GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kebijakan keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan prioritas daerah, tidak sesuai lagi dengan kondisi pengaturan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hbukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomoer 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dam Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 04);
10. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 15);
11. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 38);
12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

Ketentuan ayat (2) Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pembangunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
(2) Dilakukan penyesuaian :
    a. target terkait proyeksi indikator makro Provinsi Gorontalo Tahun 2025;
    b. terkait kebijakan keuangan daerah;dan
    c. program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah yang baru sebagai implikasi atas kebijakan nasional dan karena adanya penyesuaian kebijakan keuangan daerah.

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 JUNI 2025

GUBERNUR GORONTALO,

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 25 JUNI 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 9

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari sistem perencanaan nasional merupakan wahana strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pembangunan di daerah diorientasikan pada tiga aspek fundamental yaitu pemerataan ekonomi melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah dalam kerangka otonomi yang bertanggung jawab.

Sebagai implementasi dari kerangka hukum tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Penyusunan RPD sebagai dokumen transisi ini mengacu secara ketat pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 yang secara khusus mengatur pola perencanaan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, menjamin kontinuitas pembangunan meski dalam situasi transisi kepemimpinan.

Dalam perkembangannya, muncul kebutuhan penyesuaian kebijakan menyikapi dua dinamika penting. Pertama, perubahan kepemimpinan daerah yang membawa visi-misi dan program unggulan baru. Kedua, tuntutan sinkronisasi dengan program prioritas nasional (Asta Cita) sebagai agenda pembangunan pemerintah pusat. Merespons perkembangan ini, Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui RKPD Perubahan Tahun 2025 memberikan panduan operasional untuk melakukan penajaman arah kebijakan, penyelarasan agenda pembangunan dengan visi kepemimpinan baru, serta optimalisasi alokasi sumber daya melalui penyesuaian prioritas program.

RKPD Perubahan Tahun 2025 Provinsi Gorontalo hadir sebagai instrumen kebijakan yang memiliki peran strategis multi-dimensi. Pada tataran politik, dokumen ini berfungsi sebagai media penyesuaian kebijakan terhadap perubahan kepemimpinan daerah. Pada tataran teknis, menjadi alat sinkronisasi program daerah dengan prioritas nasional. Sementara pada tataran operasional, berperan sebagai pedoman revisi menyeluruh terhadap dokumen perencanaan turunan termasuk Rencana Kerja SKPD, Rencana Strategis, serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Penyusunan dokumen ini merefleksikan komitmen mendalam Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan responsivitas kebijakan terhadap dinamika pembangunan terkini. Melalui proses penyusunan yang partisipatif dan berbasis bukti, diharapkan dapat

tercipta koherensi perencanaan yang kuat dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas melalui penajaman fokus program prioritas. Hal ini sejalan dengan upaya percepatan pencapaian target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kehadiran RKPD Perubahan Tahun 2025 ini diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan operasional yang dinamis bagi seluruh pemangku kepentingan, instrumen akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sekaligus landasan penganggaran yang responsif dan efektif. Lebih dari itu, dokumen ini menjadi jembatan strategis untuk mewujudkan visi Gorontalo yang maju, mandiri, dan sejahtera. Dengan semangat kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholders, penyusunan dokumen ini diharapkan dapat menjadi titik tolak baru dalam menjawab tantangan pembangunan sekaligus memanfaatkan setiap peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo yang lebih baik di masa mendatang.

RKPD Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dengan tahapan yang dapat dicermati pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2025

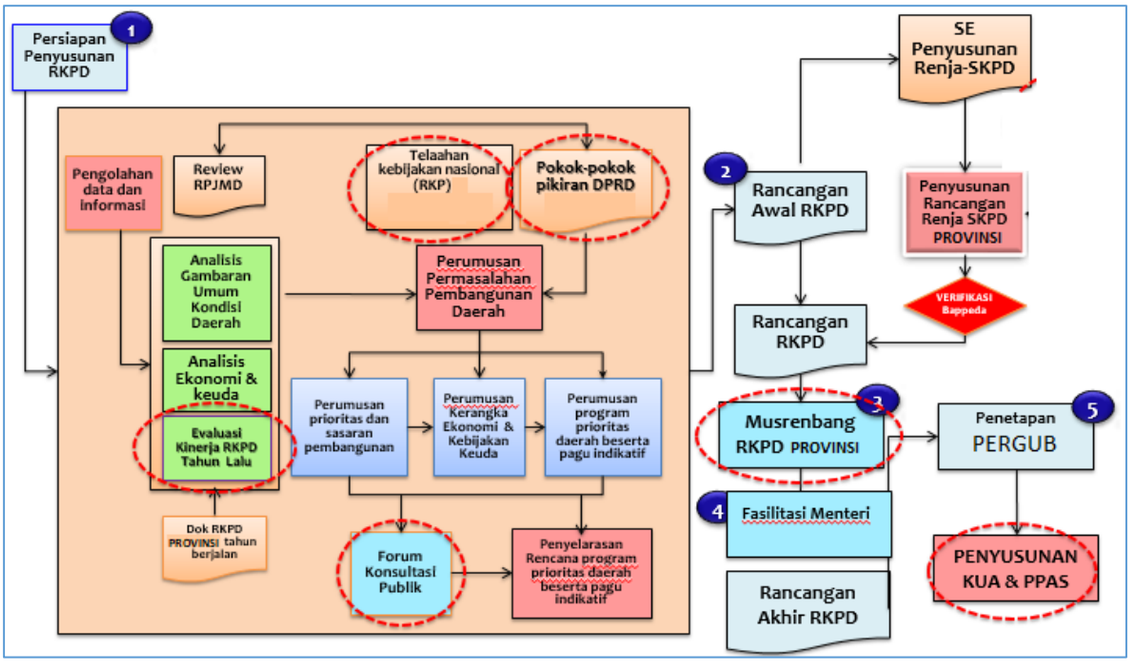

1.2. Landasan Hukum

Peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanugnan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo;
17. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
18. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
20. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
23. Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
24. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045.
25. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2:

Gambar 1.2 Keterkaitan Perencanaan Nasional dengan Perencanaan Daerah

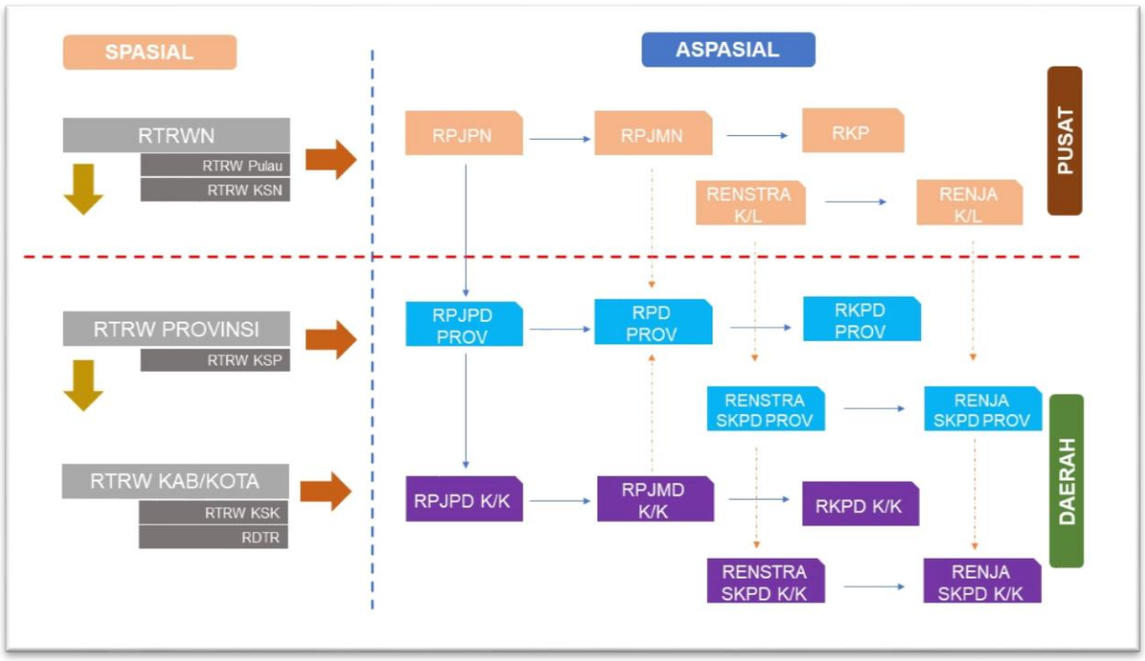

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2025 adalah:

1. Menyelaraskan target pembangunan dengan visi-misi kepala daerah terpilih dan prioritas nasional (Asta Cita).
2. Mempertegas strategi pembangunan daerah sesuai perubahan kepemimpinan dan kondisi terkini.
3. Menyesuaikan kebijakan ekonomi dan keuangan dengan perkembangan makroekonomi dan kebutuhan pendanaan.
4. Memperkuat sinergi pembangunan antar pemerintah, SKPD, dan kabupaten/kota.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan.
6. Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk program prioritas hasil penyesuaian.

7. Menjaga konsistensi dokumen perencanaan turunan (Renja SKPD, Renstra, KUA-PPAS, dan APBD).

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD Perubahan, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD, Renstra PD, Renja PD serta tindaklanjutnya yaitu penyusunan KUA-PPAS dan APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan disusunnya RKPD Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

1.5. Sistematika

Memuat sistematika dokumen RKPD Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan tahun sebelumnya.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya

Menjelaskan hasil capaian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 serta pencapaian indikator RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

2.3. Permasalahan Pembangunan

Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2025

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2025 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran pembangunan tahun 2025.

4.2 Isu Strategis

Memuat Isu Strategis yang merupakan hasil analisis terhadap permasalahan yang diuraikan pada BAB II. Dikemukakan pula Isu Strategis Nasional yang perlu menjadi perhatian daerah.

4.3 Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat tentang prioritas pembangunan untuk tahun 2025 serta prioritas program pembangunan daerah.

4.4 Program Prioritas Daerah

Memuat Program Prioritas Daerah berdasarkan Prioritas Daerah beserta Program Prioritas Daerah yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2025.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA TAHUN 2025

Memuat Arah Kebijakan Pembangunan dan Prioritas Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 yang menjadi bahan sinkronisasi atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo pada tahun 2025.

BAB VI. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Provinsi Gorontalo dibentuk pada tanggal 5 Desember Tahun 2000, dan menjadi provinsi ke-32 di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo tanggal 22 Desember 2000. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 tahun 2019, Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah sebesar 11.257,07 Km^2, atau sebesar 0,59 persen dari luas wilayah Indonesia. Sedangkan cakupan wilayah perencanaan RTRW Provinsi seluas kurang lebih 2.107.785 Ha, meliputi wilayah darat dan wilayah laut.

Wilayah Administrasi Provinsi berada pada posisi geografis 0°6′ 18″ – 1°15′ 25″ Lintang Utara dan 121°9′ 40″ – 123°33′ 99″ Bujur Timur. Letak Provinsi Gorontalo sangat strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di sebelah Utara. Provinsi Gorontalo juga berbatasan langsung dengan dua provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Provinsi Gorontalo

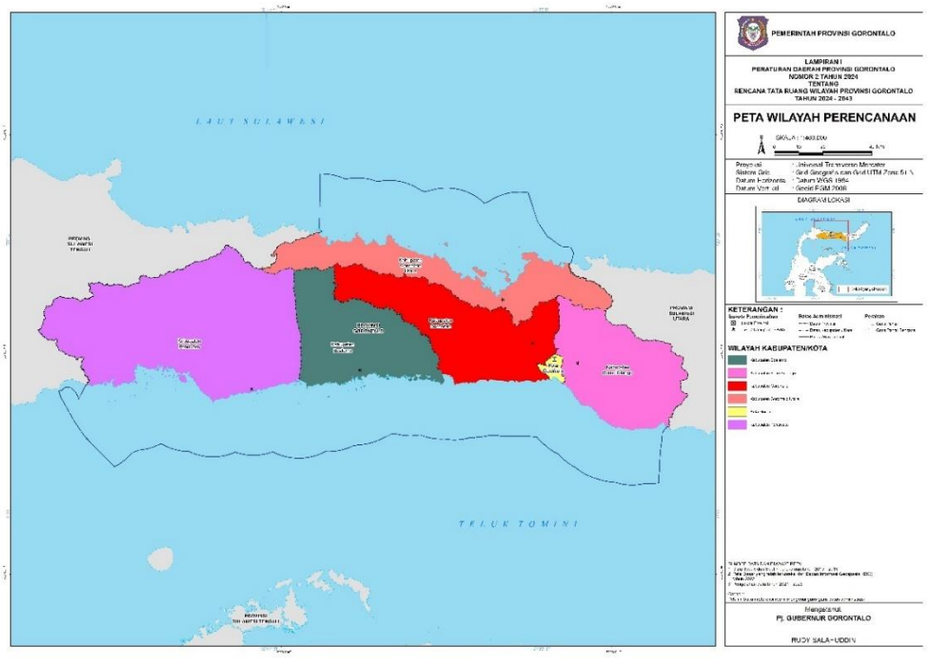

Sumber: RTRW Provinsi Gorontalo tahun 2024-2043

Secara Administratif, Provinsi Gorontalo terbagi atas 5 Kabupaten dan 1 Kota yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi. Dari 6 wilayah administrasi tersebut terdiri atas 77 Kecamatan, 72 Kelurahan dan 657 Desa. Kabupaten dengan

kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Pohuwato memiliki wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah sebesar 4.370,359 km^2 atau sebesar 36,34 %, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 70,933 km^2 atau sebesar 0,59%.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Provinsi Gorontalo menurut Kabupaten/Kota

Kode Wilayah	Wilayah	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (Km^2)	Persentase (%)
			Kelurahan	Desa	Jumlah		
75.01	Kabupaten Gorontalo	19	14	191	205	2.160,364	**17,97**
75.02	Kabupaten Boalemo	7	-	84	84	1.830,865	**15,23**
75.03	Kabupaten Bone Bolango	18	5	160	165	1.888,998	**15,71**
75.04	Kabupaten Pohuwato	13	3	101	104	4.370,359	**36,34**
75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	11	-	123	124	1.703,628	**14,17**
75.71	Kota Gorontalo	9	50	-	50	70,933	**0,59**
75	**Provinsi Gorontalo**	**77**	**72**	**657**	**729**	**12.025,147**	**100**

Sumber: Kepmendagri 100.1.1-1667 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

A. Kondisi Topografi

Berdasarkan topografinya wilayah Provinsi Gorontalo merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954. Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut.

Gambar 2.2
Peta Topografi Provinsi Gorontalo

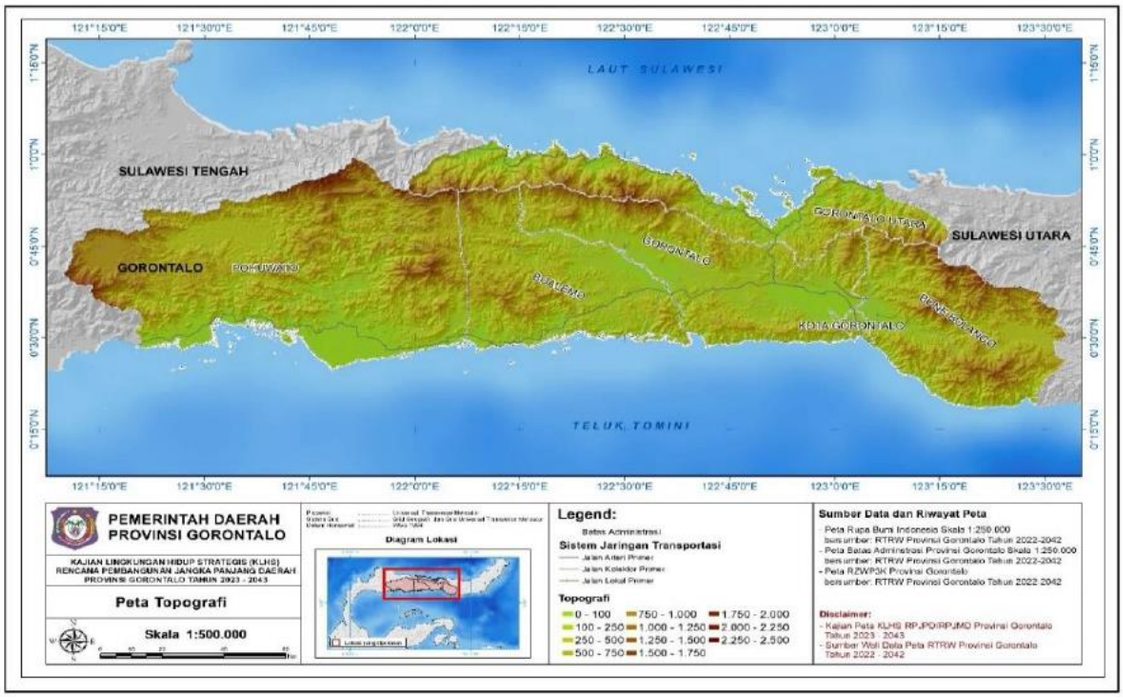

Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030

Wilayah Gorontalo dikelompokkan menjadi 2 satuan wilayah morfologi, yaitu:

1) Satuan morfologi pegunungan berlereng terjal, terutama menempati wilayah bagian tengah dan utara wilayah Gorontalo, yang menjadi pembatas sebelah timur dan sebelah utara dari Cekungan Air Tanah Limboto yaitu dengan beberapa puncaknya berada di Pegunungan Tilongkabila, antara lain : G. Gambut (1954 m), G. Tihengo (1310 m), G. Pombolu (520 m) dan G. Alumolingo (377 m).Satuan morfologi ini terutama dibentuk oleh satuan batuan Gunung api tersier dan batuan Plutonik.
2) Satuan morfologi perbukitan bergelombang, terutama dijumpai di daerah bagian selatan dan bagian barat dan menjadi batas cekungan di sebelah selatan dan sebelah utara. Satuan morfologi ini umumnya menunjukkan bentuk puncak membulat dengan lereng relatif landai dan berjulang kurang dari 200 meter yang terutama ditempati oleh satuan batuan Gunung api dan batuan sedimen berumur Tersier hingga Kuarter.

Satuan morfologi dataran, merupakan daerah dataran rendah yang berada di bagian tengah wilayah Cekungan Limboto yaitu di sekitar Danau Limboto. Pada umumnya daerah ini ditempati oleh satuan aluvium dan endapan danau. Aliran sungai di wilayah ini umumnya mempunyai pola sub dendritic dan sub paralel. Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut, dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Tabongo (2.100 mdpl), Gunung Boliyohuto (2.065 mdpl), Gunung Mopangga (2.051 mdpl) dan Gunung Pontolo (2.017 mdpl).

Tabel 2.2
Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo

Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Luas (ha)	Persentase (%)
A	0 – 2	22.043,96	1,83
B	2 – 5	100.302,18	8,33
C	5 – 15	189.728,33	15,76
D	15 – 25	183.796,47	15,26
E	25 – 40	400.774,82	33,29
F	>40%	307.414,80	25,53
Jumlah		1.204.060,56	100,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa wilayah dengan kemiringan paling sedikit yaitu 0 – 2 % yaitu 22.043,96 ha, kemudian kemiringan 2 – 5 % yaitu 100.302,18, sedangkan wilayah kemiringan paling banyak yaitu antara 25>40% atau seluas 708.189,62 ha.

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo

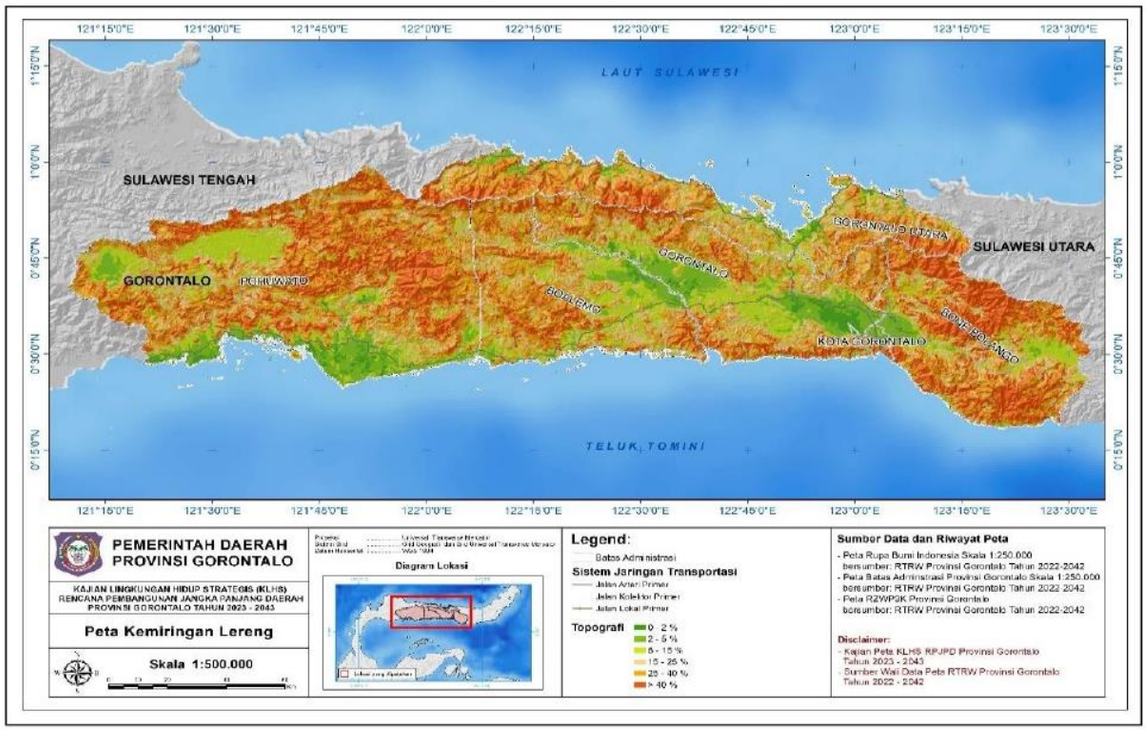

Sumber : KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

B. Geologi

Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar batuannya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpai dataran rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang diduga semula merupakan danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan terdiri dari batuan-batuan yang berumur Tersier hingga Kuarter. Urutan batuan dari yang tertua hingga batuan yang termuda adalah sebagai berikut:

- Formasi Tinombo (Teot): Terdiri dari lava basal, basal sepilitan, lava andesit, breksi gunungapi, batu pasir wake, batu lanau, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu dan batuan termalihkan lemah. Formasi ini berumur Eosen – Pertengahan Oligosen.

- Secara selaras diatas Formasi Tinombo terdapat Formasi Dolokapa (Tmd) yang terdiri dari: batu pasir wake, batu lanau, batu lumpur, konglomerat, tuf, tuflapili, aglomerat, breksi gunung api, lava andesit sampai basalt. Formasi Dolokopa berumur Miosen Tengah – Pertengahan Miosen Atas.
- Kedua formasi batuan tersebut selanjutnya di intrusi oleh Diorit Boliohuto (Tmbo) yang terdiri dari diorit dan granodiorit yang berumur Pertengahan Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas.
- Diatas ketiga batuan baik Formasi Tinombo, Formasi Dolokopa dan intrusi Diorit Boliohuto secara tidak selaras ditempati oleh Batuan Gunung api Pinggu (TQpv) yang terdiri dari: aglomerat, tuf, lava andesit, basalt yang berumur Pliosen Atas - Plistosen Bawah. Selaras lebih muda bersamaan diendapkan batu gamping klastika (TQl) yang terdiri dari kalkarenit, kalsirudit dan batu gamping koral. Selanjutnya pada Plistosen mulai di endapkan endapan Danau yang berumur Plistosen Bawah - Holosen dan di atasnya secara selaras diendapkan batu gamping terumbu (Ql) yang dimulai pada Plistosen Atas – Holosen berupa batu gamping koral, sedangkan endapan yang paling muda di daerah penyelidikan adalah berupa endapan permukaan/ aluvium (Qpl).

Struktur geologi yang utama yang berkaitan dengan daerah penyelidikan adalah sesar, berupa sesar normal dan sesar geser. Sesar normal yang terdapat di G. Boliohuto menunjukkan pola memancar, sedangkan sesar geser umumnya bersifat menganan tetapi ada pula yang mengiri. Sesar tersebut memotong batuan yang berumur tua (Formasi Tinombo) hingga batuan yang berumur muda (Satuan Batu gamping Klastik).

Gambar 2.4
Peta Geologi Provinsi Gorontalo

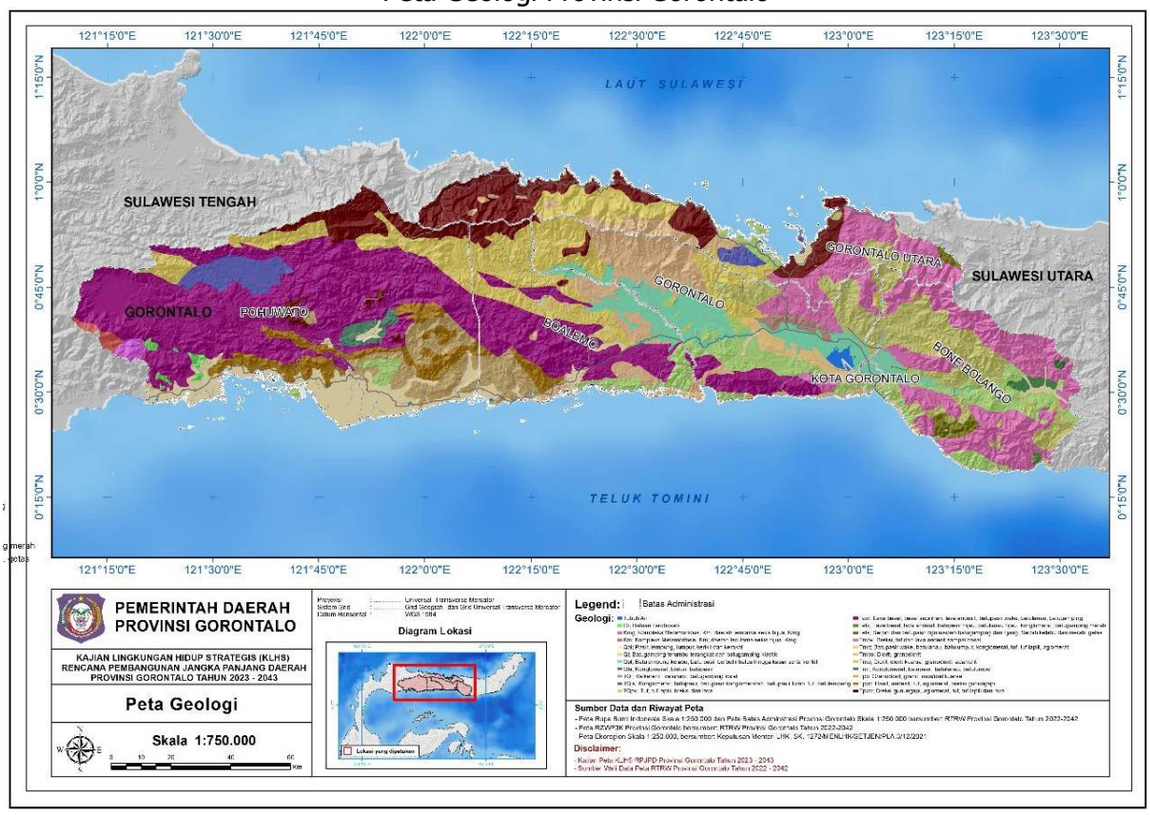

Sumber : KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

C. Klimatologi

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, Provinsi Gorontalo memiliki iklim tropis. Dengan kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis khatulistiwa, menjadikan daerah ini mempunyai suhu udara yang cukup panas. Menurut catatan Stasiun Klimatologi Gorontalo, suhu udara rata-rata Provinsi Gorontalo selama tahun 2024 adalah 27,69°C. Suhu terendah terjadi di bulan Agustus yaitu 21,10°C. Provinsi Gorontalo memiliki kelembaban udara yang relatif tinggi. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2024 sebesar 83,38 persen. Sementara itu, untuk jumlah curah hujan selama tahun 2024 yaitu sebesar 1.595,70 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus, yaitu mencapai 359,40 mm. Pada tahun 2024, rata-rata kecepatan angin tercatat sebesar 1,74 knot.

D. Hidrologi

1) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Wilayah Provinsi Gorontalo dibagi kedalam tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, masing-masing DAS Randangan, DAS Paguyaman dan DAS Limboto Bolango Bone. Diluar dari ketiga DAS utama tersebut, juga terdapat Daerah Aliran Sungai Kecil lainnya yang umumnya terdapat dihampir seluruh wilayah pegunungan dipinggiran kawasan pantai. Air dari DAS-DAS kecil bermuara di Teluk Tomini untuk DAS dibagian Selatan Provinsi dan dilaut Sulawesi untuk DAS dibagian utara Provinsi.

Tabel 2.3
Wilayah Sungai (WS) Provinsi Gorontalo

NO	NAMA WILAYAH SUNGAI	KODE	LUAS (Km²)
1.	Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone (WS LBB)	WS No. 05.05.A2	456.944,03
2.	Wilayah Sungai Paguyaman	WS No. 05.05.A3	3.485,65
3.	Wilayah Sungai Randangan	WS No. 05.06.A2	3.945

Sumber : BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo,2022

Tabel 2.4
Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Di Provinsi Gorontalo

DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
WS Paguyaman	**WS Limboto-Bolango-Bone (LBB)**		**WS Randangan**
1. DAS Paguyaman,	1. DAS Tolinggula,	38. DAS Waluhu	1. DAS Randangan
2. DAS Limba,	2. DAS Potanga,	39. DAS Bilolantunga	2. DAS Beringin
3. DAS Olibuhu,	3. DAS Limbato	40. DAS Tombulilato	3. DAS DingaMotolohu,
4. DAS Tumba,	4. DAS Biawu,	41. DAS Ombulo	4. DAS Patihu,
5. DAS Bolangga,	5. DAS Bulolila,	42. DAS Momungaa	5. DAS Sidorukun,
6. DAS Bubaa,	6. DAS Bulontio,	43. DAS Bangahu	6. DAS Sukadamai,
7. DAS Tumbihi,	7. DAS Boliohulu	44. DAS Mopuya	7. DAS Wonggarasi,
8. DAS Limbatihu,	8. DAS Boliyohuto,	45. DAS Kaidundu	8. DAS Lemito,
9. DAS Tabongo,	9. DAS Baladu,	46. DAS Uabanga	9. DAS Lomuli,
10. DAS Dulupi,	10. DAS Mooti,	47. DAS Tongo	10. DAS Milangodaa,
11. DAS Sambat,	11. DAS Sipatana,	48. DAS Bilungala	11. DAS Popayato,
12. DAS Tilamuta,	12. DAS Dulukapa,	49. DAS Tamboo	12. DAS Dudeulo,
13. DAS Lamu,	13. DAS Deme I,	50. DAS Tolotio	13. DAS Molosipat,
14. DAS Botumoito,	14. DAS Dunu,	51. DAS Olele	14. DAS Moutong
15. DAS Tapadaa,	15. DAS Bubalango,	52. DAS Oluhuta	
16. DAS Salilama,	16. DAS Tengah,	53. DAS Molotabu	
17. DAS Tabulo,	17. DAS SOgu,	54. DAS Botutonuo	

18. DAS Bumbulan, 19. DAS Libuo 20. DAS Marisa	18. DAS Monano, 19. DAS Tudi, 20. DAS Tolango, 21. DAS Datahu, 22. DAS Popalo, 23. DAS Tolangio, 24. DAS Pontolo, 25. DAS Buda, 26. DAS Posso, 27. DAS Bubode, 28. DAS Sanbungo, 29. DAS Tolotapo, 30. DAS Butoimola, 31. DAS Samia 32. DAS Tapaibuhu 33. DAS Soklat 34. DAS Sapawea 35. DAS Imana 36. DAS Taludaa 37. DAS Sogitia	55. DAS Modelamo 56. DAS Buluango 57. DAS Huangobutu 58. DAS Inengo 59. DAS Leato 60. DAS Bolango-Bone 61. DAS Limboto 62. DAS Pohe 63. DAS TanjungKramat 64. DAS Bongo 65. DAS Lopo 66. DAS Kayu Bulan 67. DAS Bilihu Timur 68. DAS Langgula 69. DAS Lamu 70. DAS Limo'o 71. DAS Lobuto Timur 72. DAS Lobuto 73. DAS Biluhu Barat 74. DAS Huango	

Sumber : BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo, 2022

Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa dari total 245.000 Ha lahan DAS Limboto-Bone Bolango, 140.487 Ha termasuk dalam kategori agak kritis, kritis dan sangat kritis. Hal ini diindikasikan menjadi penyebab meningkatnya sedimentasi baik disungai maupun didanau Limboto. Dalam kurun waktu 6 tahun (2013-2018) terjadi alih fungsi lahan hutan sebesar 2.100 Ha diwilayah DAS Limboto dan Bone, menjadi kawasan permukiman, pertanian, semak belukar, dll. Perubahan lahan ini berkontribusi terhadap peningkatan koefisien pengaliran dan indeks Erosi Tanah. Sempadan sungai belum efektif sebab pembangunan wilayah pemukiman masih dilaksanakan di wilayah sempadan sungai dan tanpa menerapkan konsep waterfront city. Hal ini menyebabkan tingginya kerawasan banjir di Kota Gorontalo, dimana 57% masyarakat tinggal dikawasan rawan banjir di Pusat Kota Gorontalo

2) Danau

Di Provinsi Gorontalo terdapat 2 (dua) danau yang secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi antara lain :

1. Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di 2 (dua) wilayah yaitu wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dimana pada tahun 1932 rata-rata kedalaman danau mencapai 30 m dengan luas 7.000 ha tetapi mulai tahun 1990 sampai sekarang kedalaman danau rata-rata hanya tinggal 2.5 m pada musim kemarau dan bisa mencapai 5 m pada musim hujan dengan luas kurang lebih 3.000 ha. Pendangkalan danau diakibatkan oleh adanya erosi dan sedimentasi dan masalah lain yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya gulma air seperti enceng gondok yang menutupi permukaan mencapai 30% sampai 35 % dari luas danau.
2. Danau Perintis yang terdapat di Desa Huluduotamo Kec. Suwawa ± 11 Km dari pusat kota Gorontalo dapat ditempuh ± 12 menit dengan kendaraan darat. Danau perintis merupakan obyek wisata seluas ± 6 Ha yang dibuat untuk kepentingan pengairan sawah. Air yang mengalir ke Danau Perintis berasal dari mata air pegunungan yaitu mata air Lulahu dan mata air Poso.

3) Cekungan Air Tanah

Wilayah cekungan air tanah di Provinsi Gorontalo ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) wilayah cekungan air tanah berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, yang terdiri atas CAT Bone, CAT Pinogu, CAT Tombulilato, CAT Gorontalo, CAT Molombulahe, CAT Mahinoto, CAT Sogniti, CAT Marisa, dan CAT Popayato.

E. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Provinsi Gorontalo terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu:

1) Kawasan Lindung

Kawasan lindung seluas kurang lebih 575.415 Ha, yang meliputi :

a. Badan Air

Badan air memiliki luas kurang lebih 7.192 Ha, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

b. Kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadadp kawasan bawahannya (PTB) memiliki luas kurang lebih 202.053 Ha, tersebar diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.

c. Kawasan Perlindungan Setempat (PS)

Kawasan Perlindungan Setempat dengan luas kurang lebih 2.703 Ha, tersebar diwilayah Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.

d. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi memiliki luas kurang lebih 279.403 Ha, terdiri dari :

1. Cagar Alam Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Cagar Alam Panua di Kabupaten Gorontalo;
3. Cagar Alam di Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Cagar Alam Tangale di Kabupaten Gorontalo;
5. Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato;
6. Kawasan Konservasi teluk Gorontalo di Laut;
7. Suaka Margasatwa Nantu di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara;
8. Taman Hutan Raya di Kabupaten Gorontalo;
9. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Sedangkan Kawasan konservasi yang berada di Wilayah Laut diatur berdasarkan arahan zona kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

e. Kawasan Pencadangan Konservasi di laut

Kawasan pencadangan konservasi di Laut (KPL) memiliki luas kurang lebih 82.551 Ha, yang terdiri atas:

1. Kawasan konservasi Dulangka di Laut;
2. Kawasan konservasi Gorontalo Utara di Laut;
3. Kawasan konservasi Maruangi Mabasar di Laut;
4. Kawasan konservasi Monduli di Laut;
5. Kawasan konserbasi Olinggobe di Laut
6. Kawasan konservasi Sumalata di Laut;. Dan
7. Kawasan Konservasi Tolinggula di Laut.

Kawasan pencadangan konservasi di Laut yang berada di wilayah Laut diatur dalam arahan zona kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

f. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya memiliki luas kurang lebih 26 Ha, yang terdiri atas :

1. Bangunan Indis Rumah Keluarga Hiola di Kabupaten Gorontalo
2. Bangunan Indis Rumah Keluarga Nelly Yusuf di Kabupaten Gorontalo;
3. Bangunan Indis Rumah Tinggi di Kota Gorontalo;
4. Bangunan Kantor Pos Kota Gorontalo di Kota Gorontalo;
5. Benteng Maas di Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Benteng Orange di Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Kantor Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM)/Kantor PT Pelayaran Nasional di Kota Gorontalo;
8. Makam Herman Christiaan Knapppert di Kabupaten Gorontalo Utara;
9. Makam Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango;
10. Makam Raja Blongkod di Kabupaten Bone Bolango;
11. Masjid Ar-Rahman Bulila di Kabupaten Gorontalo;
12. Masjid Tua Hunto Sultan Amay di Kota Gorontalo;
13. Pillbox 1 di Kabupaten Gorontalo Utara;
14. Rumah Dulohupa di Kota Gorontalo;
15. SDN 56 Kota Timur di Kota Gorontalo;
16. Situs Benteng Otanaha, Benteng Ulupahu, Benteng Otahiya di Kota Gorontalo;
17. SMA Negeri 1 Kota Gorontalo di Kota Gorontalo;
18. Struktur Makam Raja Tabala-Bala di Kabupaten Gorontalo;
19. Kompleks Makam Hubulo (Gobel) di Kabupaten Bone Bolango; dan
20. Makam Hilamuhu (Talo Tahangi Lipu) di Kabupaten Bone Bolango.

g. Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Ekosistem Mangrove memiliki luas kurang lebih 1.486 Ha, terdapat diwilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo dan Laut. Kawasan Ekosistem Mangrove yang berada di wilayah Laut diatur dalam arahan zona kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

2) Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya meliputi Kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, memiliki luas kurang lebih 1.532.370 Ha, yang terdiri atas :

a. Kawasan hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi (KHP) terdapat di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boelamo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan hutan produksi konversi.

Berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo. Luas hutan Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 seluas 824.668 Ha. Seiring berjalannya pembangunan, terjadi pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan untuk daerah transmigrasi, sehingga pada tahun 2018 luas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo berkurang menjadi 764.881,23 Ha. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kehutanan, Kawasan Hutan dibagi kedalam kelompok hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Berikut adalah luas kawasan hutan menurut Kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 2.5
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2021

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi dapat dikonversi	Jumlah luas hutan dan perairan
Boalemo	28.514,52	10.970,62	44.240,78	14.537,49	4.783,09	103.046,50
Gorontalo	13.124,94	24.777,84	41.899,34	17.714,06	2.395,33	99.911,51
Pohuwato	136.582,81	39.707,97	83.304,44	41.476,29	10.522,52	311.594,03
Bone Bolango	15.634,23	104.855,72	18.830,08	824,10	-	140.144,13
Gorontalo Utara	8.021,54	16.210,33	64.388,66	15.540,08	5.554,01	109.714,62
Kota Gorontalo	470,48	-	-	-	-	470,48
Provinsi Gorontalo	**202.348,52**	**196.522,47**	**252.663,30**	**90.092,02**	**23.254,95**	**764.881,27**

Sumber : Gorontalo Dalam Angka Provinsi Gorontalo, 2024

Sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa Pasal 38 Ayat (1) Penggunaan kawasan untuk kepentingan Pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan didalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung, tanpa mengubah pokok kawasan hutan. Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat dilakukan Kegiatan Perhutanan Sosial.

b. Kawasan Budidaya lainnya yaitu meliputi Kawasan Pertanian (KP), Kawasan Perikanan (IK), Kawasan Pergaraman (KEG), Kawasan Pertambangan dan Energi (TE), Kawasan Peruntukan Industri (PI), Kawasan Pariwisata (W), Kawasan Permukiman (PM), Kawasan Transportasi (TR), dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

F. Potensi Wilayah

1) Potensi Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan Provinsi Gorontalo dan menjadi penyumbang terbesar PDRB. Sektor ini berpeluang besar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di perdesaan. Potensi pertanian Provinsi Gorontalo antara lain :

- Tanaman pangan meliputi padi dan palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedele, kacang tanah dan kacang hijau). Tahun 2024, luas panen padi sawah adalah 46.952 ha dan produksi padi sebesar 234.863 ton, dengan luas panen terbesar berada di Kabupaten Gorontalo sekitar 20.931 ha (44,58 persen). Luas panen jagung adalah 133.002 ha dengan 625,97 ribu ton produksi.
- Hortikultura meliputi komoditas sayur-sayuran (bawang merah, bawang daun, bayam, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, kubis, melon, petsai/sawi, semangka, terung, tomat dan wortel) dan buah-buahan (alpukat, belimbing, duku, durian, jambu air, jambu biji, jeruk besar, jeruk siam, mangga, manggis, nangka, nenas, pepaya, rambutan, salak, sawo, sirsak dan sukun). Cabai rawit merupakan komoditas utama sayur-sayuran dengan luas panen 1.993 hektar dengan produksi sebanyak 147.292 ton. Dari komoditas buah-buahan, pisang adalah yang utama dengan produksi 131.664 kw.

Luas Baku lahan Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar 1.302.650 yang terdiri dari Luas lahan Sawah sebesar 32.488 Ha, Lahan pertanian bukan sawah sebesar 999.471 Ha, dan Lahan Bukan Pertanian sebesar 270.691 Ha.

Kota Gorontalo, memiliki Pertanian lahan basah seluas ± 796 Ha berada di 7 (tujuh) Kecamatan dari 9 (Sembilan) Kecamatan yang ada di Kota Gorontalo. Kawasan tanaman pangan lahan basah untuk tanaman padi berada di Kecamatan Dungingi, Kota Timur, kota Utara, kota tengah, dan Sipatana. Lahan sawah di Kota Gorontalo hanya berupa lahan sawah irigasi teknis. Pertanian lahan kering seluas ± 157 Ha. Kawasan tanaman pangan lahan kering dikembangkan untuk berbagai jenis tanaman antara lain: jagung di Kecamatan kota Barat, Dungingi, Kota Timur dan Kota Utara; tanaman buah mangga dan pisang di hampir seluruh wilayah kecamatan; tanaman buah nangka berada di Kecamatan Kota Barat, Kota Timur, Dumbo Raya, Kota Utara dan Sipatana; tanaman Buah pepaya di Kecamatan Kota Barat, Kota utara dan Sipatana. Kawasan hortikultura, berada di Kecamatan Kota Barat, dungingi, dan Kota Utara dengan Komoditi cabe dan tomat.

Kabupaten Boalemo, Lahan pertanian di Kabupaten Boalemo untuk lahan sawah irigasi berada di 5 kecamatan yaitu Mananggu, Botumoito, Paguyaman, Wonosari dan Dulupi dengan jenis komoditi berupa padi sawah. Sementara untuk Kawasan perkebunan di Kabupaten Boalemo diarahkan pada pengembangan perkebunan dengan komoditi yang potensial untuk dikembangkan yaitu cengkeh, kakao, kelapa, kelapa sawit dan tebu dengan menyesuaikan ketinggian lahan.

Kabupaten Bone Bolango, Potensi Sektor Pertanian di wilayah ini terdiri dari beberapa komoditas pertanian yaitu: Komoditas Pertanian tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelei, ubi jalar dan ubi kayu; Komoditas tanaman hortikultura terdiri dari bawang merah, bawang daun, petsai/sawi, cabe rawit, tomat, terong, ketimun, kangkung, bayam dan kacang panjang; Komoditas tanaman perkebunan antara-

lain Kelapa, Kakao, Kemiri, Jambu, Kapuk, Pala, Cengkih, Kopi, Aren, Vanili, Kayu Manis; dan Komoditas Tanaman Buah-buahan yaitu Alpokat, Belimbing, duku, langsat, Durian, Jambu Biji, Jambu air, Jeruk Siam/Keprok, Jeruk Besar, mangga, Nangka, nenas, Pepaya, Pisang, Rambutan, Sirsak, dan Sukun.

Kabupaten Gorontalo, Potensi di Sektor Pertanian di daerah Kabupaten ini adalah tanaman Padi yang menjadi komoditi andalan, yang tersebar di 2 kawasan yaitu kawasan agropolitan, meliputi Kecamatan Telaga, Telaga Biru, Limboto Barat Tabongo, Dungaliyo, Batudaa, Pulubala, Tibawa Mootilango, Asparaga, Tolangohula, Boliyohuto, Telaga Jaya, Tilango, Bilato dan Limboto; dan di kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Batudaa Pantai, Biluhu, Bilato, Telaga, Telaga Biru, Limboto, Limboto Barat, Tabongo, Bongomeme, Dungaliyo, Pulubala, Tibawa, Mootilango, Boliyohuto, Tolangohula dan Asparaga. Sektor Pertanian sangat memungkinkan mengingat lahan produktif cukup luas yaitu tanah persawahan/basah 11.856 ha.

***Kabupaten Gorontalo Utara*,** Komoditas yang termasuk pada tanaman pangan adalah padi, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Gorontalo Utara tersebar di seluruh kecamatan. Kabupaten Gorontalo Utara juga memiliki produksi beberapa komoditas hortikultura. Komoditas hortikultura yang berupa tanaman sayur antara lain cabai rawit, tomat, terung, kacang panjang, dan kangkung. Tanaman sayuran yang paling banyak tumbuh dan tersebar merata di setiap kecamatan adalah cabai rawit, dengan luas panen seluas 529 hektar dan produksi mencapai 20.349 Ton pada tahun 2023. Untuk tanaman buah-buahan yang paling banyak adalah durian yang produksinya mencapai 10.951 Ton. Kecamatan Atinggola merupakan produsen buah durian terbanyak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Kabupaten Pohuwato, Kabupaten ini mengandalkan Jagung dan Padi Sawah sebagai *brand* daerah, bahkan dinamakan sebagai Lumbung Jagung terbesar di Provinsi Gorontalo. Pengembangan pertanian Padi Sawah menjadi unggulan kedua setelah jagung dengan luas areal lahan yang terhampar mencapai kira-kira 41.212 ha, atau sebesar 9,71% dari luas wilayah kabupaten. Petani di daerah ini juga mengembangkan komoditi Hortikultura dan Perkebunan dengan berbagai jenis tanaman seperti kopi, kakao, mete, kelapa dalam, kelapa sawit, cengkeh, panili dan kemiri serta buahan-buahan seperti durian, jeruk dan mangga. Luas areal yang diarahkan untuk pengembangan tanaman perkebunan adalah seluas 48.481 ha dengan areal pengembangannya merata ke segenap wilayah Kabupaten Pohuwato. Luas Panen Padi di Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 sebesar 7.000 Ha, yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya seluas 4.068 Ha.

Dalam rangka menjamin kedaulatan pangan berkelanjutan, maka dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 40.121 Ha, yang tersebar diwilayah Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.

Gambar 2.5
Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

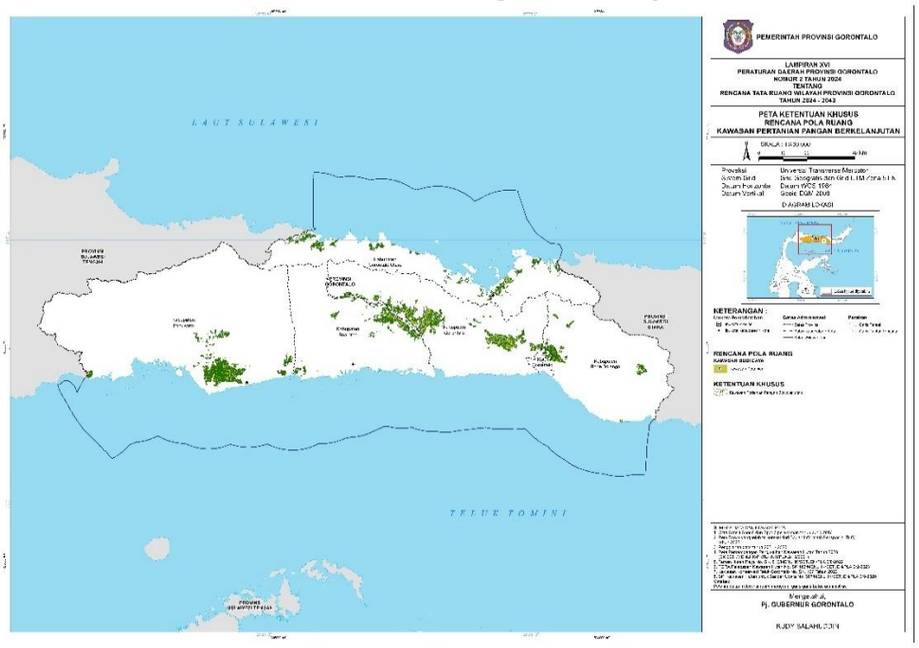

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo, 2024-2043

Peta KP2B sangat diperlukan untuk menjadi dasar acuan dalam setiap tahap pembangunan, terkait perijinan dan pengendalian pemanfaatan lahan. Dengan adanya pemetaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, diharapkan juga menjadi dasar perencanaan bagi pembuat kebijakan di bidang pertanian.

Adapun beberapa rekomendasi tindak lanjut pemetaan LP2B, yaitu (1) Perlu dibuat program peningkatan produktifitas lahan melalui penerapan sapta usaha yang meliputi pemakaian benih unggul, pengolahan tanah yang baik, pengelolaan air, pemakaian pupuk berimbang dan pengendalian hama dan penyakit serta penanganan pasca panen dan pemasaran. (2) Melakukan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jaringan irigasi baru (jaringan irigasi sederhana: jaringan berskala kecil, menggunakan teknologi sederhana, cepat berfungsi, serta murah biayanya dengan kemampuan membawa air dari sumbernya ke tempat pemanfaatan dengan cara sesederhana mungkin), peningkatan pemeliharaan jaringan irigasi – untuk mencapai tingkat kinerja jaringan irigasi yang andal, optimal dan berkelanjutan. (3) Masalah regenerasi petani, disebabkan rendahnya pendapatan di bidang pertanian dan makin menyusutnya lahan pertanian perlu ditangani dengan upaya-upaya misalnya memberikan perlindungan stabilitas harga di tingkat usahatani yang disesuaikan dengan biaya produksi serta melindungi lahan pertanian khususnya lahan pangan agar tidak beralih fungsi.

2) Potensi Peternakan

Selain Pertanian, peternakan juga menjadi salah satu potensi yang cukup berkembang di Provinsi Gorontalo. Faktor pendorongnya diantaranya adalah ketersediaan lahan dan pakan ternak. Populasi ternak Sapi Provinsi Gorontalo Tahun 2022 mencapai 266.728 ekor, sementara populasi ternak kambing 2022 sebesar 109.673 ekor. Selain ternak sapi dan kambing, potensi peternakan lainnya adalah jenis unggas ayam dan itik yang cukup mendorong perekonomian daerah. Berikut sebaran populasi unggas menurut kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Kabupaten Bone Bolango **:** potensi peternakan adalah peternakan besar : sapi, kuda dan kambing, ayam kampung, ayam ras, dan itik. Populasi ternak sapi pada tahun tahun 2022 mencapai 49.471 Ekor. Peningkatan populasi sapi disebabkan Pelaksanaan Inseminasi Buatan melebihi target yang telah ditetapkan pada program SIKOMDAN sejumlah 2.400 Ekor.

Kabupaten Boalemo : Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Mananggu, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Paguyaman Dan Kecamatan Paguyaman Pantai. Populasi peternakan di wilayah kabupaten ini meliputi sapi potong, kuda, kambing dan babi. Yang masih paling dominan adalah sapi yakni 43.216 ekor per tahun. Ternak ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik juga terdapat di daerah ini.

Kabupaten Gorontalo : Di sektor peternakan kabupaten gorontalo terus berusaha memenuhi permintaan pasar local dan regional yang terus meningkat termasuk permintaan pasar luar negeri, di antaranya yang terjalin melalui kerja sama ekspor. Potensi peternakan di daerah ini adalah sapi, (lokasi di seluruh kecamatan), kambing (lokasi dikembangkan di kecamatan biluhu dan batudaa pantai) dan itik (lokasi dikembangkan di kecamatan batudaa, tobango dan bongomeme).

Kabupaten Pohuwato **:** Potensi di sektor peternakan meliputi ternak ruminansia dan ungags. Untuk ruminansia dominan yang dikembangkan adalah ternak sapi dan kambing. Sedangkan untuk unggas terdiri dari ayam ras dan buras serta itik.

Kabupaten Gorontalo Utara *:* Potensi di sektor peternakan adalah sapi potong dan kambing sekaligus sebagai komoditas unggulan. daerah yang menjadi penghasil hewan ternak non unggas terbesar jenis sapi potong yaitu di Kecamatan Kwandang dan Anggrek, Kambing di Sumalata Timur dan Anggrek, Babi di Gentuma dan Kuda di Kecamatan Atinggola. Sedangkan pada jenis unggas, ayam kampung sebagai unggas terdominan di Gorontalo Utara.

Kota Gorontalo *:* Pengembangan ternak dan unggas diarahkan pada lahan pertanian sawah bukan irigasi, pertanian lahan kering dan hortikultura. Rencana Kawasan ini di Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Kota Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango.

3) Potensi Perikanan

Potensi sumber daya alam di Provinsi Gorontalo sangat strategis khususnya disektor perikanan dan kelautan. Provinsi Gorontalo memiliki luas perairan laut 876.663,08 Ha atau 9.638.44 Km^2 yang memiliki panjang garis pantai 903,7 Km terdiri dari 572,5 Km Pantai Selatan/ Teluk Tomini dan 331,2 Km Pantai Utara/ Laut Sulawesi.

Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo tidak bisa dipisahkan dari potensi perikanan tangkap yang berbasis pada WPP (Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan) dan diakui secara Nasional maupun Internasional. Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo masuk dalam 2 (dua) WPP yaitu:

1. WPP 715 (perairan Teluk Tomini sampai perairan Laut Seram) potensi perikanan tangkapnya : 1.242.526 ton per tahun.
2. WPP 716 (Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik bagian Utara pulau Halmahera dan Irian Jaya) potensi perikanan tangkapnya: 597.139 ton per tahun. Potensi ini sudah termasuk potensi perikanan di wilayah ZEE pada wilayah tersebut.

Sebagaimana RTRW, Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya dilaksanakan sebagaimana ketentuan pengelolaan kawasan dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut sesuai RTRW Provinsi Gorontalo

Gambar 2.6
Peta Kawasan Pemanfaatan Ruang Laut

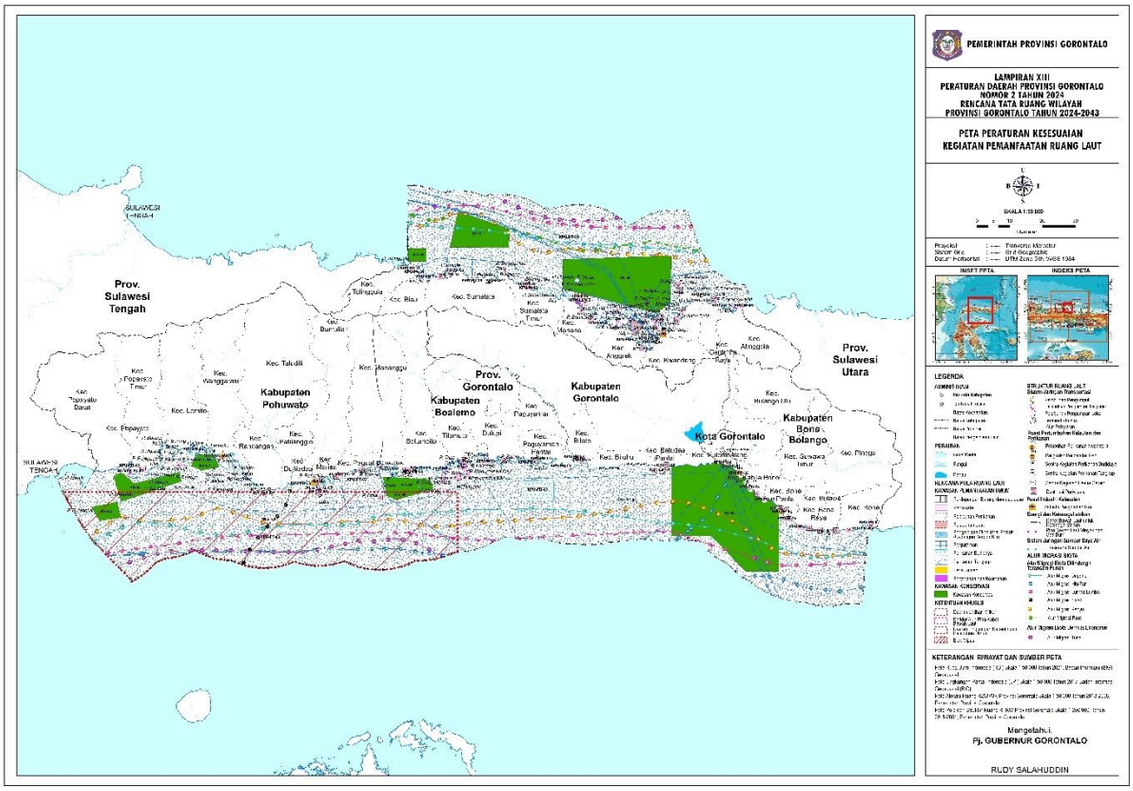

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo, 2024-2043

Jumlah produksi perikanan tangkap di laut tahun 2022 sebesar 130.916 ton. Produksi perikanan terbesar berada di Kabupaten Pohuwato yaitu 27.084 ton atau sekitar 19 persen. Hasil perikanan terbesar diperoleh dari budidaya perikanan darat yaitu sebesar 49.378 ton dengan produksi ikan bandeng terbesar di Kabupaten Pohuwato sebanyak 15.740 ton.

Kabupaten Bone Bolango, Potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten ini berada di garis sepanjang pantai selatan Gorontalo, terbentang dari Kecamatan Kabila Bone sampai dengan Kecamatan Bone dan menjadi tempat pencaharian sebagian penduduk Bone Bolango. Produksi perikanan Bone Bolango terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap laut dan perairan umum, sedangkan produksi perikanan budidaya berasal dari budidaya kolam, karamba, jaring apung dan rumput laut. Jenis ikan Laut di wilayah ini adalah Ikan Layang, Tongkol, Cakalang, Selar, Tenggiri, Ikan Terbang, Julung, Kuwe, Cumi, Tuna dan Madidihang. Produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Bone Bolango sebesar 10.991 ton/tahun.

Kota Gorontalo, Budidaya perikanan darat yang sudah berkembang di Kota Gorontalo meliputi keramba jaring apung yang terletak di wilayah Danau limboto Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Utara, sedangkan budidaya berupa kolam ikan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Gorontalo. Sebagian kecamatan di Kota Gorontalo juga merupakan produsen perikanan tangkap. Kecamatan yang menjadi produsen perikanan adalah Hulontalangi dan Dumbo Raya dengan hasil produksi perikanan laut pada Kecamatan Hulontalangi sebesar 17.190 Ton dan Kecamatan Dumbo Raya 12.188 ton.

Kabupaten Boalemo, Sektor perikanan ini meliputi jenis perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap terbesar berasal dari Kecamatan Tilamuta, Mananggu, Botumoito, Dulupi, Paguyaman dan Paguyaman Pantai. Sedangkan untuk budidayanya adalah pembudidayaan ikan Bandeng, Ikan air tawar, ikan kuwe dan budi daya rumput laut (basah).

Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Teluk Tomini adalah salah satu penghasil ikan yang cukup besar karena memiliki wilayah kelautan yang cukup luas. Dengan panjang garis pantai sekitar 80 Km (13,6 % dari panjang pantai Provinsi Gorontalo) memiliki karakteristik sebagian besarnya adalah pantai berbatu/berpasir dan luas ZEE mencapai kira-kira 587,6 km2 yang membentang di 3 kecamatan dan 21 desa pesisir. Kabupaten Gorontalo juga memiliki potensi ekosistem pesisir yang terdiri dari ekosistem terumbu karang sekitar 72 ha, ekosistem estuaria sekitar 12,4 ha dan ekosistem lamun sekitar 87,7 ha. Produksi perikanan Kabupaten Gorontalo di dominasi oleh perikanan tangkap dan sebagian kecil perikanan budidaya yang berada di Danau Limboto (2.400 ha) dan kolam air tawar (potensi sekitar 580 ha).

Kabupaten Gorontalo Utara, Komoditas unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara adalah ikan cakalang. Potensi perikanan ini berada di perairan 12 mil dengan hasil sebesar 25.831 ton per tahun. Aktivitas perikanan menonjol adalah perikanan tangkap dan budidaya (rumput laut, kerang mutiara, udang laut, ikan karapu dan ikan karang). Pengelolaan ikan umumnya masih bersifat tradisional (penggaraman, pengeringan dan pengasapan ikan).

Kabupaten Pohuwato, Sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Gorontalo dimana dari 13 kecamatan yang ada, 10 kecamatan berada diwilayah pesisir.Pencaharian masyarakat disektor ini terdiri dari dua yakni pada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Jenis ikan tangkap yang dominan diperoleh nelayan adalah ikan tongkol, cakalang, tuna, udang dan jenis lainnya. Sedangkan untuk jenis budidaya ikan air tawar melalui kolam belum masiv dilaksanakan padahal ikan air tawar mudah dikembangkan.

4) Potensi Pertambangan dan Energi

Sektor pertambangan Provinsi Gorontalo memiliki berbagai jenis bahan tambang logam, misalnya: emas, perak, tembaga, pasir besi; sedangkan bahan non logam antara lain: slag pasir, batu, pasir-batu (sirtu), kerikil, besi andesit, batu makora, basalt, batu gamping, toseki, batu granit, dll.

Sesuai RTRW Provinsi Gorontalo, ditetapkan wilayah pertambangan mineral dan batubara yang tersebar diwilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Gorontalo.

Gambar 2.7

Peta Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Gorontalo

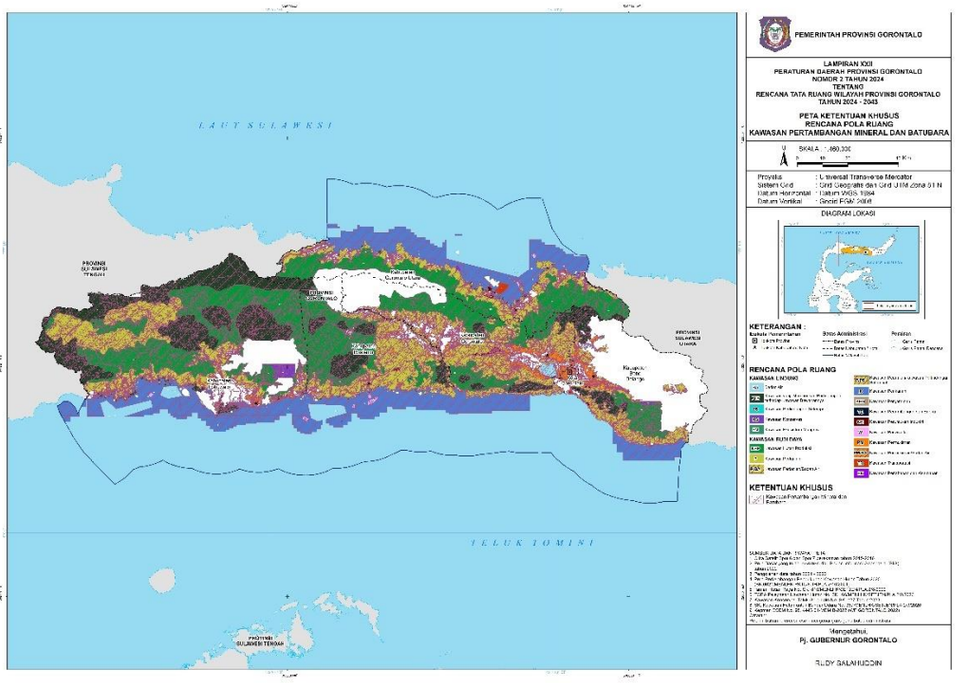

Sumber : Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Provinsi 2024-2043

Potensi pertambangan dan energy tersebar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dengan potensi yang dimiliki, sebagai berikut :

Kabupaten Bone Bolango. Potensi Pertambangan di wilayah ini adalah pertambangan:

- Emas di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Tulabolo, Sungai Mak, Motomboto dan Kayu Bulan) dan Bone Raya (Desa Tombulilato Kiri).
- Tembaga di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Kayu Bulan, Motomboto dan Sungai Mak) dan Bone Pantai Cabang Kiri.

Potensi Energi di wilayah ini meliputi sumber energi yang belum dikelola yakni : Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur; Pembangkit Listrik Tenaga Udara/Uap (PLTU) di Kecamatan Kabila Bone; dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Kecamatan Suwawa Tengah dan Suwawa Selatan.

Sementara Potensi Energi yang sudah dikelola adalah: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur (Pinogu 450 unit, Tulabolo Timur 145 Unit, Tulabolo Barat 100 Unit, Poduma 71 Unit), Suwawa Selatan (Molintogupo 1 unit, Bulontala 45 unit), Suwawa Tengah (Tapadaa 71 Unit), Kabila Bone (Biluango 50 unit, Olele 50 unit) dan Tilongkabila (Tunggulo 48 unit); serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berlokasi di Kecamatan Bolango Ulu (Owata 1 unit), Bolango Timur (Desa Kopi 1 unit) dan Suwawa Timur (Desa Tulabolo sebanyak 15 Unit).

Kabupaten Gorontalo Potensi sumber daya alam mineral di daerah ini baik logam dan non logam dapat ditemukan di setiap wilayah kecamatan, dengan potensi yang beragam. Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat sebagian besar pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional.

- Potensi mineral logam: Emas dengan jumlah cadangan sekitar 528.29 ton yang tersebar di Kecamatan Boliyohuto dan Tembaga dengan jumlah cadangan sekitar 3.978.390 m^3 tersebar di Kecamatan Boliyohuto.
- Potensi mineral non logam meliputi: Granit (jumlah cadangan sekitar 470.000.000 m^3), tersebar di Kecamatan Telaga Biru dan Batudaa Pantai; Batu Gamping (jumlah cadangan sekitar 12.414.500 m^3), tersebar di Kecamatan Tibawa, Limboto, Limboto Barat, Bongomeme, Batudaa dan Batudaa Pantai; Toseki (jumlah cadangan sekitar 6.000.000 m^3), tersebar di Kecamatan Tibawa dan Boliyohuto; Felspar (jumlah cadangan sekitar 1.000.000 m^3), tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai; dan Andesit (jumlah cadangan sekitar 1.050.000 m^3), tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai Boliyohuto dan Tibawa.
- Potensi Energi sumber daya panas bumi terdapat di Kecamatan Telaga Biru dan Mootilango.

Kabupaten Gorontalo Utara, Potensi sumberdaya pertambangan logam meliputi: emas, perak, tembaga dan pasir besi. Sedangkan bahan mineral non-logam adalah; granit, slag pasir, batu, sirtu, kerikil, besi Andesit, batu Makora dan basalt. Disamping itu terdapat potensi sumberdaya air sungai yang banyak mengaliri wilayah ini yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.

Kabupaten Pohuwato, Potensi Pertambangan yang dimiliki daerah ini adalah: Emas; Sirtu (13.313.250 m^3); Batu Andesit (13.350.810 m^3); Batu Dasit (24.227.775 m^3); Batu Granodiorit (1.279.299.750 m^3); Batu Granit (1.064.226.900 m^3); dan Toseki (10.771.431 m^3). Kesemuanya tersebar di Kecamatan Marisa, Taluditi, Paguat, Buntulia, Randangan, Wonggarasi, Popayato dan Patilanggio.

Beberapa lokasi yang menjadi pusat penambangan emas oleh masyarakat diantaranya: Kecamatan Dengilo, Taluditi, Popayato Barat, Buntulia dan Kec. Patilanggio. Meski tergolong tradisional namun stabilitas keamanan terjaga dengan baik. Dalam hal pengolaan limbah para penambang berupaya maksimal menjaga aktivitas ini agar tidak memberi dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya.

5) Potensi Industri

Pembangunan ekonomi merupakan transformasi secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi dilakukan proses industrialisasi. Proses tersebut mencakup perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dalam prosesnya meliputi interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong perubahan struktur ekonomi.

Sektor industri dipersiapkan untuk mendorong perkembangan sektor lainnya yang terkait, baik keterkaitan kedepan *(forward lingkage),* maupun keterkaitan kebelakangan *(backward lingkage).* Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, maka Provinsi Goronalo sangat potensial untuk mendorong sektor industri, baik dari pengolahan pertanian, dan perikanan.

Beberapa potensi sektor industri di masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo

Kabupaten Gorontalo Utara, Adapun potensi Industri di Kabupaten ini berbasis keunggulan daerah yaitu :

- Industri berbasis Ikan. Potensi bahan baku ikan ini terdapat di 11 kecamatan sepanjang garis pantai 320 km terpanjang (se-Provinsi Gorontalo) dengan laut ZEE seluas 40.000 Km^2. Industri pengelolaan ikan ini berupa pengeringan ikan dengan kapasitas produksi 1.394.526 kg/tahun dan pengasapan ikan sebesar 337.680 kg/tahun;
- Industri berbasis kerajinan kerang laut berada di pesisir garis pantai dan berlokasi di pulau ponelo yang bisa dikembangkan sebagai sentra kerajinan kerang;
- Industri berbasis Aren dan ijuk Aren. Potensi bahan baku pohon aren ini memiliki total luas areal tumbuh tanaman sekitar 332 Ha atau sekitar 51.792 pohon aren dengan asumsi 1 ha ditumbuhi 156 pohon. Hasil aren berupa nira diproduksi secara tradisional menjadi gula merah aren dan ijuk pohonnya dibuatkan sapu ijuk, atap ijuk dsb.;
- Industri berbasis tanaman Bambu Burik di Kecamatan Gentuma Raya, Tomilito dan Monano. Tanaman ini hanya tumbuh di Kabupaten Gorontalo Utara dan sangat potensial

dicarikan investor yang memproduksi furniture; Industri berbasis kerajinan Sulaman Karawo yang dikenal dengan sulaman Kabate Gorontalo Utara.

Kota Gorontalo, Kota Gorontalo terus berkembang sebagai pusat perindustrian dan perdagangan. Industri kecil di Kota Gorontalo terbagi atas 2 (dua) kategori perusahaan industri dan industri kerajinan rumah tangga. Industri yang berkembang di Kota Gorontalo adalah industri makanan dan industri kerajinan dan pakaian jadi.Perusahaan perdagangan yang menonjol terdiri dari dari perusahaan terbatas, Firma (CV), Koperasi dan perorangan. Selain itu juga terdapat pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil/mikro.

Kabupaten Gorontalo. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Gorontalo berdasarkan informasi bahwa potensi di sektor industri masih bersifat menyebar (kegiatan *home industry*). Berdasarkan jenisnya, unit usaha industri di Kabupaten Gorontalo terbagi atas : Industri Hasil Pertanian; Industri Aneka; Industri Logam; dan Industri Perikanan.

Beberapa industri yang sudah berkembang di antaranya adalah

- Pabrik Tepung Kelapa dan Nata de Coco. Sektor Perkebunan kelapa menjadi prospek andalan untuk pengembangan produksi pabrik tepung kelapa dan *nata de coco* di Kabupaten Gorontalo. Industri yang bahan bakunya ditunjang dari hasil pertanian rakyat dari seluruh wilayah Kabupaten serta beberapa wilayah di sekitarnya. Pabrik tepung kelapa Tri Jaya Tangguh terletak di kawasan Boliyohuto. Sejak awal berproduksi pabrik ini telah meluncurkan ekspor tepung kelapa ke Rusia sebanyak 40 feet.
- Pabrik Gula Tolangohula berdiri sejak tahun 1990 pada areal seluas 15.700 ha dengan lahan perkebunan tebu mencapai sekitar 8.000 ha. Pabrik Gula Tolangohula pada setiap tahun memproduksi gula sebesar 35.000 ton sampai dengan 39.000 ton. Besaran produksi tersebut memenuhi kebutuhan gula bagi masyarakat se Provinsi Gorontalo sejumlah 12.000 Ton, sedangkan lainnya dipasarkan ke luar daerah. Pabrik ini mengangkat 1.800 karyawan ditambah 4.000 orang tenaga pekerja lepas yang dikontrak setiap musim produksi.
- Pabrik Rumput Laut.Sebahagian besar produksi rumput laut yang dikelola melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat ataupun secara perorangan ditampung pada pabrik pengolahan. Kapasitas yang dihasilkan pabrik rumput laut mencapai 2 ton per hari dan dipasarkan ke berbagai wilayah, terutama ke Jakarta, Malaysia dan Korea. Pabrik ini juga menampung hasil rumput laut dari beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, seperti Gorontalo Utara, Boalemo dan juga Pohuwato.

6) Potensi Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai sektor pendorong ekonomi daerah. Pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian. Sektor ini merupakan salah satu jenis industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang

cepat dalam penyediaan lapangan pekerjaan, standar hidup serta dapat menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik.

Berbagai Potensi Pariwisata di wilayah Provinsi Gorontalo ini, diantaranya:

1. *Wisata Pantai* : Obyek wisata pantai yang memiliki prospek sangat menjanjikan adalah Wisata Pantai Bolihutuo (Kabupaten Boalemo) dan Taman Laut Olele (di Kabupaten Bone Bolango). Destinasi wisata lainnya adalah Pantai Karang Putih, Pantai Diyonumo, Pantai Pulau Popaya-Raja, Pantai Minanga, Pantai Molotabu, Pantai Bumbulan, Pantai Pohon Cinta, Pantai Langala, Pantai Mananggu, Pantai Batu Buaya, Pantai Kurenai, Pantai Dunu dan Pantai Ratu Tenilo.
2. *Wisata Laut dan Pulau* : Obyek wisata Pulo Cinta (Kabupaten Boalemo), Laut Torosiaje (KabupatenPohuwato) dan obyek wisata Pulau Saronde (Kabupaten Gorontalo Utara) adalah salah satu dari beberapa destinasi wisata yang sangat indah. Destinasi wisata lainnya meliputi: Objek Wisata Hiu Paus (*whale shark*), Pulau Bogisa, Pulau Ponelo, Pulau Oile, Pulau Bitila, Pulau Olinggobe, Pulau Asiangi, Pulau Monduli dan Pulau Mohinggito.
3. *Wisata Alam dan Pegunungan* : Obyek wisata Hutan Pinus Dulamayo, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Danau Limboto merupakan destinasi wisata yang sangat mengagumkan. Disamping itu juga Goa-Goa, Air terjunTaludaa, Air terjunAyuhulalo, Air Terjun Tilamuta, Cagar Alam Panua di Kelurahan Libuo, Cagar Alam Tangole, Kolam Renang Potanga, Sumber Mata Air Panas Alami Pentadio dan Lombongo serta Air Terjun Ayuhulalo.
4. *Wisata Adat dan Situs Sejarah* : Obyek wisata yang perlu dikunjungi adalah ObjekWisataReligiBubohu, Tumbila Tohe; Rumah Adat Dulohupa; Rumah Adat Bandayo Pomboide, Benteng Oranye, Benteng Otanaha, Pentadio Resort, Masjid Baiturrahim, Makam kerajaan Ju Panggola, Batu berbentuk tapak kaki, Tangga 2000 dan Jejak Kaki Lahilote, Torosiaje (Desa Terapung Suku Bajo), Pendaratan Soekarno dan Pusat Kerawang.

Potensi Pariwisata yang tersebar di Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo sangat beragam dan memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing.

Kabupaten Bone Bolango. Potensi Pariwisata di Kabupaten ini cukup besar dan dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Berdasarkan analisis dan pengamatan dilapangan daerah ini memiliki potensi pengembangan wisata pantai dan wisata taman bawah laut. Pengembangan wisata lainnya yang belum dikembangkan adalah wisata alam jenis *outbond* (*hiking, tracking, climbing* dan *rafting*). Garis pantai Bonebol ada di daerah sepanjang pesisir perairan pantai selatan (Teluk Tomini) dan wisata bawah laut yang terletak di Olele dan Botubarani. Jenis Obyek wisata lainnya adalah Wisata alam Lombongo, Wisata

Budaya Makam Raja Atinggola, Benteng Ulantha, Owista Lamahu (Kampung Digital), Owista Huntu Selatan, Pantai Botutonuo, Pantai Molotabu, dsb. Tercatatat sebanyak 25 Objek Wisata di Bone Bolango.

Kota Gorontalo. Beberapa objek wisata yang telah dikembangkan di Kota Gorontalo diantaranya adalah objek wisata alam dan objek wisata budaya sekaligus perpaduan antara keduanya. Salah satu objek wisata yang juga menjadi situs bersejarah di Gorontalo terletak di Kota Gorontalo yaitu Benteng Otanaha. Kota juga telah memiliki penunjang pariwisata berupa hotel berbintang, cafe, restoran dan biro-biro perjalanan.

Kabupaten Boalemo. Beberapa objek wisata lain yang dikembangkan di Kabupaten Boalemo meliputi : Pulau Bitila, wisata pantai Kramat, danau teratai, di Kecamatan Mananggu; Pantai Boalemo Indah, pemandian air panas Dulangea, Taman Laut Pulau Monduli di Kecamatan Botumoito; Pulau Cinta, Pulau Pasir Putih, Pulau Mohupomba, wisata alam air terjun Ayuhulalo, air terjun Dulamayo dan air terjun Tenilo di Kecamatan Tilamuta; Taman Polohungo, air terjun Tangga Barito di Kecamatan Dulupi; Taman laut Pulau Limba, teluk Bubaa di Kecamatan Paguyaman Pantai; dan Ekowisata Sungai Paguyaman, Sungai Moliliulo, dan Hutan Nantu di Kecamatan Wonosari.

Kabupaten Gorontalo. Potensi Pariwisata di Kabupaten Gorontalo memiliki daya tarik dan keunikan masing-masing. Obyek wisata yang dapat dikembangkan meliputi : Teluk Paguyaman sepanjang Batudaa Pantai; Hutan Suaka Marga Satwa Nantu di Kecamatan Tolangohula; Cagar alam Tangale; Rumah Adat/Banthayo Poboide; Danau Limboto; Pentadio Resort; Pakaya Tower/Eks Menara Keagungan; dan Pemandian Taluhu Barakati, Desa Wisata Religi Bubohu.

Kabupaten Gorontalo Utara. Potensi wisata di Kabupaten Gorut adalah sebagai berikut : Wisata Pantai yang menjadi unggulan yaitu Pulau Saronde, Pulau Diyonumo, Pantai Minanga, Pantai Mokonow, Pantai Toliteyuhu dan masih terdapat 52 pulau yang berpotensi untuk dijadikan wisata pantai meskipun 50 pulau di antaranya tidak berpenghuni. Pulau yang berpenghuni adalah Pulau Ponelo dan Pulau Dudepo; Wisata Sejarah yaitu Benteng Oranye/*Orange Fortress*, Benteng Emas yang dibangun bangsa Portugis sebagai benteng pertahanan tahun 1630; dan Kawasan pariwisata Kota Jin sebagai situs Geopark di Kec. Atinggola.

Kabupaten Pohuwato. Potensi Pariwisata yang ada di wilayah ini adalah Air Terjun Lemito Indah yang terkenal dengan panorama alam air terjun dengan hawa sejuk di pegunungan, lokasinya berada di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito; Pulau Bitila dan Pulau Lahe terkenal dengan pesona alam dan panorama bawah laut yang berlokasi di Kecamatan Marisa dan Kecamatan Paguat; Tanjung Bajo, tempat ini sangat cocok untuk menyalurkan hobi menyelam dan memancing berlokasi di Kecamatan Paguat; Pantai Indah Bumbulan dikenal dengan panorama pantai. Pantai ini biasanya digunakan untuk berselancar, perahu tradisional dan terdapat *cottage-cottage* di sekitar lokasi pariwisata ini. Lokasi pantai ini berada di Kelurahan Libuo dan Kecamatan Paguat; Cagar Alam Panua yang merupakan

habitat Burung Maleo (Maskot Sulawesi). Lokasi cagar alam ini berada di sejumlah Kecamatan termasuk di ibu kota Marisa; dan Kampung Torosiaje yang dikenal dengan perkampungan Suku Bajo yang mengapung di atas air, berlokasi di Kecamatan Popayato (sekitar 88 km dari kota Marisa).

G. Kondisi Kebencanaan

1. Kawasan Rawan Gempa

Gempa bumi adalah peristiwa alam karena proses tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik disebabkan dari pergerakan tektonik lempeng. Wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya terletak pada jalur subdaksi lempeng, yaitu Lempeng Indo – Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Dengan demikian wilayah Gorontalo merupakan wilayah yang rawan gempa bumi tektonik.

Potensi bahaya gempa di Provinsi Gorontalo berada dalam kriteria potensi sedang. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan rawan gempa karena kondisi Geologi Gorontalo yang merupakan jenis batuan tua yang memiliki banyak patahan. Namun secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- Wilayah sebelah Utara merupakan kawasan rawan gempa yang bersifat merusak.
- Wilayah sebelah selatan merupakan kawasan rawan gempa yang tidak terlalu merusak.

Wilayah Gorontalo juga dilalui oleh 2 (dua) patahan lempeng aktif yang berpotensi menimbulkan gempa. Keberadaan patahan/sesar Gorontalo terbagi menjadi 2 segmen. Pertama, segmen jalur patahan pantai utara yang mengiris wilayah Gorut hingga ke Laut Sulawesi yang merupakan batas sisi utara daerah ini. Segmen yang kedua, merupakan jalur patahan pantai selatan yang membentang dari arah tenggara di Teluk Tomini ke arah barat laut, memotong Kota Gorontalo hingga sisi timur Kabupaten Gorontalo, termasuk di Danau Limboto. Di daerah patahan ini terdapat potensi terjadinya tektonik endogen dalam bentuk bergesernya kerak/lapisan bumi secara vertikal.Tatanan tektonik geologi yang kompleks ini menjadikan sebagian besar Provinsi Gorontalo dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana gempa bumi menengah dengan prakiraan intensitas goncangan berkisar antara VII-VIII (skala MMI/*Modified Mercally Intensity*).

Gambar 2.8
Peta Patahan Provinsi Gorontalo

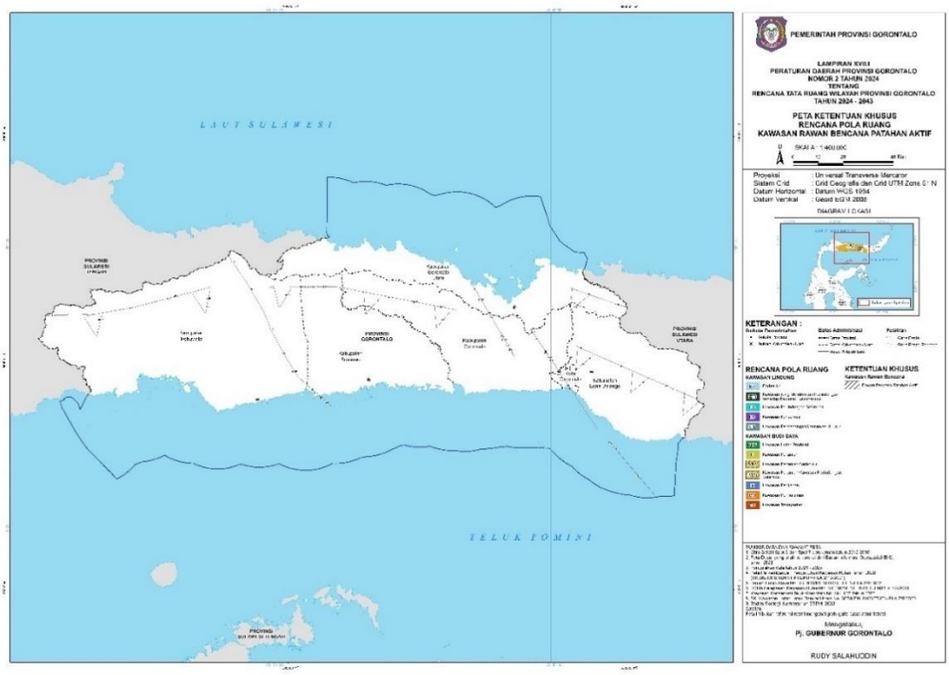

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo, 2024-2043

Berdasarkan analisis peta geologi lembar Gorontalo, sesar/patahan Gorontalo merupakan bagian zona pertemuan antara zona eurasia dan zona pasifik. Sesar Gorontalo tersebut menyerupai garis diagonal tunggal mulai dari Leato sampai Kwandang, yang berpotensi terjadinya gempa tektonik endogen yang menyebabkan patahan. Di daerah patahan ini terdapat potensi terjadinya tektonik endogen dalam bentuk bergesernya kerak/lapisan bumi secara vertikal. Kawasan rawan bencana patahan aktif dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari kiri dan kanan garis patahan yang telah teridentifikasi jalurnya sebagai zona bahaya deformasi sesar aktif.

Gambar 2.9
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi Gorontalo

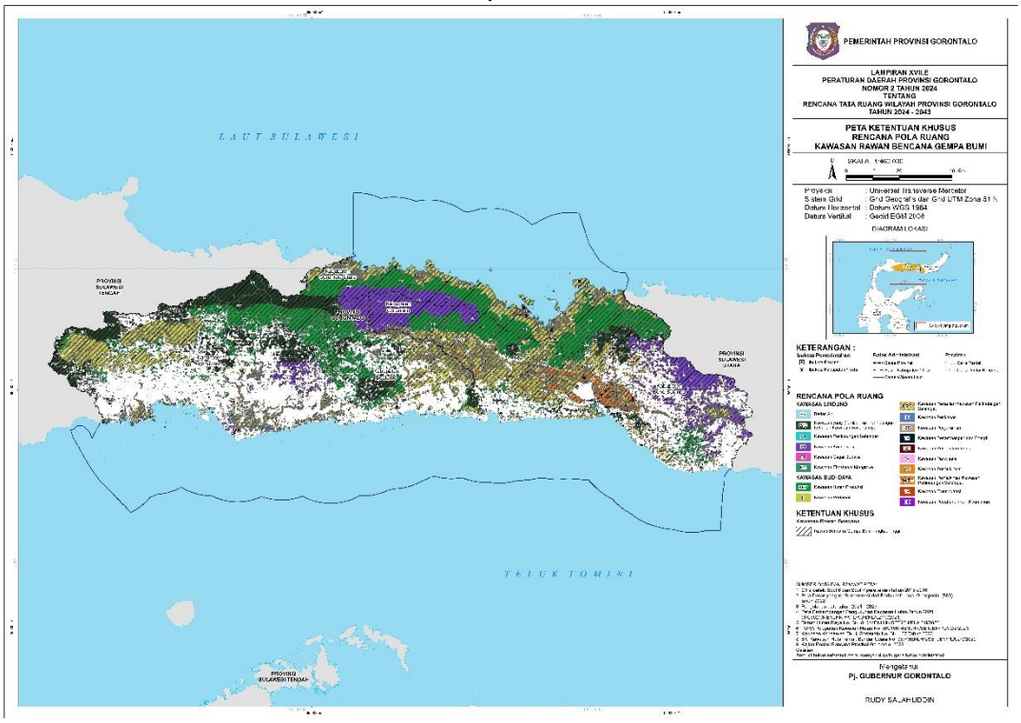

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo 2024-2043

Beberapa kawasan yang sering dilanda dan rawan longsor adalah Kota Gorontalo berada pada Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur dan Kota Barat. Kabupaten Gorontalo berada pada Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Tolangohula. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango.Di Kabupaten Pohuwato yaitu di Kecamatan Buntulia (lokasi tambang). Sedangkan di Kabupaten Bone Bolango kawasan rawan longsor berada pada Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Botupingge, Boneraya dan Bulawa. Di Kabupaten Gorontalo Utara berada di kecamatan Kwandang, Atinggola, Sumalata dan Tolinggula.

Gambar 2.10
Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Provinsi Gorontalo

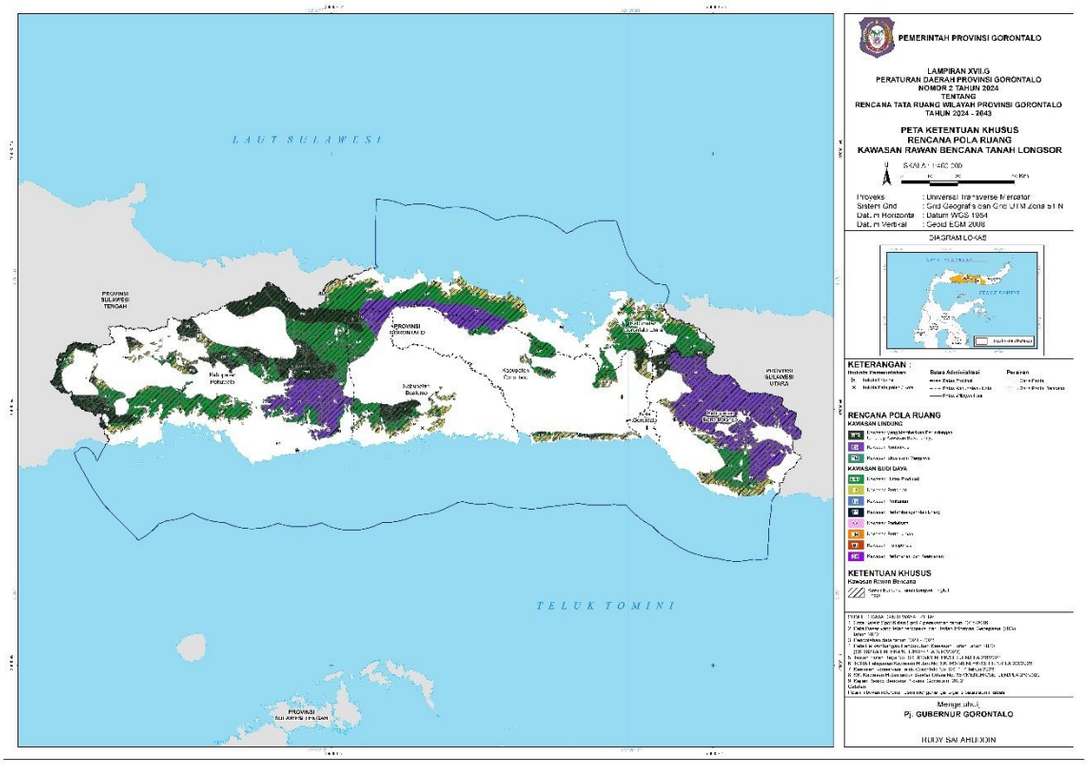

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo 2024-2043

Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman tsunami karena memiliki panjang garis pantai ± 655,8 km dan terdapat jalur patahan. Wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap tsunami di kabupaten Boalemo adalah Kecamatan Botumoito, Mananggu, Paguyaman Pantai dan Tilamuta. Seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara beresiko tinggi terhadap tsunami. Wilayah Kota Gorontalo yang beresiko tinggi terhadap tsunami adalah Kecamatan Dumbo Raya dan wilayah Kabupaten Pohuwato adalah Kecamatan Marisa, Kecamatan Paguat dan Kecamatan Randangan.

Gambar 2.11
Peta Risiko Bencana Tsunami di Provinsi Gorontalo

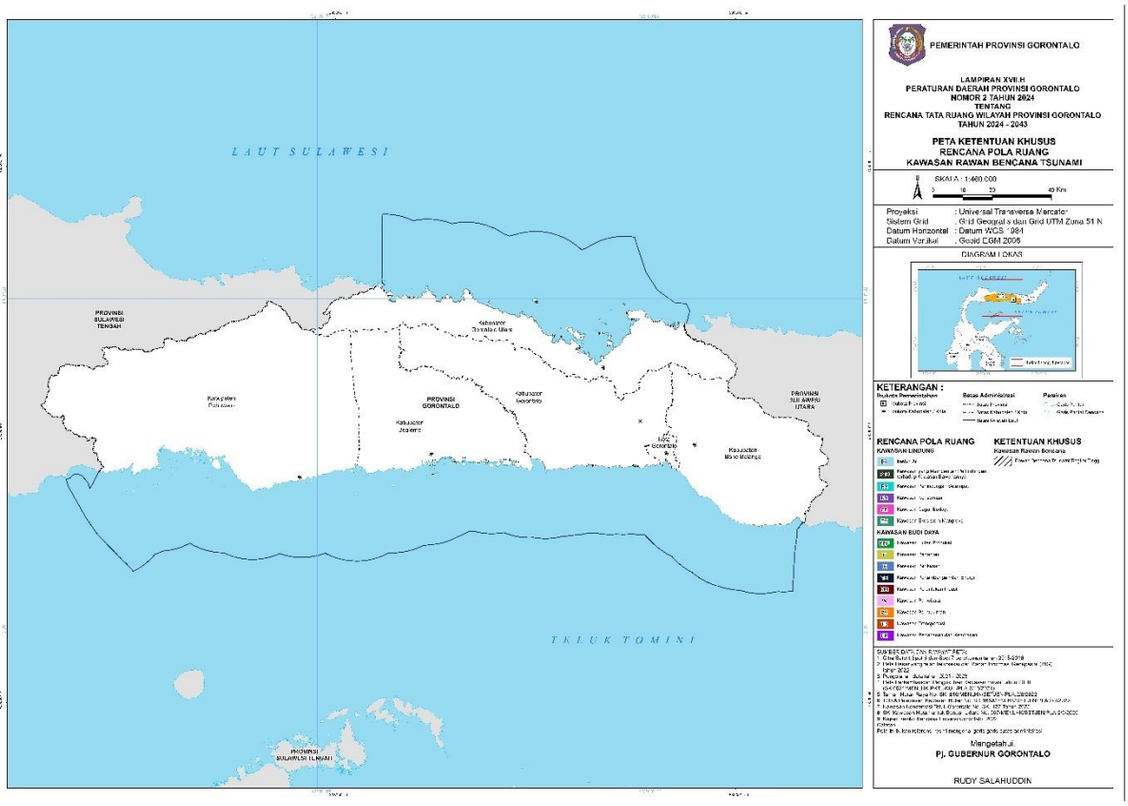

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo 2024-2043

Provinsi Gorontalo potensial untuk terjadi banjir karena bentuk topografi lahannya yang berbentuk seperti mangkuk. Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Gorontalo berada pada semua kabupaten dan kota yang ada, yaitu Kota Gorontalo terdapat pada Kecamatan Kota Selatan, Kota Timur, Kota Utara dan Kota Barat. Pada kabupaten Gorontalo terdapat di Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga, Telaga Jaya, Tibawa, Tolangohula, Bongomeme, Pulubala dan Boliyohuto. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Pada Kabupaten Pohuwato berada di Kecamatan Randangan, Marisa, Lemito dan Popayato. Untuk Kabupaten Bone Bolango terdapat di Kecamatan Suwawa, Kabila, Botupingge dan Tilongkabila sedangkan di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat di Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumalata.

Gambar 2.12
Peta Risiko Bencana Banjir di Provinsi Gorontalo

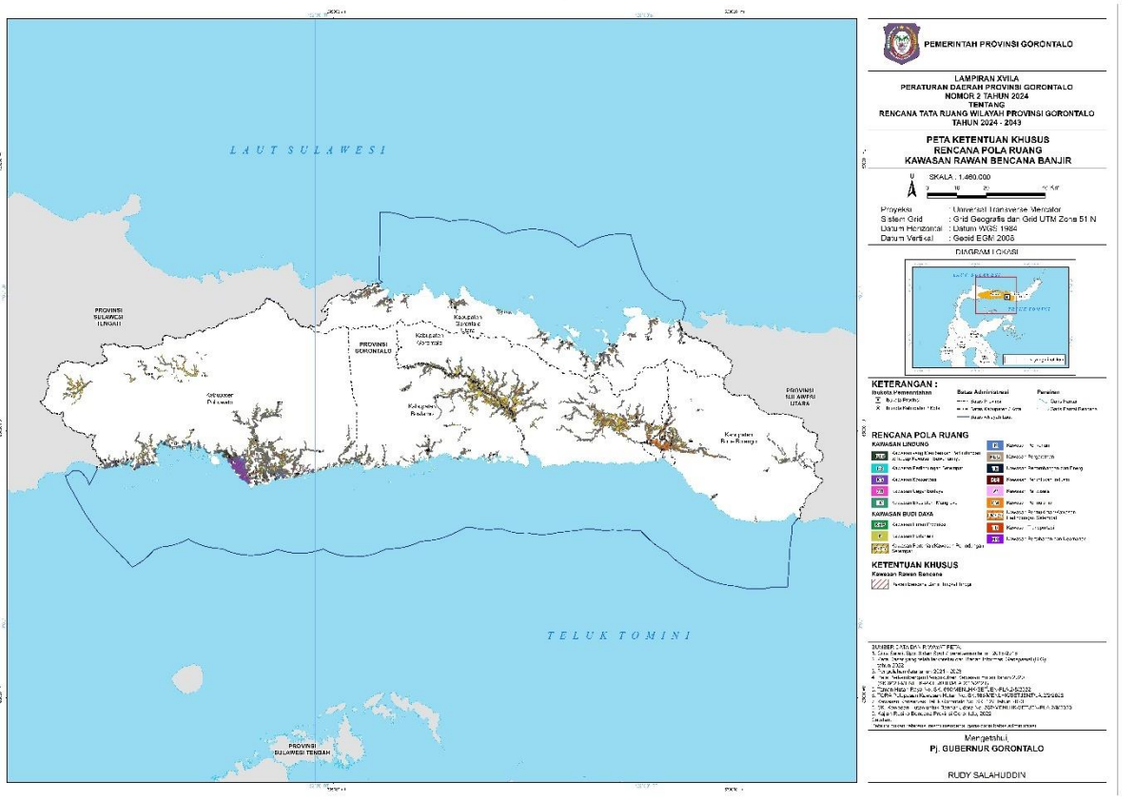

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo 2024-2043

Gambar 2.13
Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Provinsi Gorontalo

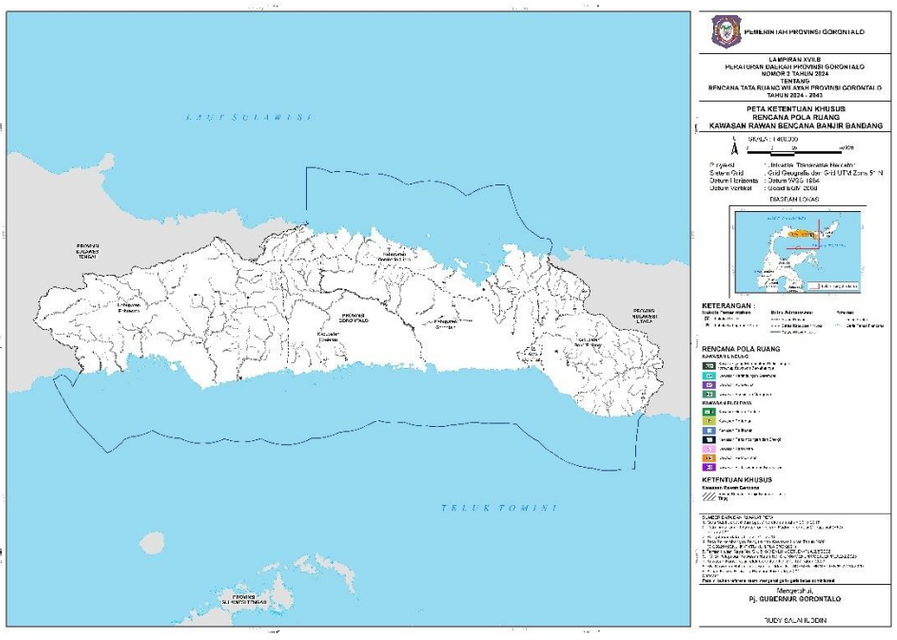

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo 2024-2043

Secara Nasional, Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan potensi bencana sedang berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berdasarkan dari data yang dihimpun dari DIBI BNPB data dari BPBD selama

periode 10 tahun terakhir provinsi Gorontalo, dari tahun 2018-2023, telah mengalami sebanyak 222 kejadian bencana. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023 Provinsi Gorontalo memiliki indeks risiko sedang dengan nilai indeks 116,71 turun dibanding tahun 2022 sebesar 120,61. Indeks risiko bencana meliputi kelompok bahaya, kerentanan dan kapasitas. Komponen bahaya maupun keretanan cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan faktor-faktor alam, lingkungan dan aktifitas manusia, seperti , peningkatan jumlah penduduk, degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan peningkatan pembangunan. Oleh karena itu upaya penurunan indeks risiko bencana dapat dicapai melalui strategi peningkatan kapasitas (capacity) yang diukur berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana.

Grafik 2.1

Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Gorontalo tahun 2019-2023

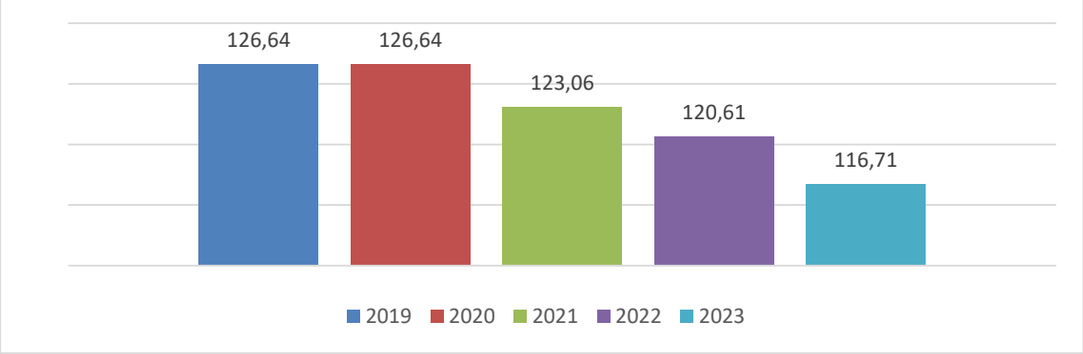

Sumber: Buku IRBI 2023

Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan didaerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksaan, dan monitoring serta evaluasinya sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah yang mengatur penanggulangan bencana yang menjadi urusan wajib daerah. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan ketahanan daerah Provinsi Gorontalo dalam menghadapi potensi bencana memiliki Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2022 sebesar 0,51, nilai menunjukkan Tingkat kapasitas daerah Sedang. IKD Tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding capaian tahun sebelumnya 2021 sebesar 0,38. Capaian ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dan komponen terkait pengurangan risiko bencana di Provinsi Gorontalo telah tercapai dan didukung oleh kebijakan sistematis, tetapi capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

Tabel 2.6
Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks ketahanan Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,82	0,51	SEDANG
2.	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,47		
3.	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,45		
4.	Penanganan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,45		
5.	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,46		
6.	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,56		
7.	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,41		

Sumber : Kajian Resiko Bencana, 2022-2026

H. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan merupakan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia. Oleh karenanya, keberadaan lingkungan alam menjadi sebuah keharusan untuk terus dijaga dalam eksistensinya terhadap daya dukung alam agar memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) berupa DDDTLH air dan pangan di Provinsi Gorontalo, dengan memperhatikan jasa ekosistem penyedia air dan pengaturan tata air dan banjir.

a. Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Air

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya). Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah. Bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa.

- *Jasa Ekosistem Penyedia Air*

  Peta jasa ekosistem penyedia air Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa jasa ekosistem penyediaan air kelas rendah dan sedang terdapat diseluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. Perhitungan jasa ekosistem penyediaan air menggunakan tiga sumber data yaitu bentang lahan, vegetasi alami dan penutup lahan. Berdasarkan bobot yang diberikan yaitu bentang lahan 0.28, vegetasi alami 0.12 dan penutup lahan 0.6 maka faktor yang paling berpengaruh pada nilai indeks jasa ekosistem penyediaan air adalah penutup lahan. Hasil *overlay* antara peta jasa ekosistem penyediaan air dan peta penutup lahan menunjukkan bahwa jasa ekosistem dengan kelas tinggi dan sangat tinggi terdapat pada penutup lahan badan air, rawa, dan pertanian lahan kering campur.

Kondisi ketersediaan air di Provinsi Gorontalo Tahun 2020, masih didominasi pada kondisi ketersediaan air kelas rendah (berkategori sangat rendah dan rendah) dan kelas sedang. Dengan persentase sebesar 55,08 persen kelas rendah dan 26,39 persen kelas sedang dari total persentase luas wilayah fungsional. Wilayah fungsional ketersediaan air yang paling kecil masih tetap kelas tinggi dengan persentase sebesar 0,79 persen dari total persentase luas wilayah fungsional. Berdasarkan pembagian administrasi kabupaten/kota jasa ekosistem penyediaan air kelas berkategori sangat tinggi terluas berada di Kabupaten Gorontalo dan jasa ekosistem penyediaan air kelas sangat rendah berada di Kabupaten Gorontalo dengan luas areal 4974,67 hektar atau sebesar 0,41%.

Gambar 2.14
Distribusi Jasa Ekosistem Penyedia Air di Wilayah Fungsional Daratan
Provinsi Gorontalo Tahun 2020

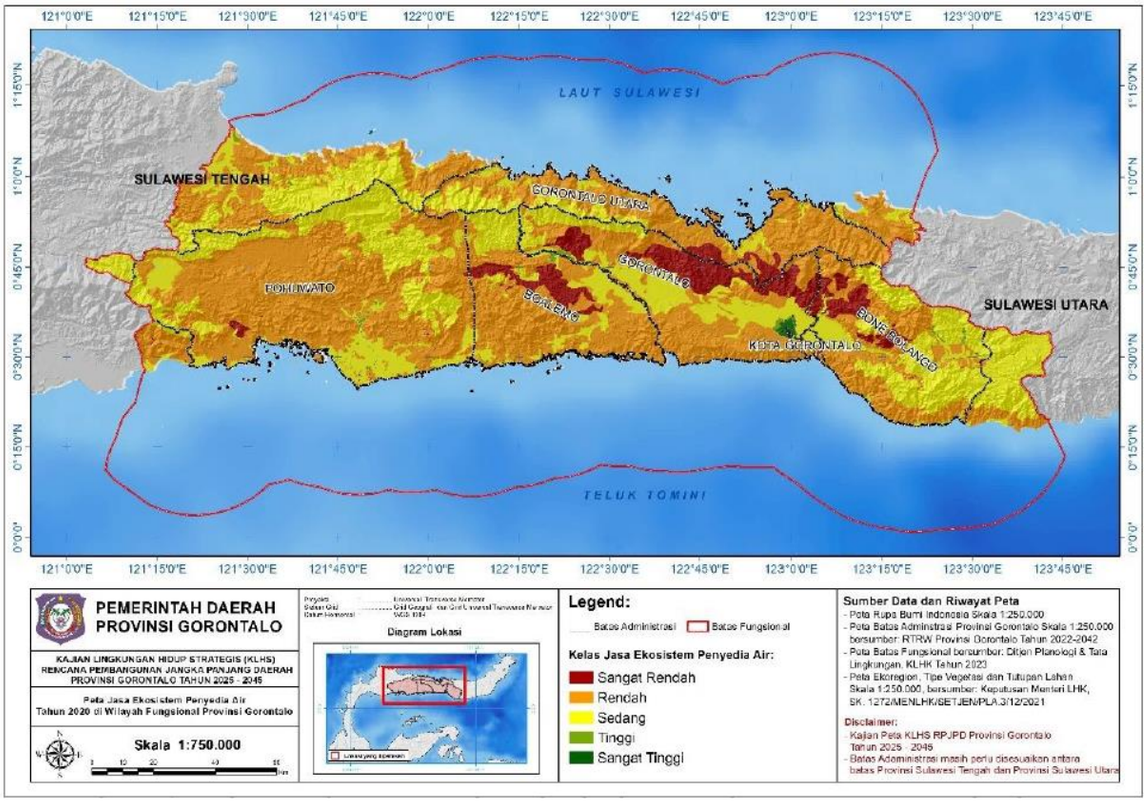

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

Tabel 2. 7
Distribusi Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Air di Wilayah Fungsional
Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Wilayah	Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Air Tahun 2020				
	Rendah	Sedang	Tinggi	NA	Jumlah
Provinsi Gorontalo	**55,08%**	**26,39%**	**0,70%**	**0,0127%**	**82,19%**
Kabupaten Boalemo	9,43%	2,96%	0,09%	0,0005%	12,49%
Kabupaten Bone Bolango	6,57%	6,18%	0,14%	0,0028%	12,88%
Kabupaten Gorontalo	9,92%	4,50%	0,31%		14,74%
Kabupaten Gorontalo Utara	9,20%	2,53%	0,02%	0,0009%	11,76%
Kabupaten Pohuwato	19,71%	10,00%	0,12%	0,0085%	29,84%
Kota Gorontalo	0,25%	0,22%	0,01%		0,48%
Sulawesi Tengah	**6,43%**	**6,13%**	**0,07%**	**0,0017%**	**12,63%**
Buol	5,50%	5,91%	0,07%	0,0016%	11,47%
Parigi Moutong	0,93%	0,22%	0,00%	0,0001%	1,16%
Sulawesi Utara	**1,82%**	**3,34%**	**0,02%**	**0,0019%**	**5,18%**
Bolaang Mongondow Selatan	0,68%	2,98%	0,00%	0,0009%	3,66%
Bolaang Mongondow Utara	1,14%	0,36%	0,02%	0,0011%	1,52%
Jumlah Wilayah Fungsional	**63,33%**	**35,86%**	**0,79%**	**0,02%**	**100,00%**

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

- *Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air*

  Kondisi pengaturantata air di Provinsi Gorontalo dominan pada kondisi pengaturantata air kelas tinggi dengan total persentase luas sebesar 64,57% dari total persentase luasanWilayah Fungsional Provinsi Gorontalo. Pengaturan tata air dengan luasan terbesar kedua disusul oleh ketersediaan air rendah dengan total luasan 450.483,41 hektar atau sebesar 37,44% dan ketersediaan air yang paling kecil adalah ketersediaan air tinggi dengan luas 2295,04 hektar atau sebesar 0,19% dari total luas Provinsi Gorontalo. Berdasarkan pembagian administrasi kabupaten/kota jasa ekosistem penyediaan air kelas sangat tinggi terluas berada di Kabupaten Gorontalo dengan luas areal 2415,64 hektar atau sebesar 0,20% dan jasa ekosistem penyediaan air kelas sangat rendah berada di Kabupaten Gorontalo dengan luas areal 4974,67 hektar atau sebesar 0,41%.

  Kondisi jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir di Provinsi Gorontalo dominan pada kondisi jasa ekosistem pengaturan iklim tinggi dengan total luasan sebesar 665,171.88 hektar atau sebesar 55,28% dari total luas Provinsi Gorontalo. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir dengan luasan terbesar kedua yaitu jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir kelas rendah dengan luasan 391,554.98 hektar atau sebesar 32,54%. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air yang paling kecil luasannya adalah jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir pada kategori sangat rendah dengan luas 8,917.53 hektar atau sebesar 0,74% dari total luas Provinsi Gorontalo.

Gambar 2.15

Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air di Provinsi Gorontalo Tahun 2020

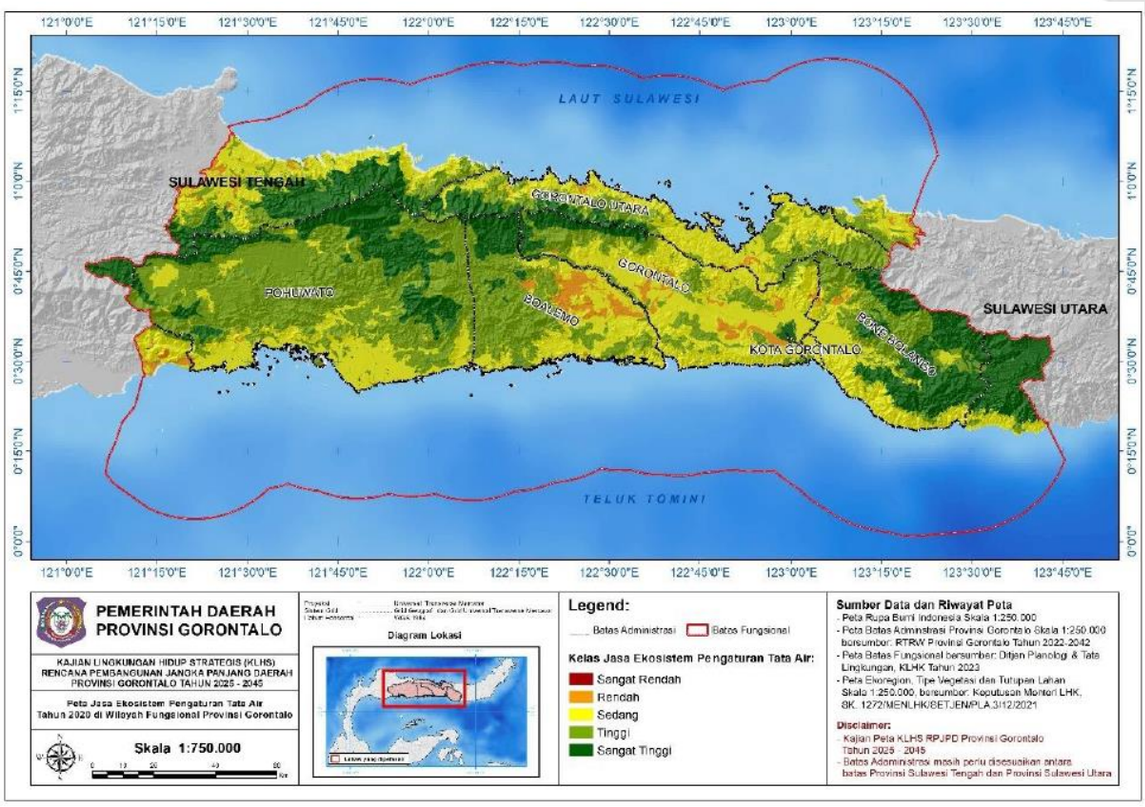

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

Tabel 2.8
Luasan dan Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Air di Wilayah Fungsional Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Wilayah	Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Tahun 2020				
	Rendah	Sedang	Tinggi	NA	Jumlah
Provinsi Gorontalo	**2,66%**	**29,92%**	**52,26%**	**0,0127%**	**82,19%**
Kabupaten Boalemo	1,27%	5,12%	7,36%	0,0005%	12,49%
Kabupaten Bone Bolango	0,13%	3,58%	9,30%	0,0028%	12,88%
Kabupaten Gorontalo	0,98%	9,45%	5,28%		14,74%
Kabupaten Gorontalo Utara	0,18%	5,69%	6,07%	0,0009%	11,76%
Kabupaten Pohuwato	0,08%	5,64%	24,19%	0,0085%	29,84%
Kota Gorontalo	0,03%	0,43%	0,05%		0,48%
Sulawesi Tengah	**0,52%**	**5,32%**	**7,29%**	**0,0017%**	**12,63%**
Buol	0,28%	4,30%	7,17%	0,0016%	11,47%
Parigi Moutong	0,24%	1,03%	0,12%	0,0001%	1,16%
Sulawesi Utara	**0,07%**	**1,41%**	**3,77%**	**0,0019%**	**5,18%**
Bolaang Mongondow Selatan	0,00%	0,57%	3,09%	0,0009%	3,66%
Bolaang Mongondow Utara	0,07%	0,84%	0,68%	0,0011%	1,52%
Jumlah Wilayah Fungsional	**3,25%**	**36,66%**	**63,32%**	**0,02%**	**100,00%**

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

- *Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air*

Status daya dukung dan daya tampung air, menunjukkan bahwa kebutuhan air lebih didominasi oleh kebutuhan untuk lahan yaitu sebesar Ro. 2.719.722.,705 m^3/tahun. sedangkan kebutuhan air untuk domestik sebesar 100.904.314 m^3/tahun. Perhitungan ambang batas

ketersediaan air dilakukan untuk mengetahui populasi penduduk maksimal yang dapat didukung kebutuhan airnya secara alamiah oleh karakteristik wilayah di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil kajian KLHS menunjukkan bahwa jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung oleh ketersediaan air secara alamiah di Provinsi Gorontalo 111.036.732 jiwa. Berdasarkan jumlah populasi penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yaitu 1.167.874 jiwa, maka status daya dukung penyediaan air bagi penduduk di Provinsi Gorontalo Belum Melampaui.

Tabel 2.9
Status Daya Dukung Penyediaan Air Provinsi Gorontalo Tahun 2020

KABUPATEN/KOTA	MODEL (POPULASI PERGRID)	DDDTLH INDIKATIF PENYEDIAAN AR PROVINSI GORONTALO							
		KETERSEDIAAN (SUPPLY)	KEBUTUHAN LAHAN (DEMAND)	KEBUTUHAN DOMESTK (DEMAND)	DEMAND TOTAL	AMBANG BATAS	SELISIH	PERSENTASE WILAYAH MASIH MENDUKUNG	PERSENTASE WILAYAH TIDAK MENDUKUNG
	Jiwa	m3/Tahun	m3/Tahun	m3/Tahun	m3/Tahun	Jiwa	Jiwa	%	%
Boalemo	158.351	1.113.975.694	592.864.421	13.681.526	606.545.947	12.062.802	11.904.451	13,27%	2,02%
Bone Bobngo	157.152	1.223.737.157	260.341.341	13.577.933	273.919.274	22.300.758	22.143.606	15,02%	0,67%
Gorontalo	374.813	1.343.057.524	951.605.946	32.383.843	983.989.789	9.061.340	8.686.527	14,69%	3,82%
Gorontalo Utara	112.836	1.185.912.044	379.888.649	9.749.030	389.637.679	18.657.962	18.545.126	13,95%	0,66%
Pohuwato	153.937	2.607.144.422	504.196.258	13.300.157	517.496.414	48.679.378	48.525.441	32,76%	2,51%
Kota Goiontab	210.785	42.734.226	30.876.092	18.211.824	49.087.916	274.492	63.707	0,38%	0,25%
TOTAL	1.167.874	7.516.561.068	2.719.772.705	100.904.314	2.820.677.019	111.036.732	109.868.858	90,07%	9,93%

Sumber: DDDTLH Provinsi Gorontalo, 2020.

Total ketersediaan air Provinsi Gorontalo sebesar 7.516.561.068 m3/tahun. Total Kebutuhan air Provinsi Gorontalo yaitu 2.820.677.019 m3/tahun. Ketersediaan air terbesar terdapat di Kabupaten Pohuwato yaitu sebesar 2.607.144.422 m3/tahun dan ketersediaan air terkecil terdapat di Kota Gorontalo sebesar 42.734.226 m3/tahun. Sedangkan kebutuhan air terbesar di Kabupaten Gorontalo, dan kebutuhan air terkecil di Kabupaten Gorontalo Utara.

Gambar 2.16
Peta Ketersediaan Air Provinsi Gorontalo

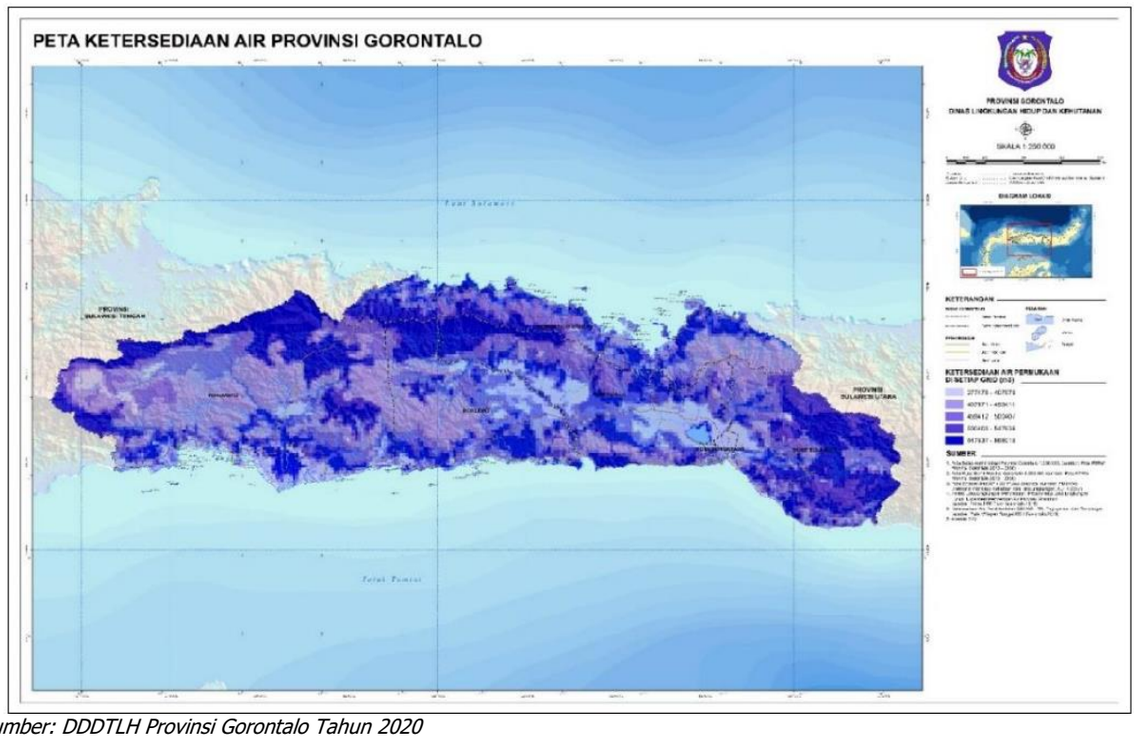

Sumber: DDDTLH Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Gambar 2.17

Peta Kebutuhan Air Provinsi Gorontalo Tahun 2020

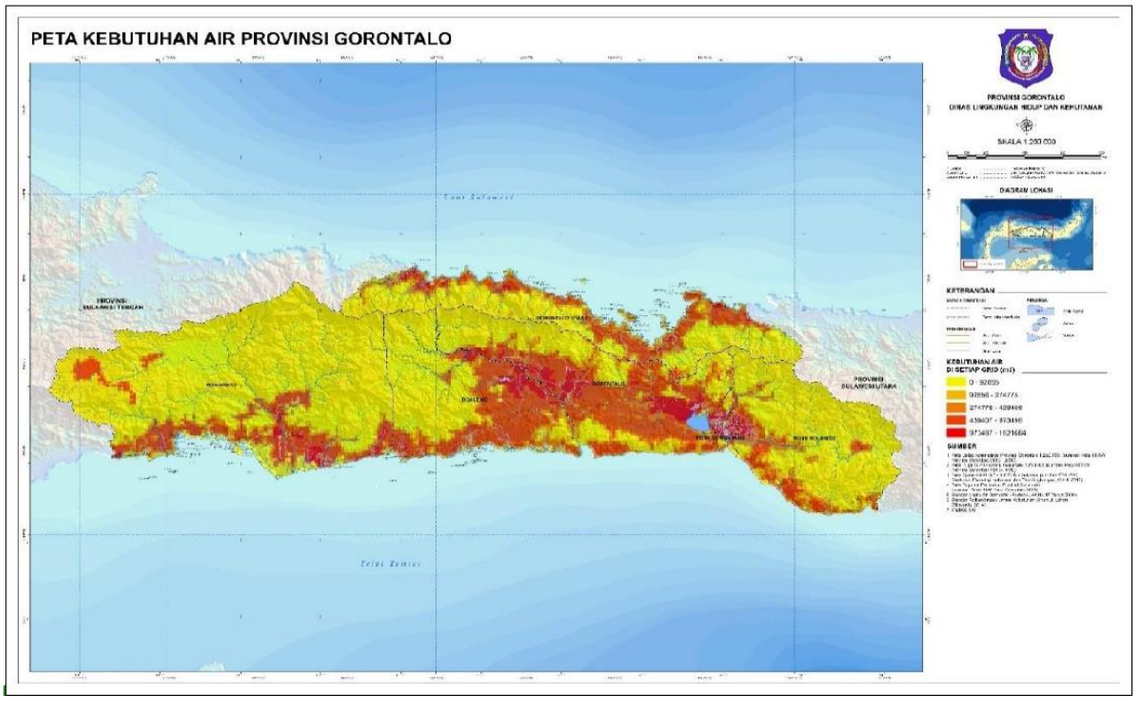

Sumber: DDDTLH Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Jika dirinci per administrasi kabupaten/kota, maka ambang batas tertinggi penyediaan air yaitu Kabupaten Pohuwato sebesar 48,679,378 jiwa, ambang batas terendah yaitu di Kota Gorontalo sebesar 274,492 jiwa. Selisih antara ambang batas penyediaan air dan populasi di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 109,868,858 jiwa. Hal tersebut berarti bahwa ketersediaan air di Provinsi Gorontalo masih dapat mencukupi kebutuhan air bagi sejumlah 109,868,858 jiwa diluar populasi yang ada. Data per kabupaten/kota menunjukkan bahwa selisih ambang batas ketersediaan air dan jumlah populasi tertinggi yaitu Kabupaten Pohuwato dengan nilai selisih 48,525,441 jiwa. Selisih antara ambang batas ketersediaan air dan populasi yang terendah yaitu di Kota Gorontalo yaitu sebesar 63,707 jiwa. Wilayah yang telah melampaui ambang batas ketersediaan air Provinsi Gorontalo meliputi Kabupaten Gorontalo sebesar 3,82%, Kabupaten Pohuwato 2,51%, Kabupaten Boalemo sebesar 2,02%, Kabupaten Bone Bolango 0,67%, Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 0,66% dan Kota Gorontalo sebesar 0,25% dari total luas Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hasil analisis status daya dukung air Provinsi Gorontalo, menunjukkan bahwa 90.07% wilayah Provinsi Gorontalo masih belum melampaui ambang batas ketersediaan air dan 9.93% wilayahnya sudah melampaui ambang batas ketersediaan air. Secara rinci berdasarkan administrasi kabupaten/kota, luasan wilayah yang belum melampui ambang batas berturut-turut dari wilayah yang paling luas hingga terendah yaitu kabupaten pohuwato seluas 408,143.74 hektar atau 32.76% dari total luas provinsi gorontalo, kabupaten bone bolango seluas 187,203.14 hektar atau sebesar 15.02% wilayah provinsi gorontalo, kabupaten gorontalo seluas 183,051.44 hektar atau sebesar 14.69% , kabupaten gorontalo utara seluas 173,878.42 hektar

atau sebesar 13.95%, kabupaten boalemo seluas 165,300.04 hektar atau sebesar 13.27% dan kota gorontalo seluas 4751.44 hektar atau sebesar 0.38% dari total wilayah Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.10
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Provinsi Gorontalo

Kabupaten/ Kota	Status Daya Dukung Daya Tampung Air			
	Belum Terlampaui	Terlampaui	NA	Jumlah
Kabupaten Boalemo	8,34%	6,86%	0,00%	15,19%
Kabupaten Bone Bolango	12,09%	3,58%	0,00%	15,68%
Kabupaten Gorontalo	7,23%	10,69%	0,00%	17,93%
Kabupaten Gorontalo Utara	9,41%	4,89%	0,00%	14,31%
Kabupaten Pohuwato	28,76%	7,51%	0,03%	36,30%
Kota Gorontalo	0,16%	0,43%	0,00%	0,59%
Jumlah	**66,00%**	**33,96%**	**0,04%**	**100,00%**

Sumber: SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 diolah Tim Ahli KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

Gambar 2.18
Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Gorontalo 2023

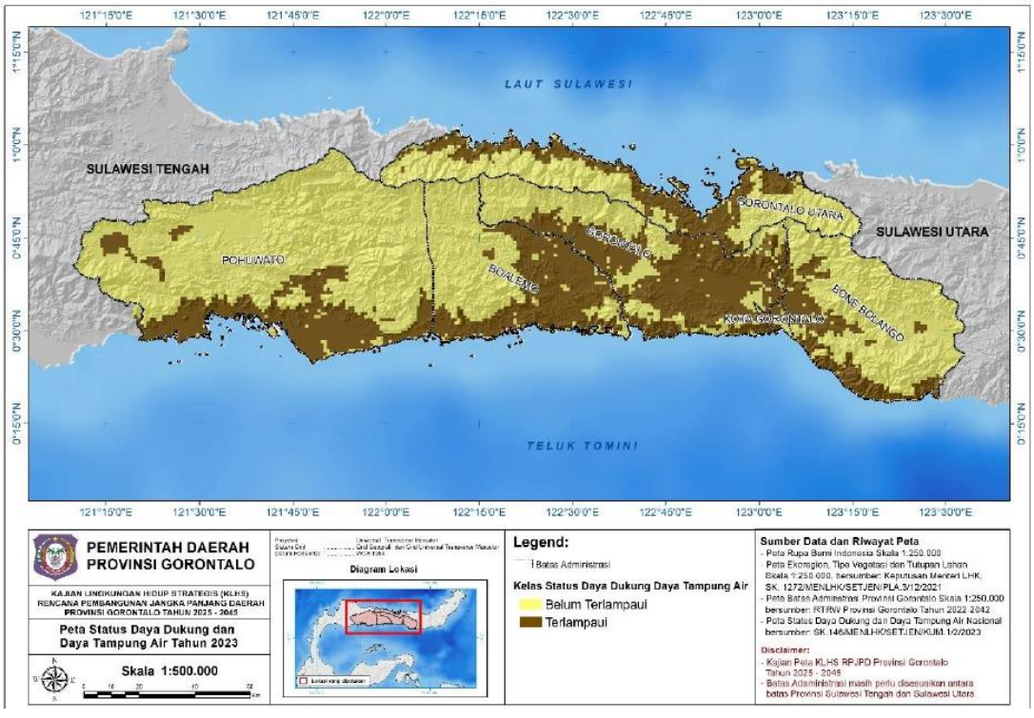

Sumber: SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 diolah Tim Ahli KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

Gambaran daya dukung dan daya tampung air Nasional dengan sumber peta Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023, Wilayah Provinsi Gorontalo secara keseluruhan telah terlampaui sebanyak 33,6%. Kabupaten tertinggi telah terlampaui daya dukung dan daya tampung air yakni Kabupaten Gorontalo sebanyak 10,6% dan belum terlampaui sebanyak 7,23%. Selanjutnya Kabupaten Boalemo Telah terlampaui 6,86% dan belum terlampaui sebanyak 8,34%.

b. Daya dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia sehingga ketersediaan bahan pangan menjadi aspek penting. Berdasarkan hasil analisis ketersediaan pangan Provinsi Gorontalo sebesar 3.219.492.120,142 Kkal, sementara total kebutuhan pangan Provinsi Gorontalo yaitu 916.489.121.500 Kkal. Ketersediaan pangan terbesar terdapat di Kabupaten Pohuwato dan Ketersediaan pangan terkecil terdapat di Kota Gorontalo. Sedangkan untuk kebutuhan pangan, kebutuhan pangan terbesar yaitu di Kabupaten Gorontalo yaitu sebesar 294.134.501.750 Kkal dan kebutuhan pangan terkecil yaitu di Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 88.548.051.000 Kkal.

Kajian status daya dukung penyediaan pangan menunjukkan bahwa ambang batas penduduk terkait ketersediaan pangan di Provinsi Gorontalo adalah 4,100,184 jiwa. Hasil kajian jumlah populasi penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yaitu 1,167,874 jiwa maka daya dukung penyediaan pangan bagi penduduk Provinsi Gorontalo pada BELUM MELAMPAUI.

Tabel 2.11
Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Provinsi Gorontalo

KABUPATEN/KOTA	DDDTLH INDIKATIF PENYEDIAAN PANGAN PROVINSI GORONTALO						
	MODEL (POPULASI PERGRID)	KETERSEDIAAN (SUPPLY)	KEBUTUHAN (DEMAND)	AMBANG BATAS	SELISIH	PERSENTASE WILAYAH MASIH MENDUKUNG	PERSENTASE WILAYAH TIDAK MENDUKUNG
	Jiwa	kkal	kkal	Jiwa	Jiwa	%	%
Boalemo	158.351	489,784,197,841	124.265.947.250	623.773	465422	15,12%	0,17%
Bone Bolango	157.152	499.813.185.055	123.325.032.000	636.436	479284	13,94%	1,75%
Gorontalo	374.813	554.756.973.095	294.134.501.750	706.508	331695	13,69%	4,83%
Gorontalo Utara	112.836	492.853.605.556	88.548.051.000	627.827	514991	14,61%	0,00%
Pohuwato	153.937	1.164.590.991.104	120.802.060.750	1.483.097	1329160	35,06%	0,20%
Kota Gorontalo	210.785	17.693.167.490	165.413.528.750	22.543	-188242	0,10%	0,53%
TOTAL	**1.167.874**	**3.219.492.120.142**	**916.489.121.500**	**4.100.184**	**2.932.310**	**92,52%**	**7,48%**

Sumber: DDDTLH Provinsi Gorontalo, 2020

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Provinsi Gorontalo masih dapat mencukupi kebutuhan pangan bagi 2.932.310 jiwa dluar populasi yang ada. Selisih ambang batas ketersediaan pangan dan jumlah populasi tertinggi yaitu Kabupaten Pohuwato dengan nilai selisih 1.329.160 jiwa. Sedangkan yang perlu mendapat perhatian adalah wilayah yang memiliki nilai selisih terrendah yaitu Kota Gorontalo dimana nilai selisihnya adalah -188.242

jiwa (minus). Ambang batas ketersediaan pangan di Kota Gorontalo hanya dapat mencukupi 22.543 jiwa, sedangkan jumlah populasi mencapai 210.785 jiwa.

Analisis status daya dukung pangan Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa 92.52% wilayah Provinsi Gorontalo masih belum melampaui ambang batas ketersediaan bahan pangan dan 7.48% wilayahnya sudah melampaui ambang batas ketersediaan bahan pangan. Secara rinci berdasarkan administrasi kabupaten/kota, luasan wilayah yang belum melampui ambang batas berturut-turut dari wilayah yang paling luas hingga terendah yaitu Kabupaten Pohuwato seluas 436,911.38 hektar atau 35.06% dari total luas Provinsi Gorontalo, Kabupaten Boalemo seluas 188,359.03 hektar atau sebesar 15.12% wilayah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara seluas 182,030.76 hektar atau sebesar 14.61%, Kabupaten Bone Bolango seluas 173,739.85 hektar atau sebesar 13.94%, Kabupaten Gorontalo seluas 170,579.29 hektar atau sebesar 13.69% dan Kota Gorontalo seluas 1,188.96 hektar atau sebesar 0.10% dari total wilayah Provinsi Gorontalo.

Wilayah yang melampaui ambang batas ketersediaan pangan Provinsi Gorontalo terdistribusi di Kabupaten Gorontalo sebesar 4.83%, Kabupaten Bone Bolango 1.75%, Kota Gorontalo 0.53%, Kabupaten Pohuwato 0.20%, Kabupaten Boalemo sebesar 0.17%, dan Kabupaten Gorontalo Utara seluas 9.87 hektar atau sebesar 0.001% dari total luas Provinsi Gorontalo. Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa distribusi spasial wilayah yang sudah melampaui ambang batas ketersediaan pangan di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan perkotaan dengan penutup lahan umumnya berupa permukiman dan atau lahan terbangun.

Gambar 2.19
Peta Status Daya Dukung Daya Tampung Pangan Provinsi Gorontalo

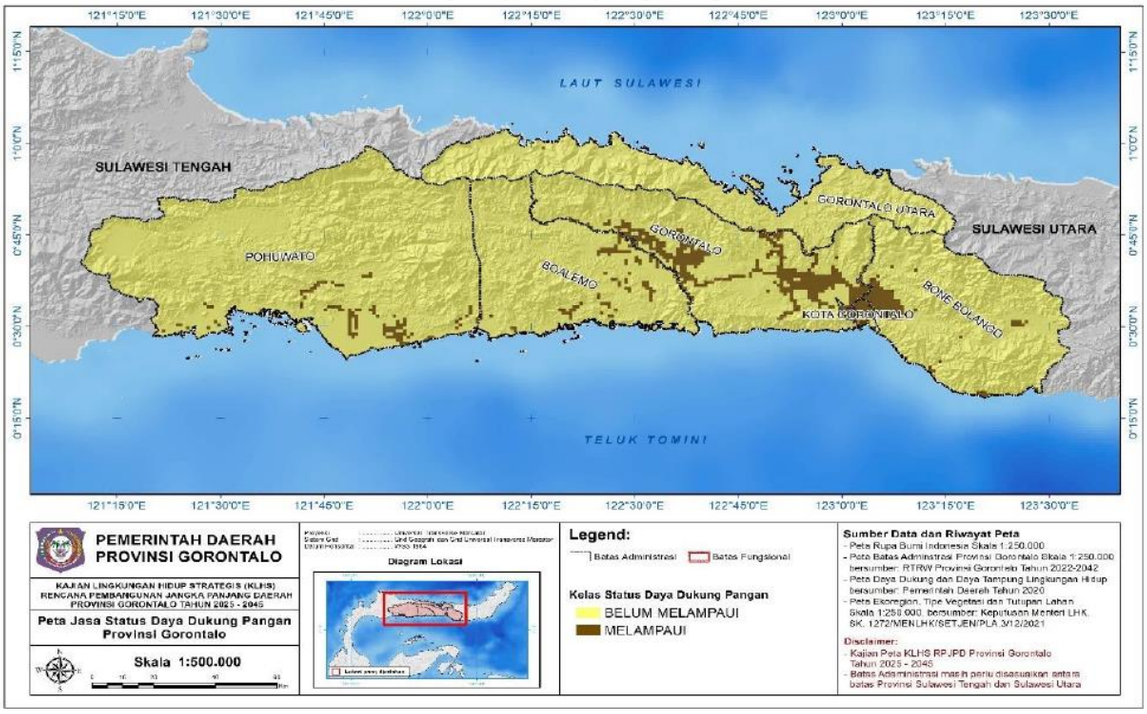

Sumber: DDDTLH Provinsi Gorontalo, 2020

Kondisi ketersediaan pangan di Provinsi Gorontalo dominan pada kondisi ketersediaan pangan tinggi dengan total luasan sebesar 702,367.82 ha atau sebesar 58,37% dari total luas provinsi gorontalo.

I. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*)

Keanekaragaman hayati merupakan keragaman organisme hidup dari semua sumber termasuk antara lain ekosistem darat, laut dan akuatik. Dalam periodisasi pembangunan jangka panjang, salah satu hal penting dan strategis yang perlu menjadi perhatian yaitu aspek keberlanjutan keanekaragaman hayati *(biodiversity)*. Keanekaragaman hayati merupakan komponen penyusun ekosistem alam yang memiliki peranan yang sangat besar baik dari segi ekologi, sosial, ekonomi maupun budaya. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan sumber daya alam hayati juga meningkat, sehingga jika tidak dikelola secara lestari maka akan memiliki dampak terhadap lingkungan dan mengakibatkan degradasi sumberdaya hutan. Oleh karenanya kebutuhan akan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan perlu menjadi prioritas utama.

Berbagai keanekaragaman hayati yang dimiliki Provinsi Gorontalo, diantaranya 81 jenis burung endemic Pulau Sulawesi, 21 jenis mamalia endemic Pulau Sulawesi, 17 jenis reptile endemic Sulawesi, 9 jenis amphibi endemic. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah menetapkan Menteri LHK kembali menegaskan perwujudan Gorontalo sebagai Provinsi konservasi. Dimana terdapat beberapa areal konservasi seperti Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohatu, Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang. Selain itu ada Cagar Alam Mas Popaya Raja dan Cagar Alam Tangale.

Salah satu upaya pembangunan berkelanjutan adalah menjamin pelestarian keanekaragaman hayati. Hal ini menjadi salah satu yang perlu diperhatikan dalam periode pembangunan jangka panjang dalam pemanfaatan dan pengelolaan komponen keanekaragaman hayati untuk masyarakat dan generasi yang akan datang. Untuknya, sebagai modal dasar pembangunan dan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, maka salah satu ukuran yang dapat digunakan yaitu melalui Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang merupakan salah satu tolok ukur utama untuk mengukur aksi/kegiatan/tindakan yang dilakukan dalam rangka penguraman ancaman kehilangan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Indeks Pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebesar 0,524 (nilai indeks).

J. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas-gas di atmosfer yang berfungsi menyerap radiasi infra merah dan ikut menentukan suhu atmosfer. Gas ini yang terdiri dari Karbon Dioksida (CO_2), Metana (CH_4), *Dinitrogen Mono Oksida* (N_2O), *Hidro Fluorocarbon* (HFCs), *Sulfur Hexafluorida* (SF_6), *Perfluoro Karbon* (PFCs), dan gas-gas turunan lainnya. Pemerintah telah berkomitmen ikut

serta dalam pengendalian perubahan iklim dengan menurunkan emisi GRK. Inventarisasi GRK dilakukan untuk monitoring dan evaluasi efektifitas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yang telah dilakukan. Emisi GRK Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 mencapai sekitar 1.407,27 Gg CO2e.

Pelaksanaan inventarisasi GRK menggambarkan seluruh emisi maupun riset yang dihasilkan. Upaya-upaya pengendalian melalui pelaksanaan RAD GRK dapat menurunkan jumlah emisi GRK tetapi belum tentu menurunkan emisi GRK secara keseluruhan jika sektor-sektor lain yang terkait tidak dikendalikan emisi GRK-nya. Informasi ini hanya dapat diketahui apabila dilakukan inventarisasi emisi GRK yang mencakup berbagai sektor, baik yang dikendalikan maupun tidak.

Upaya inventarisasi emisi GRK ini dapat dikuantifikasikan untuk menjadi pertimbangan bagi arah pengendalian emisi GRK yang lebih efektif. Penyusunan inventarisasi emisi GRK dilakukan menurut Pedoman Inventarisasi Emisi GRK Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021. Sesuai peraturan ini, penyusunan inventarisasi GRK menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Secara agregat, emisi GRK di Provinsi Gorontalo pada periode tahun 2017 -2022 mengalami fluktuatif. Jumlah ini terus mengalami kenaikan pada tahun 2022 emisi agregat GRK Gorontalo mencapai 1.407,27 Gg CO2e. Pada tahun 2017, emisi GRK agregat mencapai 387,52 Gg CO2e. Hal ini menunjukan dalam kurun waktu 6 tahun, kenaikan emisi GRK di Gorontalo mencapai 1.019,75 Gg CO2e. Urutan sektor penyumbang emisi GRK pada tahun 2022 adalah sektor pertanian, sektor energi, sektor limbah. Sedangkan sektor kehutanan menghasilkan penyerapan emisi GRK.

2.1.2. Demografi

Jumlah penduduk Gorontalo menduduki peringkat ke 32 dari 38 provinsi di Indonesia. Keseluruhan penduduk tersebar ke dalam 5 kabupaten dan 1 kota. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2020-2050 hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni), jumlah penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebanyak 1.227.794 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,20 persen dari tahun 2020. Pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2020, di masa pandemi Covid-19, dimana jumlah penduduk mengalami penurunan hingga 2,57 persen.

Grafik 2.2
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2025

Berdasarkan wilayah kabupaten/kota, jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo sebanyak kurang lebih 409.509 ribu jiwa, sedangkan laju pertumbuhan tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo Utara yang tumbuh sebesar 1,53 persen.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per KM persegi (KM^2)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Boalemo	153,3	1,25	84	103,7
Gorontalo	409,5	1,03	190	101,2
Pohuwato	153,8	1,23	35	103,1
Bone Bolango	170,7	1,19	90	101,0
Gorontalo Utara	132,8	1,53	78	103,8
Kota Gorontalo	207,8	1,15	2.390	99,3
Provinsi Gorontalo	1.227,8	1,18	102	101,7

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

Data empiris menunjukkan wilayah Kota Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibanding wilayah lainnya di Provinsi Gorontalo. Dengan luas wilayah Kota Gorontalo sebesar 79,59 km2 kepadatan penduduk mencapai 2.930 jiwa per km2. Padatnya penduduk Kota Gorontalo terkait erat dengan fungsi sentral Kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi (pusat pemerintahan) dan juga pusat kegiatan ekonomi, pusat kesehatan, dan pendidikan.

Persebaran penduduk adalah distribusi penduduk menurut wilayah. Pada tahun 2024, persebaran penduduk Provinsi Gorontalo yang tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo yaitu sebesar 33,35 persen dari total penduduk Provinsi Gorontalo. Sementara wilayah dengan penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 10,81 persen dari total penduduk Provinsi Gorontalo.

Grafik 2.3
Persentase Persebaran Penduduk Provinsi Gorontalo, 2024

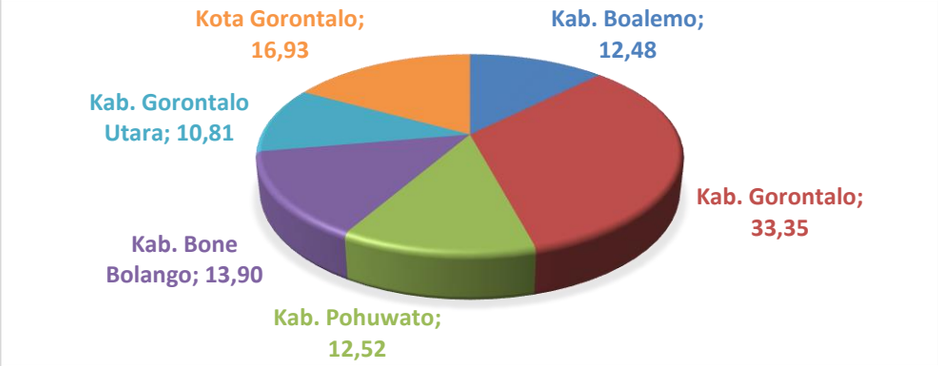

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

Pada tahun 2024, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja sebanyak 652.588 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,95 persen. Dengan demikian, angka beban tanggungan penduduk usia produktif (*dependency ratio*) sebesar 43,65. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Gorontalo semakin meningkat dan menjadi salah satu pendorong utama pembangunan daerah.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Kondisi perekonomian Provinsi Gorontalo dalam lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Ekonomi Gorontalo di tahun 2024 tumbuh mencapai 4,13 persen. Sementara di tahun 2020 gejolak ekonomi akibat pandemi Covid19 mengakibatkan beberapa sektor ekonomi mengalami pelemahan, sehingga ekonomi Gorontalo berada pada level minus 0,02 persen. Akan tetapi dalam 4 (empat) tahun terakhir ekonomi Gorontalo tumbuh positif meskipun masih berada dibawah rata-rata Nasional.

Grafik 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Gorontalo Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

Kinerja perekonomian Gorontalo ditunjang oleh beberapa kebijakan strategis dalam upaya mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terus mengalami peningkatan setiap tahun. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2024 mencapai 32.949,62 Milyar Rupiah atau meningkat

4,1 persen dibanding tahun sebelumnya. PDRB Provinsi Gorontalo memberikan kontribusi terhadap Sulampua sebesar 2,52 persen dan menyumbang sebesar 0,25 persen dari total PDRB Nasional yang mencapai 12.920,3 Triliun Rupiah.

Tabel 2.13

PDRB Menurut Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2020 -2024 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku					Harga Konstan				
		2020	2021	2022	2023*	2024**	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.188,20	17.082,24	18.073,20	19.386,98	20.344,28	10.478,78	10.663,64	10.907,95	11.365,50	11.719,48
B	Pertambangan dan Penggalian	468,20 4	483,23	519,28	562,13	608,56	332,18	339,34	353,96	375,69	399,12
C	Industri Pengolahan	1.799,86	1.936,07	2.170,69	2.273,93	2.396,85	1.172,89	1.235,29	1.332,27	1.338,40	1.381,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,44	22,00	23,96	25,65	26,07	25,01	25,67	27,24	28,95	29,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	26,18	26,88	27,76	29,20	31,00	18,21	18,10	18,49	19,18	19,91
F	Konstruksi	4.399,36	4.597,26	5.189,74	5.717,04	6.186,44	3.059,83	3.097,66	3.274,17	3.464,07	3.686,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.100,30	5.386,86	6.220,17	7.074,66	7.757,16	3.326,04	3.439,37	3.757,01	4.128,18	4.437,00
H	Transportasi dan Pergudangan	2.245,90 2	2.325,32	2.668,65	3.040,11	3.296,35	1.551,39	1.578,04	1.693,94	1.798,58	1.887,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	964,41	1.008,94	1.07617	1.156,14	1.250,17	659,74	685,98	720,53	761,86	810,81
J	Informasi dan Komunikasi	1.145,00	1.184,00	1.286,08	1.370,73	1.463,12	997,07	1.029,70	1.095,92	1.140,60	1.193,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.869,83	2.140,55	2.192,18	2.070,44	2.123,19	1.266,77	1.380,46	1.302,73	1.206,46	1.216,34
L	Real Estate	778,97	756,47	820,71	820,26	862,84	563,73	543,51	566,46	557,15	576,27
M, N	Jasa Perusahaan	36,49	37,54	42,80	42,33	42,98	24,86	25,16	27,66	26,51	26,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2.628,24	2.644,99	2.802,94	2.985,00	3.139,57	2.077,50	2.076,81	2.165,30	2.244,67	2.319,03
P	Jasa Pendidikan	1.947,54	2.018,20	2.124,00	2.249,90	2.276,92	1.328,14	1.360,67	1.415,29	1.474,89	1.455,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.528,89	1.642,19	1.711,67	1.896,89	2.049,84	1.105,94	1.161,38	1.176,97	1.238,43	1.301,69
R, S,T ,U	Jasa lainnya	581,08	600,53	616,29	665,35	699,15	437,30	447,15	448,33	474,67	488,20
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**41.729,89**	**43.893,26**	**47.566,29**	**51.366,74**	54.554,50	**28.425,38**	**29.107,91**	**30.282,21**	**31.643,79**	**32.949,62**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

** Angka Sementara*

Struktur ekonomi Provinsi Gorontalo sebagian besar masih berasal dari sektor Primer Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang masih memberikan kontribusi rata-rata 38,15 persen pertahunnya, diikuti perdagangan barang dan jasa rata-rata sebesar 13,11 persen, konstruksi rata-rata sebesar 10,88 persen. Sementara sektor transportasi dan pergudangan hanya berkontribusi rata-rata sebesar 5,65 persen dari total PDRB lapangan usaha.

Grafik 2.5
Rata-rata Distribusi PDRB Provinsi Gorontalo Selang Tahun 2020-2024

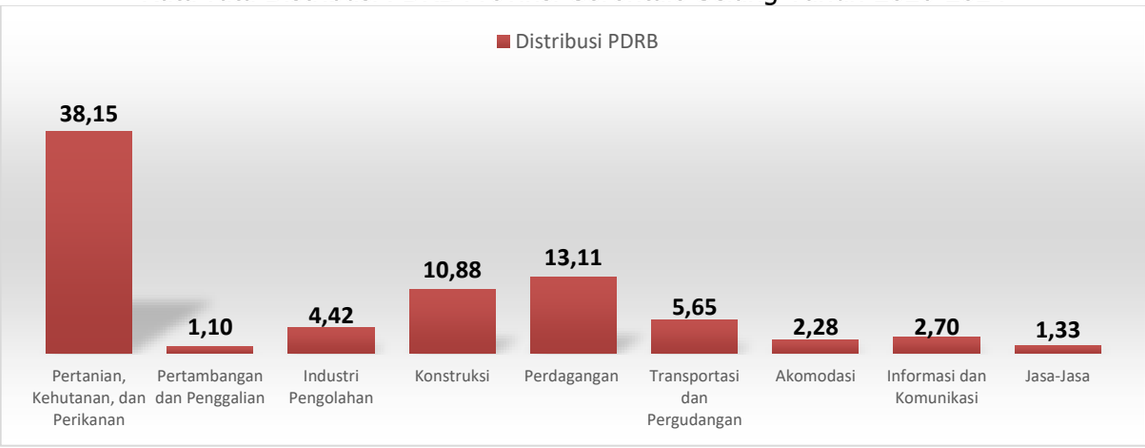

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (diolah, 2025)

Dari sisi pengeluaran, kontribusi tertinggi berasal dari Pengeluaran Konsumsi rumah tangga rata-rata sebesar 62,07 persen (selang tahun 2020-2024) dengan nilai PDRB mencapai 54.554,50 Milyar Rupiah (ADHB). Dari sisi Pengeluaran PMTB kontribusi sebesar 27,30 persen, pengeluaran konsumsi Pemerintah 17,35 persen, dan ekspor sebesar 28,52 persen. Disisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif tinggi sebesar 37,37 persen di tahun 2024.

Tabel 2.14
Produk Domestik Regional Bruto ADHB dan ADHK
Menurut Pengeluaran, Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		ADHB					ADHK				
		2020	2021	2022	2023*	2024**	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	25.860,22	27.104,89	29.262,80	31.733,41	33.863,07	17.463,23	17.878,94	18.598,13	19.394,13	20.188,16
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	310,49	321,78	349,11	381,49	429,72	219,13	221,81	231,69	243,32	266,10
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.247,78	8.680,32	8.903,58	9.208,25	9.467,29	5.272,83	5.412,01	5.418,28	5.446,93	5.466,82
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.691,59	12.383,79	13.225,57	14.207,97	14.893,44	8.474,68	8.714,44	8.874,28	9.188,43	9.516,56
5	Perubahan Inventori	731,45	644,81	685,41	738,72	727,47	372,74	320,17	327,07	338,25	339,11
6	Ekspor Barang dan Jasa	10.089,96	11.641,64	12.794,76	13.879,90	15.561,66	6.102,35	6.776,30	7.261,31	7.755,53	8.409,63
7	Impor Barang dan Jasa	15.201,61	16.883,96	17.651,58	18.775,34	20.388,15	9.479,59	10.215,75	10.426,46	10.718,98	11.236,76
	Produk Domestik Regional Bruto	**41.729,89**	**43.893,26**	**47.569,65**	**51.374,40**	**54.554,50**	**28.425,38**	**29.107,91**	**30.284,29**	**31.647,60**	**32.949,62**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024
** Angka Sementara*

Grafik 2.6
Rata-rata Distribusi PDRB dari Sisi Pengeluaran selang Tahun 2020-2024

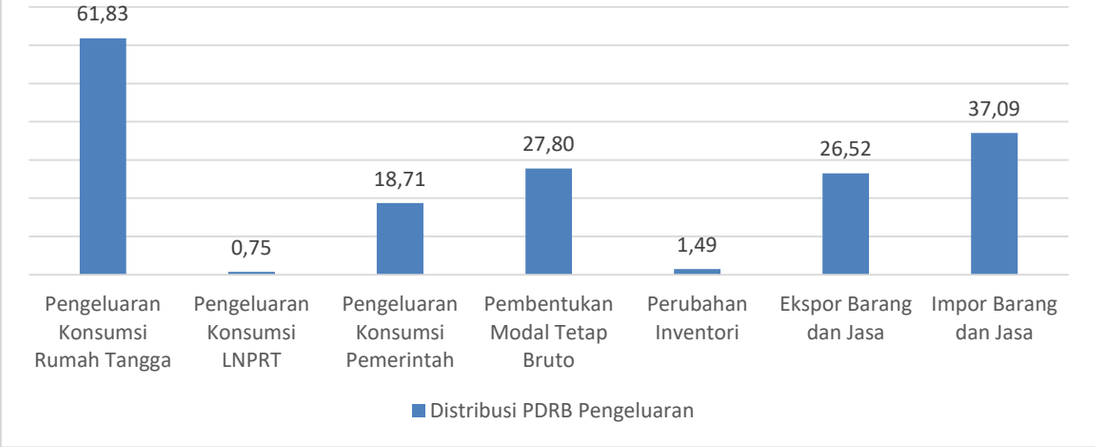

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (diolah, 2025)

Jika dilihat secara regional, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 berada diurutan kedua terbawah setelah Sulawesi Barat. Kedua Provinsi ini masih bergantung pada kontribusi sektor Primer dalam struktur PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer, memiliki laju pertumbuhan yang cenderung lebih rendah dibanding pertumbuhan pada sektor sekunder industri manufaktur.

Grafik 2.8
Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo dan Regional Sulawesi Tahun 2020-2024

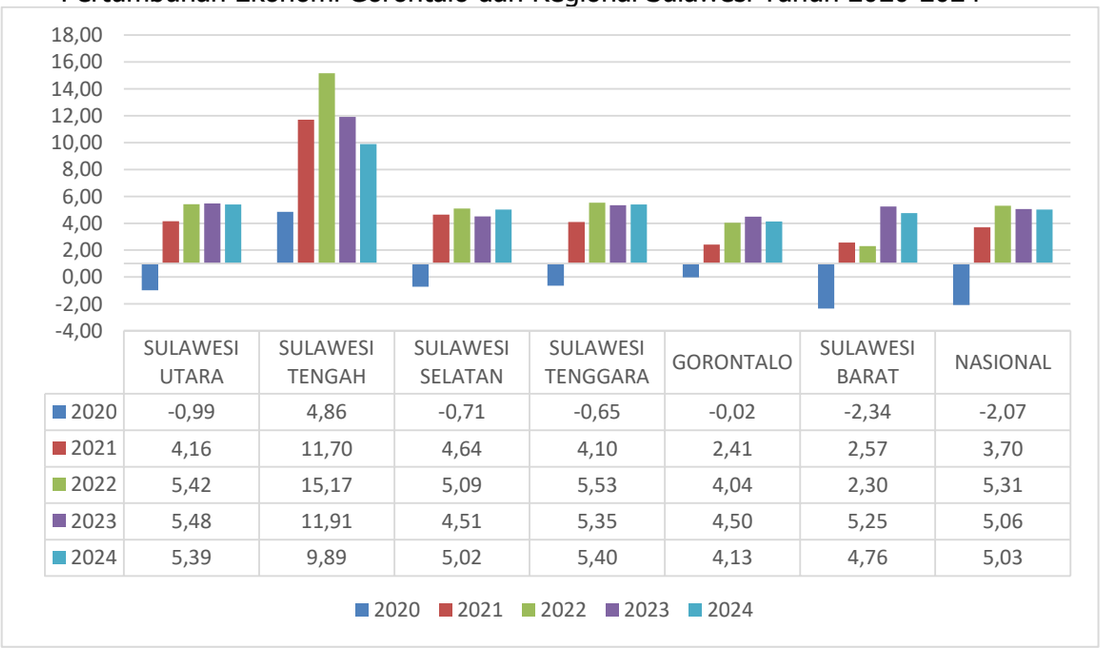

	SULAWESI UTARA	SULAWESI TENGAH	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGGARA	GORONTALO	SULAWESI BARAT	NASIONAL
2020	-0,99	4,86	-0,71	-0,65	-0,02	-2,34	-2,07
2021	4,16	11,70	4,64	4,10	2,41	2,57	3,70
2022	5,42	15,17	5,09	5,53	4,04	2,30	5,31
2023	5,48	11,91	4,51	5,35	4,50	5,25	5,06
2024	5,39	9,89	5,02	5,40	4,13	4,76	5,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional dan Gorontalo, (diolah 2025)

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo tidak terlepas dari intervensi pembangunan Nasional dan Kabupaten/Kota yang saling bersinergi dan saling mendukung dalam rangka pencapaian target-target makro pembangunan. Hingga tahun 2023 pertumbuhan ekonomi

tertinggi berada di Kota Gorontalo yang tumbuh sebesar 4,52 persen dengan rata-rata laju pertumbuhan Provinsi Gorontalo selang tahun 2019 – 2023 sebesar 3,46 persen.

Tabel 2.15
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Laju Pertumbuhan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan
Kabupaten Boalemo	6,7	-0,21	2,04	3,05	4,42	3,2
Kabupaten Gorontalo	6,22	-0,01	2,43	3,93	4,51	3,41
Kabupaten Pohuwato	6,28	-	2,21	3,08	4,40	3,99
Kabupaten Bone Bolango	6,35	-0,06	2,20	4,02	4,47	3,39
Kabupaten Gorontalo Utara	6,77	-0,02	2,21	3,30	4,31	3,31
Kota Gorontalo	6,95	-0,02	2,83	4,11	4,52	3,67
Provinsi Gorontalo	**6,40**	**-0,02**	**2,40**	**4,04**	**4,50**	**3,46**

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, (diolah 2024)

Jika dilihat secara menyeluruh, struktur ekonomi dari sisi lapangan usaha di Provinsi Gorontalo maupun Kabupaten/Kota masih bergantung pada sektor primer dalam hal ini pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sementara dari sektor strategis lainnya seperti industri pengolahan, kontribusi sektor masih sangat kecil. Hal ini karena selain potensi wilayah Gorontalo, juga karena disebabkan sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo yang lebih besar bekerja disektor pertanian. Sementara dari sisi pengeluaran, masih didominasi oleh konsumsi Rumah Tangga dengan kisaran diatas 60 persen, sedangkan kontribusi PMTB dan ekspor masih sangat kecil dan fluktuatif. Olehnya upaya transformasi ekonomi perlu kembali didorong, dengan menjadikan sektor-sektor primer sebagai katalisator dalam mendorong sektor-sektor industri dan UMKM, melalui penguatan rantai nilai *(value chain)* masing-masing sektor dan berintegrasi dalam memperkuat perdagangan barang dan jasa serta ekspor.

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat menunjukan baik/buruknya perekonomian suatu daerah. Tingkat inflasi tinggi, menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi terjadinya deflasi tidak selalu menggambarkan hal yang positif. Angka inflasi yang stabil menunjukan bahwa indikator perekonomian semakin baik.

Grafik 2.9
Perkembangan Inflasi Kota Gorontalo 2020-2024

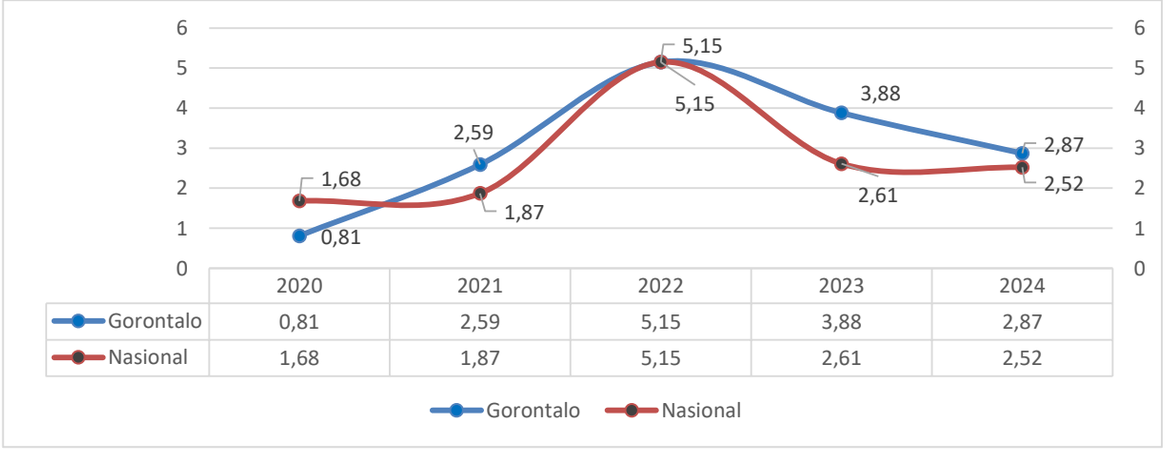

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2025

Selama lima tahun terakhir, Inflasi Tahunan terendah terjadi pada Tahun 2020 sebesar 0,81, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid19 yang berlangsung sejak Bulan Februari 2020 dan Inflasi Tahunan tertinggi terjadi pada Tahun 2023 sebesar 5,15.

Tingkat inflasi Kota Gorontalo *yoy* Desember 2023 dan Desember Tahun 2024 (Januari-Desember) menunjukan adanya penurunan dibandingkan Tahun 2023. Laju Inflasi Tahun 2023 sebesar 3,88 persen turun menjadi 2,87 persen pada Tahun 2024. Untuk inflasi Nasional, di Tahun 2024 inflasi Nasional juga menurun dibandingkan Tahun 2023, dimana tahun 2023 sebesar 2,61 persen dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,52 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas di Kota Gorontalo selama Desember 2024 secara umum menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada Desember 2024 terjadi deflasi *year on year (yoy)* sebesar 0,79 persen, atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,45 pada Desember 2023 menjadi 106,60 pada Desember 2024.

Deflasi *y-on-y* Provinsi Gorontalo terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks pada empat kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,43 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,93 persen; kelompok transportasi sebesar 0,78 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,79 persen. Enam kelompok pengeluaran mengalami inflasi *y-on-y* yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,79 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,37 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,02 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,54 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,30 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,20 persen. Sementara kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tidak mengalami perubahan indeks secara signifikan.

Dari segi Komoditas beberapa barang yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y* pada Desember 2024, antara lain: makanan ringan/snack, mie kering instant, ikan cakalang/ikan sisik, ikan ekor kuning, ikan layang/ikan benggol, ikan teri, ikan tuna, pepaya, pisang, apel, bayam, kangkung, tomat, cabai merah, cabai rawit, tahu mentah, tempe, susu bubuk untuk balita, air kemasan, bahan bakar rumah tangga, pengharum cucian/pelembut, sabun cair/cuci piring, sabun detergen bubuk, bensin, angkutan udara, telepon seluler, sabun mandi, deodorant, krim wajah, dan popok bayi sekali pakai/diapers. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/ sumbangan inflasi *y-on-y*, antara lain: beras, daging ayam ras, cumi-cumi, minyak goreng, bawang merah, kue basah, kopi bubuk, sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM) dan emas perhiasan.

Meskipun ada fluktuasi dalam harga komoditas, secara keseluruhan Tingkat inflasi di Kota Gorontalo pada Desember 2024 menunujukkan tren yang relative stabil dengan kontribusi deflasi yang cukup besar.

c. Indeks Gini

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Angka Gini Rasio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara nilai 0 (nol) dan 1 (satu). Gini Rasio sama dengan 0 (nol)menunjukkan kesenjangan sebaran pendapatan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedang nilai 1 (satu) menunjukan tingkat kesenjangan sebaran yang tinggi (kesenjangan sempurna).

Nilai Gini Ratio Gorontalo selama periode Maret 2020 – September 2024 terus mengalami fluktuasi. Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Gorontalo yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,413. Angka ini menurun sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,414.

Tabel 2.
Indeks Gini Provinsi Gorontalo dan Nasional
periode Maret 2019- September 2024

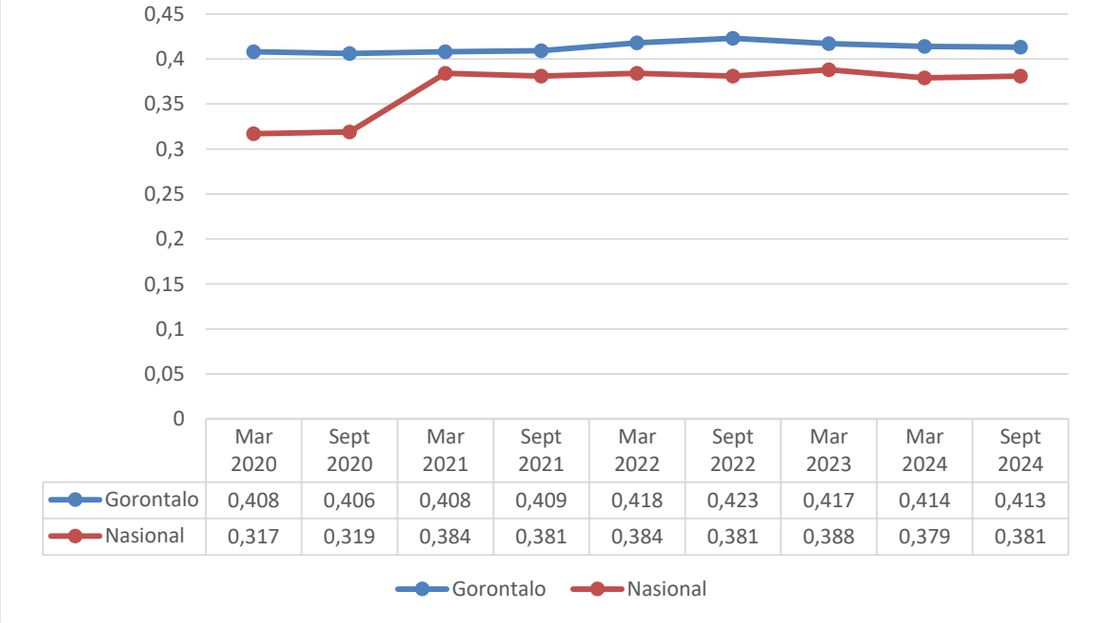

	Mar 2020	Sept 2020	Mar 2021	Sept 2021	Mar 2022	Sept 2022	Mar 2023	Mar 2024	Sept 2024
Gorontalo	0,408	0,406	0,408	0,409	0,418	0,423	0,417	0,414	0,413
Nasional	0,317	0,319	0,384	0,381	0,384	0,381	0,388	0,379	0,381

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada September 2024 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di perkotaan sebesar 17,71 persen dari total konsumsi penduduk perkotaan Gorontalo. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di perdesaan tercatat sebesar 16,63 persen dari total konsumsi penduduk perdesaan Gorontalo. Kondisi ini menunjukan adanya peningkatan share konsumsi pada kelompok ini di wilayah perkotaan

sedangkan penurunan share konsumsi di wilayah perdesaan dibandingkan Maret 2024. Menurut kriteria Bank Dunia, ketimpangan yang terjadi di wilayah perkotaan Gorontalo termasuk rendah sedangkan wilayah perdesaan tergolong sedang.

Grafik 2.11

Gini Rasio Provinsi se-Sulawesi tahun 2020-2024

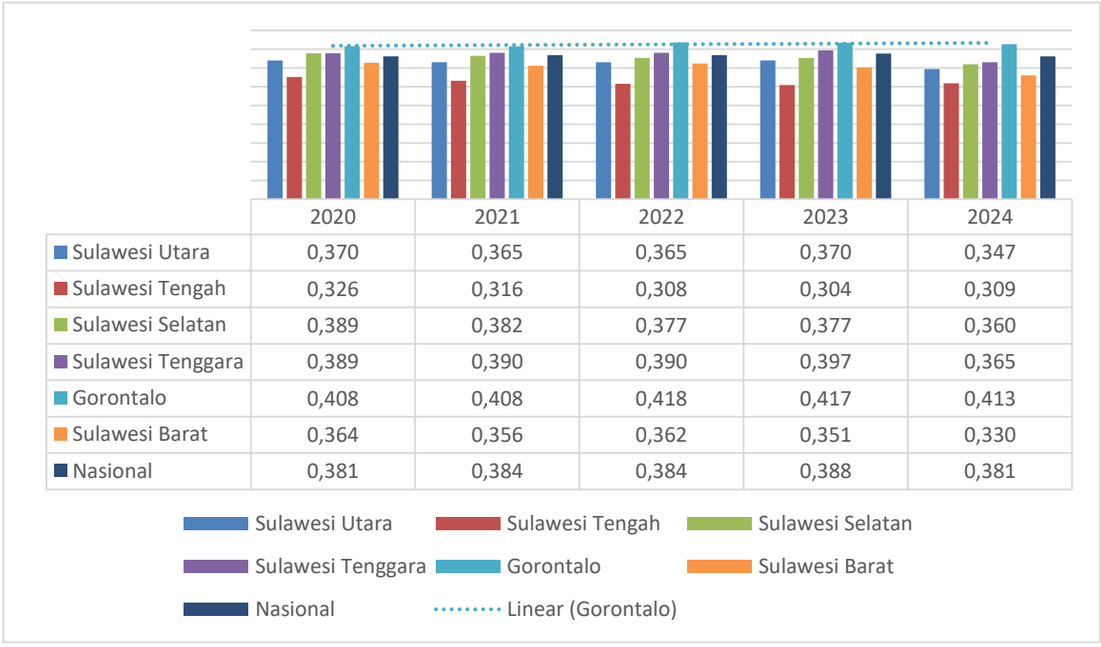

	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	0,370	0,365	0,365	0,370	0,347
Sulawesi Tengah	0,326	0,316	0,308	0,304	0,309
Sulawesi Selatan	0,389	0,382	0,377	0,377	0,360
Sulawesi Tenggara	0,389	0,390	0,390	0,397	0,365
Gorontalo	0,408	0,408	0,418	0,417	0,413
Sulawesi Barat	0,364	0,356	0,362	0,351	0,330
Nasional	0,381	0,384	0,384	0,388	0,381

Sumber : Badan Pusat Statistik, (diolah 2024)

Selain itu, jika dibandingkan dengan kondisi Nasional nampaknya tingkat kesenjangan di Provinsi Gorontalo masih tergolong tinggi dibanding wilayah lainnya se-Sulawesi. Selama periode 2020-2024 tingkat kesenjangan di Provinsi Gorontalo juga lebih tinggi daripada Nasional.

d. Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kemiskinan Provinsi Gorontalo selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Persentase Kemiskinan Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebesar 14,57 persen pada Maret 2024, menjadi 13,87 persen pada September 2024. Angka ini merupakan Penurunan tingkat kemiskinan terendah sepanjang berdirinya Provinsi Gorontalo. Meski saat Pandemi Covid-19 melanda angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo sempat naik, namun secara umum angka kemiskinan Provinsi Gorontalo dari waktu ke waktu mengalami penurunan. Selain itu, persentase kemiskinan Provinsi Gorontalo masih berada diatas rata-rata Nasional dan masih termasuk salah satu dari 10 Provinsi termiskin di Indonesia.

Grafik 2.11
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo dan Nasional
Tahun 2020-2024

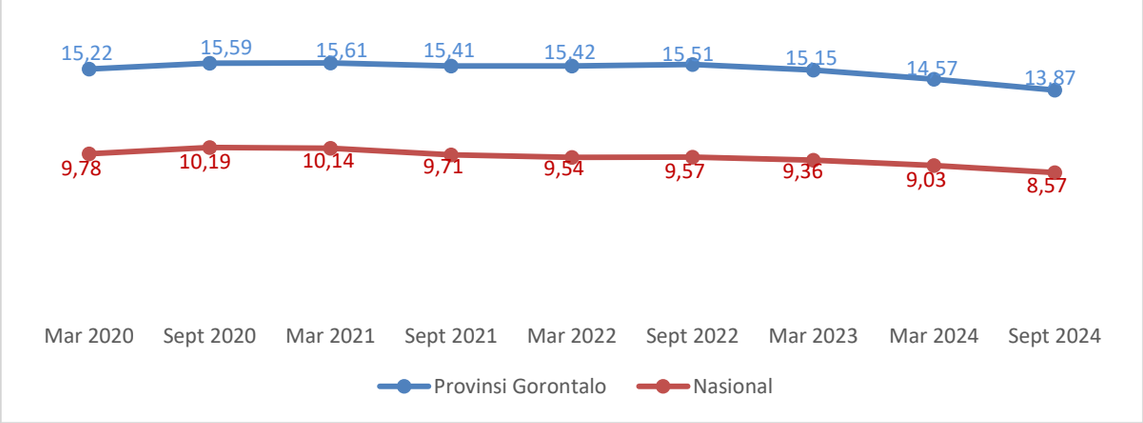

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2024 mencapai 107,03 ribu orang. Bila dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 7,96 ribu orang.

Bila dilihat menurut wilayah tempat tinggal, pada Maret 2024 dibandingkan September 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 3,03 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 10,99 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 4,57 persen menjadi 4,99 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 22,97 persen menjadi 21,62 persen.

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp473.006,- per kapita per bulan dan pada September 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp487.578,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp14.572,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 3,08 persen. Pada September 2024, GKM untuk wilayah perkotaan tercatat sebesar Rp372.700,- dan perdesaan sebesar Rp385.233,-. Kondisi ini menunjukan bahwa pola konsumsi makanan di wilayah perdesaan kurang mengandung kalori dibandingkan pola konsumsi di perkotaan, sehingga untuk mendapatkan kalori yang standar (2100 kkal/hari) diperlukan harga yang lebih mahal.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar melihat berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan yang disajikan dalam bentuk indeks. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2023-Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks

Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar 2,879 turun 0,039 poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 2,918. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk yang berada jauh garis kemiskinan tahun 2024 cenderung lebih sedikit dan terus berkurang dibandingkan tahun 2023. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan Maret 2024 tercatat sebesar 0,776 naik 0,036 poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 0,740.

Jika dibandingkan menurut wilayah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada September 2024 nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan tercatat sebesar 0,395 sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 3,957. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan tercatat sebesar 0,061, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 1,041.

Berdasarkan data, bila dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya yang ada di Sulawesi, angka kemiskinan Provinsi Gorontalo masih yang tertinggi pada selang tahun 2020-2024. Hal ini disebabkan perekonomian Gorontalo digerakkan oleh sektor pertanian dan tidak bertumpu pada sektor jasa.

Grafik 2.13
Presentase Kemiskinan Regional Sulawesi (Maret 2020-Maret 2023 & September 2024)

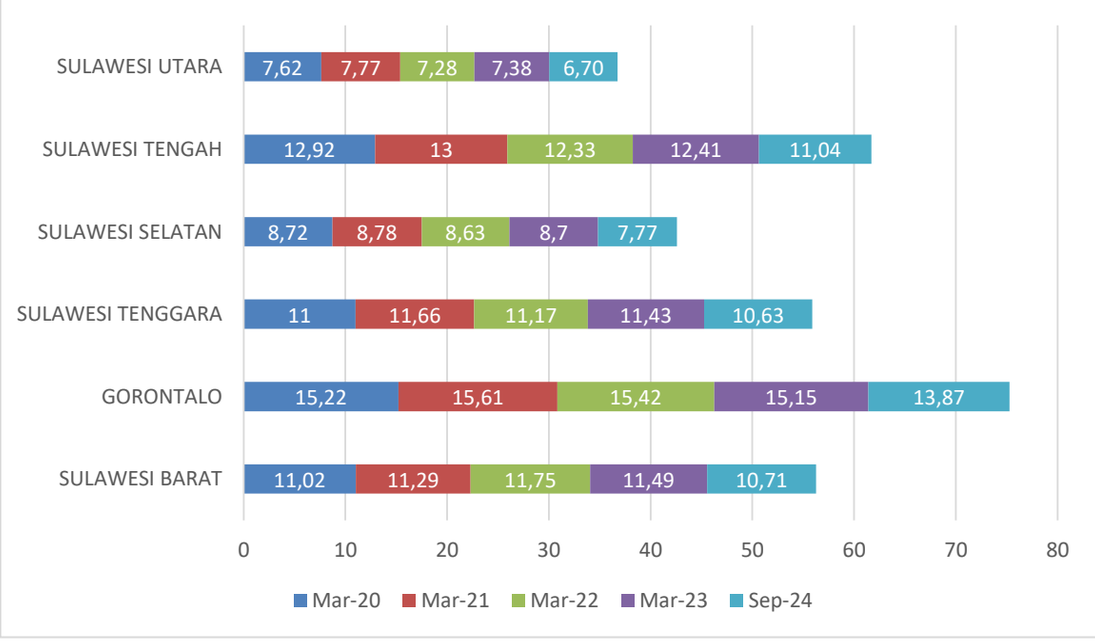

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, (diolah 2024)

69

Setiap Tahun angka Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Gorontalo terus mengalami penurunan. Penurunan Kemiskinan Ekstrem yang cukup signifikan terjadi di bulan Maret 2023. Berdasarkan data SUSENAS, Penduduk miskin ekstrem pada Maret 2024 sebesar 1,46% (17,41 ribu jiwa) turun 0,98% terhadap maret 2023. Capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan target pemerintah pusat terkait kemiskinan ekstrem di tahun 2024 sebesar 0%.

Tabel 2.16
Kemiskinan Ekstrim di Provinsi Gorontalo, tahun 2021-2023

Kabupaten/ Kota	2021		2022		2023		2024	
	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim (ribu)	Penduduk Miskin Ekstrim (%)	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim (ribu)	Penduduk Miskin Ekstrim (%)	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim (ribu)	Penduduk Miskin Ekstrim (%)	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim (ribu)	Penduduk Miskin Ekstrim (%)
Boalemo	5,88	3,51	6,29	3,68	3,74	2,15	n/a	n/a
Gorontalo	32,69	8,7	26,03	6,92	17,86	4,74	n/a	n/a
Pohuwato	4,97	3,07	8,05	4,91	3,38	2,03	n/a	n/a
Bone Bolango	7,51	4,75	5,12	3,23	2,44	1,53	n/a	n/a
Gorontalo Utara	2,4	2,13	5	4,45	1,7	1,51	n/a	n/a
Kota Gorontalo	2,18	1	1,04	0,47	0,42	0,19	n/a	n/a
Provinsi Gorontalo	**55,63**	**4,66**	**51,52**	**4,28**	**29,54**	**2,44**	**17,41**	**1,46**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2024

Upaya penurunan kemiskinan ekstrim dilakukan melalui berbagai strategi diantaranya penurunan beban pengeluaran, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui bantuan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, bantuan usaha dibidang pertanian, peternakan dan perikanan.

e. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) serta Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai tukar petani merepresentasikan kondisi kesejahteraan petani. NTP menunjukkan daya tukar *(terms of trade)* dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Berikut ini menunjukan tren NTP Provinsi Gorontalo 5 tahun terakhir.

Grafik 2.

Nilai Tukar Petani Provinsi Gorontalo, tahun 2020-2024

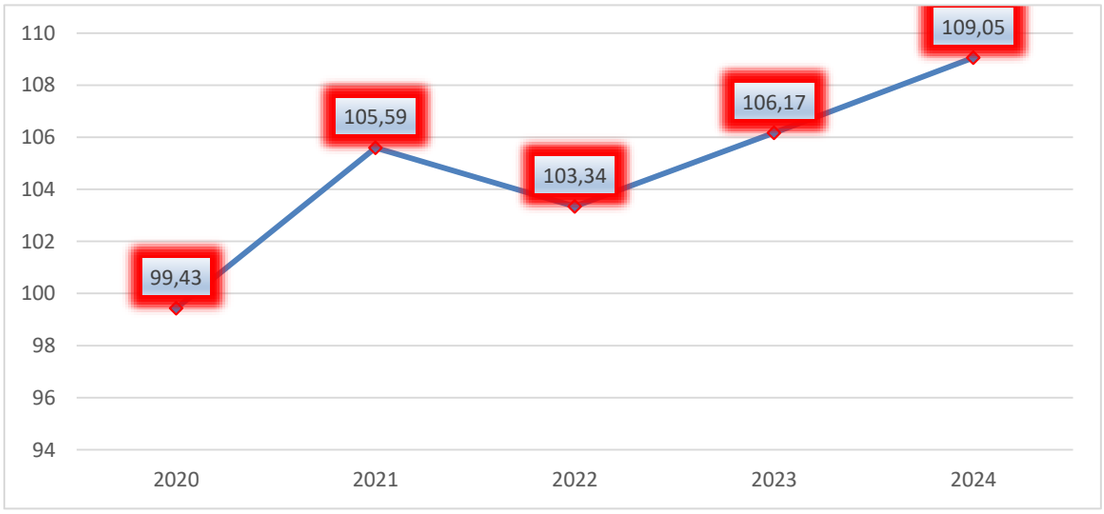

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, (diolah 2024)

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa NTP Provinsi Gorontalo mengalami fluktuasi cenderung meningkat berada pada angka diatas 100. Walaupun berada posisi diatas 100, namun angka ini belum mencerminkan kondisi yang ideal harapan.

Ada berbagai asumsi yang bisa menjelaskan kondisi pada grafik tersebut. Diantaranya bahwa terjadi dinamika peningkatan kebutuhan konsumsi RT petani dan produksi yang tidak diimbangi oleh perbaikan pendapatan petani, harga produk pertanian anjlok dengan kapasitas produksi yang menurun ataupun biaya produksi yang terus meningkat yang tidak disertai dengan kebijakan perbaikan harga. Pada prinsipnya capaian NTP Provinsi Gorontalo setiap tahunnya telah melampaui dari target yang ditetapkan, dimana diakhir periode targetnya hanya 105,89 %. Selanjutnya, jika kita memotret lebih dalam lagi sub sektor hortikultura dan perkebunan rakyat yang berkontribusi signifikan terhadap angka NTP sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 2.14

NTP berdasarkan Sub Sektor Provinsi Gorontalo, tahun 2020-2024

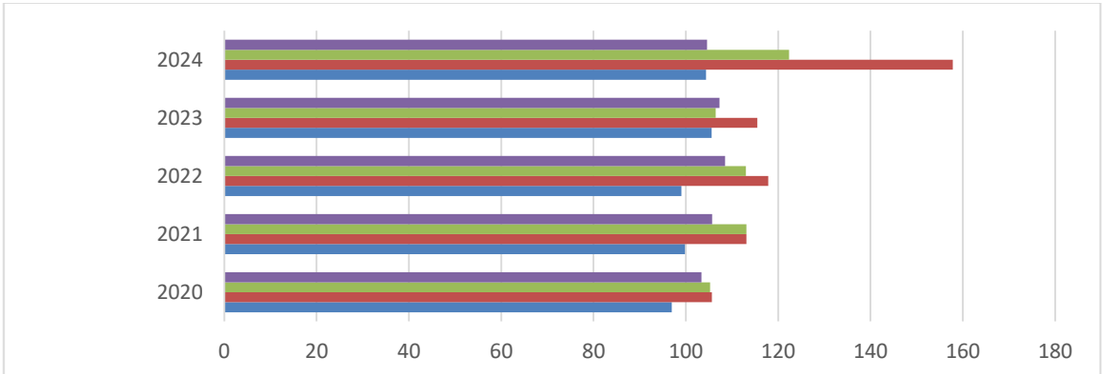

	2020	2021	2022	2023	2024
Peternakan	103,37	105,68	108,48	107,31	104,58
Perkebunan	105,28	113,1	113,03	106,48	122,34
Hortikultura	105,62	113,12	117,84	115,47	157,85
Tanaman Pangan	96,93	99,79	99,05	105,58	104,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, (diolah 2024)

Berdasarkan data capaian bulanan di periode tahunan masa lampau, evaluasi capaian Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) menggambarkan dinamika yang mencerminkan adaptasi sektor pertanian terhadap perubahan ekonomi dan lingkungan. Fluktuasi dan pertumbuhan yang diamati menawarkan wawasan penting mengenai stabilitas dan adaptabilitas sektor ini. Refleksi nyata tergambar pada data tahun 2020 – 2023 yang relatif stabil dengan tren pertumbuhan perlahan sepanjang tahun. Meskipun perubahan bulanan kecil, akumulasi tersebut mengindikasikan adaptasi sektor terhadap perubahan ekonomi. Tahun 2023 mencatat kenaikan yang signifikan, menunjukkan stabilitas dan adaptabilitas sektor terhadap kondisi yang lebih mapan. Secara keseluruhan, evaluasi ini menggambarkan kemampuan sektor pertanian untuk beradaptasi dengan tantangan seperti dampak pandemi dan perubahan pasar, menghasilkan stabilitas dan perkembangan yang berdampak positif pada ekonomi dan lingkungan secara keseluruhan.

Produksi perikanan tangkap adalah produksi perikanan yang dihasilkan oleh kegiatan penangkapan ikan baik di perairan laut maupun di perairan umum (Danau Limboto). Produksi perikanan tangkap merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan dan nilai tukar Nelayan (NTN). Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2022 sebesar 130.916 Ton. Pada periode Januari 2019 – Desember 2023, NTN Provinsi Gorontalo tertinggi terjadi pada Februari 2019 sebesar 107,36 dan terendah terjadi pada November 2020 sebesar 90,24.

Nilai Tukar Nelayan dan pembudidaya (NTN-P) adalah nilai angka perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan/pembudidaya dengan indeks harga yang dibayar nelayan/pembudidaya yang dinyatakan dalam persentase. Indeks yang diterima adalah indeks harga yang menunjukan perkembangan harga produsen atas hasil produksi nelayan/ pembudidaya. Sedangkan indeks yang dibayar nelayan/pembudidaya adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi perikanan. NTN-P (Nilai Tukar Nelayan Pembudidaya). Pada periode Januari 2019 – Desember 2023, NTN-P Provinsi Gorontalo tertinggi terjadi pada Februari 2019 sebesar 100,94 dan terendah terjadi pada November 2020 sebesar 90,80.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan di Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2022 sebesar 76.529,34 ha. Kawasan konservasi perairan daerah yang turut menjadi pengembangan Potensi wisata bahari di wilayah Perairan Laut Sulawesi & Teluk Tomini antara lain : Olele, Leato, Botubarani (Lokasi Hiu Paus), Ex Kurenai, Pulau Mohupomba Daa, Pulau Monduli, Pulau Bitila, Pulau Olinggobe, Torosiaje, Pulau Bungkil, Pulau Dokokayu Daa, Pulau Huha, Pulau Lampu, Pulau Mohinggito, Pulau Ponelo, Pulau Saronde, Pulau Bogisa, Pulau Dudepo dan Pulau Raja.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Provinsi Gorontalo hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,13 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3-4 orang penganggur. Selama lima tahun terakhir, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2022 dan sedikit meningkat hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami kenaikan sebesar 0,07 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Grafik 2.14
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo dan Nasional
(Agustus 2020 – Agustus 2024)

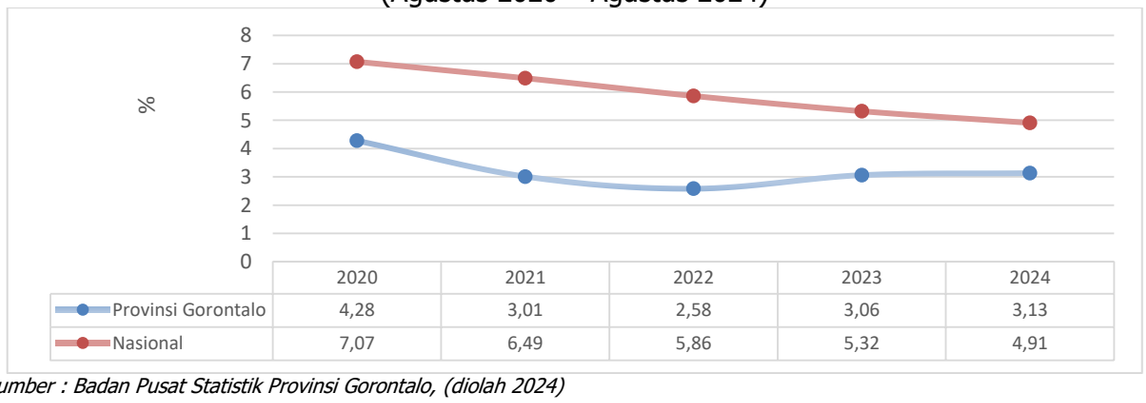

	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Gorontalo	4,28	3,01	2,58	3,06	3,13
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, (diolah 2024)

Secara tren capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo selalu berada pada posisi di bawah nasional sehingga memberikan kontribusi positif dalam pencapaian indikator ketenagakerjaan secara nasional. Hal ini disebabkan antara lain jumlah penyerapan tenaga kerja yang berada pada sektor pertanian yang masih cukup tinggi mengingat PDRB Provinsi Gorontalo didominasi oleh Lapangan Usaha dari sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang sampai tahun 2024 pada angka 37,29%. Yang perlu menjadi perhatian adalah dengan rendahnya angka pengangguran belum memberikan kontribusi signifikan pada angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Data menunjukkan capaian angka persentase kemiskinan pada 13,87% dan Provinsi Gorontalo berada pada 10 daerah dengan peringkat terbawah. Hal ini berarti bahwa dengan banyaknya angkatan kerja yang bekerja belum bisa memberikan pendapatan yang cukup dan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang bekerja masih relatif rendah, yang dapat disebabkan karena tingkat produktivitas tenaga kerja di Provinsi Gorontalo yang juga cenderung masih rendah.

Dari seluruh penduduk berkerja pada Agustus 2024, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 35,54 persen, diikuti status berusaha sendiri (24,89 persen), sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar, yaitu sebesar 3,01 persen. Dibandingkan Agustus 2023, status pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah buruh/karyawan/pegawai sebesar 1,67 persen poin. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar terdapat pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 1,45 persen poin.

Grafik 2.15
Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2022 – Agustus 2024

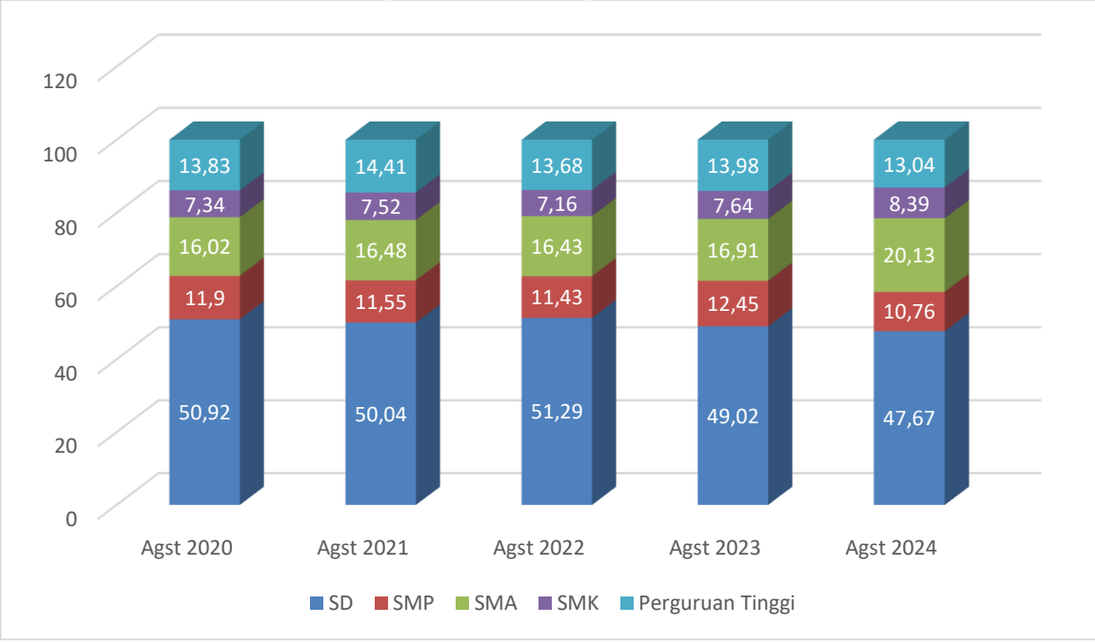

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, (diolah 2024)

Gambar di atas menunjukkan nilai TPT menurut tingkat Pendidikan yang ditamatkan, secara garis besar bahwa TPT di Provinsi Gorontalo didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD) yaitu sebesar 47,67 persen. Diikuti oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 20,13 persen, Perguruan Tinggi sebesar 13,04 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 10,76 persen, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 8,39 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022 dan Agustus 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa mereka yang berpendidikan lebih rendah cenderung untuk mau menerima pekerjaan apa saja, sedangkan untuk yang berpendidikan lebih tinggi cenderung untuk memilih pekerjaan yang lebih sesuai (cenderung untuk memilih – milih jenis pekerjaan). Selain itu di Provinsi Gorontalo belum tersedia banyak industri atau jenis usaha yang mampu untuk langsung menyerap lulusan SMA / SMK terutama dengan bidang keahlian spesifik yang dihasilkan oleh lulusan pada tingkat Pendidikan Menengah.

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo terus mengalami kemajuan. Selama 2020–2024, IPM Provinsi Gorontalo rata-rata meningkat sebesar 0,89 persen per tahun, dari 69,51 pada tahun 2020 menjadi 72,01 pada tahun 2024.

Grafik 2.16

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo dan Nasional tahun 2020-2024

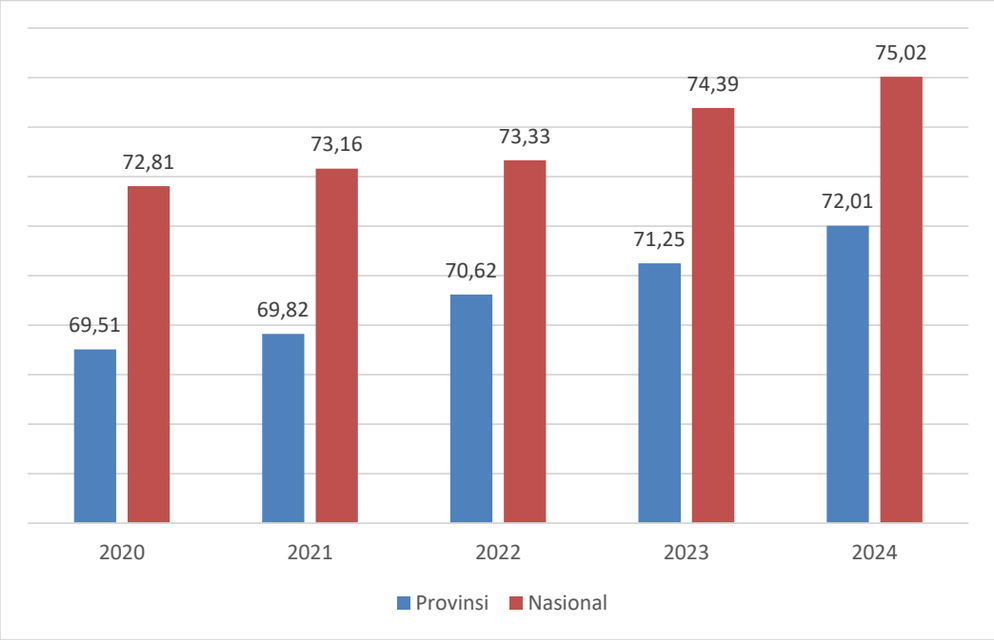

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dalam kurun waktu tersebut IPM Provinsi Gorontalo rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan tersebut relatif lebih cepat dibandingkan rata-rata IPM Indonesia yang tumbuh sebesar 0,75 persen per tahun. Pertumbuhan IPM Gorontalo pada periode 2023-2024, yaitu mencapai 1,07 persen. Sementara pada IPM Indonesia, pertumbuhan pada periode 2023-2024 sebesar 0,85 persen. Meskipun secara rata-rata pertumbuhan IPM Gorontalo cenderung lebih cepat dibandingkan nasional, namun secara level, IPM Gorontalo masih di bawah IPM Indonesia. Gorontalo masuk ke dalam kategori IPM "TINGGI" (70 ≤ IPM < 80) bersama dengan 30 provinsi lainnya di Indonesia.

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 4,25 persen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 2,35 persen. Sementara itu, pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir sedikit melambat dari 0,40 persen menjadi 0,33 persen. Demikian juga pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) melambat dari 0,30 persen menjadi 0,08 persen.

Tabel 2.12
IPM Provinsi Se-Sulawesi Tahun 2020 - 2024

Propinsi Se-Sulawesi	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	73,67	74,03	74,52	75,04	75,03
Sulawesi Selatan	73,08	73,38	73,96	74,60	74,05
Sulawesi Tenggara	71,61	71,82	72,38	72,94	73,48
Sulawesi Tengah	70,31	70,54	71,01	71,66	71,56
Gorontalo	**69,51**	**69,82**	**70,62**	**71,25**	**72,01**
Sulawesi Barat	68,40	68,64	69,19	69,80	68,20

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Capaian IPM Provinsi Gorontalo tahun 2024 meningkat dengan dimensi Angka Harapan Hidup Saat Lahir di Gorontalo mencapai 70,73 tahun. Ini berarti bahwa bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 70,73 tahun. Secara rata-rata, penduduk Gorontalo usia 25 tahun ke atas meningkat 0,19 tahun dari 8,10 tahun menjadi 8,29 tahun pada tahun 2024 sudah menempuh 8,29 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas II). Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,17 tahun atau setara dengan Diploma I. Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Provinsi Gorontalo mencapai 11,54 juta rupiah per tahun. Capaian ini meningkat 470 ribu rupiah atau 4,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 3,39 persen per tahun.

Tabel 2.13
Perkembangan Dimensi Penyusun IPM Provinsi Gorontalo dan Nasional
Tahun 2020-2024

Dimensi/ Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
GORONTALO						
Umur Panjang dan hidup sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	69,83	69,93	70,22	70,50	70,73
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,08	13,11	13,12	13,16	13,17
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,82	7,90	8,02	8,10	8,29
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Rill per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah		10.157	10.687	11.069	11.539
NASIONAL						
Umur Panjang dan hidup sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,37	73,46	73,70	73,93	74,15
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Rill per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2024

Capaian dimensi IPM Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024 masih berada dibawah rata-rata capaian nasional. Dari dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, indikator Usia Harapan Hidup tahun 2024 sebesar 70,73 tahun sedangkan capaian nasional adalah 74,15 tahun. Dimensi pengetahuan, capaian indikator HLS Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebesar 13,17 tahun dan RLS 8,29 tahun. Adapun capaian nasional yaitu HLS sebesar 13,21 tahun dan RLS sebesar 8,85 tahun. Capaian Dimensi Standar Hidup Layak Provinsi Gorontalo, dengan indikator Pengeluaran Riil per

Kapita tahun 2024 sebesar 11.539 ribu rupiah, berada dibawah capaian Nasional yang mencapai 12.341 ribu rupiah. Jika dilihat rata-rata pertumbuhan capaian indikator penyusun IPM Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024, pertumbuhan terbesar pada capaian indikator pengeluaran riil perkapita. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendorong peningkatan kualitas SDM dan terbukanya lapangan kerja.

Pada tahun 2024, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 68,83 (Kab. Gorontalo Utara) hingga 79,18 (Kota Gorontalo). Pada tahun 2024, status pembangunan manusia di Kabupaten Pohuwato meningkat dari "sedang" menjadi "tinggi", dengan capaian IPM sebesar 70,19. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah wilayah berstatus pembangunan manusia "tinggi" (70 ≤ IPM < 80) menjadi sebanyak 4, berstatus "sedang" (60 ≤ IPM < 70) sebanyak 2.

Gambar 2.14
Status IPM Kab/Kota se-Province Gorontalo tahun 2024

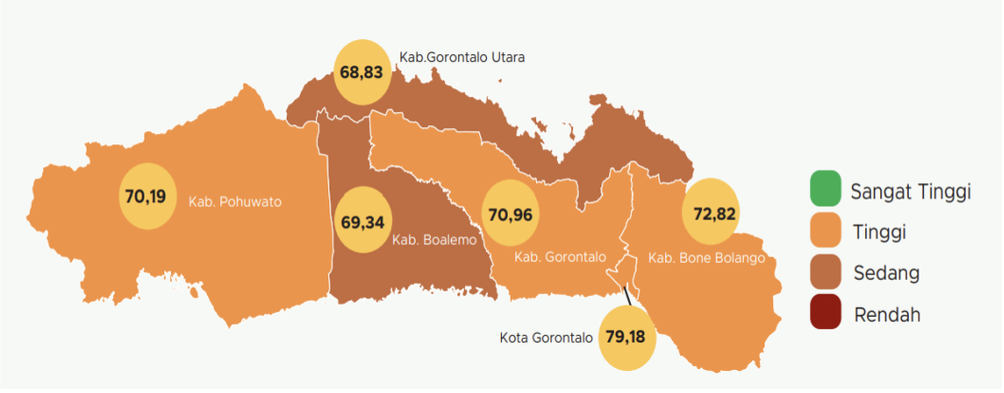

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2024

c. Keseteraan Gender (IPG, IDG, IKG)

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo sejak Provinsi ini resmi berdiri. Perempuan merupakan salah satu unsur yang menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan, sehingga kondisi dan kualitas perempuan menjadi hal penting untuk ditingkatkan.

Kondisi dan kualitas Perempuan ditunjukkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Kedua indikator ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren positif. Sampai dengan tahun 2023 IPG Provinsi Gorontalo berada pada angka 88,25. Sementara IDG Provinsi Gorontalo pada tahun yang sama sebesar 71,11.

Untuk mengukur perkembangan pencapaian kesetaraan, juga digunakan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG adalah ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian Pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dengan

laki-laki (Bappenas, 2023). Terdapat tiga dimensi pembentuk IKG, yaitu dimensi Kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja.

Secara nasional, IKG Provinsi Gorontalo lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini secara konsisten, dimana IKG Provinsi Gorontalo lebih rendah dan terus menunjukkan penurunan sejak tahun 2019. IKG tahun 2023 sebesar 0,391.

Kinerja yang meningkat ini dikontribusi oleh dimensi pemberdayaan yang menunjukkan peningkatan persentase perempuan berpendidikan SMA ke atas. Selain itu peningkatan ibu hamil 15-49 yang melahirkan di fasiltas kesehatan serta TPAK Perempuan. Namun yang masih perlu perhatian pada peningkatan proporsi perempuan yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun.

Grafik 2.18

Indeks Ketimpangan Gender Nasional dan Provinsi Gorontalo 2019-2023

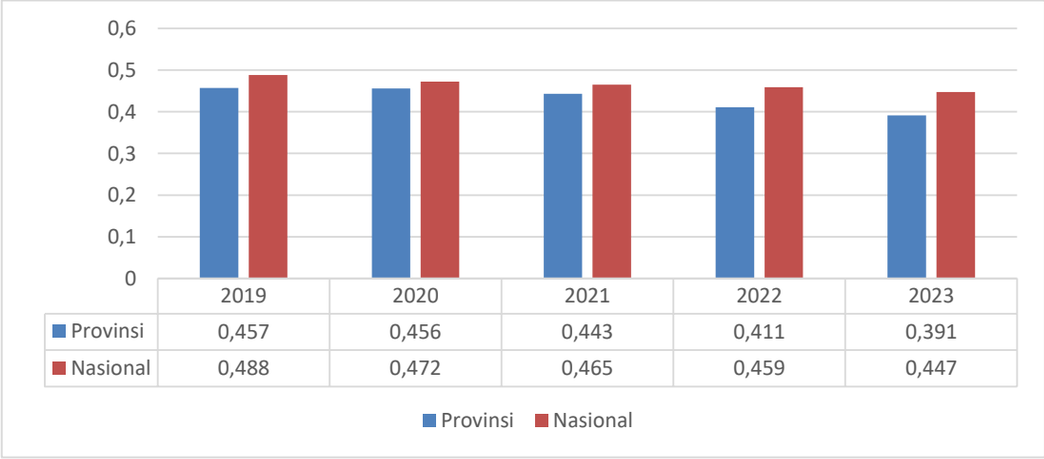

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Secara regional, untuk tahun 2022 nilai Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Gorontalo termasuk baik, yaitu kedua yang terendah setelah Sulawesi Selatan sebesar 0,411. Bila dilihat di wilayah kabupaten dan kota, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki poin paling baik yaitu 0,226 sementara yang tertinggi adalah Kabupaten Bone Bolango dengan nilai 0,523.

Tabel 2.20

Indeks Ketimpangan Gender Regional Sulawesi 2019-2023

Provinsi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Utara	0,453	0,431	0,439	0,444	0,422
Sulawesi Tengah	0,518	0,520	0,497	0,477	0,469
Sulawesi Selatan	0,460	0,427	0,410	0,390	0,366
Sulawesi Tenggara	0,565	0,559	0,554	0,490	0,491
Gorontalo	0,457	0,456	0,443	0,411	0,411
Sulawesi Barat	0,554	0,543	0,543	0,510	0,494

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo. Penduduk usia kerja Provinsi Gorontalo pada Agustus 2024 sebanyak 932.926 orang,

naik sebanyak 12.653 orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 652.588 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 280.338 orang.

Komposisi angkatan kerja Provinsi Gorontalo pada Agustus 2024 terdiri dari 632.184 orang penduduk bekerja dan 20.404 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 1.163 orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 663 orang, sementara pengangguran bertambah sebanyak 500 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Gorontalo mengalami fluktuasi sejak Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2024. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 69,95 persen, turun 0,84 persen poin dibanding Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 84,50 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 55,23 persen. Ini mengindikasikan bahwa terjadi kesenjangan partisipasi perempuan di lapangan kerja. Faktor penyebab kesenjangan TPAK adalah budaya patriarki yang masih sangat besar dalam masyarakat kita serta kondisi sosial ekonomi Masyarakat.

Tabel 2.
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020-Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Agst 2023-Agst 2024	
	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Persen
Penduduk Usia Kerja (PUK)	883.318	893.745	905.361	914.951	920.273	12.653	1.37
Angkatan Kerja	595.223	593.973	596.968	630.534	651.425	1.163	0.18
- Bekerja	572.841	568.563	579.009	614.250	631.521	663	0.10
- Pengangguran	22.382	25.410	17.959	16.284	19.904	500	2.51
Bukan Angkatan Kerja	288.095	299.772	308.393	284.417	268.848	11.490	4.27
	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen Poin
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,38	66.46	65.94	68.91	70.79	-0.835	-0.835
- Laki-laki	84,77	83.02	81.60	85.30	85.34	-0.841	-0.841
- Perempuan	50.03	49.95	50.41	52.64	56.07	-0.842	-0.842

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, .

Tantangan dalam sektor ketenagakerjaan adalah Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo masih rendah, masih terdapat Ketidaksesuaian antara kebutuhan industri terhadap tenaga kerja dengan pendidikan dan pelatihan, rendahnya cakupan angkatan kerja yang memperoleh pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan, pengukuran produktivitas ketenagakerjaan belum dilakukan secara maksimal, persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan masih rendah.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian dalam upaya peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Pendidikan sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar beroleh pengaturan dalam UU 23 Tahun 2014 yang membagi kewenangan berasarkan jenjang pendidikan, dimana intervensi pemerintah Provinsi berada pada jenjang pendidikan menengah dan khusus (SMA, SMK, dan SLB). Pembangunan pendidikan Provinsi Gorontalo telah menunjukkan upaya perbaikan, hal ini didorong dengan implementasi berbagai kebijakan dari perbaikan kualitas dan mutu layanan pendidikan.

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sedang mengakses fasilitas pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) tertinggi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 terdapat pada kelompok umur 7-12 tahun yang merupakan kelompok umur pada jenjang SD/sederajat sebesar 98,79 persen yang artinya 99 anak sedang menjalani pendidikan.

Grafik 2.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Gorontalo
menurut kelompok umur tahun 2024

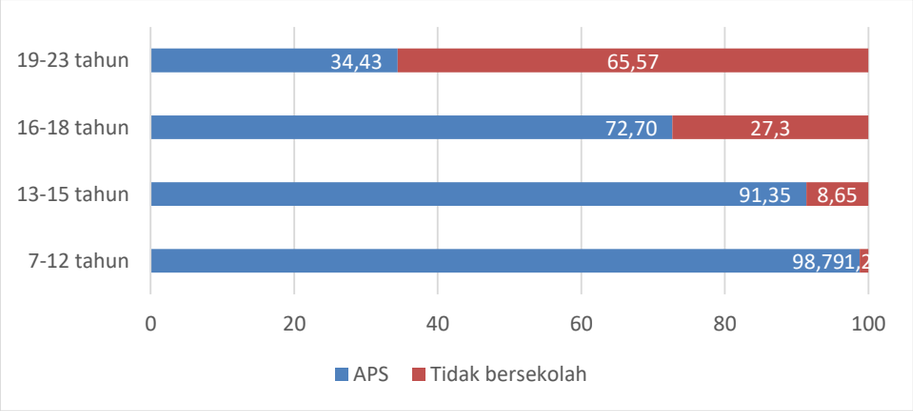

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Grafik diatas menunjukkan bahwa semakin meningkat kelompok umur sesuai jenjang sekolah, maka APS semakin rendah. Artinya tidak semua penduduk usia sekolah melanjutkan jenjang Pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Pada kelompok 7-12 tahun masih terdapat 1,21 persen penduduk yang tidak bersekolah dan pada kelompok 13-15 tahun terdapat 8,65 persen penduduk yang tidak bersekolah. Perbedaan terbesar terjadi pada kelompok umur 19-23 tahun yang bersesuaian dengan jenjang perguruan tinggi.

Berdasarkan rapor mutu Pendidikan tahun 2023, APS penyandang disabilitas pada kelompok umur 4-18 tahun sebanyak 33,93%.

Partisipasi penduduk dalam Pendidikan tinggi dapat dipengaruhi oleh banyak factor seperti ketersediaan infrastruktur perguruan tinggi, baik dari sisi jumlah maupun jarak, factor ekonomi dan biaya yang relative tinggi, serta masih adanya anggapan bahwa Pendidikan hingga Tingkat menengah atas sudah cukup untuk mencari kerja.

Grafik 2.22
Jumlah anak tidak bersekolah karena *Drop Out* (DO) per wilayah, Tahun 2024

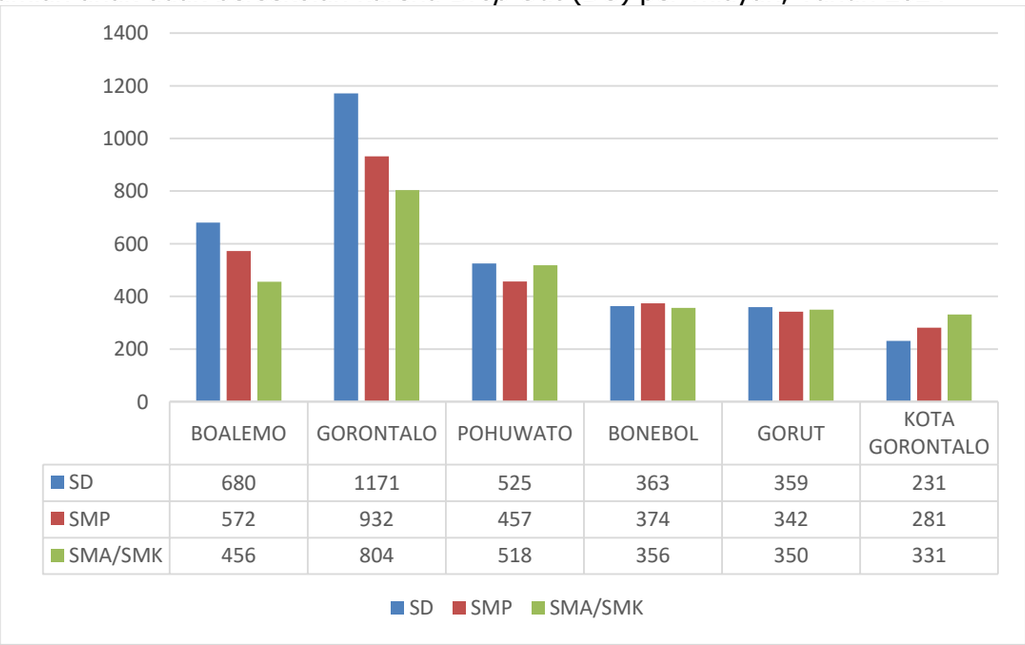

	BOALEMO	GORONTALO	POHUWATO	BONEBOL	GORUT	KOTA GORONTALO
SD	680	1171	525	363	359	231
SMP	572	932	457	374	342	281
SMA/SMK	456	804	518	356	350	331

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Grafik 2.23
Jumlah anak tidak bersekolah karena lulus tidak melanjutkan, Tahun 2024

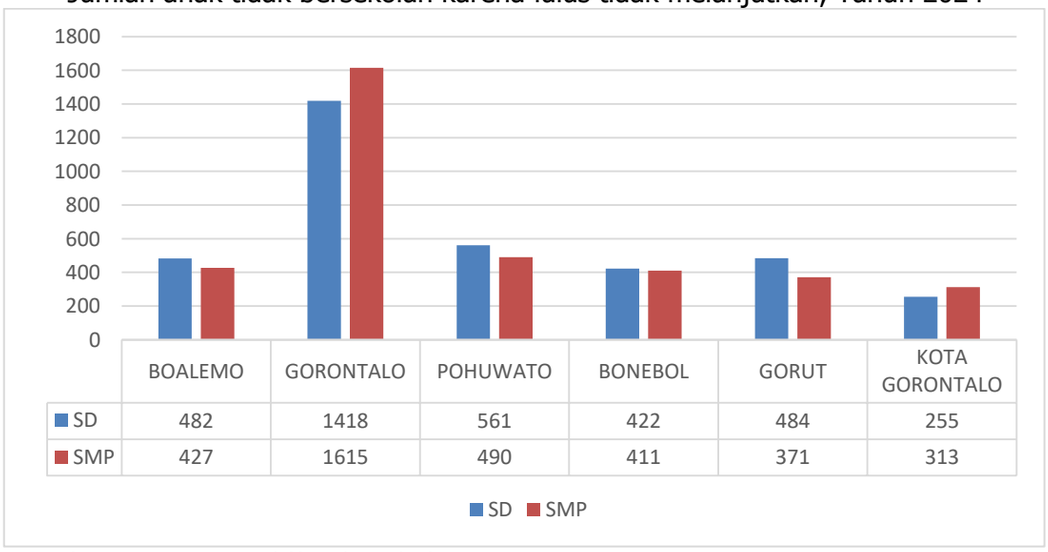

	BOALEMO	GORONTALO	POHUWATO	BONEBOL	GORUT	KOTA GORONTALO
SD	482	1418	561	422	484	255
SMP	427	1615	490	411	371	313

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Grafik 2.24
Data anak tidak sekolah karena belum pernah sekolah, Tahun 2024

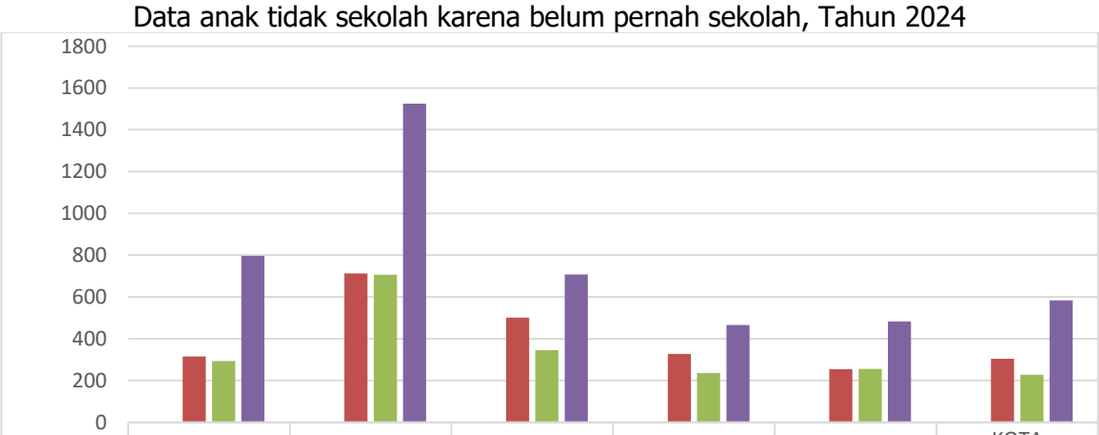

	BOALEMO	GORONTALO	POHUWATO	BONEBOL	GORUT	KOTA GORONTALO
< 7	0	0	0	0	0	0
7 - 12	315	712	501	327	255	304
13 - 15	293	706	345	236	256	228
> 15	796	1525	707	466	483	584

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo merupakan penyumbang terbesar anak tidak sekolah baik karena DO, tidak melanjutkan sekolah maupun tidak sekolah karena belum pernah bersekolah.

2. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Secara umum, APK digunakan sebagai indicator yang paling sederhana untuk mengukur keberhasilan program Pembangunan Pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam Pendidikan. Sedangkan APM menunjukkan partisipasi Pendidikan penduduk pada Tingkat tertentu yang sesuai dengan umurnya. APM juga dapat melihat penduduk umur sekolah yang bersekolah tepat waktu. Bila dilihat APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk diluar umur sekolah pada jenjang Pendidikan yang bersangkutan.

Tabel.2.21
APK dan APM Provinsi Gorontalo
menurut jenjang Pendidikan (persen) tahun 2024

GORONTALO	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat
APK	105,52	82,15	89,80
APM	98,20	72,51	61,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

Bila disandingkan dengan APK, selisih antara APK dan APM tersebut menunjukkan besaran penyimpangan yang terjadi terhadap batasan usia sekolah pada jenjang yang semestinya (proporsi siswa yang tertinggal atau terlalu cepat bersekolah).

Secara total, hanya APK SD/sederajat yang telah melewati target nasional tahun 2024 dengan capaian 105,52 persen. Sementara itu, APK SMP/sederajat Provinsi Gorontalo baru

mencapai 82,15 persen, sedangkan APK SMA/sederajat Provinsi Gorontalo baru sebesar 89,80 persen. APK jenjang perguruan tinggi hampir mencapai target nasional sebesar 45% ditahun 2035 dengan capaian 36,23 persen.

Bila dilihat, APM semua jenjang pendidikan, mulai dari SD/sederajat sampai dengan Perguruan Tinggi, belum mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berumur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Nilai APM dari SD/sederajat sampai dengan Perguruan Tinggi selalu menurun tiap jenjangnya menunjukan setiap tahunnya jumlah anak dengan usia yang sesuai yang bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi selalu berkurang.

Grafik 2.25
Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki Provinsi Gorontalo, 2023

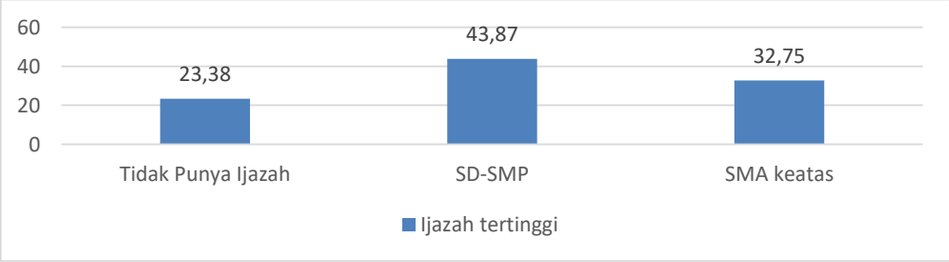

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Hal tersebut juga dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat. Tahun 2023 persentase tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Provinsi Gorontalo terbanyak berada pada kategori SMP ke bawah, yaitu sebesar 76,62 persen. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah masih memiliki porsi yang cukup besar yaitu 23,38 persen.

3. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah Provinsi Gorontalo pada Tahun 2024 telah mencapai 13,17 Tahun yang memiliki arti bahwa anak-anak usia 7 tahun di Gorontalo berpeluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Diploma I. Peningkatan harapan lama sekolah tersebut dapat mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan partisipasi sekolah di Gorontalo yang artinya bahwa semakin banyak penduduk Gorontalo yang bersekolah.

Tabel 2.
Harapan Lama Sekolah Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024

Wilayah	Harapan Lama Sekolah (tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Boalemo	12,44	12,45	12,46	12,48	12,49
Gorontalo	13,17	13,18	13,19	13,21	13,22
Pohuwato	12,37	12,38	12,39	12,46	12,48
Bone Bolango	13,57	13,65	13,66	13,67	13,69
Gorontalo Utara	12,45	12,46	12,47	12,49	12,50
Kota Gorontalo	14,34	14,50	14,57	14,58	14,59

Provinsi Gorontalo	13,08	13,11	13,12	13,16	**13,17**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

4. Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah *(mean years school/mys)* merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya.

Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat Pendidikan penduduk suatu wilayah.

Tabel 2.21
Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Boalemo	6,82	7,00	7,03	7,30	7,31
Gorontalo	7,13	7,30	7,61	7,79	7,95
Pohuwato	7,12	7,26	7,35	7,59	7,78
Bone Bolango	8,31	8,32	8,33	8,35	8,52
Gorontalo Utara	7,03	7,15	7,16	7,17	7,40
Kota Gorontalo	10,36	10,37	10,39	10,40	10,41
Provinsi Gorontalo	**7,82**	**7,90**	**8,02**	**8,10**	**8,29**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Pembangunan pendidikan Provinsi Gorontalo telah menunjukkan upaya perbaikan, hal ini didorong dengan implementasi berbagai kebijakan dari perbaikan kualitas dan mutu layanan pendidikan. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan rata-rata lama sekolah tahun 2024 mencapai 8,29 tahun. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata-rata lama sekolah di Provinsi Gorontalo, masih relatif sama selama 5 tahun terakhir. Rata-rata lama sekolah Provinsi Gorontalo berada pada kisaran 7-8 tahun.

5. Ketersediaan Sekolah, tenaga pendidik dan peserta didik

Keberlangsungan pendidikan tidak lepas dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, utamanya adalah ketersediaan sekolah yang memadai dan terjangkau. Berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo tahun 2024, Provinsi Gorontalo telah memiliki fasilitas pendidikan mulai dari Taman kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi namun yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi hanya pada jenjang SMA/SMK/MA dan SLB.

Tabel 2.24
Jumlah sekolah, guru dan murid SMA, SMK dan SLB
tahun 2024 menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

Kabupaten/ Kota	SMA			SMK			SLB		
	Jumlah Sekolah	Jumlah guru	Jumlah murid	Jumlah Sekolah	Jumlah guru	Jumlah murid	Jumlah Sekolah	Jumlah guru	Jumlah murid
Boalemo	20	580	10.104	15	425	35.569	1	33	121
Gorontalo	9	360	5.683	7	455	5.640	2	50	264
Pohuwato	12	286	3.840	10	237	1.959	2	41	144
Bone Bolango	8	248	3.504	12	226	1.786	1	30	98
Gorontalo Utara	11	219	3.943	6	227	1.609	1	14	295
Kota Gorontalo	11	260	4.203	9	111	682	1	28	81
Provinsi Gorontalo	**71**	**1.953**	**31.277**	**59**	**1.681**	**47.245**	**8**	**196**	**1.003**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, (diolah 2024)

Dari tabel diatas menunjukkan belum optimalnya penyelenggaraan layanan pendidikan terutama pada jenjang pendidikan khusus.

Pelaksanaan pendidikan ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, dan ruang kelas yang memadai. Tidak hanya masalah ketersediaan, aksesilibilitas juga menjadi fokus perhatian pembangunan dibidang pendidikan dalam rangka peningkatan angka partisipasi sekolah. Peningkatan kapasitas pendidikan, pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan khususnya didaerah terpencil dan sulit dijangkau penting dalam memperluas akses layanan pendidikan, agar semua anak didik dapat mengenyam pendidikan dan khususnya dapat memberantas buta huruf.

Grafik 2.26
Kondisi Ruang Kelas di Provinsi Gorontalo tahun 2023

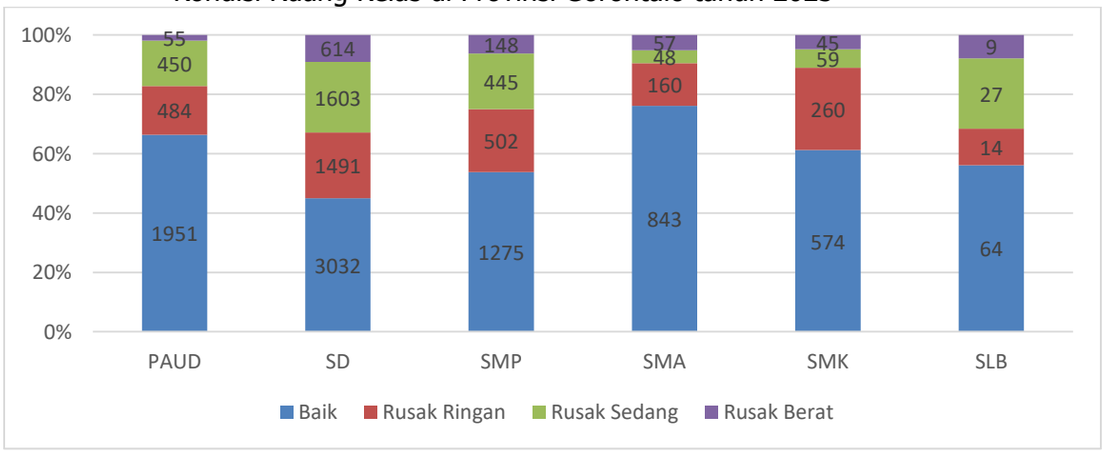

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa lebih dari separuh ruang kelas SD yang ada di Provinsi Gorontalo dalam kondisi rusak (ringan, sedang, berat). Sebanyak 3.708 ruang

kelas SD tidak dalam kondisi yang baik (kurang layak digunakan untuk proses belajar mengajar) dari 6.740 ruang kelas yang tersedia. Sedangkan ruang kelas untuk jenjang SMA sebagian besar dalam kondisi yang baik.

6. Rasio Guru

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Nomor 3 Tahun 2017, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar untuk SMA idealnya dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Sedangkan SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 peserta didik, dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk Provinsi Gorontalo, Tahun 2023 rasio siswa per kelas SMA/MA sebesar 1 : 31 dan untuk SMK rasio sekolah 1 : 20. Ini menunjukkan dalam satu kelas rata-rata berjumlah 31 peserta didik untuk SMA/MA, dan SMK rata-rata berjumlah 20 peserta didik. Data ini menunjukkan bahwa jumlah sarana sekolah dan kelas di Provinsi Gorontalo masih memenuhi dan sesuai standar yang ditetapkan.

7. Rasio Murid

Selain sarana dan prasarana, ketersediaan dan pemerataan distribusi guru penting menjadi perhatian. Ketersediaan guru juga menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Data Neraca Pendidikan Daerah tahun 2023 sebanyak 2.006 pendidik guru SMA, 1.706 pendidik guru SMK dan sebanyak 363 tenaga didik SMA, 278 tenaga didik SMK yang tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, dengan perbandingan rasio guru per siswa SMA/MA tahun 2023 sebesar 1:31, sementara rasio guru per siswa SMK 1 : 19. Ketersediaan guru tidak hanya dilihat dari aspek kuantitasnya, melainkan yang menjadi fokus pemerintah provinsi adalah tingkat sebaran, dan tingkat kesejahteraan guru khususnya guru yang mengabdi di daerah sulit dijangkau, agar pelaksanaan pemerataan kualitas maupun layanan pendidikan juga dapat lebih maksimal.

Indikator keberhasilan pendidikan digambarkan dari capaian Indeks SPM Pendidikan, untuk Provinsi Gorontalo hasil rapor pendidikan 2023 menunjukkan capaian sebesar 62,23% atau kategori "Tuntas Muda". Berikut ini persentase capaian per indikator dalam raport mutu pendidikan.

Tabel 2.25
Persentase Capaian Indikator Rapor Mutu Pendidikan, tahun 2023

Indikator Prioritas	SMA umum	SMK Umum	SDLB	SMPLB	SMALB
Kemampuan Literasi	62.17	55.11	22.21	33.32	4.34
Kemampuan Numerasi	58.71	52.95	16.67	33.32	34.78
Penyerapan Lulusan SMK		73.16			
Kepuasan Dunia Kerja terhadap kompetensi lulusan		75.55			

Kualitas Pembelajaran	62.79	61.1	61.78	57.88	57.88
Iklim Keamanan Satpen	71.09	69.48	60.88	55.59	58.53
Iklim Kebhinekaan	73.95	71.79	65.43	59.21	62.64
Iklim Inklusivitas	55.75	54	50.64	49.46	51.31

Sumber : Raport Mutu Pendidikan , 2023

Berdasarkan data diatas beberapa indikator yang perlu beroleh perhatian antara lain: Kemampuan literasi dan numerasi khususnya pada jenjang pendidikan khusus, kualitas pembelajaran pada seluruh jenjang, iklim keamanan Satpen dan iklim kebhinekaan khususnya pada jenjang SMP LB dan SMA LB, Iklim Inklusivitas pada semua jenjang kecuali SMA Umum, Proporsi Guru Penggerak yang diangkat menjadi kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah serta Angka Partisipasi Sekolah jenjang pendidikan menengah dan khusus yang masih rendah.

b. Kesehatan

Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan sangat penting untuk memiliki kualitas yang baik. Sebagai upaya untuk mencapai hal tersebut, arah kebijakan sektor kesehatan diarahkan pada upaya promotif, preventif maupun kuratif melalui peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas, aspek kesehatan dasar, edukasi pencegahan, kesadaran lingkungan dan pola hidup sehat.

1. Usia Harapan Hidup

Secara umum tingkat keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi dapat dilihat dari peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam 5 tahun terakhir, Usia Harapan Hidup penduduk Provinsi Gorontalo menunjukkan trend peningkatan. Tahun 2020 sebesar 68,07 menjadi 69,09 tahun ditahun 2024. Peningkatan UHH ini menunjukkan semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Gorontalo.

Grafik 2.27
Usia Harapan Hidup Provinsi Gorontalo dan Nasional tahun 2024

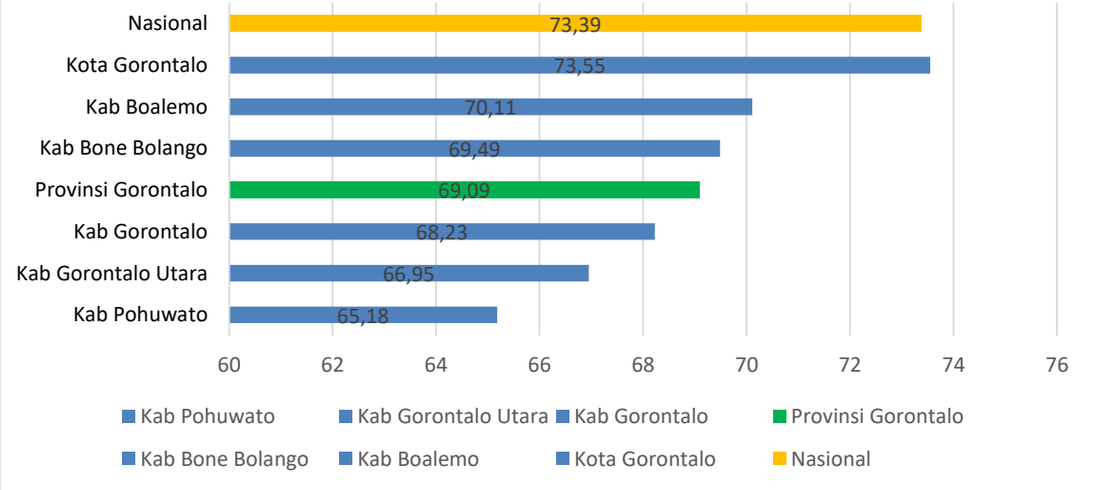

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, (diolah) 2024

Hingga tahun 2024 Usia Harapan Hidup di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan dan masih berada dibawah rata-rata Nasional. Terdapat 5 Kabupaten yang memiliki angka Usia Harapan Hidup dibawah angka Nasional yaitu Kab Boalemo, Kab Bone Bolango, Kab Gorontalo, Kab Gorontalo Utara dan Kab Pohuwato, 3 diantaranya berada dibawah angka Provinsi.

Faktor lain yang mempengaruhi Usia Harapan Hidup adalah faktor sosial ekonomi. Keterbatasan pendapatan dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab kemiskinan yang seringkali mengakibatkan keterbatasan akses terhadap layanan Kesehatan yang berkualitas dan makan yang bergizi.

2. Angka Kematian Ibu

Indikator untuk menetapkan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya adalah Angka Kematian Ibu (AKI)/*Maternal Mortality Ratio* (MMR). Apabila di suatu wilayah memiliki tingkat AKI yang cenderung tinggi maka dapat meningkatkan pembiayaan pemeliharaan sosial seperti biaya pelayanan kesehatan dan biaya yang disebabkan pendapatan yang menurun serta keproduktifan suatu keluarga. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat karena sensitivitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

Tingginya kematian maternal di suatu wilayah pada dasarnya menggambarkan derajat kesehatan masyarakat yang rendah dan dapat menyebabkan penurunan ekonomi dan sosial pada rumah tangga ibu maupun sekitarnya. Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu banyaknya kematian perempuan pada saat hamil, saat melahirkan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain (seperti terjatuh, kecelakaan, dll), per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu juga dapat menunjukkan tingkat kesehatan dan kualitas perempuan di suatu wilayah.

Grafik 2.28
Angka Kematian Ibu Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024

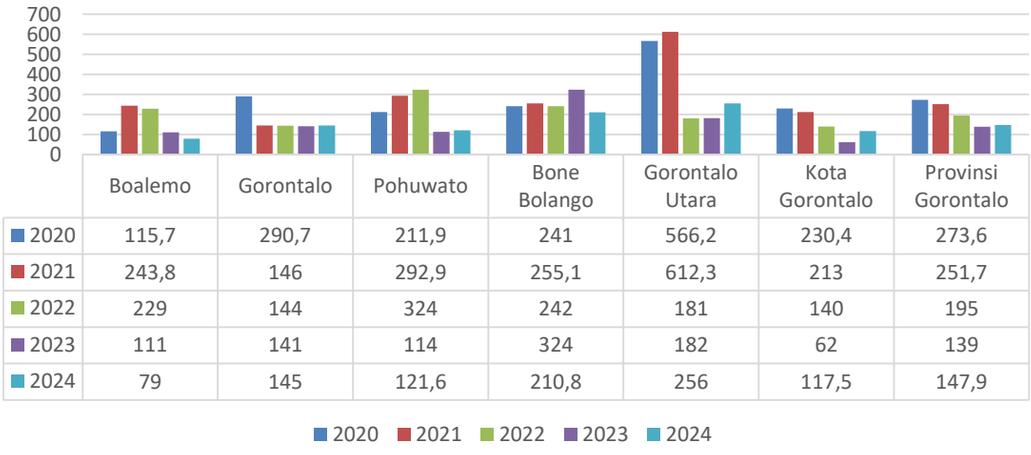

	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato	Bone Bolango	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo	Provinsi Gorontalo
2020	115,7	290,7	211,9	241	566,2	230,4	273,6
2021	243,8	146	292,9	255,1	612,3	213	251,7
2022	229	144	324	242	181	140	195
2023	111	141	114	324	182	62	139
2024	79	145	121,6	210,8	256	117,5	147,9

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2024

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) Provinsi Gorontalo dalam 5 tahun terakhir masih fluktuatif. Pada Tahun 2024, capaian AKI mencapai 147,9 naik dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 139 per 100.000 Kelahiran Hidup yang menunjukkan bahwa dalam 100.000 kelahiran hidup terdapat 139 ibu yang meninggal dunia. Angka ini masih berada di bawah angka rata-rata nasional, jika dibandingkan dengan angka kematian ibu nasional pada tahun 2024 yakni sebesar 183/100.000 KH. Target ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024.

Pada tingkat kabupaten/kota, dapat dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo Utara menjadi wilayah dengan AKI tertinggi, sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Boalemo. Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu masih tetap perdarahan selain hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan *post partum* juga komplikasi jantung dan paru yang masih menjadi masalah.

3. Angka Kematian Bayi

Angka Kematiah Bayi (AKB) merupakan indikator penting yang menggambarkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. AKB Provinsi Gorontalo tahun 2024 mencapai 10,4 per 1.000 KH di Provinsi Gorontalo naik 0,4% dari tahun sebelumnya. Gambaran Angka Kematian Bayi Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.29
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024

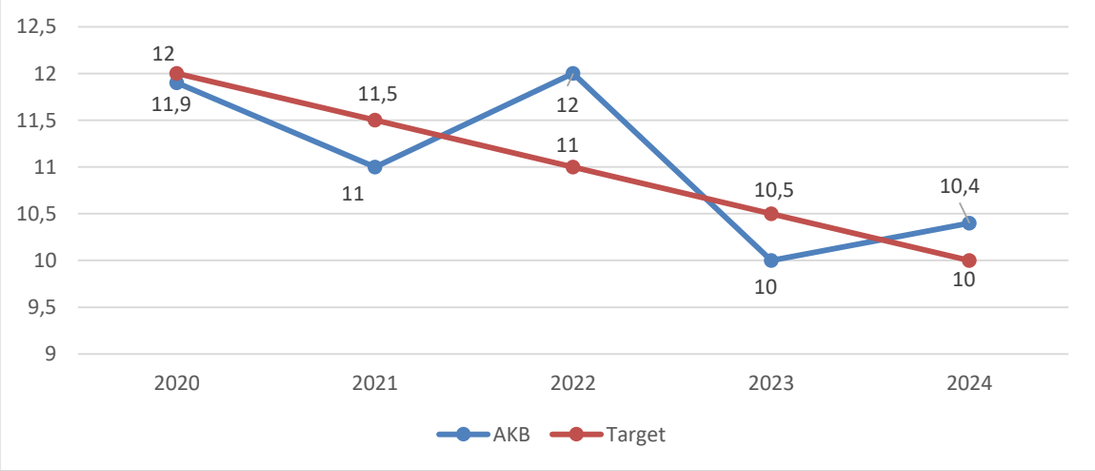

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2024

Intervensi langsung Pemerintah Provinsi dalam upaya menekan AKI, AKB dan percepatan penurunan stunting yaitu melalui Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu dengan Screening anemia remaja putri, Konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri, Pemeriksaan kehamilan, Konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil, Pemeberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK, Pemantauan tumbuh kembang balita, ASI Eksklusif, Pemberian makanan tambahan protein hewani bagi baduta, Tata laksana balita dengan masalah gizi, Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi serta Edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.

4. Prevalensi Stunting

Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

Grafik 2.30
Prevalensi Status Gizi Balita menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Gorontalo, SKI 2023

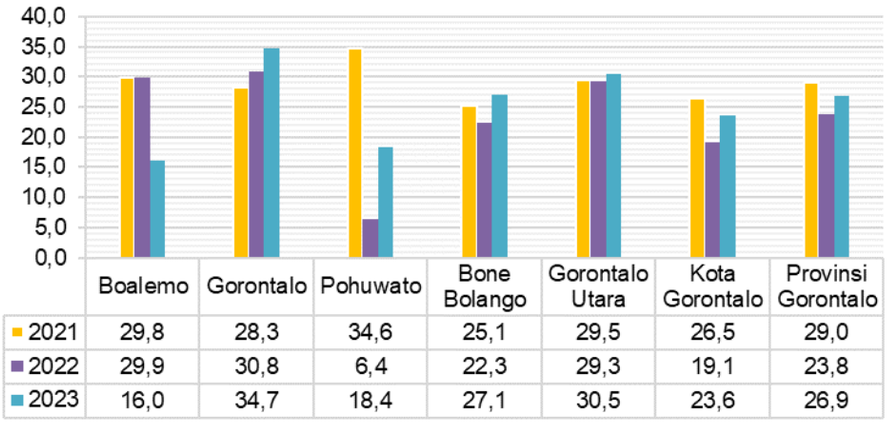

	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato	Bone Bolango	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo	Provinsi Gorontalo
2021	29,8	28,3	34,6	25,1	29,5	26,5	29,0
2022	29,9	30,8	6,4	22,3	29,3	19,1	23,8
2023	16,0	34,7	18,4	27,1	30,5	23,6	26,9

Sumber : Survei Kesehatan Indonesia, 2023

Angka prevelansi stunting Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 berdasarkan SKI sebesar 26,9%, mengalami kenaikan sebesar 3,1% dibandingkan tahun 2022 dan masih berada di atas angka rata-rata prevalensi nasional. Jika dilihat berdasarkan urutan per provinsi, Provinsi Gorontalo berada pada urutan 26 dari 34 provinsi. Jika dilihat pada tingkat kabupaten/kota, hanya Kabupaten Boalemo yang mengalami penurunan angka prevalensi stunting pada tahun 2023 dan menjadi wilayah dengan angka prevalensi terendah se-Provinsi Gorontalo, sedangkan Kabupaten Gorontalo menjadi wilayah dengan angka prevalensi tertinggi.

5. Insidensi Tuberculosis

Untuk kondisi penyakit tidak menular di Provinsi Gorontalo sesuai data Riskesdas, Provinsi Gorontalo menduduki peringkat 2 (dua) nasional penyakit jantung, sementara kanker di urutan ke-3 tertinggi nasional. Adapun penyakit ginjal nomor 4 nasional disusul stroke dan hipertensi urutan ke-6 nasional dan diabetes melitus di urutan ke 8. Bahkan persentase merokok pada penduduk Umur ≥ 15 Tahun sejak 2015 diatas rata-rata nasional. Hal ini tentunya memerlukan perhatian yang intens dari pemerintah dan masyarakat agar pertambahan usia harapan hidup dibarengi juga dengan kondisi 327Kesehatan yang baik.

Grafik 2.31

Jumlah kasus Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk di Provinsi Gorontalo, tahun 2019-2023

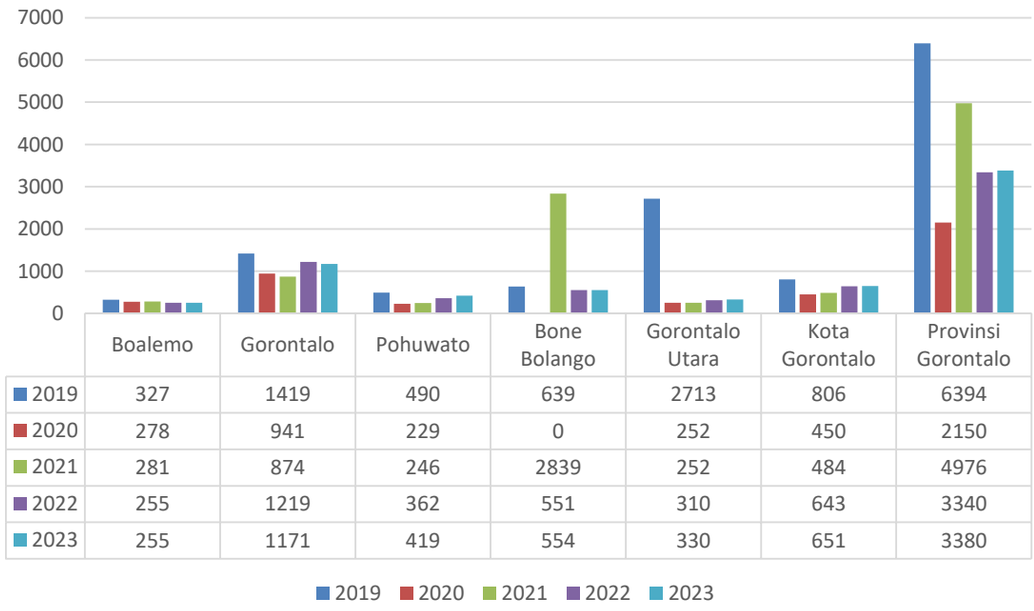

	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato	Bone Bolango	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo	Provinsi Gorontalo
2019	327	1419	490	639	2713	806	6394
2020	278	941	229	0	252	450	2150
2021	281	874	246	2839	252	484	4976
2022	255	1219	362	551	310	643	3340
2023	255	1171	419	554	330	651	3380

Sumber : Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2024

Angka Insidensi TB Provinsi Gorontalo dalam rentang waktu 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan, meskipun di tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari 531,7/100.000 penduduk di tahun 2019, menjadi 275,6/100.000 penduduk di tahun 2023. Artinya jumlah kasus Tuberculosis di Provinsi Gorontalo terus mengalami penurunan Dimana dari 100.000 penduduk, terdapat 275 penduduk yang mengalami tuberculosis. Jika dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota, Kabupaten Gorontalo menjadi wilayah dengan jumlah kasus tuberculosis tertinggi di Provinsi Gorontalo dengan jumlah 1.171 orang dan terendah di Kabupaten Boalemo dengan jumlah 255 orang.

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage)* di Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 67% sedangkan angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) berada diangka 92%. Tingginya angka insiden tuberkolosis di Gorontalo mengindikasikan masih tingginya risiko penduduk terjangkit tuberkulosis. Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi salah satu cara untuk mengurangi tuberkulosis di masyarakat.

6. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Salah satu program unggulan Provinsi Gorontalo adalah program kesehatan yang prima diantaranya meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta). Gorontalo meraih prestasi terbaik kelima secara nasional untuk kategori provinsi dengan jumlah kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh. Hingga Juli 2024 jumlah peserta JKN di Gorontalo sebanyak 1.201.443 jiwa atau mencapai 97,1 persen dari total penduduk Gorontalo.

Tabel 2.27
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Kabupaten/ Kota	2019 target UHC 95%		2020 target UHC 95%		2021 target UHC 95%		2022 target UHC 95%		2023 target UHC 95%		2024 target UHC 98%	
	Total Peserta		Total Peserta		Total Peserta		Total Peserta		Total Peserta		Total Peserta	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Boalemo	133.681	91	111.598	75,3	115.679	77,95	147.941	99,28	145.704	96,81	148.331	97,84
Gorontalo	369.167	92.8	329.812	82.2	363.415	89.77	364.376	89.86	404.817	97.45	407.598	97.45
Pohuwato	137.862	94.1	108.795	73.8	119.960	79.31	151.473	98.73	150.072	95.19	153.433	95.78
Bone Bolango	161.860	98.5	145.729	87.9	173.699	104.03	167.440	99.88	162.189	95.25	165.832	96.25
Gorontalo Utara	122.101	97.2	102.373	81.2	104.868	83.42	109.592	86.82	124.036	96.17	125.907	96.55
Kota Gorontalo	188.522	94.2	193.033	96.0	199.599	99.01	198.816	98.36	197.016	96.95	200.342	97.99
Provinsi Gorontalo	1.147.103	97.7	991.340	83.3	1.077.220	89.86	1.139.638	94.7	1.183.834	96.6	1.201.443	**97.1**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

7. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga merupakan ukuran yang baru di kembangkan pada tahun 2023 untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang kemudian menjadi ukuran juga di daerah dalam mendukung pencapaian nasional.

Capaian Indeks Kualitas Keluarga di Provinsi Gorontalo di tahun 2023 sebesar 78,08 naik dari tahun sebelumnya yaitu 77,03. Dari Capaian Indeks Kualitas Keluarga nasional tahun 2023 sebesar 77 mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu 76,08. Namun dalam capaian komponen IKK Provinsi Gorontalo terdapat 3 dimensi pembentuk IKK yang masih buruk yaitu: Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS), Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) dan Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB). Catatan terkait capaian 3 dimensi yang buruk adalah terkait PoU (Prevalensi Kurang Gizi) untuk semua umur mengalami peningkatan, rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi

mengalami penurunan, rumah tangga yang ada ART memiliki asuransi kesehatan mengalami penurunan, rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah mengalami peningkatan, rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja mengalami penurunan, rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir juga mengalami penurunan.

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Sementara itu, Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator lain yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat. AHH adalah perkiraan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh seseorang pada suatu populasi tertentu. Indikator ini dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat kematian dan kelahiran.

Gambar 2.23

Data Indeks Keluarga Sehat Provinsi Gorontalo tahun 2023

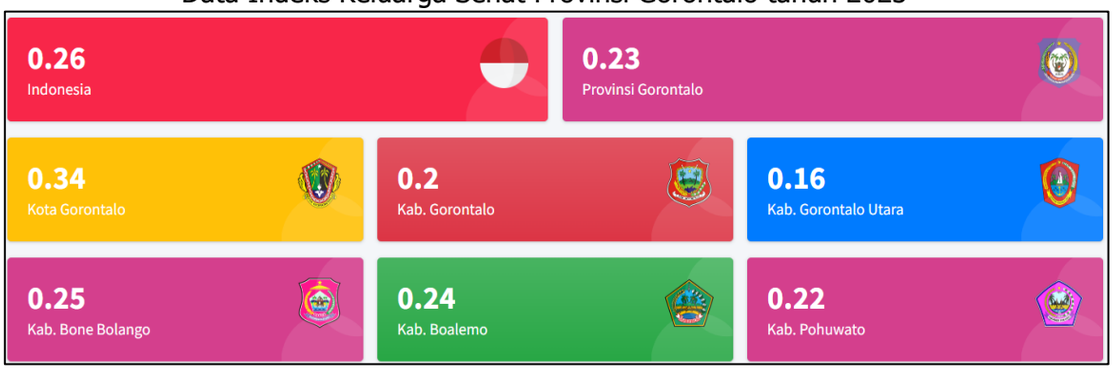

Sumber : Dashboard Data Indeks Keluarga Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2023

Berdasarkan data di atas capaian Indeks Keluarga Sehat Provinsi Gorontalo masih berada di bawah capaian nasional dengan nilai 0,23. Capaian tertinggi ditempati oleh Kota Gorontalo dengan skor 0,34 , Kab Bone Bolango 0,25 dan Kab Boalemo 0,24. Daerah yang masih di bawah peringkat Provinsi adalah Kab Gorontalo dengan skor 0,2, Kab Gorontalo Utara 0,16 dan Kab Pohuwato 0,22.

c. Pekerjaan Umum

1. Jalan dan Jembatan

Infrastruktur merupakan salah satu pilar dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan infrastruktur memiliki nilai elastisitas yang tinggi dalam perekonomian disuatu wilayah. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan provinsi Gorontalo. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dilakukan melalui pembangunan serta perbaikan jalan dan jembatan provinsi, serta pembangunan jalan dan jembatan strategis provinsi sebagai akses pusat-pusat perekonomian, akses pendidikan dan kesehatan, dan akses pemukiman.

Penyediaan akses jalan di Provinsi Gorontalo, dibagi berdasarkan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Panjang jalan Nasional di Provinsi Gorontalo yaitu sepanjang 748,60, dan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sepanjang 3.637,55 km. Sementara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 383/18/XI/2017 tanggal 27 November 2017, panjang ruas jalan provinsi 467,17 Km dan jalan strategis provinsi 176,4 Km. Terjadi perubahan dan penambahan ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi, dari sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 373/09/IX/2012 yaitu sepanjang 432,51 km. Penetapan status ruas jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer 2 (JKP-2), jalan kolektor primer 3 (JKP-3), dan jalan strategis provinsi dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang ditetapkan oleh Gubernur. Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebesar 66,12 persen, menurun dibanding tahun 2023 sebesar 70,23 persen. Sedangkan untuk kondisi mantap Jalan Nasional mencapai 95,27 persen dari total panjang jalan kewenangan Nasional di Provinsi Gorontalo 716,26 Km.

Grafik 2.32

Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Pekerjaan Provinsi Gorontalo, 2024

Kondisi jalan provinsi dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu kondisi Baik, Sedang, Rusak Ringan dan Rusak Berat. Tahun 2019 panjang jalan dengan kondisi baik yaitu sebesar 197,02 Km atau 42,17 persen. Selanjutnya tahun 2023 dari total panjang jalan kewenangan Provinsi sebesar 467 Km kondisi jalan baik meningkat mencapai 302,736 Km atau sebesar 64,72%.

Tabel 2.28

Panjang Jalan Provinsi Gorontalo berdasarkan

Kategori Jalan	Panjang Jalan KM (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
BAIK	185,47 Km (39,70%)	217,6 Km (46,58%)	256,2 Km (54,84%)	231,85 Km (49,63%)	302,36 Km (64,72%)
SEDANG	37,27 Km (7,98%)	36,46 Km (7,80%)	11,39 Km (2,44%)	48,90 Km (10,47%)	15,41 Km (3,30%)
RUSAK RINGAN	56,48 Km (12,09%)	101,66 Km (21,76%)	51,83 Km (11,09%)	29,69 Km (6,35%)	12,09 Km (2,59%)

RUSAK BERAT	187,95 Km (40,23%)	111,45 Km (23,86%)	147,75 Km (31,63%)	156,74 Km (33,55%)	137,31 Km (29,39%)

Sumber : Dinas Pekerjaan Provinsi Gorontalo, 2024

Jika dilihat dari rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan di Provinsi Gorontalo, setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah ruas jalan belum sebanding dengan tingkat peningkatan jumlah kendaraan yang setiap tahunnya meningkat rata-rata 0,12 persen pertahun.

2. Sumber Daya Air dan Irigasi

Ketersediaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi sangat mempengaruhi perkembangan sektor pertanian. Luas lahan sawah irigasi di Provinsi Gorontalo dibedakan berdasarkan kewenangan yang dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkat kewenangan, yaitu:

a) Kewenangan pusat dengan luas lahan sawah > 3.000 ha. Sampai dengan tahun 2022 sudah terdapat 4 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan pusat dengan total luas sebesar 22.371 Ha.
b) Kewenangan provinsi dengan luas lahan sawah antara 1.000 – 3.000 ha. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak 7 DI. Dengan total luasan sebesar 10.313 Ha.
c) Kewenangan kabupaten dengan luas lahan sawah < 1.000 ha. Total luas DI. Kewenangan Kabupaten sebesar 17. 892 Ha.

Lahan sawah terdiri dari lahan sawah irigasi dan lahan sawah non irigasi. Sebagian besar lahan sawah di Provinsi Gorontalo merupakan lahan sawah irigasi. Pada tahun 2019 luas sawah irigasi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 2.420 ha. Pada tahun 2023 luas lahan sawah di Provinsi Gorontalo sebesar 33.131 ha, yang terdiri dari luas sawah irigasi sebesar 25.572 Ha, dan luas sawah non irigasi sebesar 4.015 Ha.

3. Air Minum dan Sanitasi

Akses terhadap air minum dan pelayanan dasar merupakan prioritas nasional dan daerah, dan hal itu sangat erat kaitannya dengan isu pembangunan lain seperti kesehatan, kemiskinan, dan pembangunan manusia. Hingga tahun 2022 rumah tangga di Provinsi Gorontalo yang mendapatkan kriteria sanitasi dan air minum layak cenderung meningkat, meskipun masih di bawah target nasional. Walaupun akses terhadap layanan sumber air minum layak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun di Provinsi Gorontalo. Meskipun angka proyeksi pada tahun 2030 menyatakan bahwa akses terhadap sumber air minum layak sudah universal, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum aman dan sistem persediaan air perpipaan. Akses Air Minum Layak 100% pada tahun 2024 dan 2030. Akses terhadap air minum aman ditargetkan mencapai 15% pada tahun 2024 dan 43,15% pada tahun 2030. Sementara itu, akses terhadap sistem

persediaan air perpipaan ditargetkan mencapai 30,54% pada tahun 2024, dan 53,94% pada tahun 2030.

Tabel 2.
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Air Minum Layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2020-2024

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Boalemo	94,85	94,21	95,14	95,41	95,37
Gorontalo	95,56	95,11	96,80	94,81	96,20
Pohuwato	87,21	93,19	95,93	96,05	96,20
Bone Bolango	96,73	93,72	94,87	98,50	96,05
Gorontalo Utara	87,55	86,23	89,47	90,14	90,71
Kota Gorontalo	97,43	99,62	100	99,86	99,37
Provinsi Gorontalo	**94,16**	**94,57**	**96,16**	**96,00**	**96,13**

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2025

Jumlah rumah tangga dengan kriteria kelayakan air minum di Provinsi Gorontalo selama 2020-2024 meningkat dari 94,16% menjadi 96,13%. Namun cakupan dari cadangan air yang dikelola secara aman masih rendah. Jumlah rumah tangga dengan kriteria air minum aman 8,3% pada tahun 2023. Akses air minum perpipaan di 24,12% pada tahun 2023. PDAM merupakan satu-satunya perusahaan yang berperan dalam menyalurkan air bersih di Provinsi Gorontalo. Jumlah pelanggannya pun kian meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo. Upaya pemenuhan air bersih di Provinsi Gorontalo diupayakan melalui peningkatan kapasitas produksi air bersih, pemberdayaan dan pemanfaatan sumber bahan baku lainnya, serta pengoptimalisasian sistem distribusi air bersih khususnya di kawasan perkotaan. Pengembangan prasarana air bersih akan lebih difokuskan pada penambahan jaringan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sampai saat ini 3,84% dari target nasional belum terlayani jaringan air bersih di Provinsi Gorontalo yaitu dengan adanya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota (SPAM Regional Gorontalo Raya). Intervensi yang kuat, seperti penyediaan air minum, dapat berkontribusi sebesar 70% terhadap pencegahan stunting. Pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya ini merupakan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang untuk saat ini direncanakan melayani 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan pekerjaan pembangunan dilakukan 4 (empat) tahap. Pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya masih pada tahapan perencanan persiapan pembangunan berupa telah disusunnya dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (Rispam) dan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) air minum pada tahun 2022, tahapan selanjutnya adalah proses pengadaan tanah, sebagai upaya pencapaian pemerintah provinsi dalam Pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya.

Senada dengan akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak berkaitan erat dengan kesehatan dan lingkungan. Khususnya, kurangnya akses terhadap sanitasi layak akan menurunkan kualitas air dan berpengaruh terhadap meningkatkan prevalensi stunting pada anak-anak dengan koefisien korelasi sebesar 0,66 (Riskesdas, 2013). Selain akses terhadap sanitasi layak, akses terhadap sanitasi yang aman juga merupakan bagian dari agenda 2030. Akses terhadap sanitasi layak 90% pada tahun 2024 dan 100% pada tahun 2030. Akses terhadap sanitasi aman ditargetkan mencapai 20% dan menurunkan BABS hingga 0% pada tahun 2024 dan 53,71% pada tahun 2030.

Tabel 2.
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2020-2024

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Boalemo	63,19	68,82	74,62	69,91	73,11
Gorontalo	78,18	76,82	75,14	80,56	82,32
Pohuwato	66,03	76,20	78,32	82,42	82,04
Bone Bolango	77,22	73,57	76,75	78,15	79,99
Gorontalo Utara	71,80	79,03	81,80	81,37	84,07
Kota Gorontalo	87,61	92,9	92,09	94,48	93,89
Provinsi Gorontalo	**75,68**	**78,58**	**79,82**	**81,72**	**82,99**

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2025

Jumlah rumah tangga dengan kriteria kelayakan sanitasi di Provinsi Gorontalo cenderung meningkat pada tahun 2020 ke tahun 2024, yaitu dari 75,68% menjadi 82,99%. Sementara itu Ketersediaan sanitasi layak untuk memenuhi rumah sehat juga semakin meningkat karena kesadaran masyarakat untuk hidup sehat juga semakin tinggi. Untuk memenuhi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan kewenangannya berusaha menyediakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat. Sebagai upaya dalam pengelolaan dan pengembangan SPALD Regional, pada tahun 2023 telah dianggarkan Penyusunan Dokumen Rencana Induk SPALD Provinsi Gorontalo serta kegiatan koordinasi Bersama *stakeholder* terkait dan penguatan kelembagaan Pokja PKP.

d. Perumahan Rakyat dan Permukiman

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo, maka pertumbuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat juga akan mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini tentu menjadi suatu permasalahan pokok mendasar di kalangan masyarakat. Untuk menanggapi masalah tersebut tentu masyarakat berusaha memperbaiki kondisi permukimannya relatif besar. Akan tetapi karena berbagai keterbatasan dari tingkatan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan tanah serta Prasarana Sarana Umum (PSU) seringkali mengakibatkan kondisi permukiman yang tidak memenuhi syarat. Akibatnya di satu sisi

telah berkembang pusat-pusat kegiatan ekonomi namun di sisi lain pertumbuhan kawasan kumuh dan tidak layak huni juga semakin meningkat.

Dalam rangka penuntasan kawasan kumuh sebagaimana mendukung program pemerintah melalui program 100, 0, 100 (100 % akses air minum aman, 0 % kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak). Untuk menurunkan luasan kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo, ditangani melalui kegiatan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh seluas 26 Ha dari target 19 Ha Kawasan kumuh ditahun 2023 dengan beberapa program antaranya Pembangunan Rumah Plus Jamban, Advokasi Sosialisasi Hidup Bersih dan Sehat, Fasilitasi Pokja PKP dan Penanganan Fisik Kawasan Kumuh. Tahun 2023 luas Kawasan Kumuh di Provinsi Gorontalo direview kembali oleh masing-masing Kabupaten Kota sebagaimana SK yang ditetapkan yakni 459 Ha. Sehingga Rencana Pembangunan Daerah akan menangani 37 kawasan yang terdapat dalam SK bupati/walikota terbaru dengan luas total keseluruhan kawasan tersebut adalah 459 Ha. Saat ini tahun 2024 sedang dilakukan pemutakhiran SK kawasan kumuh dengan melihat intervensi penanganan di tahun – tahun sebelumnya, proses pemutakhiran sedang di verifikasi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Kementerian PUPR RI.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Negara dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjamin keamanan dan ketertiban. Semakin maju dan berkembangnya suatu wilayah, dan semakin terbukanya akses informasi maka tingkat kejahatan dimasyarakat semakin meningkat, sehingga hal ini menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan. Pemerintah hadir dalam memberikan jaminan kepada masyarakat agar dapat hidup aman dan nyaman, salah satunya diukur melalui seberapa besar penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk provinsi Gorontalo, Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya mencapai 51,72 persen di tahun 2020.

Pembangunan keamanan dan ketertiban juga diarahkan pada upaya untuk mendorong kemampuan aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk menjaga stabilitas daerah.

Tabel 2.29
Jumlah Kejahatan yang dilaporkan menurut Kepolisian Resort
di Provinsi Gorontalo, Tahun 2020-2024

Kepolisian Resort	Jumlah kejahatan yang dilaporkan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Polres Boalemo	269	235	267	252	341
Polres Gorontalo	780	563	557	549	503

Polres Pohuwato	401	338	356	441	403
Polres Bone Bolango	335	352	383	296	309
Polres Gorontalo Utara	147	638	197	203	211
Polres Kota Gorontalo	786	224	616	728	620
Polda Gorontalo	251	242	296	441	437
Provinsi Gorontalo	**2.969**	**2.592**	**2.672**	**2.910**	**2.824**

Sumber : Gorontalo Dalam Angka, BPS 2024

Berdasarkan data tahun 2020-2024, dapat dilihat bahwa jumlah kejadian kejahatan di Provinsi Gorontalo setiap tahun cenderung mengalami fluktuatif. Tahun 2024 sebanyak 2.824 kejahatan yang dilaporkan menurun dari tahun sebelumnya. Menurunnya jumlah kejadian kejahatan, berbanding lurus dengan menurunnya tingkat resiko kejahatan dari 240 tahun 2023 menjadi 230 per 100.000 penduduk di tahun 2024. Sedangkan capaian persentase penyelesaian tindak pidana pada rentang waktu 2020-2024, rata-rata persentase penyelesaian tindak pidana di Provinsi Gorontalo masih mulai meningkat yakni sebesar 74%. Jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sulawesi, jumlah kejadian kejahatan di Provinsi Gorontalo ditahun 2023 berada pada posisi ke-9 tertinggi setelah Sulawesi Tenggara.

Tingginya komitmen pemerintah dalam membangun demokrasi dan politik Indonesia harus didukung oleh data empirik yang dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Bahkan saat ini Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan salah satu indikator di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015-2030. Capaian IDI Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 79,71 berada diatas IDI Nasional sebesar 79,51 namun berada dibawah IDI Pusat sebesar 83,14. Capaian kinerja demokrasi Provinsi Gorontalo tersebut masih berada pada kategori sedang (berkisar antara 60-80). Sementara itu, IDI Provinsi Gorontalo tercatat berada di posisi ke-12 diantara 34 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil survei Indeks Kerukunan Umat Beragama pada periode 2020-2024 terjadi fluktuasi, tahun 2021 mencapai 71,9. Capaian ini menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara, dalam menjalankan agama, serta bekerja sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang terdiri dari dimensi toleransi, kesetaraan dan kerjasama.

f. Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha untuk mencapai tujuan pembangunan. Sasaran utama pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah meningkatnya perlindungan social bagi Masyarakat. Dalam upaya meningkatkan perlindungan social masyarakat Provinsi Gorontalo melaksanakan berbagai program kegiatan diantaranya melalui program perlindungan dan jaminan sosial, program pemberdayaan social dan program rehabilitasi sosial.

Dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dilakukan melalui Program perlindungan dan jaminan social melalui kegiatan pemberian bantuan sosial pangan kepada 451.196 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo di tahun 2024. Sedangakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha produktif melalui pemberian bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Upaya prefentif lainnya melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun, juga berupaya menjamin jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja. Mengambil hikmah dampak pandemi Covid-19 yang mengancam jiwa pekerja dan menghantam ekonomi pekerja, peran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yakni memberikan perlindungan kepada pekerja dengan nilai manfaat yang diterima dapat digunakan untuk melanjutkan kehidupan pekerja ataupun keluarganya. Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan harus terus memperluas cakupan kepesertaan untuk pekerja Indonesia, meningkatkan kecepatan dan akses pelayanan serta terus berinovasi untuk memberikan perlindungan yang maksimal sehingga meningkatkan kesiapan pekerja untuk menghadapi pasar kerja di masa depan serta mengangkat keluarga dari perangkap kemiskinan.

Tabel 2.30
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi

Kabupaten/Kota	Kepesertaan Aktif, Juni 2024				
	Potensi	Pencapaian	%	Sisa	%
Boalemo	53.249	20.162	37,86	33.087	62,14
Gorontalo	125.569	87.388	69,59	38.181	30,41
Pohuwato	64.811	32.172	49,64	32.639	50,36
Bone Bolango	102.316	66.054	64,56	36.262	35,44
Gorontalo Utara	38.088	12.834	33,70	25.254	66,30
Kota Gorontalo	82.335	45.521	55,29	36.814	44,71
Provinsi	**466.368**	**264.131**	**56,64**	**202.237**	**43,36**

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2024

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pekerja yang sudah menjadi peserta Jamsostek sebesar 264.131 jiwa dari 466.368 total pekerja yang menjadi potensi. Capaian ini menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan Jamsostek Provinsi Gorontalo baru berkisar 56,64% dan masih terdapat 43,36% pekerja yang belum menjadi peserta Jamsostek. Capaian ini juga masih cukup jauh dari target *Universal Coverage* Provinsi Gorontalo di tahun 2025 yakni sebesar 85%.

Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang diikuti Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Konteks

kesejahteraan sosial tersebut di atas juga menyiratkan bahwa hak-hak penyandang disabilitas untuk dapat hidup layak dan berpartisipasi dalam masyarakat dilindungi dan harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat. Penyandang disabilitas seperti halnya masyarakat lainnya yang berada dalam kondisi memerlukan bantuan dan dukungan, berhak mendapatkan layanan yang dapat di akses oleh mereka dengan mudah sebagai warga negara Indonesia.

Dampak disabilitas dapat menjadi sebuah fenomena yang kompleks dimana ketika kebutuhan individu dengan keterbatasan fungsi tidak dapat terakomodasi oleh lingkungannya (menjadi hambatan), kondisi ini akan menghambat partisipasi penyandang disabilitas. Tingkat partisipasi yang rendah memiliki implikasi terhadap angka kemiskinan yang selanjutnya dapat meningkatkan risiko penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan pemenuhan hak berupa pelayanan sosial untuk mengeliminasi hambatan agar penyandang disabilitas dapat memaksimalkan dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya serta dapat berpartisipasi di masyarakat.

Tabel 2.31
Persentase Penyandang Disabilitas yang bekerja di sektor Formal dan Informal

Kabupaten/ Kota	Jumlah disabilitas bekerja	Formal*	%	Informal*	%
Boalemo	1.240	368	29,7	872	70,32
Gorontalo	2.822	903	32,0	1.919	68,00
Pohuwato	1.032	307	29,7	725	70,25
Bone Bolango	929	245	26,4	684	73,63
Gorontalo Utara	862	234	27,1	628	72,85
Kota Gorontalo	680	259	38,1	421	61,91
Provinsi	**7.565**	**2.316**	**30,6**	**5.249**	**69,39**

Sumber: REGSOSEK (Analisis SEPAKAT), 2022
***Sektor Formal:** Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, Buruh/karyawan/pegawai swasta, PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/anggota legislatif
***Sektor Informal:** Berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, Pekerja bebas pertanian, Pekerja bebas non-pertanian, Pekerja keluarga/tidak dibayar

Sebanyak 69% penyandang disabilitas (1,37 juta orang) bekerja di sektor informal. Mayoritas pekerja difabel (penyandang disabilitas) bekerja di sektor informal karena kerap ditolak sektor formal lantaran latar belakang pendidikan mereka. Cukup banyak penyandang disabilitas yang bekerja di sektor pertanian dan pedesaaan, bekerja sendiri atau menjadi pekerja temporer, bahkan tidak dibayar. Penyandang disabilitas lebih banyak yang bekerja tidak jauh dari tempat bekerja, dan cukup banyak yang bekerja di rumah.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan mempunyai korelasi positif yang cukup erat terhadap suksesnya proses pembangunan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperlukan pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan

kualitas potensi tenaga kerja, diantaranya melalui penyediaan lapangan kerja, penciptaan usaha kecil dan menengah yang memberdayakan potensi daerah, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan di perusahaan pengguna, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembekalan keterampilan kerja, yang didukung dengan sistem Informasi Pasar kerja yang memadai, maka akan tercipta kesempatan kerja dan perluasannya. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka perlu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Dimana semakin tinggi pendidikan seseorang maka ia akan mampu menghasilkan pekerjaan yang lebih baik atau lebih produktif. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2024 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SMP ke bawah sebanyak 58,43% (47,67% pekerja berpendidikan SD atau belum/tidak tamat sekolah; 10,76% pekerja berpendidikan SMP sederajat). Kondisi seperti ini juga terjadi pada periode-periode sebelumnya di mana penduduk bekerja di Provinsi Gorontalo mayoritas mengenyam pendidikan SMP ke bawah. Namun demikian, persentase pekerja berpendidikan SMP kebawah menunjukan tren yang menurun menunjukan perbaikan kualitas pekerja di Gorontalo. Hal ini diikuti oleh peningkatan pekerja berpendidikan diatasnya. Serapan tenaga kerja pada jenjang pendidikan SMA dan SMK sebesar 20,13% dan 8,39%, dan 13,04% pekerja sudah menamatkan pendidikan jenjang diploma dan perguruan tinggi.

Untuk penjaminan hak-hak tenaga kerja, setiap perusahaan di daerah Provinsi Gorontalo diwajibkan untuk mengikuti asuransi Jamsostek, dan tunduk pada peraturan pemerintah daerah termasuk penentuan upah minimum provinsi (UMP). Upah Minimum Provinsi ditetapkan melalui SK SK Gubernur Gorontalo Nomor 446/32/XI/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Gorontalo. Dalam SK Penetapan UMP tersebut, menetapkan UMP Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebesar Rp 3.221.731 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.025.100.

Grafik 2.33
Perkembangan UMP Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024

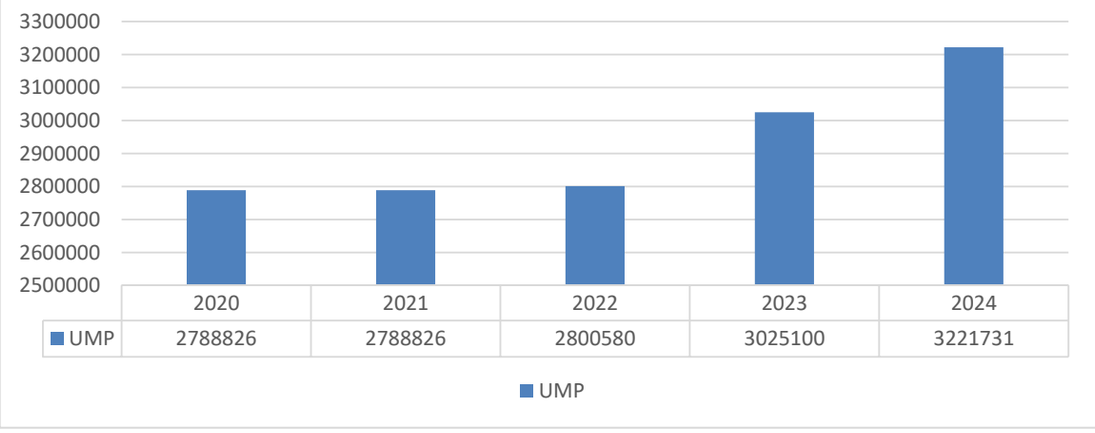

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, 2024

b. Perlindungan Perempuan dan Anak

Kebijakan Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak melalui Peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan; Peningkatan kesetaraan gender; Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak, dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Grafik 2.34
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
di Provinsi Gorontalo tahun 2019-2024

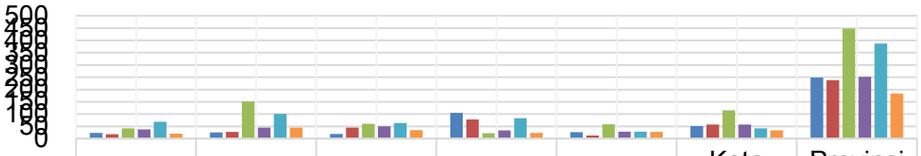

	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato	Bone Bolango	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo	Provinsi Gorontalo
2019	23	25	19	105	26	51	249
2020	18	27	45	78	13	57	238
2021	42	151	60	22	58	115	448
2022	38	45	50	34	28	57	252
2023	69	101	64	83	28	42	387
2024	20	45	35	23	27	33	183

Sumber: SIMFONI, Kemen PPPA, 2024
**Data Tahun 2024 per Oktober*

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi dan fluktuatif setiap tahunnya, dimana jumlah kekerasan tertinggi terjadi di tahun 2021 dengan 448 kasus kekerasan. Pada tahun 2024 berdasarkan data bulan oktober, tercatat bahwa jumlah kekerasan di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, dimana Kabupaten Gorontalo menjadi wilayah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo dengan mayoritas kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak adalah kekerasan fisik dan seksual.

Perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan anak merupakan isu yang krusial dalam pembangunan. Dalam upaya untuk mencapai generasi emas, perlindungan dan pemenuhan atas hak anak sangat menentukan kualitas generasi penerus pembangunan. Untuk melihat perkembangannya, Indeks Pelindungan Anak (IPA) digunakan sebagai salah satu indicator untuk mengukur pembangunan perlindungan anak dengan memperhatikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Grafik 2.35
Indeks Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, tahun 2020-2023

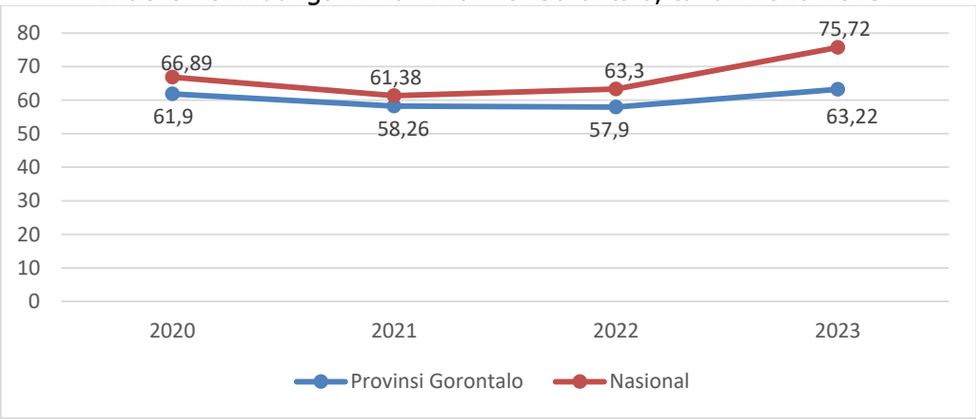

Sumber: Kementerian PPA RI, 2024

Tingginya kasus – kasus yang terkait dengan isu pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak merupakan indikasi perlunya upaya pemerintah yang terstruktur, berkesinambungan, serta melibatkan banyak pihak. Salah satu inidkator untuk mengukur capaian keberhasilan Pembangunan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui Indeks Perlindungan Anak. Berdasarkan data dari KemenPPA Gorontalo termasuk dalam 3 Provinsi Indonesia yang delta pertumbuhannya menurun yaitu Papua dan Nusa Tenggara Timur sehingga diperlukan perhatian khusus untuk isu ini terutama di Kabupaten Boalemo yang pada 2023 memiliki capaian indeks terendah se Provinsi Gorontalo yaitu 49,74.

Terdapat 5 klaster pembentuk indikator ini yaitu klaster I Hak Sipil dan kebebasan, Klaster II Lingkungan keluarga & pengasuhan alternatif, Klaster III Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Klaster IV Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan klister ke V adalah perlindungan khusus.

Provinsi Gorontalo memiliki nilai yang rendah pada klaster IV yaitu sebesar 26,10 pada tahun 2022. Klaster IV terdiri atas 5 indikator yaitu (1) persentase anak usia 7-17 tahun yang tidak sekolah, (2) persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia, (3) persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar), (4) persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler dan (5) persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni.

Berdasarkan wilayah, tahun 2022 Kota Gorontalo menjadi daerah yang memiliki persentase tertinggi untuk IPA yaitu 80,94 persen berada diatas rata-rata provinsi. Kabupaten Boalemo adalah daerah yang memiliki persentase terendah yaitu 49,74 persen. Selain Kabupaten Boalemo, terdapat 2 daerah lainnya yang memiliki persentase dibawah rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Pohuwato (54,96) dan Kabupaten Gorontalo Utara 58,10 persen.

c. Pangan

Pemenuhan pangan yang cukup dan terjangkau untuk setiap kalangan merupakan hak setiap orang. Salah satu wujud bentuk kepedulian pemerintah terhadap isu pangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Upaya ini tentunya sejalan dengan tujuan pertama dan kedua dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu mengakhiri kelaparan mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan digunakan indikator Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Grafik 2.36
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024

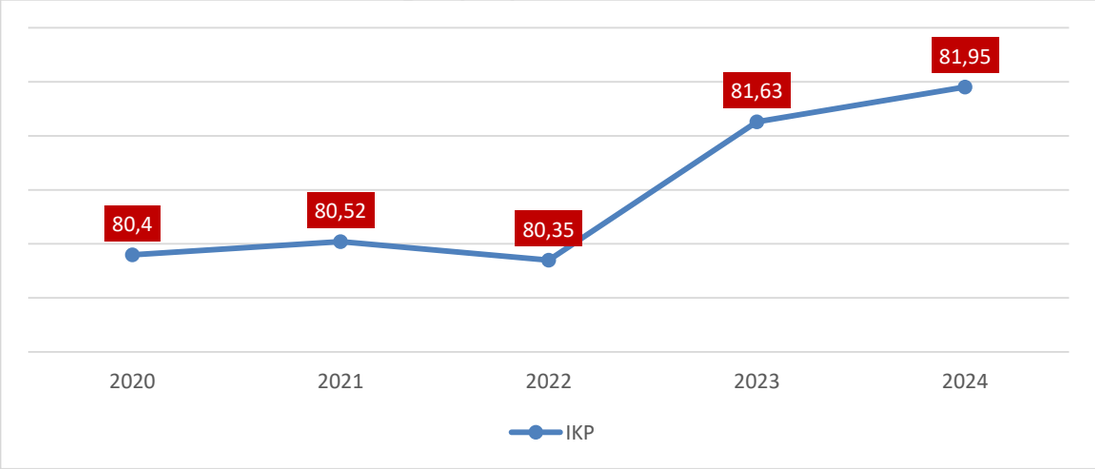

Sumber: Badan Pangan Nasional, Indeks Ketahanan Pangan, 2024

Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2024, Provinsi Gorontalo kembali menunjukkan pencapaian positif dalam sektor ketahanan pangan dengan nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode 2023-2024, ketahanan pangan di Gorontalo tercatat berada di atas angka 81%, sebuah angka yang menggambarkan kemajuan signifikan.

Analisis ketahanan pangan tahun 2024, hasil FSVA menunjukkan tidak ada lagi kecamatan di Kabupaten se-Provinsi Gorontalo yang masuk dalam kategori rentan pangan. Hal ini menjadi indikasi bahwa program-program ketahanan pangan yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik, dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang lebih merata di seluruh wilayah.

Skor IKP pada level Kabupaten/Kota di Gorontalo juga bervariasi. Pada tahun 2024, wilayah dengan Indeks Ketahanan Pangan tertinggi adalah Kota Gorontalo. Sedangkan wilayah dengan Indeks Ketahanan Pangan terendah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. Penyebab rendahnya nilai IKP antara lain produksi pangan wilayah lebih kecil dibanding kebutuhan (kurang), prevalensi balita stunting tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk hidup miskin tinggi. Penanganan kerentanan pangan yang

komprehensif perlu diprioritaskan pada daerah tersebut sesuai dengan faktor penyebabnya.

Grafik 2.37
Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota
se Provinsi Gorontalo tahun 2024

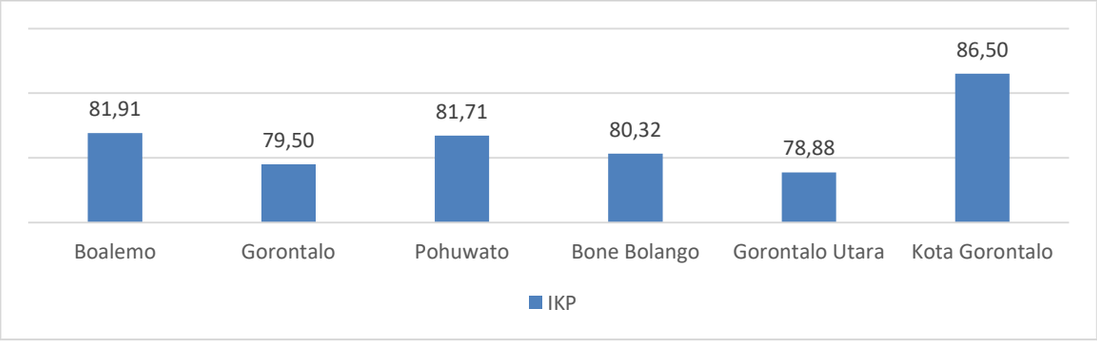

Sumber: Badan Pangan Nasional, Indeks Ketahanan Pangan, 2025

Status ketahanan pangan yang berbeda antar wilayah menunjukkan bahwa akses rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan masih belum merata. Salah satu indikator yang menggambarkan situasi kerawanan pangan adalah Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU). PoU adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. PoU pada level nasional pada 2023 mencapai 8,53 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 10,21. Artinya, pada tahun 2023 sekitar 8 dari 100 orang yang tidak mampu mememuhi kebutuhan energi untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Pola serupa juga terjadi di Provinsi Gorontalo. PoU di Provinsi Gorontalo pada 2023 sebesar 15,10 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 18,63.

Grafik 2.38
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Gorontalo
Tahun 2022-2023

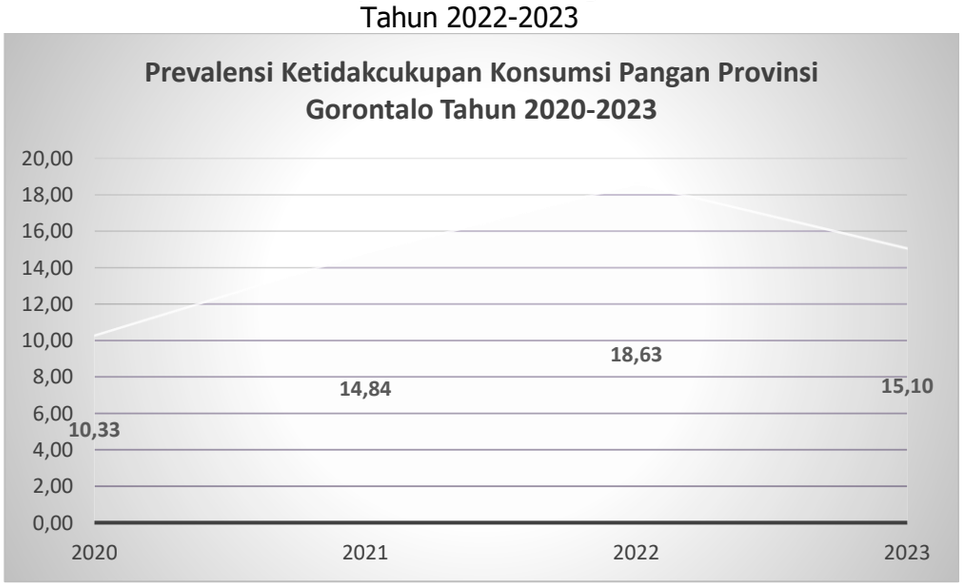

Sumber: Badan Pangan Nasional, Indeks Ketahanan Pangan, 2023

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tahun 2023 terdapat sekitar 15 dari 100 orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi untuk hidup normal, aktif, dan sehat di Provinsi Gorontalo. Hasil analisis kerawanan pangan Provinsi Gorontalo menunjukan terdapat 8 karakteristik rumah tangga yang beresiko menyebabkan kerawanan pangan yaitu kemiskinan, pendidikan tamat SD, Pendidikan Tamat SMP-SMA, Pendidikan Taman PT, Rumah tangga lanjut usia, topografi puncak, kejadian bencana dan tidak ada pasar permanen. Karakteristik terbesar yang beresiko menyebabkan kerawanan pangan di Provinsi Gorontalo yaitu kemisinan dan pendidikan.

d. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat untuk mengukur kinerja setiap daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Sesuai dengan RPJMN KLHK Tahun 2020 – 2024 bahwa perhitungan nilai IKLH mengalami perubahan perhitungan, sejak tahun 2020 perhitungan nilai IKLH menambah parameter Indeks Kualitas Air Laut, selanjutnya untuk perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara yang semula menggunakan 2 parameter NO2 dan SO2, di tahun ini menambahkan nilai PM 2.5, sementara untuk parameter kualitas air yang menjadi parameter kunci untuk perhitungan nilai IKA bertambah dari 7 parameter bertambah menjadi 8 parameter, demikian juga untuk perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang keseluruhannya menggunakan hasil perhitungan KLHK sehingga nilai IKTL dan IKAL menggunakan hasil perhitungan IKLH Nasional. Pemantauan kualitas udara di Provinsi Gorontalo masih menggunakan 2 parameter SO2 dan NO2, namun untuk kualitas air telah memenuhi parameter yang diperhitungkan saat ini.

Grafik 2.39
Indeks Lingkungan Hidup, tahun 2020-2024

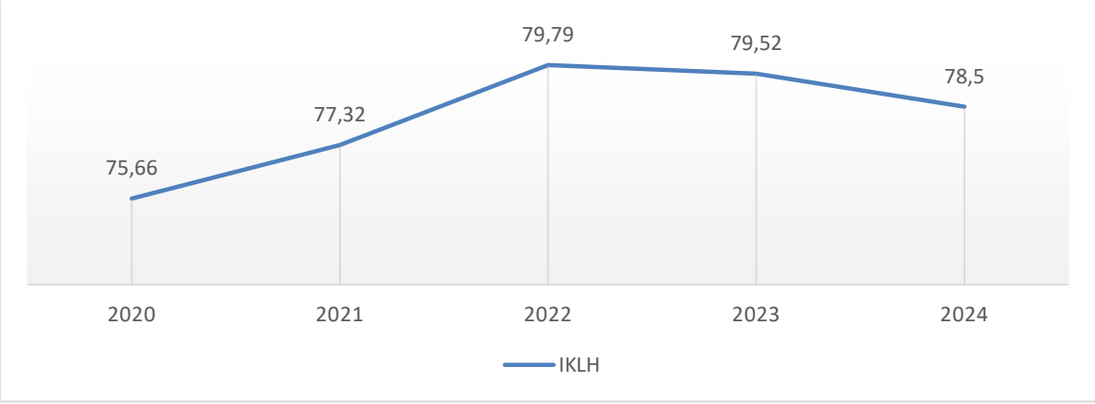

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo cenderung fluktiatif selama 5 tahun terakhir. Tahun 2023 IKLH sebesar 79,52 menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 78,5 namun masih termasuk pada kategori BAIK. Meskipun demikian berdasarkan ketiga indeks komposit pembentuk

IKLH, indeks Kualitas Air capaiannya masih sangat rendah yaitu berada pada angka 58,14 atau dengan kategori cemar sedang.

Berbagai masalah yang masih menjadi perhatian dari kualitas lingkungan di Provinsi Gorontalo yaitu kerusakan hutan dan lahan, terumbu karang dan mangroove, kebersihan dan penghijauan kota yang belum merata di setiap Kabupaten/Kota, masih adanya penambangan emas tanpa izin (PETI), longsor dan banjir yang masih sering terjadi, serta masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

Selain itu terjadinya penurunan kualitas air dipermukaan, serta kerusakan dan penurunan kualitas air Danau Limboto. Penurunan kualitas air berdampak pada tingginya sedimentasi, dan proses eutrofikasi atau pencemaran air yang terjadi akibat meningkatnya kadar mineral dan nutrisi termasuk nitrogen dan fosfor di dalam perairan. Permasalahan lainnya yaitu pertumbuhan enceng gondok yang tumbuh semakin tidak terkendali yang menyebabkan pendangkalan danau, selain itu juga pencemaran limbah cair dan padat akibat aktifitas masyarakat di sekitar danau, meningkatnya laju erosi dari di hulu sungai serta meningkatnya aktifitas perikanan Kerambah Jaring Apung (KJA), serta persoalan sampah domestik juga turut mengancam kelestarian danau Limboto.

Danau Limboto merupakan salah satu asset sumberdaya alam yang dimiliki Provinsi Gorontalo saat ini. Berada dilokasi yang sangat strategis yang membentang pada 2 (dua) wilayah yaitu 30 % di Kota Gorontalo dan 70% di Kabupaten Gorontalo. Danau Limboto sangat potensial sebagai sumber pendapatan bagi nelayan, pencegah banjir, sumber air pengairan dan obyek wisata. Berdasarkan hasil penelitian total nilai manfaat ekosistem Danau Limboto adalah Rp 581.919.234.588/tahun.

Namun demikian, nilai manfaat Danau Limboto yang sangat besar sangat kontras dengan kondisi danau. Pengukuran yang dilakukan oleh *Laja* pada tahun 2016 dengan menggunakan data citra satelit memotret perubahan luasan danau dan vegetasi air periode 2000-2015. Luas Danau Limboto pada Tahun 2000 sebesar 4.019 ha dan pada Tahun 2015 sebesar 2.943 ha. Selama Tahun 2000-2015 luas Danau Limboto berkurang sebesar 1.076 ha dengan rata-rata penyusutan sebesar 71,73 ha atau 1,79% pertahunnya. Luas penyusutan terbesar terjadi pada bagian barat, timur dan utara danau. Pada tahun 1932 rata-rata kedalaman danau Limboto ±30 meter dengan luas 8.000 Dalam kurun waktu 52 tahun luas danau limboto berkurang sekitar 4.304 Ha atau 62,60 % dari total luas danau. Tahun 2012-2018 kedalaman danau Limboto hanya ±2,5 meter dengan luas yang tersisa yaitu ± 2.537 Ha. Berdasarkan luas lahan kritis di Daerah Aliran Sungai (DAS) Limboto, data menunjukkan bahwa tahun 2013 luas lahan kategori sangat kritis tahun 2013 sebesar 23.871,48 Ha, sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 94.834 Ha.

Seiring dengan makin berkurangnya luasan danau, vegetasi air mengalami perluasan dari 1.148 ha dengan persentase tutupan 28,56% dari luas danau pada Tahun 2000 meningkat menjadi 1.811 ha pada Tahun 2015 dengan persentase tutupan 61,53% dari luas danau Tahun 2015. Selama kurun waktu 15 tahun vegetasi air bertambah 663 ha

dengan rata-rata perluasan sebesar 44,2 ha atau 3,85% per tahunnya. Penyebaran vegetasi air pada Tahun 2000 berada disekitar pinggiran danau. Sementara pada Tahun 2015, nampak sebagian vegetasi air sudah menyebar ke tengah danau. Vegetasi air yang menyebar ke tengah danau didominasi oleh eceng gondok.

Selain pelestarian danau Limboto, persoalan di bidang lingkungan hidup lainnya adalah terkait dengan persampahan. Dalam hal penanganan sampah, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga baik yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Menurut data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN), produksi sampah di Gorontalo rata-rata mencapai diatas 30.000 ton pertahun, yang dihitung dari rata-rata buangan sampah pada TPA Talumelito sebagai pembuangan akhir sampah untuk wilayah Kota Gorontalo, Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Sementara total laju timbulan sampah untuk seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo mencapai rata-rata 110.715,37 ton/tahun (2019-2023). Tahun 2023 volume sampah mencapai 152.050 ton. Pembangunan Fasilitas limbah B3 di Provinsi Gorontalo saat ini telah terbangun pada tahun 2023 dan untuk pengembangan tempat pengelolaan Limbah B3, seluruh dokumen pendukung baik dokumen DED, Dokumen Lingkungan serta lahan sudah tersedia.

Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman perkotaan dan perdesaan meningkat dari tahun 2020 sebesar 2,98% dan pada tahun 2023 mencapai 4,14%. Kondisi pengelolaan sampah di Provinsi Gorontalo Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah pada tahun 2019 sebesar 125.774,51 ton/tahun dan pada tahun 2023 sebesar 152,050.93 ton/tahun, hal ini menunjukan bahwa pemilahan sampah di sumber belum maksimal. Pada tahun 2022 Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah baru sebesar 23% dengan timbulan sampah terkumpul 0,452 ton/hari dimana Daur Ulang Sampah *(Recycling)* hanya sebesar 16,36% dan Residu Sampah di Lahan Urug Residu hanya sebesar 0,20%. Hal ini sangat berpengaruh pada kemampuan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang saat ini sudah tidak memadai.

e. Administrasi dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya pada tata kelola data Kependudukan, sementara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan ditingkat Kabupaten/kota. Oleh karenanya melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain melalui Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil dan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk.

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu program pemerintah dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat, terwujudnya perkembangan desa dan kelurahan, terwujudnya kelembagaan masyarakat yang berkualitas, serta Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi.

Upaya ini dilakukan melalui program pengembangan desa, Program Peningkatan Kerja sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Data Kementerian Desa, menunjukkan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Gorontalo sejak tahun 2022 tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal. Secara keseluruhan IDM dengan status mandiri pada tahun 2024 sebanyak 186 desa, desa maju sebanyak 291 desa, desa berkembang menjadi 178 desa, dan desa tertinggal 2 sebanyak desa.

Grafik 2.40
Status IDM Provinsi Gorontalo Per Wilayah Tahun 2024

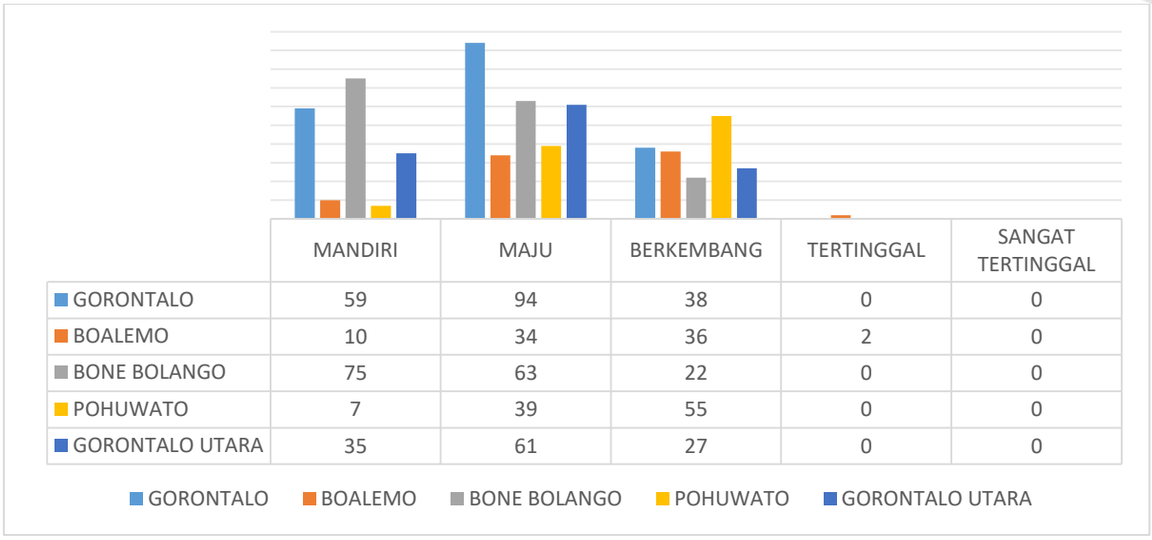

	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL
GORONTALO	59	94	38	0	0
BOALEMO	10	34	36	2	0
BONE BOLANGO	75	63	22	0	0
POHUWATO	7	39	55	0	0
GORONTALO UTARA	35	61	27	0	0

Sumber : Kementerian Desa dan PDT RI

Grafik 2.41
Data Perkembangan Status Desa Mandiri Provinsi Gorontalo tahun 2021-2024

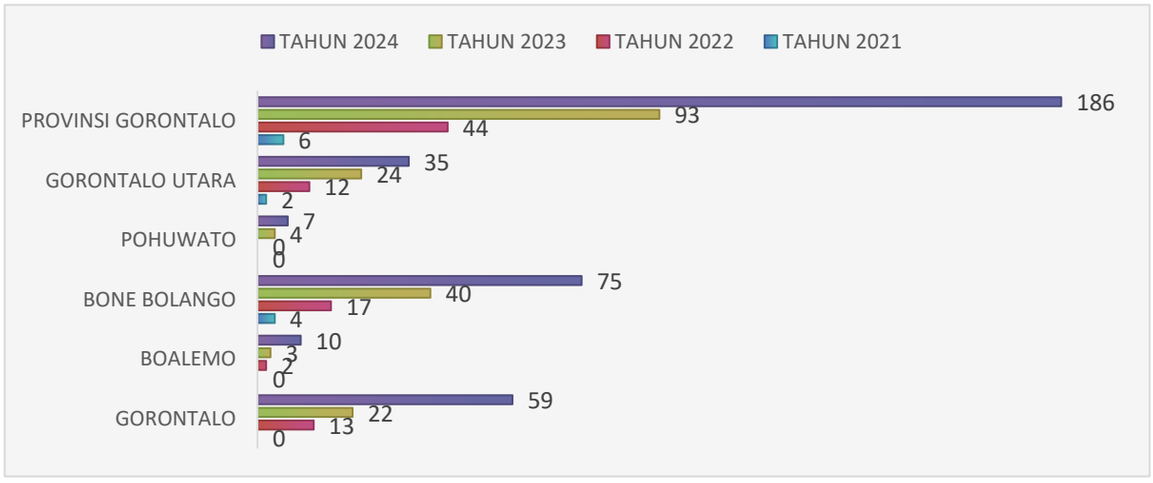

Sumber : Kementerian Desa dan PDT RI

Berdasarkan grafik di atas, status Desa Mandiri di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2021. Pada Tahun 2021 Capaian status Desa Mandiri tahun Provinsi Gorontalo sebesar 0,91% atau hanya 6 desa dari total jumlah desa di Provinsi Gorontalo yaitu 657, dengan kerja sama dan kolaborasi semua pihak pada tahun 2024 Capaian Desa Mandiri Provinsi Gorontalo meningkat sebesar 27,39% di tahun 2024 menjadi 28,31% yaitu sejumlah 186 Desa.

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berbicara mengenai kependudukan, fertilitas dan mortalitas menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Keduanya menjadi salah satu penyebab dinamika perubahan jumlah

penduduk. Fertilitas memiliki pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan penduduk. Meningkatnya jumlah kelahiran akan mengakibatkan pertumbuhan penduduk menjadi semakin tinggi. Sedangkan mortalitas berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk. Semakin meningkat jumlah kematian maka pertumbuhan penduduk akan semakin rendah. Fertilitas Provinsi Gorontalo mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam 22 tahun terakhir. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa usia suburnya (15-49 tahun). Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000 angka TFR Provinsi Gorontalo mencapai 2,70 yang artinya rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan sekitar 2-3 anak selama masa reproduksinya. Sementara Long Form SP2020 mencatat TFR Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 sebesar 2,30 yang berarti rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan hanya sekitar 2 anak selama masa produksinya.

Berdasarkan data Susenas, usia kawin pertama tahun 2022 dari perempuan di Gorontalo masih didominasi oleh perempuan usia 21 tahun ke atas. Usia 19-20 tahun pun masih menduduki posisi yang sama sebagai peringkat kedua yaitu mencapai 23,91%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk tidak menikah muda mengalami peningkatan.

Fenomena fertilitas juga sangat berhubungan dengan program pembatasan anak dan jarak kelahiran dalam keluarga. Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah menangani masalah kependudukan adalah berupa kesadaran masyarakat untuk menyukseskan program Keluarga Berencana (KB). Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengaturan jarak kelahiran.

Grafik 2.42

Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Pernah Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara KB di Provinsi Gorontalo, 2019-2023

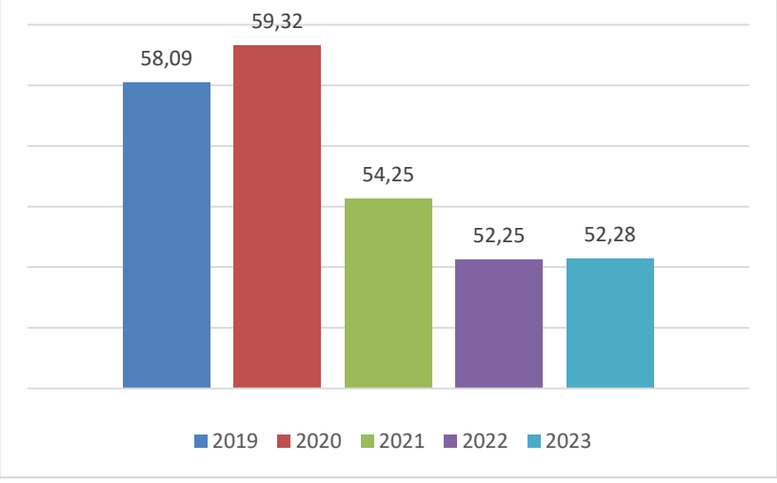

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022, BPS Provinsi Gorontalo, 2023

Program tersebut dapat dilihat dari penggunaan alat KB oleh pasangan. Persentase wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang menggunakan alat KB mengalami

peningkatan menjadi 52,28% tahun 2023 dari 52,25 pada tahun 2022. Dalam jangka panjang, peningkatan penggunaan alat KB akan berdampak pada penurunan angka kepadatan penduduk, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Berdasarkan alat atau cara penggunaan KB, jenis KB suntikan masih menjadi alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan di tahun 2023 dengan persentase pengguna sebesar 43,15%, angka ini meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 41,19%. Selain KB Suntikan, susuk KB juga banyak digunakan dengan persentase pengguna sebesar 28,56% di tahun 2023. Manfaat implementasi KB sangat berdampak baik dari segala bidang. Selain dapat meningkatkan status kesehatan ibu dan anak dan mengurangi risiko kematian bayi, KB juga mampu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga jarak kelahiran dapat direncanakan dengan matang. Dari segi ekonomi, KB juga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga karena dengan jumlah anak yang sedikit dapat menjamin anak menikmati fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas.

h. Perhubungan

Dalam pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain, pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah.

Transportasi Laut

1. Pelabuhan Gorontalo

   Jumlah kapal yang keluar masuk melalui Pelabuhan Gorontalo pada tahun 2023 tercatat sebanyak 840 unit. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 8,1 persen dibandingkan jumlah kapal pada tahun 2022 yang sebanyak 914 unit.

   Sepanjang tahun 2023, jumlah penumpang yang naik kapal melalui Pelabuhan Gorontalo tercatat sebanyak 34.588 orang, meningkat 39,98 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 24.710 orang. Peningkatan juga terjadi pada jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Gorontalo tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Dalam rentang tahun 2023, jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Gorontalo tercatat sebanyak 42.402 orang atau 52,6 persen lebih banyak dibandingkan penumpang tahun 2022 yang berjumlah 27.787 orang.

   Pada tahun 2023, kegiatan bongkar barang di Pelabuhan Gorontalo mengalami penurunan sebesar 86,14 persen, dari 690.435 ton pada tahun 2022 menjadi 95.663 ton pada tahun 2023. Searah dengan itu, barang yang dimuat di Pelabuhan Gorontalo juga turun dengan persentase sebesar 92,10 persen dari 228.443 ton pada tahun 2022 menjadi 18.046 ton pada tahun 2023.

2. Pelabuhan Kwandang

Pada tahun 2023, jumlah kapal yang keluar masuk Pelabuhan Kwandang mengalami peningkatan sebesar 38,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 168 unit pada tahun 2022 menjadi 233 unit di tahun 2023.

Banyaknya penumpang yang naik kapal melalui Pelabuhan Kwandang tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 31,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 1.115 orang pada tahun 2022 menjadi 1.467 orang pada tahun 2023. Searah dengan hal tersebut, jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Kwandang juga meningkat 27,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 722 orang pada tahun 2022 menjadi 922 orang pada tahun 2022.

Kegiatan bongkar dan muat barang di Pelabuhan Kwandang pada tahun 2023 mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 26,44 persen dan 2.079,61 persen (Lampiran 6). Jumlah barang yang dibongkar naik dari 346.905 ton pada tahun 2022 menjadi 438.627 ton pada tahun 2023, sedangkan kegiatan muat barang naik dari 1.494 ton pada tahun 2022 menjadi 32.555 ton pada tahun 2023.

3. Pelabuhan Anggrek

   Jumlah kapal yang keluar masuk melalui Pelabuhan Anggrek pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,93 persen, yaitu dari 214 unit pada tahun 2022 menjadi 216 pada tahun 2023.

   Sepanjang tahun 2022 dan 2023, tidak ada penumpang yang naik dan turun melalui Pelabuhan Anggrek. Sementara itu, kegiatan bongkar barang di Pelabuhan Anggrek meningkat 4,28 persen dari 384.312 ton pada tahun 2022 menjadi 400.770 ton pada tahun 2023. Sebaliknya, kegiatan muat barang di Pelabuhan Anggrek turun 11,37 persen dari 482.896 ton pada tahun 2022 menjadi 428.013 ton pada tahun 2023.

4. Pelabuhan Tilamuta

   Pada tahun 2023, jumlah kapal yang keluar masuk melalui Pelabuhan Tilamuta sebanyak 53 unit, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 95,98 persen dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 1.319 unit.

   Jumlah penumpang yang turun melalui Pelabuhan Tilamuta pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 37,62 persen yaitu dari 1.175 orang pada tahun 2022 menjadi 1.617 orang pada tahun 2023. Jumlah penumpang yang naik melalui Pelabuhan Tilamuta meningkat 68,16 persen dari 1.294 orang pada tahun 2022 menjadi 2.176 orang pada tahun 2022.

   Kegiatan bongkar barang di Pelabuhan Tilamuta berkurang 67,29 persen yaitu dari 20.700 ton pada tahun 2022 menjadi 7.753 ton pada tahun 2023. Sementara itu, kegiatan muat barang turun 62,94 persen dari 41.754 ton pada tahun 2022 menjadi 15.472 ton pada tahun 2023.

5. Pelabuhan Penyeberangan

   Jumlah penumpang yang naik dan turun melalui pelabuhan penyeberangan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

(Lampiran 12). Penumpang naik berkurang dari 36.902 orang pada tahun 2022 menjadi 36.629 orang pada tahun 2023. Sedangkan, penumpang yang turun berkurang dari 35.362 orang pada tahun 2022 menjadi 35.107 orang pada tahun 2023.

Transportasi udara

Secara umum, lalu lintas pesawat dan jumlah penumpang di Bandara Jalaluddin pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Jumlah pesawat yang berangkat meningkat 39,36 persen, sedangkan pesawat yang tiba di Bandara Jalaluddin meningkat 41,72 persen. Jumlah pesawat yang berangkat bertambah dari 1.255 unit pada tahun 2022 menjadi 1.749 unit pada tahun 2023, sedangkan jumlah pesawat yang tiba bertambah dari 1.256 unit pada tahun 2022 menjadi 1.780 unit pada tahun 2023.

Penumpang yang berangkat dan tiba di Bandara Jalaluddin mengalami peningkatan masing-masing sebesar 14,34 persen dan 19,87 persen. Jumlah penumpang yang berangkat bertambah dari 148.561 orang pada tahun 2022 menjadi 169.868 orang pada tahun 2023, sedangkan jumlah penumpang yang tiba bertambah dari 145.255 orang pada tahun 2022 menjadi 169.759 orang pada tahun 2023.

Kegiatan bongkar dan muat barang yang melalui Bandara Jalaluddin berasal dari tiga kategori yaitu kargo, bagasi, dan pos/paket. Untuk kegiatan bongkar dan muat dari kargo pada tahun 2023 mengalami kenaikan masingmasing sebesar 32,48 dan 64,91 persen. Kegiatan bongkar barang dari kargo naik dari 2.637.158 kg pada tahun 2022 menjadi 3.493.743 kg pada tahun 2023, sedangkan kegiatan muat barang dari kargo bertambah dari 371.454 kg pada tahun 2022 menjadi 612.548 kg pada tahun 2023.

Kegiatan bongkar barang dari bagasi mengalami peningkatan 14,85 persen dari 1.663.030 kg pada tahun 2022 menjadi 1.909.978 kg pada tahun 2023. Di sisi lain, kegiatan muat barang dari bagasi berkurang 2,44 persen dari 1.480.499 kg pada tahun 2022 menjadi 1.444.372 kg pada tahun 2023 (Lampiran 16). Untuk kegiatan pos/paket, tidak tercatat ada bongkar dan muat barang di Bandara Jalaluddin sejak tahun 2021 hingga 2023.

Secara keseluruhan, pada tahun 2023 kegiatan bongkar barang (kargo, bagasi, dan pos/paket) melalui Bandara Jalaluddin mengalami kenaikan sebesar 25,66 persen, sedangkan kegiatan muat barang (kargo, bagasi, dan pos/paket) mengalami peningkatan sebesar 11,07 persen (Lampiran 17). Kegiatan bongkar barang (kargo, bagasi, dan pos/paket) naik dari 4.300.188 kg pada tahun 2022 menjadi 5.403.721 kg pada tahun 2023, sedangkan kegiatan muat barang(kargo, bagasi, dan pos/paket) naik dari 1.851.953 kg pada tahun 2022 menjadi 2.056.920 kg pada tahun 2023.

Transportasi darat

Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat. Hal ini karena fungsi strategis yang dimilikinya, yaitu sebagai penghubung antar satu daerah dengan daerah lain. Jalan sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan

daerah pemasaran sangat dirasakan sekali manfaatnya dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Data panjang jalan disajikan menurut kewenangan pembinaan (pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), jenis permukaan, serta kondisi jalan. Pada tahun 2023, panjang jalan negara, provinsi, dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo masing-masing adalah 752 km, 467,17 km, dan 4.292,81 km. Menurut jenis permukaannya, sebagian besar jalan provinsi dan kabupaten/kota sudah diaspal.

Berdasarkan Buku Saku Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, rasio konektivitas Provinsi Gorontalo sebesar 0,553.

i. Komunikasi dan Informatika

Integrasi system dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting. Salah satu cara untuk dapat mencapai birokrasi dan pelayanan public yang berkinerja tinggi adalah dengan penerapan system pemerintahan berbasis elektronik yang meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah. Sejak tahun 2018, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Gorontalo hanya berada di angka 1,8 poin, kemudian di tahun 2024, berada di angka 4,13 poin dengan kategori baik. Teknologi informasi yang semakin canggih menuntut Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera menyusul provinsi lain dalam memberikan layanan berbasis elektronik yang efektif kepada masyarakat.

j. Koperasi dan UKM

Sasaran Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah yakni meningkatnya kapasitas usaha kecil menengah, meningkatnya pertumbuhan industry kecil menengah serta meningkatnya nilai ekspor. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian.

Pada Tahun 2021 Jumlah UMKM tercatat sebanyak 94.829 unit dan menurun pada Tahun 2022 menjadi 81.042 unit Jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 naik 28% dari tahun 2023, Perkembangan UMKM di Provinsi Gorontalo terjadi peningkatan yang signifikan jumlah UMKM di Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 Jumlah UMKM tercatat sebanyak 94.829 unit dan menurun pada Tahun 2022 menjadi 81.042 unit.

Berdasarkan data UMKM per skala usaha di Provinsi Gorontalo, di dominasi yang pada kategori usaha mikro. Dari total 105.509 UMKM, sebanyak 99.757 unit atau sekitar 94,5% merupakan usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Gorontalo memulai bisnis dengan skala yang relatif kecil yang dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Proporsi Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Gorontalo, Tahun 2021-2024

WILAYAH	2021				2022				2023				s.d Agusutus 2024			
	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH
KOTA GORONTALO	11.415	2.692	400	14.507	11.415	2.692	400	14.507	11.560	2.692	400	14.652	17.227	2.692	400	20.319
KABUPATEN GORONTALO	43.124	422	13	43.559	29.596	419	12	30.027	30.285	419	12	30.716	37.897	419	12	38.328
KABUPATEN BOALEMO	10.227	1.499	202	11.928	10.193	1.493	202	11.888	10.201	1.493	202	11.896	11.925	1.493	202	13.620
KABUPATEN POHUWATO	10.684	240	104	11.028	10.914	85	19	11.018	11.629	87	19	11.735	13.184	87	19	13.290
KABUPATEN BONE BOLANGO	7.862	205	37	8.104	7.699	174	26	7.899	7.830	174	26	8.030	11.174	174	26	11.374
KABUPATEN GORONTALO UTARA	5.475	213	15	5.703	5.475	213	15	5.703	5.475	213	15	5.703	8.350	213	15	8.578
JUMLAH	88.787	5.271	771	**94.829**	75.292	5.076	674	**81.042**	76.980	5.078	674	**82.732**	99.757	5.078	674	**105.509**
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)		5,56%	0,81%			6,26%	0,83%			6,14%	0,81%			4,81%	0,64%	

Sumber: Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2023

Kewirausahaan merupakan motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing suatu negara, Kewirausahaan bukan sekedar membangun bisnis, tapi tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian melihat peluang di tengah tantangan. Mayoritas para pelaku usaha melakukan usahanya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari *(necessity driven)*, masih sedikit para pelaku usaha yang memiliki keinginan untuk tumbuh. Hal ini terlihat dari rasio kewirausahaan yang didasarkan pada proporsi pekerja pekerja dibantu buruh tetap dibandingkan dengan angkatan kerja pada tahun 2023 hanya sebesar 3,04% dan capaian Rasio Kewirausahan Nasional Tahun 2024 sebesar 3,35% (berdasarkan Data SAKERNAS BPS Februari 2024) untuk capaian Rasio Kewirausahan Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah 2,79 % masih di bawah Rasio Kewirausahaan Nasional.

Volume Usaha Koperasi Menurut Provinsi Tahun 2021 sebesar 268.169 juta (berdasarkan data BPS), data koperasi di Provinsi Gorontalo menunjukkan dinamika antara tahun 2022 dan 2023, terjadi peningkatan jumlah koperasi aktif, namun juga ada koperasi yang nonaktif. Jumlah koperasi aktif naik 4,66% menunjukkan pertumbuhan positif dan kesadaran masyarakat akan manfaat koperasi dan terjadi penurunan koperasi nonaktif sebesar 14,46% mengindikasikan upaya pembinaan dan dukungan yang lebih baik. Adapun kenaikan rata-rata keanggotaan per koperasi sebesar 9,79% mencerminkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat yang lebih besar. Perbedaan Antar Wilayah Kabupaten/Kota menunjukkan variasi dalam pertumbuhan koperasi, menunjukkan perbedaan faktor pendukung dan tantangan di setiap daerah. Meskipun ada peningkatan, perkembangan koperasi di Provinsi Gorontalo masih perlu perhatian. Dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas, stabilitas dan daya saing koperasi, sehingga dapat berkontribusi optimal pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki 1 (satu) BUMD yaitu Gorontalo Fitrah Mandiri (GFM) yang berdiri berdasarkan Akta Notaris Gunawan Budiarto, S.H nomor 95 tanggal 30 Oktober 2009, Modal dasar Perusahaan berjumlah Rp.45.000.000.000 yang terbagi dari 18.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp.2.500.000,- per saham. Modal ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham sebanyak 17.966 lembar saham (Rp.44.915.000.000).

Perusahaan mengalami kerugian terus menerus dalam usahanya, sehingga mengakibatkan akumulasi kerugian yang siqnifikan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing (Rp37.195.434.635,- dan (Rp30.247.643.992,-)

Dari hasil audit eksternal oleh akuntan publik didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Likuiditas Perusahaan rendah karena kemampuan Perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek atau yang harus segera dibayar dalam jangka pendek rendah. Nilai Aset Lancar Rp.2.139.146.822,- sementara utang jangka pendek Rp.4.358.150.761. Hal tersebut karena menurunnya asset lancar khususnya persediaan dan rendahnya kas dan setara kas sebagai akibat dari operasional Perusahaan yg sudah tdk berjalan dengan normal dan rendahnya tingkat ketertagihan piutang
b. Dari sisi solvabilitas Perusahaan yaitu kemampuan Perusahaan untuk membayar semua utang (Rp.5.484.412.783) dengan menggunakan total asset yang dimiliki senilai Rp.13.045.618.897,-, Perusahaan masih dapat menalangi walaupun belum dapat mencerminkan kemampuan Perusahaan dalam mengelola kewajiban untuk menambah asset karena akumulasi penyusutan yang cukup besar Rp.5.189.778.528
c. Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik, terkait keberlangsungan usaha Perusahaan mengalami kerugian terus menerus sehingga menyebabkan akumulasi kerugian yang signifikan
d. Perusahaan sudah tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan penagihan piutang untuk mengubah menjadi kas Perusahaan
e. Pengendalian internal dan sistem pelaporan keuangan Perusahaan tidak cukup memadai, karena masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu mendapat perbaikan antara lain
    - Penghapusan asset tetap belum sesuai mekanisme Permendari 153 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan barang Daerah Yang Dipisahkan
    - Perusahaan sudah menghapus persediaan barang yang tidak diketemukan lagi
    - Piutang Usaha tidak dapat tertagih seluruhnya sudah dilakukan penyisihan, namun belum dihapus bukukan.

k. Penanaman Modal

Pembangunan investasi berpengaruh penting dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun demikian, investasi di Provinsi Gorontalo memang masih dinilai belum begitu berkembang. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka meningkatkan jumlah dan minat investor di Provinsi Gorontalo yaitu melalui Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal.

Grafik 2.43

Realisasi Investasi Provinsi Gorontalo, tahun 2022-2024

Sumber: Dinas PMESDM Provinsi Gorontalo, 2024

Tahun 2019 Nilai realisasi investasi Provinsi Gorontalo Meningkat dari tahun 2018 yaitu dari Rp. 2,102 Triliun menjadi Rp.3,413 Triliun pada tahun 2019. Pada tahun 2020 realisasi investasi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 dimana pada tahun 2019 realisasi investasi sebesar Rp.3,413 pada tahun 2020 turun menjadi Rp.1,656 Triliun. Penurunan realisasi investasi timbul akibat adanya pandemi covid 19 yang terjadi mulai tahun 2020 sudah ada pembatasan pelaksanaan kegiatan.

Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 nilai realisasi investasi di Provinsi Gorontalo mengalami fluktuasi, dimana nilai realisasi investasi pada tahun 2023 sebesar Rp.5,515 Triliun dan namun mengalami penurunan menjadi Rp.3,56 Triliun pada tahun 2024. Realisasi investasi ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), uraian realisasi investasi PMA dan PMDN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.33
Realisasi Investasi PMA dan PMDN, Tahun 2019 – 2023

NO	TAHUN	REALISASI		TOTAL
		PMA	PMDN	
1	2019	Rp 2.569.598.768.670	Rp 844.372.900.000	**Rp 3.413.971.668.670**
2	2020	Rp 973.250.244.578	Rp 683.565.100.000	**Rp 1.656.815.344.578**
3	2021	Rp 1.244.608.762.684	Rp 898.557.750.015	**Rp 2.143.166.512.699**
4	2022	Rp 1.476.582.028.994	Rp 1.113.462.200.000	**Rp 2.590.044.228.994**
5	2023	Rp 500.847.767.539	Rp 5.014.654.832.181	**Rp 5.515.502.599.720**
TOTAL		**Rp 3.222.038.559.217**	**Rp 7.026.674.782.196**	**Rp 10.248.713.341.413**

Sumber: Dinas PMESDM Provinsi Gorontalo, 2024

Grafik 2.44
Realisasi PMA dan PMDN, Tahun 2019-2023

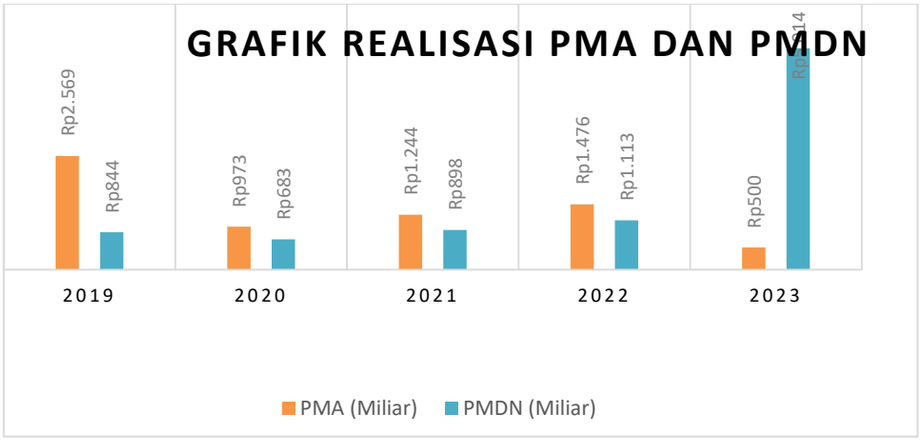

Sumber: Dinas PMESDM Provinsi Gorontalo, 2024

Tahun 2023 Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerbitkan izin sebanyak 2.040 yang terdiri atas izin di sektor pertanian, peternakan dan perkebunan sebanyak 22 izin, sektor perikanan dan kelautan sebanyak 371 izin, sektor Perindustrian sebanyak 249 izin, sektor Perdagangan sebanyak 0 izin, sektor Perhubungan sebanyak 11 izin, sektor Kesehatan sebanyak 5 izin, sektor Pendidikan sebanyak 2 izin, sektor Pariwisata sebanyak 24 izin, sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1321 izin, sektor ESDM sebanyak 35 izin, dan sektor PUPR sebanyak 0 izin.

Grafik 2.45
Realisasi Izin dan Non Izin, Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas PMESDM Provinsi Gorontalo

Jumlah izin yang terbit sebagaimana uraian diatas merupakan izin yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Gorontalo Tidak termasuk realisasi izin yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota. Peningkatan jumlah izin yang terbit tersebut terjadi karena semua

proses perizinan sudah mudah diakses oleh pelaku usaha melalui aplikasi *Online Singe Submission Risk Based Aproach* (OSS RBA). Sistem dapat diakses dimana saja, pelaku usaha tidak harus datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo. Selain itu peningkatan ini juga terjadi karena pelaku usaha atau masyarakat sudah mulai memahami dan menyadari pentingnya izin sebagai bukti legalitas kegiatan/usaha yang dijalankan.

Pemerintah Provinsi terus meningkatkan pelayanan dengan memberikan kemudahan berinvestasi, serta promosi investasi. Tahun 2023 nilai realisasi Investasi sebesar 3.397 Triliun terlihat telah melebihi target 2,6 Triliun yang ditetapkan.

I. Kepemudaan dan Olahraga

Pencapaian pembangunan di bidang sosial dan budaya juga ditunjukkan oleh Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Saat ini lndonesia sedang berada di fase penting dimana persentase usia produktif lebih besar dibandingkan persentase usia tidak produktif yang didapatkan melalui bonus demografi yang akan mencapai puncaknya di tahun 2030. Pemuda dengan jumlah yang besar tersebut diharapkan menjadi motor penggerak produktivitas sehingga dapat berkontribusi terhadap kemajuan lndonesia ke arah yang lebih baik di masa depan.

Melihat peningkatan IPP sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 yang menjadi tahun saat pandemi Covid-19 dengan berbagai keterbatasan aktivitas menunjukkan jika pembangunan pemuda telah berada di jalur yang positif. Walaupun jika mengacu pada angka yang didapatkan, nilai ini masih jauh dari nilai tertinggi yaitu 100. Nilai IPP Provinsi Gorontalo tahun 2023 naik sebesar 53,83 poin. Selain naik signifikan, capaian domain kesehatan dan kesejahteraan Provinsi Gorontalo juga lebih baik dari level nasional, sebesar 5 poin di atas rata-rata nasional. Sebaliknya, domain pendidikan serta domain partisipasi dan kepemimpinan lebih rendah dari capaian nasional. Meskipun nilai capaian kedua indikator tersebut lebih rendah dibanding level nasional, namun keduanya merupakan penyumbang terbesar terhadap IPP Provinsi Gorontalo.

Pembangunan dalam bidang Kepemudaan dan olahraga terus dilakukan dengan mendorong agar masyarakat gemar berolahraga, kreatif dan inovatif melalui penataan dan menyempurnakan sistem pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga, membangun keserasian dan keharmonisasian program, mekanisme dan hasil pembangunan keolahragaan kabupaten/kota, serta memfasilitasi dan mengembangkan jaringan serta akses kemitraan disektor olahraga tingkat provinsi sampai kabupaten/kota.

Peningkatan prestasi siswa dibidang akademik dan non akademik terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Strategi peningkatan prestasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang serta memperhatikan bakat dan minat siswa terhadap jenis dan lomba tersebut. Pembinaan Pemuda dan Olahraga dilakukan melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

serta Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dengan memfasilitasi para pelajar dalam mengikuti berbagai kejuaraan baik ditingkat Regional, Nasional maupun Internasional. Sebanyak 377 orang Pemuda dan 60 Olahraga yang dibina dan memperoleh Medali Olahraga Pelajar baik ditingkat Regional, Nasional maupun Internasional dari berbagai cabang olahraga yang diikutsertakan, yaitu dari cabang atletik, sepak takraw, pencak silat, taekwondo dan karate.

Berbagai prestasi tersebut cukup menggembirakan, hingga kedepan akan terus dilakukan peningkatan kesadaran berolahraga di kalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan olahraga dan pemasyarakatan olahraga akan memudahkan pencarian dan penemuan bibit unggul daerah di bidang olahraga dan bisa membudayakan olahraga di masyarakat.

m. Statistic

Pembangunan di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keanekaragaman data informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi serta mempersiapkan SDM penyelenggaraan statistik. Informasi data statistik yang akurat secara series dan berkesinambungan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Data statistik menjadi paramenter bagi pemerintah dalam evaluasi dan perencanaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Statistik sangat terkait dengan program/kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan yaitu dalam penyediaan data dan informasi, sehingga program dan kegiatan dalam urusan statistik yakni Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Dalam pengelolaannya, telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimasing-masing OPD sebagai penanggungjawab dan penyedia informasi data sektor dimasing-masing OPD. Hal ini dimaksudkan untuk optimalisasi keterisian data sektor dimasing-masing OPD.

Dukungan statistic lainnya adalah melalui penyusunan Buku Profil Daerah, Buku Data Statistik Sektor Provinsi Gorontalo yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, yang diterbitkan setiap 5 tahun.

n. Persandian

Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Di era keterbukaan informasi, setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk

mengakses informasi seperti yang tertuang dalam undang-undang keterbukaan informasi public. Namun bukan berarti kebebasan itu tanpa batas, akan tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga stabilitas negara. Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat digunakan untuk menjamin keamanan informasi, karena itu perlu adanya payung hukum yang mengamankan informasi berklasifikasi. Sebagaimana tugas fungsi Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo yaitu dalam rangka peningkatan aplikasi, muatan layanan publik, pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta menjamin keamanan informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka pelaksanaan urusan persandian untuk menjamin keamanan informasi daerah melalui kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo berbasis elektronik dan non elektronik.

o. Kebudayaan

Pencapaian pembangunan di bidang budaya dan adat istiadat juga ditunjukkan oleh capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai salah satu instrumen yang telah dirilis sejak tahun 2018 untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan didasarkan pada 7 dimensi yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Dimana IPK Provinsi Gorontalo sejak 2018-2021 bergerak secara dinamis dari 49,86 ditahun 2018, kemudian meningkat menjadi 50,57 di tahun 2019. Dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 51,49, meskipun kemudian di tahun 2021 terjadi penurunan dengan perolehan sebesar 47,14.

Dari hasil capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan terdapat beberapa dimensi yang pencapaiannya belum maksimal antara lain ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, dan ekspresi budaya, sedangkan untuk dimensi budaya literasi dan gender pencapaiannya lebih tinggi dari angka nasional. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi, Provinsi Gorontalo berada di posisi ke 5 setelah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Pembangunan Seni Budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Gorontalo memiliki beraneka ragam budaya daerah yang sangat kental dengan adat istiadat Provinsi Gorontalo. Kebudayaan daerah tersebut meliputi tarian, lagu daerah, alat musik tradisional, upacara keagamaan, rumah adat dan pakaian adat, yang masih dijaga kelestariannya.

p. Perpustakaan

Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 disebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karyatulis, karya cetak, dan/atau

karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan fungsi perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dinyatakan bahwa perpustakaan mempunyai fungsi yang strategis sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Konsekuensi dari fungsi–fungsi tersebut, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yakni program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno melalui Pelestarian Karya Cetak dan bibliografi/katalog induk daerah (BID/KID) yang tersedia pada perpustakaan umum daerah.

Semakin mudahnya akses informasi melalui media internet, semakin tergerusnya budaya baca dikalangan masyarakat. Oleh karenanya Dalam rangka meningkatkan minat baca di Provinsi Gorontalo, Dinas perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023 terus mengembangkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan layanan jasa perpustakaan dan informasi, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang dilakukan antara lain dengan Gerakan Gorontalo Gemar Membaca dan pengembangan kapasitas perpustakaan. Dari upaya tersebut, menunjukkan jumlah pemustaka yang mengunjungi perpustakaan tahun 2024 meningkat sebanyak 8.760 pemustaka dibanding tahun sebelumnya sebanyak 6.550 pemustaka. Pemustaka dibagi dalam 2 kategori yaitu kategori Masyarakat/Umum sebanyak 2.190 pemustaka dan kategori pelajar sebanyak 6.570 pemustaka.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Berdasarkan laporan IPLM Perpustakaan Nasional RI, Indeks Pembagunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 70,39 naik menjadi sebesar 77,46 pada tahun 2024 sedangkan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat pada tahun 2023 sebesar 64,59 turun menjadi sebesar 62,43.

q. Arsip

Arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Menurut pasal 1 ayat Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mendukung kegiatan *e-government* dalam reformasi birokrasi, maka pengelolaan arsip harus dilakukan secara baik dan benar sesua idengan tata cara dan kaidah yang berlaku. Sedangkan kearsipan adalah

suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut system tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi pemerintah daerah, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan lembaga pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelayanan arsip kepada pengguna arsip di lingkungannya berdasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Untuk memenuhi prinsip pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel, maka layanan kearsipan tahun 2023, daerah didesain sedemikian hingga rancangan system layanan kearsipan tersebut mampu memenuhi harapan masyarakat dan memiliki daya guna serta hasil guna.

Kebijakan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan kearsipan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan melalui penerapan aplikasi SRIKANDI dalam proses surat menyurat. Tujuan penerapan arsip berbasis digital yakni untuk mengurangi pemakaian kertas dalam pengelolaan arsip, pengadministrasian arsip secara digital, serta mengurangi tumpukan arsip.

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan pilihan

a. Kelautan dan perikanan

Potensi sumber daya alam di Provinsi Gorontalo sangat strategis khususnya disektor perikanan dan kelautan. Provinsi Gorontalo memiliki luas perairan laut 963.844 Ha atau 9.638.44 Km^2 yang memiliki panjang garis pantai 903,7 Km terdiri dari 572,5 Km Pantai Selatan/ Teluk Tomini dan 331,2 Km Pantai Utara/ Laut Sulawesi.

Di sektor Perikanan dan Kelautan sampai dengan tahun 2024 menunjukkan capaian hasil yang relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi terhadap produksi perikanan tangkap yang mencapai 120.059 ton atau menurun dibanding produksi tahun 2023 sebesar 136.579 ton. Sementara untuk produksi perikanan budidaya menurun mencapai 50.358 ton tahun 2024, meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 44.863. Pertumbuhan produksi perikanan yang signifikan tersebut, memberikan pengaruh juga terhadap rata-rata pendapatan nelayan per bulannya. Dimana pada tahun 2022 pendapatan nelayan dapat mencapai Rp. 4,4 Juta/Bulan. Kegiatan perikanan budidaya juga memegang peranan yang sangat strategis selain perikanan tangkap dalam pembangunan perikanan di Provinsi Gorontalo. Akan tetapi, tingginya kontribusi produksi perikanan tangkap terhadap total produksi perikanan, tidak dibarengi dengan total produksi perikanan budidaya yang masih rendah dan laju persentase pertumbuhannya yang masih di bawah target. Produksi perikanan budidaya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021. Rata-rata laju pertumbuhan hanya sekitar 4,76% dari target pertumbuhan 9% per tahun yang ditetapkan. Penurunan produksi perikanan budidaya ini, berdampak pada capaian Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Gorontalo. Bila dilihat dari tingkat pencapaian NTN-Pi, pada tahun 2023 menurun sebesar 95,69.

b. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang cukup penting dan mempunyai andil yang besar dalam memacu pembangunan. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa dampak terhadap perkembangan disektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industry sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi ditunjang dengan keadaaan geografis pegunungan dan panorama alam yang memukau merupakan kekayaan alam yang tak ternilai bagi potensi pariwisata untuk mewujudkan pariwisata Gorontalo yang mendunia.

Untuk mengembangkan sector pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah itu sendiri. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, informasi lokasi wisata, akses jalan, serta akomodasi yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan juga factor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.

Grafik 2.46
Penyediaan Akomodasi Makan Minum (Milyar Rupiah), 2023

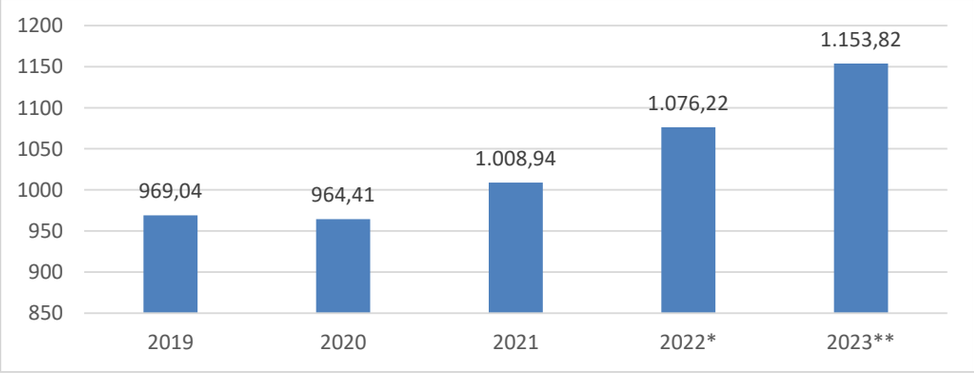

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Grafik 2.47
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%), 2023

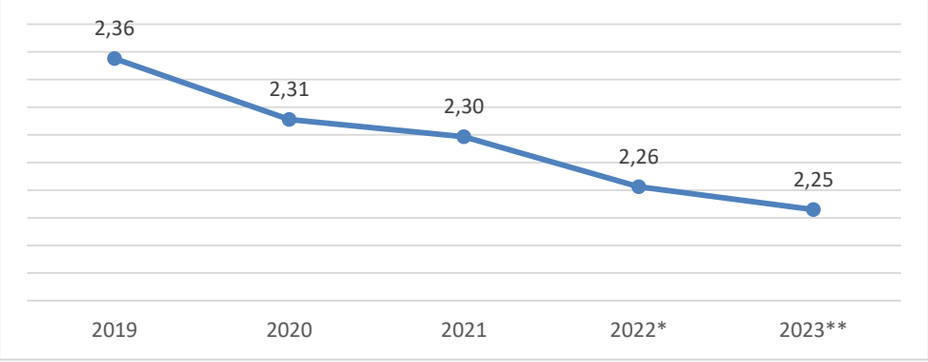

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Dari grafik diatas menunjukan bahwa penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan sektor akomodasi didorong oleh adanya pelaksanaan *event-event* daerah maupun pusat yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo, sedangkan sektor makan minum disebabkan menjamurnya pembukaan rumah makan dan warung kopi sebagai sarana buat masyarakat untuk berkumpul bersama teman maupun keluarga. Namun jika dilihat dari rasio sektor pembentuk PDRB selama 5 tahun terakhir, penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami penurunan dibanding dengan kontribusi sektor lainnya.

Kebijakan pembangunan urusan kepariwisataan Provinsi Gorontalo diarahkan melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal, melalui Program Pemasaran Pariwisata, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Grafik 2.48
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara, Tahun 2020-2024

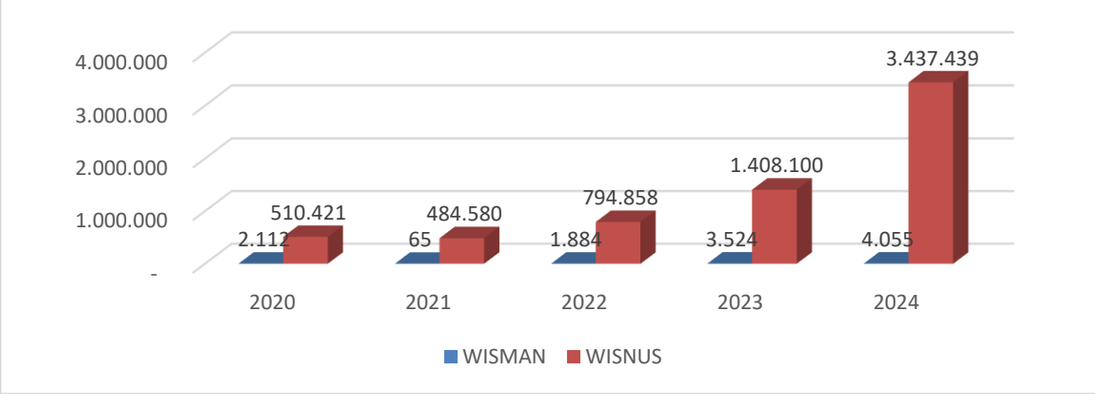

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2024

Tahun 2022 sektor pariwisata telah bangkit kembali dari keterpurukan akibat adanya pandemi covid-19 pada awal bulan Maret 2020. Pemulihan sektor pariwisata di tahun 2023 ditunjukkan dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara dan Nusantara dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 56,44%. Hal ini disebabkan adanya event-event daerah yang baru dilaksanakan antara lain *International Whale Shark Day*, *International Maleos Day, Gorontalo Art and Creative Festival,* selain itu dengan adanya peningkatan promosi pariwisata Gorontalo melalui media sosial memudahkan bagi wisatawan dalam mendapatkan informasi. Adanya *Direct Flight* beberapa negara seperti Cina dan Singapura ke Manado memberikan imbas secara tidak langsung terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Gorontalo.

Grafik 2.49
Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan, tahun 2020-2024

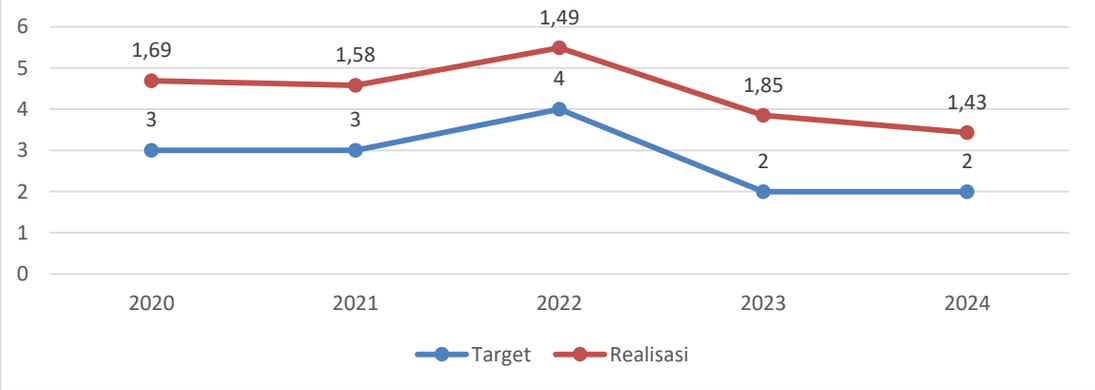

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2024

Tren *length of stay* wisatawan di Provinsi Gorontalo tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,42 poin dari capaian tahun sebelumnya yaitu 1,85 hari. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan *event* daerah yang masih parsial antara *event* yang satu dan lainnya. Selain itu, belum tersedianya paket wisata yang terintegrasi dengan pelaksanaan *event* didaerah. Dari target rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara di Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebanyak 2 hari hanya terealisasi sebesar 1,43 hari atau sebesar 71,50%.

c. Pertanian

Komoditi unggulan tanaman pangan Gorontalo adalah Padi dan Jagung dengan tingkat kontribusi terhadap PDRB diatas 30 persen. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan produksi tanaman pangan khususnya jagung adalah kebijakan penganggaran pada sektor-sektor unggulan Provinsi Gorontalo. Pada sektor pertanian misalnya terdapat bantuan benih tanaman, bibit sapi, brigde alsintan dan bajak gratis dan lain sebagainya. Tujuan dari kebijakan ini adalah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan khususnya kemiskinan pada sektor pertanian. Dalam 5 (lima) tahun terakhir produktivitas tanaman ini cenderung fluktuatif.

Grafik 2.50
Perbandingan Produktivitas (Ku/Ha) Padi Gorontalo dengan Wilayah Regional Tahun 2018-2022

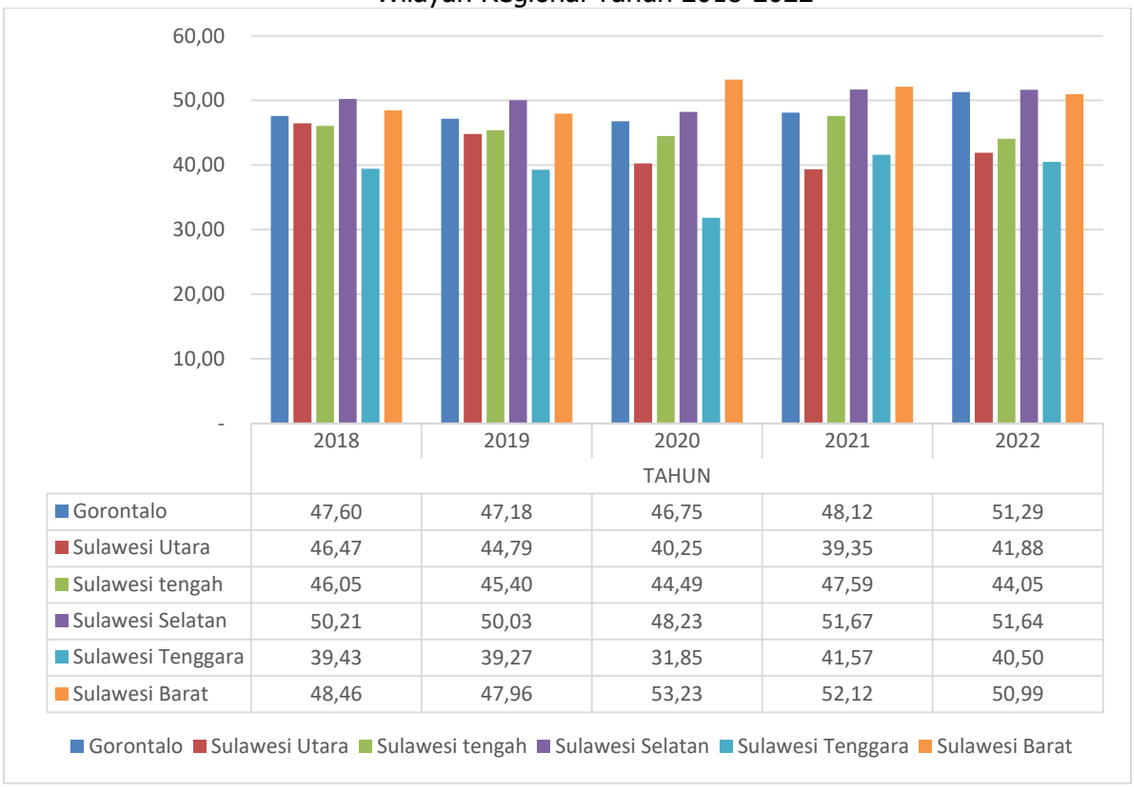

	2018	2019	2020	2021	2022
Gorontalo	47,60	47,18	46,75	48,12	51,29
Sulawesi Utara	46,47	44,79	40,25	39,35	41,88
Sulawesi tengah	46,05	45,40	44,49	47,59	44,05
Sulawesi Selatan	50,21	50,03	48,23	51,67	51,64
Sulawesi Tenggara	39,43	39,27	31,85	41,57	40,50
Sulawesi Barat	48,46	47,96	53,23	52,12	50,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, (diolah) 2024

Berdasarkan tabel diatas, produktivitas tanaman padi di Gorontalo pada tahun 2020 sampai dengan 2022 atau 3 (tiga) tahun terakhir terus menalami kenaikan. Di tahun 2022 Provinsi Gorontalo menempati posisi tertinggi kedua setelah Sulawesi Selatan. Secara kualitas, beras produksi Gorontalo juga masih kalah bersaing dengan beras dari luar Gorontalo bahkan di pasar lokal. Penyebabnya dalah minimnya fasilitas pasca panen seperti RMU modern yang menghasilkan beras premium.

Selanjutnya, tanaman pangan yang menjadi unggulan Gorontalo adalah jagung. Produksi jagung Gorontalo sempat meroket tembus diangka 1,8 Juta Ton di Tahun 2019 dengan produktivitas 44,18. peringkat terbawah ke 2 wilayah regional sulawesi setelah Sulawesi Tenggara. Lebih jelasnya perbandingan produktivitas tanaman jagung wilayah regional disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2.51
Perbandingan Produktivitas (Ku/Ha) Jagung Gorontalo dengan Wilayah Regional Tahun 2018-2022

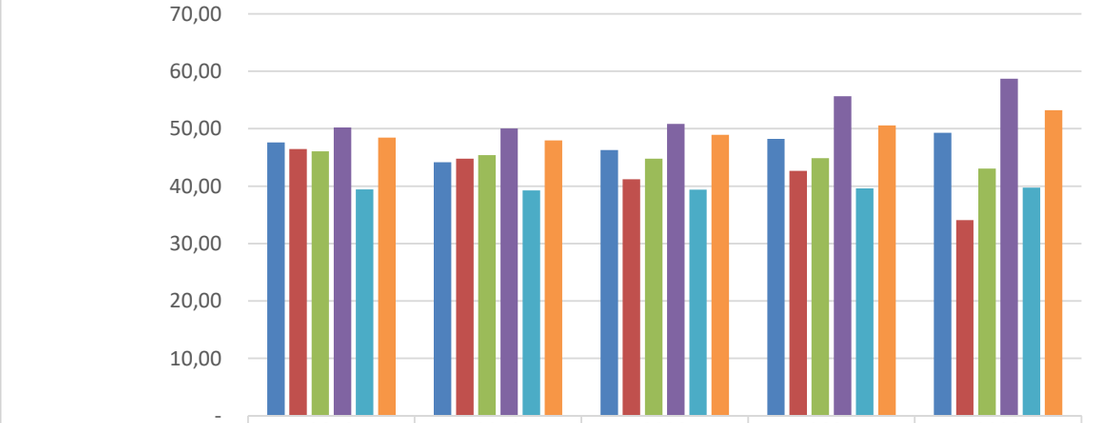

	2018	2019	2020	2021	2022
Gorontalo	47,60	44,18	46,28	48,21	49,27
Sulawesi Utara	46,47	44,79	41,19	42,65	34,08
Sulawesi tengah	46,05	45,40	44,78	44,88	43,04
Sulawesi Selatan	50,21	50,03	50,84	55,64	58,71
Sulawesi Tenggara	39,43	39,27	39,39	39,59	39,73
Sulawesi Barat	48,46	47,96	48,93	50,58	53,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, (diolah) 2024

Berdasarkan tabel diatas, selang 3 tahun terakhir produktivitas kita terus mengalami peningkatan namun masih dibawah 5 ton per hektar yaitu hanya 4,9 ton per ha di tahun 2022. Jika membandingkan dengan wilayah lain disulawesi dimana komoditi unggulannya bukan jagung, tingkat produktivitasnya masih lebih tinggi. Menurunnya kualitas lahan atau unsur hara tanah, tingginya serangan hama, dan infrastruktur irigasi serta kualitas benih ini sangat mempengaruhi produktivitas tanaman jagung.

d. Kehutanan

Kerusakan hutan juga menjadi perhatian yang serius dalam penanganannya. Hingga tahun 2022 luas lahan kritis dalam kawasan sebesar 90.580,07 Ha sementara di luar kawasan sebesar 134.857,93 Ha sehingga total lahan kritis 225.438 Ha. Kerusakan terbesar berada di wilayah Kabupaten Gorontalo dengan luas 135.992 Ha. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, kawasan hutan dibagi ke dalam kelompok hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Hutan Produksi (HP) merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis. Hutan produksi terbatas merupakan hutan yang hanya dapat

dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.

Secara umum luas Kawasan Hutan di Provinsi Gorontalo adalah seluas 764.979,50 Ha, yang terdiri dari Kawasan Suaka/Pelestarian Alam (KSA/KPA) seluas 196,522,43 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas 202.348,47 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 90.092,06 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 252.663,75 Ha, dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 23.352,81 Ha, serta Area Pengunaan Lainnya (APL) seluas 438.505,48 Ha.

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan rendah karbon merupakan salah satu strategi transisi menuju ekonomi hijau dan Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan rendah karbon juga menjadi tulang punggung menuju ekonomi hijau untuk mencapai visi Indonesia maju 2045 dan mencapai nol emisi pada 2060. Ekonomi hijau dan Pembangunan rendah karbon akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pembangunan Rendah Karbon dapat diwujudkan dengan melakukan transisi menuju ekonomi hijau. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan diperlukan kesepakatan yang solid dari semua pihak. Oleh karena itu, perlu dilakukan kolaborasi dan komunikasi yang intensif antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan proses transisi menuju ekonomi hijau dapat dilakukan dengan baik.

Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah realisasi pemanfaatan energi dari sektor EBT dengan jumlah total pemanfaatan energi. Pada tahun 2024, tercatat data bauran energi sebagai berikut: Capaian porsi EBT 12,35%, minyak bumi sebesar 53,14%, gas bumi sebesar 13,64% dan batubara sebesar 20,87%. Realisasi kontribusi EBT sebesar 18.77% pada bauran energi daerah Provinsi Gorontalo ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED), bahkan melampaui target tahun 2023 sebesar 11,76%.

Persentase jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang listrik sebesar 34,96%. Indikator kinerja program tersebut dicapai dengan membandingkan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang Listrik dan jumlah rumah tangga sasaran yang belum berlistrk. Tercatat Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang belum berlistrik sebanyak 7.255 RTS. Jumlah rumah tangga sasaran yang mendapatkan instalasi Listrik gratis pada tahun 2024 sebanyak 65 RTS, sehingga rumah tangga sasaran yang telah terpasang Listrik sampai dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 2.536 RTS. Hal tersebut menggambarkan capaian Persentase jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang Listrik sebesar 34,96%. Hingga tahun 2024, rasio elektrifikasi Provinsi Gorontalo sebesar 99,99%.

Selain penyediaan listrik bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memberikan pelayanan dan pemenuhan air bersih khususnya didaerah-daerah sulit air. Pada tahun 2023, 1 (satu) dokumen konservasi Air Tanah telah disusun yaitu di cekungan air tanah Marisa (Paguat-Patilanggio), sehingga tercatat sampai dengan tahun 2023 telah tersedia 2 (dua) data zona konservasi air tanah. Jumlah zona konservasi air tanah di Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 7 cekungan air tanah. Hal itu menggambarkan Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah sebesar 29% atau tercapai 67,44% dari target yang ditetapkan.

f. Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran strategis, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi.

Peran perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dan kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

Pembangunan bidang perdagangan difokuskan untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui beberapa program kegiatan diantaranya : Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Komoditi produk ekspor dari tahun ke tahun berfluktuatif, pada tahun 2024 ada delapan Jumlah komoditi dengan nilai eksport berjumlah $52.967.332,45, dengan negara tujuan Korea Selatan, Jepang, Cina, Eropa, Saudi Arabia, Fhilipina, Singapura, dan Malaysia dengan ekspor komoditi terbanyak adalah molases, wood palet, santan beku, minyak mentah, kelapa parut, jagung, ikan dan kepiting.

g. Perindustrian

Kebijakan Pembangunan perindustrian difokuskan pada Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian. Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi sangat besar karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi, serta sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya.

Oleh karenanya penting untuk mendorong Pembangunan sektor industri, yang dimulai dari Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya Kegiatan pelatihan pengembangan WUB, fasilitasi tempat usaha, bahan dan peralatan, Listrik bagi IKM pangan, Bimtek penyuluhan keamanan pangan, fasilitasi kemasan untuk IKM pangan, fasilitasi sertifikat halal bagi IKM pangan, sosialisasi aplikasi/web Sistem Informasi Industri (SIINAS) serta fasilitasi pendampingan, konsultasi perizinan khusus sektor industry untuk memberikan kemudahan para IKM dan industry menengah dalam mendapatkan informasi serta pengurusan perizinan khusunya sektor Perindustrian.

Rasio PDRB industri pengolahan Menurut lapangan Usaha pada Tahun 2023 sebesar 1.335,46 dan pada tahun 2024 terus meningkat sebesar 1.381,62 (milyar rupiah).

h. Transmigrasi

Penyelenggaraaan urusan transmigrasi mempunyai peran penting dalam pembangunan Nasional, khususnya dalam upaya pengembangan wilayah, pemerataan Pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Provinsi gorontalo merupakan salah satu Provinsi tujuan transmigran. Terdapat 7 kawasan pemukiman transmigrasi Provinsi Gorontalo meliputi Kimtrans Bukit Aren dengan total 158 KK dan Kimtrans Ayumolingo sebanyak 275 KK yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo, Kimtrans Pangea SP3 sebanyak 150 KK dan Kimtrans Lito SP 1 sebanyak 186 KK yang berlokasi di Kabupaten Boalemo, Kimtrans Sandalan di Kabupaten Pohuwato yang dihuni oleh 165 KK, dan Kimtrans Motihelumo di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 134 KK. Sedangkan 4 lokasi lainnya yaitu Puncak, Marisa, Pangea SP4, Pangea SP1 termasuk UPT pembinanya telah diserahkan ke kabupaten bersangkutan. Tahun 2024, tercatat masyarakat transmigrasi yang dikembangkan sebanyak 230 KK dan jumlah masyarakat transmigrasi binaan sebanyak 635 KK.

2.1.3.4. Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan, keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas.

Kebijakan Perencanaan Di Provinsi Gorontalo Dilaksanakan Kebijakan Perencanaan Di Provinsi Gorontalo dilaksanakan untuk mengintensifkan penerapan pendekatan HITS dalam formulasi perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat OPD, Meningkatkan sinergi perencanaan dan pengganggaran, memastikan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah, mengembangkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk menunjang hal tersebut, program yang dilaksanakan yaitu : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, koordinasi tersebut diwadahi dalam sebuah mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan yang kemudian dituangkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah untuk pemerintah pusat dan rencana kerja pembangunan daerah provinsi/kab/kota. Selain itu, optimalisasi sinkronisasi antar dokumen perencanaan daerah mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja OPD hingga penyusunan dokumen Penganggaan KUA PPAS dan APBD.

Kualitas Perencanaan Pemerintah Daerah menggambarkan kondisi perencanaan di Pemerintah Daerah. Dari hasil penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) 2024 Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo mendapat nilai 84,36 dengan predikat Baik. Penilaian IPPN Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menilai kualitas perencanaan setiap pemerintah Daerah yang ditunjukkan dengan adanya Sinergi antar dokumen perencanaan, Kualitas Perencanaan dan Keterhubungan antara Rencana dengan Kinerja. Dalam Sistem Perencanaan Nasional, hirarki perencanaan tertinggi yaitu tingkat Nasional wajib menjadi acuan dan didukung pencapaiannya oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Dalam skala Provinsi, wujud perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJMD, yang disusun berdasarkan RPJMN, wajib menjadi acuan dalam penyusunan RKPD maupun Renstra dan Renja OPD.

b. Keuangan

1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Terkait hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya memperbaiki sistem dan mekanisme pengelolaan pendapatan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Tahun 2024, pendapatan asli daerah berkontribusi sebesar 27,46% terhadap pendapatan daerah dengan realisasi sebesar Rp524.448.862.639,00, meningkat 2,44 dari tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan dari sisi kontribusi, perlu menjadi perhatian bahwa rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menggambarkan kondisi kemandirian fiskal daerah yang masih rendah karena masih sangat bergantung pada dana transfer ke daerah. Uraian pendapatan daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan asli daerah. Pada tahun 2024, pajak daerah berkontribusi sebesar 85,69 persen terhadap PAD. Pada komponen penyusun pajak daerah, pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi terbesar yakni mencapai 30,97 persen dari total keseluruhan pajak daerah, sementara terendah yaitu pajak air permukaan yang hanya memberikan kontribusi sebesar 0,05 persen dari total pajak daerah. Sementara itu, untuk realisasi komponen PAD tertinggi yakni pada realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 110,96 persen.

2) Retribusi Daerah

Pada tahun 2024, realisasi retribusi daerah adalah sebesar Rp 54.066.708.700,00 atau 110,15 persen dari target realisasi. Penerimaan retribusi daerah berasal dari retribusi jasa umum, dengan realisasi sebesar Rp52.873.350.572,00 atau sebesar 114,57 dari target, dan retribusi jasa usaha dengan realisasi sebesar Rp1.193.358.128,00 atau sebesar 40,63% dari target.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah sebagai dividen atas penyertaan modal pada BUMD, dengan realisasi sebesar Rp11.580.368.337,00, atau terealisasi sebesar 113,32 persen dari target yang ditetapkan.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD yang sah terrealisasi sebesar Rp9.354.296.471,00 atau tercapai sebesar 47,72 persen dari target. Realisasi ini merupakan realisasi terendah dari komponen PAD.

Upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak daerah diantaranya : Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembayaran secara online melalui E-Samsat dan SAMOLNAS; Melaksanakan Kerjasama dengan Ditlantas Polda Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Razia kenderaan bermotor, *door to door*, samsat keliling, warkop samsat dan *samsat night*; serta memberikan kemudahan informasi pembayaran pemberi PKB melalui Super PKB (Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo PKB).

2) Nilai Opini BPK

Pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dari upaya yang dilakukan tersebut, kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi tahun 2023 berhasil menjaga predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.43
Nilai Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Provinsi Gorontalo
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2023

Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan RI berkat keberhasilannya meraih meraih opini pemeriksaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2013 secara berturut-turut sampai dengan tahun 2024. Hal ini karena Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memantapkan dan meningkatkan komitmennya dalam pelaksanaan pembangunan daerah, mulai dari Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Program Kegiatan, Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam perwujudan *Good Governance and Clean Governance.*

Selain itu, Penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah juga ditunjang dengan pengelolaan aset. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo terus memperbaiki pengelolaan aset Provinsi Gorontalo, hingga tahun 2024 persentase aset yang dikelola dengan baik sebesar 100 persen.

c. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan. Hasil Kajian penelitian dalam bentuk konsep, model, scenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat, dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah dalam pembangunan. Penelitian dan pengembangan yang menjadi fungsi penunjang pemerintahan

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, melalui Program Penelitian dan PengembanganDaerah.

Berbagai hasil kajian penelitian yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan Provinsi Gorontalo. Beberapa output yang dihasilkan ditahun 2024 antara lain:

- Penyusunan Dokumen Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ-PID) Provinsi Gorontalo 2025-2030
- Penyusunan Police Brief "Model Pengembangan Integrasi Tanaman Pangan-Ternak Berbasis Teknologi & Ekosistem Hilirisasi dalam meningkatkan struktur social pada masyarakat di Provinsi Gorontalo".
- Kajian Identifikasi UMKM Potensial dalam Mendukung Upaya Promosi Kawasan Geopark Gorontalo.
- Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Rinduk untuk Pengembangan Geopark
- Laporan pelaksanaan fasilitasi pengembangan geopark Gorontalo dan pelaksanaan rencana aksi kerjasama Provinsi Gorontalo dan Ehime Prefektur

Hasil Penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi arahan dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi Pembangunan Provinsi Gorontalo, Tahun 2024 jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan sebanyak 4 Kajian dan jumlah inovasi dan teknologi yang termanfaatkan sebanyak 2 Inovasi.

d. Pengawasan

Dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern adalah efektivitas "peran" aparat "pengawasan intern" pemerintah (APIP). Pelaksanaan pengawasan intern lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Adapun program yang dilakukan dalam upaya mengoptimalkan fungsi pengawasan internal lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih *(Good and Clean Government)*. Inspektorat daerah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah berperan sebagai *quality assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif, baik dari sisi administrative maupun pengelolaan keuangan. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan Tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD.

Dari segi pengendalian dan pengawasan internal pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerjanya. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Kapabilitas SPIP dan Indeks Maturitas SPIP Provinsi Gorontalo berada pada level 3, Manajemen Risiko Indeks pada level 3 dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi pada level 3.

Salah satu bentuk komitmen dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dalam pelaksanaan pembangunan adalah dengan melaksanakan pengajuan unit kerja sebagai wilayah Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan langkah akselerasi guna mencapai sasaran reformasi birokrasi. Tahun 2024 terdapat 2 (dua) unit kerja pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah berkomitmen menjadi Zona Integritas WBK WBBM.

e. Pendidikan Dan Pelatihan

Dalam rangka optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, maka dilakukan peningkatan kompetensi baik secara struktural maupun fungsional. Dalam menjalankan fungsinya, Badan pendidikan dan pelatihan melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai bentuk upaya peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan kompetensi SDM Aparatur, serta meningkatkan kualitas kelembagaan diklat dengan kegiatan diantaranya :

1. Kegiatan pengembangan kompetensi teknis meliputi Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum serta Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional meliputi Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar, Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga, serta Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

Adapun faktor-faktor penunjang *output* pada kegiatan ini adalah penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP), pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan, dan pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan K/L/D.

Terkait penyusunan dokumen HCDP, BPSDM Provinsi Gorontalo telah menyusun dokumen tersebut berdasarkan pengumpulan data dari ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah dianalisis dan diolah menjadi sebuah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi yang menentukan target prioritas ASN yang membutuhkan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

BPSDM Provinsi Gorontalo telah melakukan re-akreditasi sebagai penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS dengan hasil memperoleh nilai 91,011 dengan predikat "A". Predikat "A" yang diperoleh merupakan perolehan yang sama juga ketika pelakanaan reakreditasi sebelumnya, sehingga perolehan ini menunjukkan kapasitas BPSDM Provinsi Gorontalo dalam menjaga kualitas penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

f. Kepegawaian

Pengelolaan dan manajemen kepegawaian dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pengembangan ASN, layanan kesejahteraan dan pembinaan ASN, serta pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian. Badan Kepegawaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan manajemen pengelolaan kepegawaian berupa pelayanan kenaikan pangkat, pensiunan, pengangkatan jabatan, pelayanan mutasi, pengelolaan data dan pengembangan sistem pelayanan manajemen ASN, manajemen arsip kepegawaian daerah.

Pelaksanaan urusan penunjang Pemerintahan bidang Kepegawaian dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan sasaran yaitu percepatan reformasi birokrasi.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Kepegawaian Daerah dengan kegiatan diantaranya:

1. Kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN melalui koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK, fasilitasi Lembaga profesi serta pengelolaan system informasi kepegawaian.
2. Kegiatan mutasi dan promosi ASN meliputi pelantikan pejabat Esselon I dan II, SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun dan pengelolaan promosi ASN.
3. Kegiatan pengembangan kompetensi ASN berupa pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN melalui bantuan studi belajar dan izin belajar.
4. Kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur meliputi kenaikan gaji berkala, karpeg, karis/karsu, SKP Tahunan, Taspen, Taperum, Cuti, Satya Lencana, KPE, dan TKD bagi ASN dan Pelayanan Pembinaan dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Dari hasil penilaian (evaluasi) Indeks sistem merit Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah 327 dengan predikat sangat baik dan predikat kualitas pengisian JPT baik.

g. Kesekretariatan Daerah

1) Nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil *(outcome)*. Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Sejak tahun 2019 hingga 2024 Nilai SAKIP Provinsi Gorontalo sudah berada pada kategori B. Nilai SAKIP tahun 2024 mencapai 68,88 atau Predikat B. Penilaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah menunjukkan hasil yang baik.

Tabel 2.45
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021-2024

Indikator	2.2. Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP	68,05	67,63	68,66	68,88
Predikat	B	B	B	B

Sumber : Menpan-RB, 2024

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Gorontalo yang diarahkan untuk menggerakkan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima dan berkualitas serta berorientasi pada kepuasan masyarakat telah menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Indeks Reformasi Birokrasi menjadi indikator pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat serta mewujudkan reformasi birokrasi yang baik di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2024, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo dengan Kategori BB. Hasil evaluasi tahun 2024 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indicator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Selanjutnya dari sisi tata Kelola pemerintahan, yang ditunjukkan dengan nilai MCP atau *Monitoring Center for Prevention* oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Provinsi Gorontalo sebesar 81,7 persen, meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 81,50 persen namun masuk kategori Zona Hijau karena berada diatas 70%. Penilaian MCP meliputi tujuh area perubahan, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan APIP, Manajemen ASN, Manajemen Aset serta Optimalisasi Pajak

Daerah dan Pengelolaan Dana Desa. Nilai MCP Provinsi Gorontalo berada diatas rata-rata MCP Nasional yakni sebesar 65 persen.

Tabel 2.46
Nilai MCP Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

No	Area Intervensi	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	100	92,09	73,88
2	Pengadaan Barang dan Jasa	94,46	82,86	100
3	Perizinan	100	99,08	100
4	Pengawasan APIP	89,31	77,48	65,20
5	Manajemen ASN	83,47	63,16	83,93
6	Optimalisasi Pajak Daerah	73,63	73,89	73,69
7	Manajemen Aset Daerah	77,96	85,09	73,01
TOTAL		**89,72**	**82,51**	**81,50**

Sumber : Korsupgah KPK RI, 2023

Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo juga mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih kategori A sebagai Zona Hijau kualitas tertinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan tahun 2024 yang dilakukan oleh Ombudsman Gorontalo, Provinsi Gorontalo memperoleh nilai 90,41. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik yang prima.

Salah satu perwujudan semangat reformasi birokrasi di pemerintahan, khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) melalui *E-Procurement* pemerintah melaksanakan penguatan terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Provinsi Gorontalo terus membenahi kualitas pengelolaan barang dan jasa dengan hasil capaian Indeks Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa yang menunjukan hasil yang terus meningkat mencapai 65,90 pada tahun 2022 dibanding capaian tahun 2021 pada angka 62,14.

2) Evaluasi LPPD

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kemendagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dari upaya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

Indikator	Evaluasi LPPD (Tahun)		
	2021	2022	2023
Kategori	Optimal	*n/a*	2,8779 (sedang)

Sumber : Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, 2023

3) Sekretariat DPRD

Dalam meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, serta menunjang peran DRPD dalam pembangunan Daerah, maka sekretariat DPRD tahun 2024 ini memfasilitasi legislative dalam menyelesaikan 5 (lima) Rancangan Perda dan telah disahkan menjadi Perda.

Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas DPRD melalui Bimtek yang diikuti 45 anggota DPRD, penyelenggaraan hubungan Masyarakat melalui Kerjasama dengan Pihak Media cetak dan media elektronik, kegiatan Rapat-rapat Paripurna, Paripurna Istimewa dan semua kegiatan DPRD. Sedangkan kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi Masyarakat untuk menjaring aspirasi Masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD dilaksanakan 3 kali kegiatan reses, dan 96 kali kunjungan kerja pimpinan dan angota DPRD.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro yang diukur berdasarkan indikator pendapatan / perkapita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Namun demikian peningkatan PDRB perkapita belum menggambarkan secara rill kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum, karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku yang masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB Perkapita Provinsi Gorontalo Tahun 2024 mencapai 44,43 Juta Rupiah, meningkat 4,9 persen dibanding tahun 2023. Rata-rata PDRB perkapita Provinsi Gorontalo selang tahun 2020-2024 sebesar 39,02 juta rupiah. Meningkatnya PDRB perkapita menunjukkan tingkat kesejahteraan di Provinsi Gorontalo relatif meningkat namun tidak secara riil menunjukkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Grafik 2.52
PDRB per kapita Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2020 s/d 2024
(Juta Rupiah)

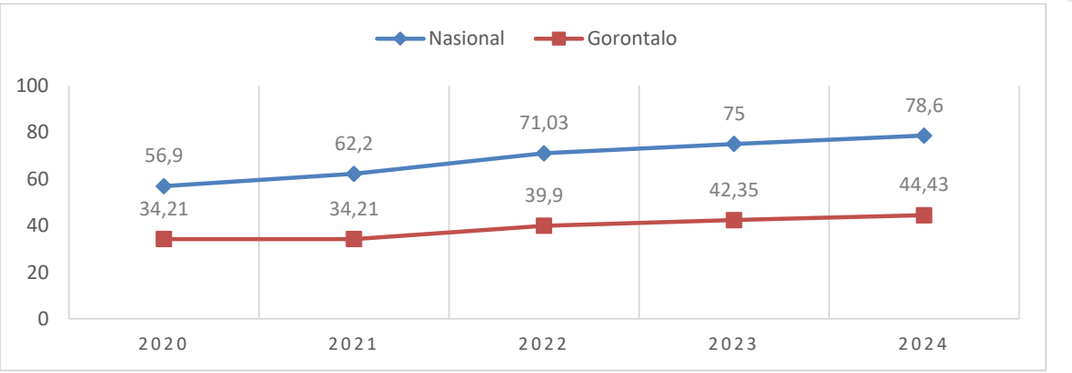

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Jika dilihat dari grafik diatas PDRB perkapita Provinsi Gorontalo, trend PDRB perkapita rata-rata meningkat 0,06 persen setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo masih sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Akan tetapi PDRB Perkapita Gorontalo masih berada dibawah rata-rata Nasional, berada pada posisi 6 terrendah secara Nasional, dan pada posisi 2 terrendah secara regional Sulawesi setelah Sulawesi Barat.

b. Indeks Inklusi Keuangan

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Peningkatan inklusi keuangan menunjukkan adanya peningkatan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan formal oleh masyarakat baik dengan tujuan bertransaksi, menabung, melakukan investasi dan lainnya. Tingkat inklusi keuangan yang semakin tinggi akan mendorong pendalaman sektor keuangan dan mengindikasikan semakin luasnya peran jasa keuangan sebagai *enabler* dalam pembangunan nasional. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2022 capaian Provinsi Gorontalo baru mencapai 85. Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi Gorontalo adalah sebesar 88,57. Nilai ini lebih baik dari rata-rata nasional (85). Provinsi Gorontalo juga sekaligus menjadi Provinsi dengan nilai inklusi keuangan tertinggi di wilayah SULAMPUA.

c. Indeks Ekonomi Hijau

Pada tahun 2022, Kementerian PPN/ Bappenas telah mengembangkan dan meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau sebagai alat untuk mengukur kemajuan ekonomi hijau Indonesia di tingkat nasional. Indeks Ekonomi Hijau nasional ini terdiri dari 16 (enam belas) indikator di bawah 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ke-16 indikator tersebut antara lain luas tutupan hutan, bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) primer, kualitas air, kualitas udara, penurunan G kumulatif, penurunan tutupan lahan gambut, intensitas emisi, intensitas energi final, GNI/kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga

kerja sektor industri, produktivitas tenaga kerja sektor jasa, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.

Grafik 2.53

Indeks Ekonomi Hijau Ekoregion Sulawesi

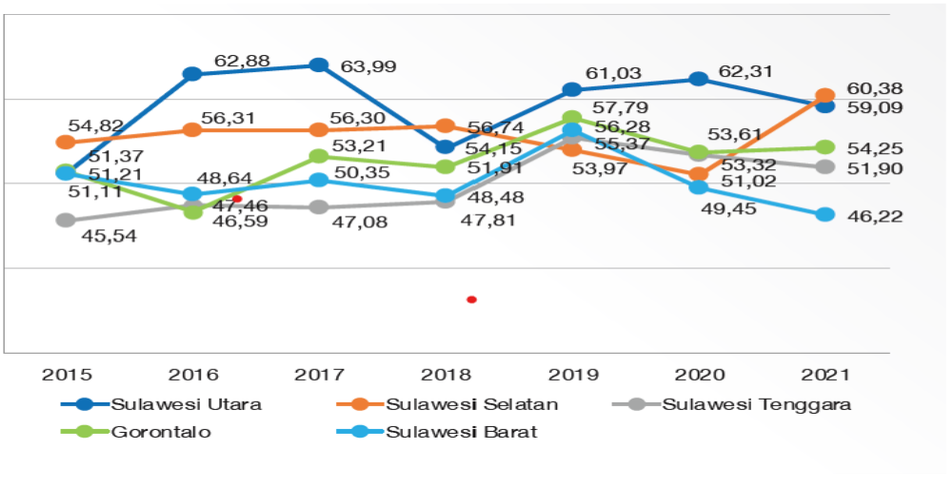

Sumber: Capaian dan Progres Ekonomi Hijau Provinsi 2015-2021 Kementerian PPN/Bappenas RI, 2022

Dari hasil perhitungan Indeks Ekonomi Hijau Provinsi pada periode 2015-2021, Provinsi Gorontalo memiliki capaian nilai Indeks Ekonomi Hijau sebesar 54,25 (kategori baik tier 1). Bila dilihat tren Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Gorontalo bergerak fluktuatif setiap tahunnya, namun tetap berada pada kategori baik tier 1, lebih baik dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara di tahun 2021. Bila ditelaah lebih detail, beberapa nilai komposit masih diperlukan sejumlah intervensi yang lebih mendukung dan masif untuk meningkatkan performa diantaranya pada pilar lingkungan (kualitas air dan kualitas udara), pilar ekonomi (intensitas emisi dan intensitas energi final) serta pilar sosial (penanggulangan kemiskinan dan tingkat pengangguran).

2.1.4.2. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Indeks Literasi Digital

Literasi digital berhubungan dengan kecakapan (*life skill*) karena tidak hanya melibatkan teknologi, melainkan meliputi kemampuan untuk belajar, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan kompetensi digital. Terdapat 4 (empat) kecakapan literasi digital yang perlu diperkuat meliputi Keterampilan Digital, Budaya Digital, Etika Digital, dan Keamanan Digital. Hasil pemetaan literasi digital Indonesia merupakan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan tingkat kecakapan dan pengetahuan digital, sekaligus memberikan gambaran kondisi dan peluang di setiap wilayah Tanah Air.

Capaian Indeks Literasi Digital Provinsi Gorontalo pada 2022 sebesar 3.35 lebih rendah 0.19 poin dibandingkan capaian literasi digital nasional dan cenderung menurun jika dibandingkan capaian ILD Provinsi Gorontalo pada 2021 yakni 3.61. Dari 4 (empat) kecakapan digital, skor tertinggi untuk Gorontalo berada pada aspek keamanan digital dan yang terendah adalah budaya digital kesadaran masyarakat Gorontalo untuk tidak mengunggah data pribadi ke

media sosial sudah relatif baik. Namun masih perlu lebih berhati-hati agar terhindar dari berbagai kemungkinan serangan siber *(cyber attack).*

Grafik 2.54
Indeks Literasi Digital Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2022

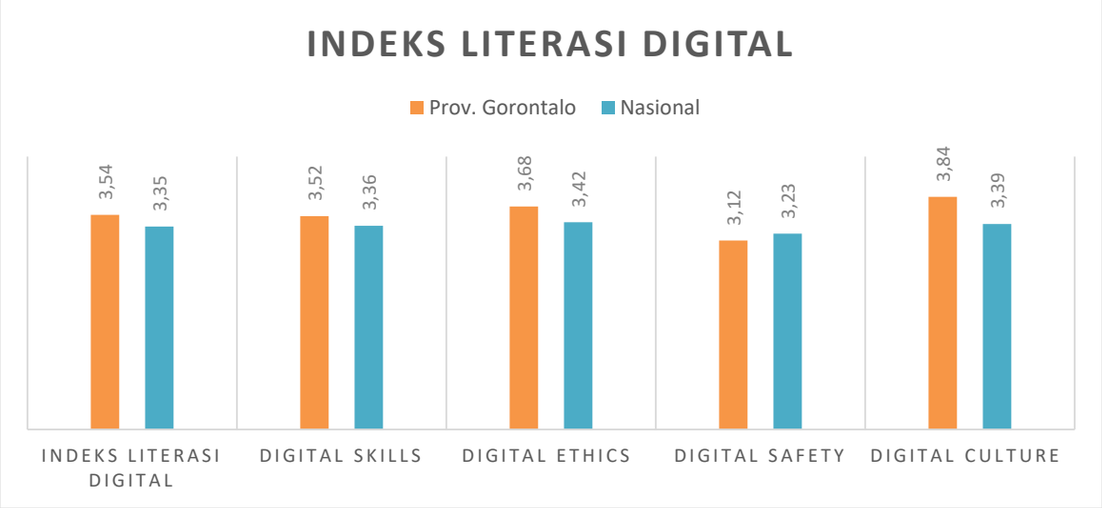

Sumber: Survey Literasi Digital Kemenkominfo RI

2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD Provinsi Gorontalo tahun 2025 memuat berbagai agenda pembangunan untuk mencapai tujuan sebagai Provinsi Mandiri di Indonesia dengan berbagai indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Dalam RPJPD diamanatkan bahwa penataan ruang Gorontalo pada tahun 2025 diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah di Gorontalo, sehingga tidak terdapat lagi daerah tertinggal di seluruh wilayah Gorontalo. Seluruh masyarakat Gorontalo dapat menikmati sarana dan prasarana baik dasar maupun yang bersifat pelayanan wilayah perkotaan dan perdesaan. Penyelenggaraan Penataan Ruang dilaksanakan melalui koordinasi yang mantap dan sistematis baik dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, di semua tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) didukung dengan infrastruktur data spasial yang mutakhir.

Kemantapan daya dukung lingkungan Gorontalo harus tetap terjaga secara konsisten bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan agar lebih asri dan lestari tetap dilanjutkan melalui perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, memelihara fungsi dan kualitas infrastruktur alam, infrastruktur buatan, serta sarana dan prasarana lingkungan yang terbangun.

Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, berkembangnya sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport), mantapnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan, tersedianya jaringan irigasi yang

berkelanjutan, mantapnya pelayanan telekomunikasi, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan rumah bagi masyarakat diharapkan dapat diwujudkan pada akhir tahun rencana. Hal ini dibutuhkan untuk penciptaan Gorontalo sebagai daerah tujuan utama investasi skala nasional dan internasional.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, dan berkeadilan, serasi, serta mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomiannya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan kota-kota besar dan metropolitan sehingga menjadi suatu kota yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona lindung, penciptaan aktivitas ekonomi melalui penyediaan ruang-ruang investasi beserta dukungan sistem transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, serta harapan penataan ruang Gorontalo 20 tahun ke depan, maka tujuan penataan ruang Gorontalo 2043 adalah :

"*Mewujudkan tatanan ruang wilayah Provinsi Gorontalo yang berkelanjutan dalam rangka optimalisasi sumber daya alam berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata serta peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang maju, unggul, sejahtera, dan handal*".

Muatan startegis dalam rencana tata ruang wilayah yaitu:

1. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia, terdiri atas:
    a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu KSN Kawasan Gorontalo – Paguyaman – Kwandang
    b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu KSN Danau Limboto dan KSNT Ekoregion Laut Sulu - Sulawesi
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yaitu KSN Perbatasan Negara Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, terdiri atas :
    a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :
        1) KSP Pariwisata Botumoito di Kabupaten Boalemo dan Laut;
        2) KSP Pariwisata Minanga di Kabupaten Gorontalo Utara dan Laut;

3) KSP Pertanian Terpadu Paguyaman-Wonosari di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo;
4) KSP Pertanian Terpadu Randangan dan sekitarnya di Kabupaten Pohuwato;
5) KSP Terintegrasi Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara dan Laut; dan
6) KSP Industri Terpadu Tibawa-Pulubala di Kabupaten Gorontalo

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu KSP Geopark Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo, dan Laut.

2.1.4.4. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Indeks Demokrasi

Kesadaran politik merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Kesadaran politik dan partisipasi politik memiliki hubungan yang berbanding lurus. Asumsinya bahwa semakin tinggi kesadaran politik maka semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat. Kesadaran politik dapat diukur dengan melihat capaian Indeks Demokrasi di suatu wilayah. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi di semua provinsi di Indonesia. Yang dijadikan aspek demokrasi dalam penyusunan IDI ini adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Pembangunan sosial dan politik diarahkan pada peningkatan kesadaran sosial dan politik demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan dinamis. Pada periode pembangunan 2020 Indeks Demokrasi provinsi Gorontalo mencapai nilai pada Kategori Baik. Namun kemudian pada tahun 2021 Indeks Demokrasi Provinsi Gorontalo kembali mengalami penurunan. Capaian Indeks Demokrasi Provinsi Gorontalo tentunya dipengaruhi oleh pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada di beberapa periode tahun yang berbeda. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Gorontalo jika dibandingkan dengan capaian Provinsi di Pulau Sulawesi berada di Posisi keempat setelah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dengan Aspek Lembaga Demokrasi yang capaiannya perlu ditingkatkan kedepannya.

b. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah dan telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Pengukuran IDSD 2022 ini mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Provinsi Gorontalo memiliki skor IDSD hamper setara skor nasional yakni sebesar 3,43. Tiga pilar yang memiliki skor lebih tinggi dari nasional adalah pilar institusi, stabilitas ekonomi makro, pasar produk, pasar tenaga kerja dan kapabilitas inovasi. Provinsi Gorontalo perlu berupaya lebih keras untuk meningkatkan skor pada pilar infrastruktur, adopsi TIK, kesehatan, keterampilan, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi. Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo memiliki rata-rata skor IDSD 2,83 yang berada dibawah skor provinsi.

c. Indeks Inovasi Daerah

Untuk mendorong tingkat daya saing dan optimalisasi otonomi daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, melalui Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri mengukur tingkat inovasi di suatu daerah, melalui indeks inovasi daerah.

Daya saing saat ini menjadi salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Tingkat daya saing suatu daerah juga menjadi salah satu ukuran kesejahteraan. Pemerintah dalam beberapa regulasi juga menekankan pentingnya kepala daerah melakukan inovasi untuk mendorong efektivitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, serta tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

Kinerja inovasi daerah baru dapat diukur melalui indikator Indeks inovasi Daerah pada tahun 2018, namun dalam dokumen perencanaan, kebijakan pemerintah terkait pengembangan inovasi, menciptakan nilai tambah dan pemberdayaan masyarakat sudah terdapat program dan kegiatan yang menunjang untuk pencapaian target inovasi daerah.

Capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari tahun ketahun. Provinsi Gorontalo saat ini berada di peringkat ke-24 dari 38 provinsi dalam skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2023 dengan nilai 44,63 dengan predikat inovatif. Nilai tersebut diperoleh dari 34 inovasi yang telah dilaporkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo pada tahun 2023. Jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan baik inovasi dari pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Rkpd Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD

Hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan sangat penting dalam memberikan gambaran pencapaian pembangunan. Hasil evaluasi pencapaian target indikator pembangunan nantinya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, serta sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan dan menentukan arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya. Target pembangunan Provinsi Gorontalo sebagaimana mengacu pada RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026.

Kinerja pembangunan daerah tahun 2024 merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan RPD 2023-2026, dimana capaian pembangunan ditunjukkan dengan realisasi indicator dan target

kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi target kinerja pembangunan selama tahun 2023, diuraikan sebagai berikut :

Tabel II.48

Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD

No	Aspek/BidangUrusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022		2023		2024		Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), melampaui (>)
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Fokus Kesejaheteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1.1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,41	7,27	4,04	6,21	4,50	6,42	4,13	<
1.2	IPM	69,82	69,62	70,62	69,68	71,25	70,02	72,01	>
1.3	PDRB per kapita ADHB (juta Rp)	37.170.549,65	28.155.865,91	39.886.776,66	35,94	42,35			>
1.4	Laju Inflasi Provinsi	2,59	3,30	5,15	2,03	4,40	2-3	2,87	<
1.5	Indeks Gini	0,381	0,36	0,423	0,398	0,417	0,396	0,413	<
1.6	Persentase Penduduk Miskin	15,41	14,69	15,51	15	15,15	14,54	13,87	=
1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,01	2,86	2,58	3,63	3,06	3,49	3,13	>
Fokus Kesejahteraan Sosial									
1.8	Harapan Lama Sekolah	13,11		13,12	13,24	13,16	13,24	13,17	=
1.9	Rata-rata Lama Sekolah	7,90	7,90	8,02	8,28	8,10	8,28	8,29	>
1.10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok 16-18	71,30		71,45	71,63	71,70	71,63	99,19	=
1.11	Persentase Satuan Pendidikan berakreditasi minimal B SMA/SMK (%)	SMA : 52 SMK : 39					SMA = 1:20 SMK = 1:15 SLB = 1 : 3	78/130 * 100 = 60%	>
1.12	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah	20,3					100%	100%	=
Fokus Budaya dan Agama									
1.13	Persentase warisan budaya benda/tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Benda: 15 ; Tak benda: 20			Benda: 30 Tak Benda: 35	5	Benda: 30 Tak Benda : 35	Benda: 30 Tak Benda : 35	<
1.14	Indeks Kerukunan Umat Beragama	68,74			69	71,9	69	72,71	>
1. **ASPEK PELAYANAN UMUM**									
Pelayanan Urusan Wajib									
Fokus Urusan Wajib									
2. Pendidikan									
2.1	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	77,75	78	81,49		86,05			>
3. Kesehatan									
3.1	Usia Harapan Hidup	68,19	68	68,51	68,80	70,50	68,4	70,72	>
3.2	Prevalensi Stunting	29			17	26,9	23	10,77	<
4. Pekerjaan Umum									

No	Aspek/BidangUrusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022		2023		2024		Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), melampaui (>)
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
4.1	Kondisi Mantap Jalan (%)	58	70	60,05	60,4	70,23	64,51	66,12	<
4.2	Persentase kinerja irigasi kewenangan provinsi	50%	55%		60%		65	87,76	>
5. Perumahan									
5.1	Persentase cakupan akses air minum layak (%)	94,57	94,96	96,16	95,35	100	95,75		>
5.2	Persentase cakupan akses sanitasi layak (%)	75,68	77,14	79,82	78,61	100	80,08		>
5.3	Penurunan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	24 Ha	38 Ha	38 Ha	19 Ha	26 Ha	7,38	7,69	>
6. Lingkungan Hidup									
6.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,32	73,39	79,79	74,31	79,52	74,82	78,5	>
7. Sosial									
7.1	Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan Kesehatan (UHC)	89,4%			91%	83,59	92	97,4	<
7.2	Cakupan Masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan social (%)	20			21	11,42	23	43,77	<
8. Pemerintahan									
8.1	Nilai MCP	89,72	91,2		92,65	81,50	94,1	81,7	<
8.2	Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)	63,90	64,5		65,1	77,75	65,7	77,75	>
8.3	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja	B	BB	B	BB	BB	BB	B	=
8.4	Indeks Kematangan Organisasi	48	48		48				
8.5	Indeks Kualitas Perencanaan	N/A	N/A	N/A	Kategori baik	87,6 baik	85	84,36	=
8.6	Opini pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
8.7	Indeks system Merit	238,5 (kurang)			292	322	300	327	>
8.8	Nilai Maturitas SPBE	2,51			2,77	3,22	2,79	4,13	>
8.9	Indeks Demokrasi	70,54			72		72	79,71	
8.10	Nilai Pengawasan Kearsipan	62,48					64	70,74	>
9. Ketahanan Pangan									
9.1	Indeks Ketahanan Pangan	80,40	81,86		83,22	80,35	86,04	81,95	<
10. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									

No	Aspek/BidangUrusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022		2023		2024		Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), melampaui (>)
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
10.1	Kemiskinan Perdesaan	24,32	23,78		23,5		22,38	21,62	>
10.2	Peningkatan status desa dari maju menjadi desa mandiri (Kawasan strategis provinsi/lokasi prioritas)	2	3		4		6 Desa	93 Desa	>
11. Komunikasi dan Informatika									
11.1	Nilai Maturitas SPBE	2,51	2,64	2,51	2,77	3,22	2,79	4,13	>
11.2	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	2		2,5		2,79	2,79	=
12. Penanggulangan Bencana									
12.1	Indeks Resiko Bencana	126,64	123,84		123	120,61	122,5	116,02	>
13. Penanaman Modal									
13.1	Realisasi PMA/PMDN (milyar)	10.145	11.345		11.824		2,8	3,563	>
14. Perhubungan									
14.1	Rasio Konektivitas antar wilayah (%)	0,553	0,553		0,553		0,553	0,553	=
15. Kepemudaan dan Olahraga									
15.1	Indeks Pembangunan Gender	86,74	86,93		87,03	88,24	87,13	88,24	>
15.2	Indeks Perlindungan Anak	64,49	66,12		67,57		67,7	60,46	<
15.3	Indeks Pembangunan Pemuda	48,17	50,58		51,59		52,62	57,83	>
16. Perpustakaan									
16.1	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	22,53	27,12		36,40		42,56	77,46	>
Pelayanan Urusan Pilihan									
17. Pertanian									
17.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,29	104,46	105,95	104,97	106,16	105,09	109,05	>
17.2	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	38,80	38,04		38,14	37,75	38,98	37,29	<
17.3	Nilai Tukar Usaha pertanian (NTUP)	108,55	105,01	108,44	109,90	115,84	113,18	105,29	>
18. Kehutanan									
18.1	Penurunan emisi GRK (%)	27,3							
19. Pariwisata									
19.1	Kontribusi PDRB sektor pariwisata	N/A	N/A		2,5	2,39	3%	2,29%	<
20. Kelautan dan Perikanan									
17.1	Nilai Tukar Nelayan/ Pembudidaya Ikan (NTN-Pi)	96,73	102,1	100,29	97,77	97,77	97,82	95,69	=

No	Aspek/BidangUrusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022		2023		2024		Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), melampaui (>)
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
21. Energi dan Sumber Daya Mineral									
21.1	Rasio Elektrifikasi (%)	99,2	99,3		99,5	99,18	99,70	99,99	=
22. Industri									
22.1	Kontribusi industry pengolahan terhadap PDRB	4,31	4,82		5,27	4,42	5,36	4,39	<
23. Perdagangan									
	Nilai Ekspor (juta USD)	13,2	15,59		18,03	37,96	19,52	60,1	>

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai Permasalahan dan hambatan dalam mewujudkan target-target pembangunan yang telah direncanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024. Beberapa permasalahan dalam pencapaian target pembangunan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya produktifitas ekonomi daerah, yang ditandai dengan kontribusi PDRB di bawah 0,2 persen terhadap PDB Nasional dan terrendah secara Nasional maupun Regional Sulawesi. PDRB Provinsi Gorontalo mencapai kurang lebih 47.574,4 Miliar Rupiah (2024). Produktifitas sektor perekonomian yang cenderung rendah diantaranya disebabkan karena kualitas SDM, inovasi dan pemanfaatan teknologi yang masih lemah. Proses produksi masih bersifat parsial dan masih rendahnya upaya hilirisasi sektor-sektor perekonomian khususnya disektor pertanian sebagai sumber utama perekonomian di Provinsi Gorontalo. Produktifitas rendah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang cenderung mengalami pelambatan dalam pertumbuhannya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode 2017-2022 sebesar 4,34 persen, tumbuh melambat dibanding periode 2012-2017 yang pertumbuhannya diatas 7 persen pertahunnya.
2. Transformasi ekonomi berjalan lambat. Struktur ekonomi Provinsi Gorontalo dari sisi lapangan usaha masih didominasi sektor primer Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi rata-rata sebesar 38 persen, sedangkan sektor manufaktur hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4% terhadap struktur PDRB. Dari sisi produksi permasalahan yang dihadapi disektor industri berkaitan dengan kualitas tenaga kerja dan adaptasi teknologi yang berimplikasi terhadap kualitas dan daya saing produk. Hal lainnya yaitu terkait dengan manajemen kemitraan dan distribusi pemasaran produk baik ekspor maupun perdagangan antar pulau yang cenderung masih belum optimal.
3. Produktifitas tenaga kerja dan pendapatan perkapita masyarakat masih cenderung rendah, yang di antaranya dipengaruhi oleh serapan tenaga kerja lebih besar disumbang dari

angkatan kerja dengan tingkat pendidikan lulusan SD/SMP sebesar 34,60 persen, dan pekerja yang tidak pernah mengeyam pendidikan sebesar 28,12 persen (tahun 2024). Selain itu ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi tenaga kerja belum mampu menjadi sarana pasar kerja yang baik dalam merespons cepat kebutuhan dan jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk dan pola budaya kerja. Persoalan lainnya tingkat serapan tenaga kerja masih cenderung rendah karena kesempatan kerja yang terbatas.

4. Sektor pariwisata cukup potensial namun masih belum berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah. Hal ini karena belum optimalnya pengelolaan kawasan-kawasan wisata strategis di Provinsi Gorontalo, ketersediaan infrastruktur sarana prasarana, amenitas, atraksi, dan aksesibilitas, SDM pariwisata masih belum cukup memadai. Pengembangan kawasan wisata dan promosi sektor pariwisata masih digarap secara konvensional dan parsial. Akselerasi investasi sektor pariwisata serta penciptaan branding lokal masih belum optimal.
5. Kondisi infrastruktur seperti jalan, irigasi masih belum optimal. Hal ini dilihat dari kondisi mantap jalan yang masih berada pada angka 60,05 persen. Berdasarkan kategori jalan, panjang jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 33,41 Km, dan rusak ringan sebesar 6,55 Km. Jika dilihat dari rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan di Provinsi Gorontalo, setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah ruas jalan belum sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan yang setiap tahunnya tumbuh rata-rata 0,12 persen. Disisi lain, kondisi Daerah Irigasi (DI) kewenangan Provinsi untuk jaringan irigasi saluran primer dan sekunder dengan panjang 137.713,58M dalam kondisi Baik 59,45 %sementara Rusak 40,54 %.Selain itu Masih rendahnya konektivitas antar wilayah, belum terbukanya beberapa ruas jalan di antaranya Marisa –Tolinggula, Tapa-Atinggola dan beberapa jalur strategis lainnya dalam mendorong pengembangan ekonomi.
6. Tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Gorontalo cenderung rendah dengan rata-rata selama 10 tahun terakhir sebesar 3,9 persen. Tingkat Setengah Penganggur di Provinsi Gorontalo masih mendominasi sebesar 6,10 persen ditahun 2022. Selain itu tingkat produktifitas masih rendah. Hal ini disebabkan karena menurut tingkat pendidikan, tenaga kerja didominasi oleh pendidikan menengah kebawah sebesar 86,59 persen tahun 2022. Menurut status pekerjaan utama, tenaga kerja masihdidominasi pada sektor informal sebesar 64,97 persen. Sedangkan menurut lapangan pekerjaan utama, serapan tenaga kerja masih didominasi disektor pertanian sebesar 33,3 persen, dengan tingkat upah yang relatif kecil. Fenomena lainnya menunjukkan bahwa kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja Laki-laki dan perempuan masih cukup tinggi. TPAK laki-laki sebesar 85,30 persen, sedangkan TPAK perempuan 52,64 persen. Sementara persentase usia muda (15-24) tahun yang sedang tidak sekolah, bekerja atau

mengikuti pelatihan Provinsi Gorontalo atau NEET (*Not Employment, Education and Training*) masih cukup tinggi sebesar 28,03 persen.

2.3.2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pada setiap Sasaran prioritas pembangunan yang perlu terus direduksi adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

1. Rendahnya penganekaragaman pangan dan optimalisasi Toko Tani Indonesia;
2. Rendahnya kualitas sarana prasarana pembibitan ternak, revitalisasi rumah potong hewan, penyediaan pakan ternak yang berkualitas untuk ternak ruminansia dan non-ruminansia, holding ground;
3. Rendahnya kualitas sarana prasarana untuk perikanan tangkap, Perikanan budidaya, Pelabuhan Perikanan, balai benih ikan/udang dan laboratorium perikanan;
4. Belum optimalnya Integrasi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan peternakan dan perikanan;
5. Belum optimalnya Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pangan;

Sasaran 2 : Meningkatnya nilai tambah produk unggulann daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian

1. Belum optimalnya investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan membangun kemitraan;
2. Belum optimalnya desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi industri, pengendalian dan pengawasan terhadap limbah industri;
3. Rendahnya produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan hubungan industrial;
4. Rendahnya kapasitas kelembagaan usaha koperasi, IKM dan UKM;
5. Kurangnya Digitalisasi promosi dan pemasaran;

Sasaran 3 : Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa

1. Belum optimalnya Revitalisasi lembaga ekonomi desa;
2. Kerjasama antar desa dan antar lembaga ekonomi desa belum terintegrasi;
3. Rendahnya sarana prasarana ekonomi desa;
4. Rendahnya infrastruktur ekonomi desa;
5. Belum optimalnya Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga berdasarkan potensi desa;

Sasaran 4 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

1. Rendahnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar;
2. Rendahnya pengelolaan dan penanganan sampah;
3. Rendahnya pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana;

4. Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum lainnya yang belum memadai;
5. Belum optimalnya kualitas pemanfaatan ruang;

Sasaran 5 : Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan

1. Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional;
2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan
3. Rendahnya kualitas kurikulum;
4. Belum optimalnya pengembangan Kerjasama Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha;
5. Belum optimalnya pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis entrepreneurship;
6. Rendahnya ketersediaan dan kualitas data pendidikan;
7. Belum optimalnya koordinasi dan advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM pendidikan.

Sasaran 6: Meningkatnya derajat kesahatan

1. Rendahnya sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan RSUD Ainun Habibie dan Labkesda;
2. Kurangnya ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan pada fasilitas Kesehatan provinsi;
3. Rendahnya kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi;
4. Belum optimalnya pengelolaan rujukan dan rujuk balik di fasilitas kesehatan;
5. Kurangnya promosi dan pemasaran Labkesda;

Sasaran 7 : Pemenuhan hak social dasar masyarakat

1. Belum optimalnya penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial;
2. Upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih rendah;
3. Upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti masih kurang;
4. Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu belum maksimal;
5. Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial belum optimal;
6. Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan ibu hamil belum optimal.

Sasaran 8: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuann dan Pemuda

1. Upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak belum maksimal;
2. Rendahnya kapasitas ekonomi perempuan;
3. Rendahnya keamanan perempuan dan anak dari kekerasan dan pelecehan seksual;
4. Potensi dan minat pemuda masih sangat rendah;
5. Jiwa wirausaha muda sangat kurang.

Sasaran 9: Meningkatnya pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama

1. Revitalisasi, pemanfaatan, aktualisasi, cagar, objek, nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo belum optimal;
2. Pengembangan, perlindungan hak dan pengelolaan kebudayaan belum maksimal;
3. Rendahnya sarana prasarana pusat pembinaan mental spiritual;
4. Pengembangan nilai-nilai keagamaan khususnya islam sebagai akar budaya daerah belum maksimal;
5. Rendahnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

Sasaran 10: Meningkatnya budaya literasi masyarakat

1. Peran perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan literasi peserta didik dan masyarakat belum optimal;
2. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra daerah belum maksimal;
3. Pengembangan teknologi informasi sebagai corong informasi literasi masyarakat yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat masih kurang;
4. Penguatan institusi sosial penggerak, penggiat dan pemerhati literasi sebagai mitra pemerintah dalam penguatan literasi masyarakat tidak maksimal.

Sasaran 11: Meningkatknya kualitas lingkungan hidup

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingungan Hidup belum optimal;
2. Rendahnya Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam pelaksanaan izin lingkungan / persetujuan lingkungan, SLO dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup;
3. Rendahnya kualitas SDM Lingkungan Hidup dan kehutanan Serta Pemberdayaan Masyarakat kehutanan;
4. Pembangunan Rendah Karbon masih kurang;
5. Rehabilitasi hutan dan lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan belum maksimal;

Sasaran 12: Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim

1. Rendahnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana;
2. Penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM belum optimal.

Sasaran 13: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

1. Penguatan manajemen institusi pemerintah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, penerapan standar internasional dalam mutu layanan publik, tata kelola pemanfaatan TIK belum optimal;
2. Proses bisnis organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan belum maksimal;
3. Transformasi digital dalam penerapan SPBE secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu perlu ditingkatkan;

4. Penerapan manajemen talenta ASN, dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai prioritas pembangunan, pengembangan pola karir structural dan fungsional, pelaksanaan talent pool JPT, implementasi Human Capital Development Plan (HCDP) dan pengembangan budaya kerja berakhlak belum optimal;
5. Penguatan kebijakan kesejahteraaan ASN dalam bentuk kebijakan insentif untuk ASN tingkat risiko pekerjaan tinggi, dan bertalenta (*high performance*) perlu ditingkatkan;
6. Perluasan implementasi sistem integritas, melalui penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan pengembangan dan implementasi sistem integritas ASN belum optimal;
7. Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui penyempurnaan kebijakan dan implementasi manajemen risiko, penguatan implementasi SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah perlu ditingkatkan;
8. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pernatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD sesuai UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan;
9. Pemanfaatan TIK untuk penguatan penerapan e-services dan Sistem Informasi Pelayanan Publik belum maksimal;
10. Kurangnya Penerapan replikasi inovasi pelayanan publik;

Sasaran 14 : Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah

1. Pencegahan kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan dan disabilitas masih belum optimal;
2. Rendahnya kerjasama dan koordinasi dengan lembaga kepolisian dan TNI;
3. Rendahnya kerukunan beragama dengan memperhatikan kesetaraan, keterwakilan, partisipasi etnis;
4. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila kurang maksimal;
5. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten masih kurang;
6. Rendahnya kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
7. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang baik perlu ditingkatkan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

RKPD Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 disusun sebagai bentuk respons terhadap perkembangan terkini pembangunan daerah dan implementasi Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penyempurnaan dokumen perencanaan. Sebagai dokumen strategis, RKPD Perubahan ini mengakomodir sepenuhnya kebijakan ASTA CITA yang merupakan penjabaran visi-misi kepemimpinan daerah terpilih, sekaligus menjaga keselarasan dengan RPJMD 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045 dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Proses penyempurnaan dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja pembangunan, analisis efektivitas program, serta penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan fiskal dan kebutuhan masyarakat. Hasilnya adalah dokumen yang lebih responsif dengan fokus pada optimalisasi program prioritas, realokasi anggaran berbasis kinerja, serta penyelarasan kegiatan seluruh SKPD dengan arahan pembangunan daerah yang baru. RKPD Perubahan ini sekaligus berfungsi sebagai instrumen transisi yang menjembatani periode RPJPD 2007-2025 dengan RPJPD 2025-2045, dengan tetap mempertahankan konsistensi program strategis daerah.

Melalui pendekatan yang lebih dinamis dan terukur, dokumen ini diharapkan mampu menjadi pedoman efektif bagi seluruh OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025. Penekanan pada sinergi antardaerah dan pembangunan berkelanjutan menjadi ciri khas RKPD Perubahan ini, yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah secara lebih tepat sasaran.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Gorontalo

Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Gorontalo tahun 2024 tumbuh sebesar 4,13 persen, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,50 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,48 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,24 persen.

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,44 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,34 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,65 persen

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2024 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 0,91 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 3,13 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,46 persen.

Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 7,48 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,42 persen; serta Konstruksi sebesar 6,41 persen

Tabel 3.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010, 2022-2024 (miliar rupiah)

	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2022	2023*	2024**	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18.073,20	19.386,98	20.344,28	10.907,95	11.365,50	11.719,48
B.	Pertambangan dan Penggalian	519,28	562,13	608,56	353,96	375,69	399,12
C.	Industri Pengolahan	2.170,69	2.273,93	2.396,85	1.332,27	1.338,40	1.381,62
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	23,96	25,65	26,07	27,24	28,95	29,48
E.	Pengadaan Air, Penge- lolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27,76	29,20	31,00	18,49	19,18	19,91
F.	Konstruksi	5.189,74	5.717,04	6.186,44	3.274,17	3.464,07	3.686,20
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.220,17	7.074,66	7.757,16	3.757,01	4.128,18	4.437,00
H.	Transportasi dan Pergu- dangan	2.668,65	3.040,11	3.296,35	1.693,94	1.798,58	1.887,77
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.076,17	1.156,14	1.250,17	720,53	761,86	810,81
J.	Informasi dan Komuni- kasi	1.286,08	1.370,73	1.463,12	1.095,92	1.140,60	1.193,96
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.192,18	2.070,44	2.123,19	1.302,73	1.206,46	1.216,34
L.	Real Estat	820,71	820,26	862,84	566,46	557,15	576,27
M,N.	Jasa Perusahaan	42,80	42,33	42,98	27,66	26,51	26,80
O.	Administrasi Pemerin- tahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.802,94	2.985,00	3.139,57	2.165,30	2.244,67	2.319,03
P.	Jasa Pendidikan	2.124,00	2.249,90	2.276,92	1.415,29	1.474,89	1.455,94
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.711,67	1.896,89	2.049,84	1.174,97	1.238,43	1.301,69
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	616,29	665,35	699,15	448,33	474,67	488,20
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**47.566,29**	**51.366,74**	**54.554,50**	**30.282,21**	**31.643,79**	**32.949,62**

Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo, 2025

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2022-2024
(persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan			Sumber Pertumbuhan		
		2022	2023*	2024**	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,29	4,19	3,11	0,84	1,51	1,12
B.	Pertambangan dan Penggalian	4,31	6,14	6,24	0,05	0,07	0,07
C.	Industri Pengolahan	7,85	0,46	3,23	0,33	0,02	0,14
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,12	6,29	1,83	0,01	0,01	0,00
E.	Pengadaan Air, Penge-lolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,13	3,75	3,82	0,00	0,00	0,00
F.	Konstruksi	5,70	5,80	6,41	0,61	0,63	0,70
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,24	9,88	7,48	1,09	1,23	0,98
H.	Transportasi dan Pergu- dangan	7,34	6,18	4,96	0,40	0,35	0,28
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,04	5,74	6,42	0,12	0,14	0,15
J.	Informasi dan Komuni- kasi	6,43	4,08	4,68	0,23	0,15	0,17
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	-5,63	-7,39	0,82	-0,27	-0,32	0,03
L.	Real Estat	4,22	-1,64	3,43	0,08	-0,03	0,06
M,N.	Jasa Perusahaan	9,93	-4,16	1,10	0,01	0,00	0,00
O.	Administrasi Pemerin- tahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,26	3,67	3,31	0,30	0,26	0,24
P.	Jasa Pendidikan	4,01	4,21	-1,29	0,19	0,20	-0,06
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,17	5,40	5,11	0,05	0,21	0,20
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	0,26	5,87	2,85	0,00	0,09	0,04
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**4,03**	**4,50**	**4,13**	**4,03**	**4,50**	**4,13**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

Tabel 3.3
Distribusi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)

	Lapangan Usaha	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,00	37,74	37,29
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,09	1,09	1,12
C.	Industri Pengolahan	4,56	4,43	4,39
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06
F.	Konstruksi	10,91	11,13	11,34
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,08	13,77	14,22
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,61	5,92	6,04
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,26	2,25	2,29
J.	Informasi dan Komunikasi	2,70	2,67	2,68
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,61	4,03	3,89
L.	Real Estat	1,73	1,60	1,58
M,N.	Jasa Perusahaan	0,09	0,08	0,08
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jami- nan Sosial Wajib	5,89	5,81	5,75
P.	Jasa Pendidikan	4,47	4,38	4,17
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,60	3,69	3,76
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1,30	1,30	1,28
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo di Regional Sulawesi menjadi capaian terendah di antara seluruh Provinsi di bawah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sedangkan untuk Kawasan Timur Indonesia, Provinsi Gorontalo masih di atas capaian dari Provinsi Papua Barat Daya dan Papua. Dilihat dari segi kontribusi terhadap Perekonomian Sulampua, Provinsi Gorontalo memberikan sumbangsih sebesar 2,52%.

PDRB Per Kapita

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro dapat digambarkan dengan indikator pendapatan per kapita atau *percapita income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini, digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Namun peningkatan PDRB perkapita sebagaimana tabel 3.4 dibawah belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum. Hal ini disebabkan karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi.

Tabel 3.4
PDRB Per Kapita Gorontalo Tahun Dasar 2010, 2022 - 2024

PDRB Perkapita ADHB	2022	2023	2024
Nilai (Rupiah)	39.690.935	42.340.504	44.432.945
Nilai (US$)	2.673	2.778	2.803

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2025

Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/ deflasi) di tingkat konsumen, khusunya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari presentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada Desember 2024 terjadi deflasi *year-on-year (y-on-y)* Provinsi Gorontalo sebesar 0,79 persen dengan IHK sebesar 106,60. Kota Gorontalo mengalami *deflasi year-on-year (y-on-y)* sebesar 1,10% dengan IHK sebesar 105,57 dan Kabupaten Gorontalo mengalami deflasi *year-on-year (y-on-y)* sebesar 0,53% dengan IHK sebesar 107,90.

Tabel 3.5
IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Gorontalo Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2023	IHK November 2024	IHK Desember 2024	Tingkat Inflasi *m-to-m* Desember 2024 1) (%)	Tingkat Inflasi *y-to-d* Desember 2024 2) (%)	Tingkat Inflasi *y-on-y* Desember 2024 3) (%)	Andil Inflasi *m-to-m* Desember 2024 (%)	Andil Inflasi *y-on-y* Desember 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	**107,45**	**106,00**	**106,60**	**0,57**	**-0,79**	**-0,79**	**0,57**	**-0,79**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	114,74	109,08	110,81	1,59	-3,43	-3,43	0,56	-1,26
Pakaian dan Alas Kaki	101,19	104,04	104,01	-0,03	2,79	2,79	~0	0,19
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,12	102,13	102,12	-0,01	~0	~0	~0	~0
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	99,20	98,12	98,28	0,16	-0,93	-0,93	0,01	-0,05
Kesehatan	102,37	103,77	103,77	~0	1,37	1,37	~0	0,03
Transportasi	110,16	109,24	109,30	0,05	-0,78	-0,78	0,01	-0,08
Informasi, Komu- nikasi, dan Jasa Keuangan	100,99	100,19	100,19	~0	-0,79	-0,79	~0	-0,04
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,41	102,09	102,44	0,34	1,02	1,02	0,01	0,02
Pendidikan	101,41	101,96	101,96	~0	0,54	0,54	~0	0,02
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	104,96	107,36	107,37	0,01	2,30	2,30	~0	0,15
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	105,73	109,47	109,11	-0,33	3,20	3,20	-0,02	0,23

Catatan:
1) Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK November 2024.
2) Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK Desember 2023.
3) Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK Desember 2023.
~0: Data sangat kecil/mendekati nol
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

Pada Desember 2023, deflasi y-on-y Provinsi Gorontalo terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks pada empat kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,43 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,93 persen; kelompok transportasi sebesar 0,78 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,79 persen. Enam kelompok pengeluaran mengalami inflasi y-on-y yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,79 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,37 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,02 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,54 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,30 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,20 persen. Sementara kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tidak mengalami perubahan indeks secara signifikan.

Selain pendapatan perkapita dan perubahan inflasi, saat ini Indeks Gini atau ***Gini Ratio*** telah menjadi salah satu aspek yang bisa menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat. Indeks Gini adalah indikator yang mengindikasikan berapa besar tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Nilai Gini Ratio Gorontalo selama periode Maret 2019 - September 2024 terus mengalami fluktuasi. Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Gorontalo yang diukur oleh Gini Ratio bernilai 0,413. Angka ini turun sebesar 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,414

Menurut wilayah tempat tinggal, Gini Ratio di wilayah perkotaan pada September 2024 adalah 0,400. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 0,003 poin dibanding Maret 2024 yang sebesar 0,397. Untuk wilayah perdesaan, Gini Ratio pada September 2024 sebesar 0,402, turun 0,006 poin dibandingkan Maret 2024. Nilai Gini Ratio pada Maret 2024 di wilayah perdesaan lebih tinggi dari pada Gini Ratio di wilayah perkotaan menunjukan pengeluaran di wilayah perdesaan relatif tidak merata dibanding wilayah perkotaan.

Tabel 3.6

Distribusi Pengeluaran Penduduk Gorontalo (persen), Maret 2023, Maret 2024 dan September 2024

Wilayah/Periode	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Maret 2023	16,75	35,50	47,75	100
Maret 2024	17,34	35,07	47,59	100
September 2024	17,71	33,89	48,28	100
Perdesaan				
Maret 2023	16,64	35,58	47,78	100
Maret 2024	16,82	34,36	48,82	100
September 2024	16,63	36,26	47,11	100
Perkotaan+Perdesaan				
Maret 2023	15,87	35,48	48,65	100

Maret 2024	16,44	34,96	48,60	100
September 2024	16,57	35,09	48,35	100

Gambaran kondisi sosial masyarakat di Gorontalo juga dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan dan kemiskinan.

Pengangguran, Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo. Penduduk usia kerja Provinsi Gorontalo pada Agustus 2024 sebanyak 932.926 orang, naik sebanyak 12.653 orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 652.588 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 280.338 orang.

Komposisi angkatan kerja Provinsi Gorontalo pada Agustus 2024 terdiri dari 632.184 orang penduduk bekerja dan 20.404 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 1.163 orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 663 orang, sementara pengangguran bertambah sebanyak 500 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Gorontalo mengalami fluktuasi sejak Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 69,95 persen, turun 0,84 persen poin dibanding Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 84,50 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 55,23 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,84 persen persen poin.

Tabel 3.7

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Provinsi Gorontalo, Februari 2022-Februari 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2023–Ags 2024	
	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	883.318	893.745	905.361	914.951	920.273	932.926	12.653	1,37
Angkatan Kerja	595.223	593.973	596.968	630.534	651.425	652.588	1.163	0,18
- Bekerja	572.841	568.563	579.009	614.250	631.521	632.184	663	0,10
- Pengangguran	22.382	25.410	17.959	16.284	19.904	20.404	500	2,51
Bukan Angkatan Kerja	288.095	299.772	308.393	284.417	268.848	280.338	11.490	4,27
	persen	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,38	66,46	65,94	68,91	70,79	69,95	-0,835	
- Laki-Laki	84,77	83,02	81,60	85,30	85,34	84,50	-0,841	
- Perempuan	50,03	49,95	50,41	52,64	56,07	55,23	-0,842	

Tabel 3.8
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo Maret 2023 – September 2024

Wilayah/Periode	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2023	4,47	24,12
Maret 2024	4,57	25,46
September 2024	4,99	28,49
Perdesaan		
Maret 2023	23,73	159,60
Maret 2024	22,97	152,53
September 2024	21,62	141,54
Perkotaan+Perdesaan		
Maret 2023	15,15	183,71
Maret 2024	14,57	177,99
September 2024	13,87	170,03

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Secara umum, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada periode Maret 2017–September 2024 mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Penurunan tingkat kemiskinan paling siginihan terjadi pada September 2018, yakni sebesar 0,98 persen poin dibandingkan Maret 2018. Pandemi Covid-19 yang mencapai puncak pada periode September 2020-Maret 2021 menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan. Tingkat kemiskinan pada September 2021, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2021. Pada Maret 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dibandingkan September 2021 dan kembali mengalami kenaikan pada September 2022. Kemudian pada periode Maret 2023-September 2024 tingkat kemiskinan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2017 sampai dengan September 2024.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2024 mencapai 107,03 ribu orang. Bila dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 7,96 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 13,87 persen, menurun 0,70 persen poin terhadap Maret 2024. Menurut wilayah tempat tinggal, pada Maret 2024 dibandingkan September 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 3,03 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 10,99 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 4,57 persen menjadi 4,99 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 22,97 persen menjadi 21,62 persen.

Tabel 3.9

Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Gorontalo Menurut Daerah Tempat Tinggal, Maret 2023 - September 2024

Wilayah/Periode	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2023	327.347	117.450	444.797
Maret 2024	353.297	122.554	475.851
September 2024	372.700	122.625	495.325
Perubahan Mar'23-Sept'24 (%)	13,85	4,41	11,36
Perubahan Mar'24-Sept'24 (%)	5,49	0,06	4,09
Perdesaan			
Maret 2023	348.718	90.295	439.013
Maret 2024	374.832	94.736	469.568
September 2024	385.233	95.074	480.307
Perubahan Mar'23-Sept'24 (%)	10,47	5,29	9,41
Perubahan Mar'24-Sept'24 (%)	2,77	0,36	2,29
Perkotaan+Perdesaan			
Maret 2023	339.799	102.395	442.194
Maret 2024	365.613	107.393	473.006
September 2024	379.715	107.863	487.578
Perubahan Mar'23-Sept'24 (%)	11,75	5,34	10,26
Perubahan Mar'24-Sept'24 (%)	3,86	0,44	3,08

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Berdasarkan kondisi perekonomian Gorontalo ditahun 2024 yang menunjukkan tumbuhnya beberapa sektor non Pertanian, perbaikan kualitas belanja Pemerintah hasil dari efisiensi dan pencadangan APBD yang digunakan untuk membiayai program unggulan dan kegiatan yang langsung menyasar target / outcome utama Pembangunan daerah, didukung dengan pelaksanaan program Pemerintah Pusat seperti Makan Bergizi Gratis yang akan memberikan nilai tambah PDRB sektor UMKM dan penyediaan bahan baku produksi seperti beras, telur, daging, ikan dan sayur dengan perkiraan 85% dana yang masuk ke SPPG adalah untuk membeli bahan baku, maka Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Gorontalo Tahun 2025 tercantum pada tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.10

Indikator Ekonomi Makro Gorontalo Tahun 2025

No	Indikator	Perkiraan capaian tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,54
2.	Inflasi (%)	2 - 3
3.	Penduduk miskin (%)	13,54
4.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,75
5.	Indeks Gini	0,417
6.	IPM	71,3

Sumber : Tim KEMD Bapppeda Provinsi Gorontalo, 2025

3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 2025

Global, Pertumbuhan Ekonomi Global sesuai dengan proyeksi Bank Dunia akan menempati angka 2,7% pada tahun 2026 spesifik untuk Pertumbuhan Ekonomi di negara – negara berkembang diperkirakan akan stabil pada kisaran 4% selama dua tahun ke depan. Faktor konsumsi Batubara global akan mulai menyusut pada tahun 2025 dan 2026 yang sebagian besar permintaannya oleh negara AS, Eropa dan China disebabkan oleh meningkatnya penggunaan energi terbarukan dan gas alam.

Berdasarkan laporan Bank Dunia yang berjudul Global Economic Prospects pada Januari 2025 menunjukkan bahwa ekspansi global yang moderat dan luas pada 2025-2026, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,7% per tahun, seiring dengan meningkatnya perdagangan dan investasi. Pertumbuhan global mulai stabil seiring dengan inflasi yang kembali mendekati target dan pelonggaran moneter yang mendukung aktivitas di negara-negara maju serta negara-negara pasar berkembang dan berkembang (EMDEs).

Kondisi keuangan global sedikit mereda secara keseluruhan sejak pertengahan 2024, terutama karena dimulainya pelonggaran moneter di Amerika Serikat dan meningkatnya selera risiko secara umum. Suku bunga kebijakan di negara-negara maju diperkirakan akan sedikit menurun lebih lanjut tahun ini, tetapi tetap jauh di atas tingkat yang sangat rendah pada 2010-an. Beban layanan utang yang terus meningkat tetap menjadi hambatan besar bagi aktivitas ekonomi di negara-negara dengan kerentanan keuangan yang tinggi, terutama di banyak negara berpenghasilan rendah (LICs). Di antara negara-negara berpenghasilan menengah dengan peringkat kredit yang lemah, spread utang negara telah mengalami normalisasi secara substansial tahun lalu, meskipun biaya pinjaman tetap jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2010-an.

Pelemahan jangka panjang dalam dinamika ekonomi juga tercermin dalam ukuran pertumbuhan potensial: secara keseluruhan, pertumbuhan potensial global diperkirakan telah menurun sekitar sepertiga sejak tahun 2000-an. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi pada dunia, melainkan juga pada Emerging market and developing economies (EMDE) maupun East Asia and Pacific.

Setelah turun menjadi 4,1% tahun lalu, pertumbuhan di negara-negara pasar berkembang dan berkembang (EMDEs) diproyeksikan akan tetap berada di kisaran tersebut selama 2025-2026, sejalan dengan perkiraan pertumbuhan potensial. Perlambatan aktivitas di China diperkirakan akan sebagian besar diimbangi oleh menguatnya pertumbuhan di negara-negara EMDE lainnya, meskipun dengan variasi antar wilayah.

Ekonomi Nasional,

Tahun 2025 merupakan periode transisi baik dari segi kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ada di Pemerintahan baik pusat dan daerah, dimana banyak

alokasi anggaran yang menjadi refocusing termasuk dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang sebagian besar menjadi komponen utama penyusun APBD. Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) praktis membutuhkan sumber dana yang besar, mengingat kebijakan ini ditargetkan mencakup seluruh siswa di tingkatan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menjadi penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dari semula 71 Trilyun yang dianggarkan untuk Tahun 2025, mengalami kenaikan hampir 140% menjadi 170 Trilyun yang dianggarkan Pemerintah Pusat. Komponen TKD yang menjadi refocusing antara lain kebijakan Dana Alokasi Khusus pada bidang selain Pendidikan dan Kesehatan, sehingga bidang lainnya seperti jalan, irigasi, pertanian dan kelautan perikanan tidak mendapatkan alokasi dana tersebut. Di tengah berbagai dinamika kebijakan Pemerintah Pusat, Bank Dunia memperkirakan Indonesia akan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% pada tahun 2025 dan 2026. Angka ini menunjukkan kestabilan meski di tengah perlambatan pertumbuhan global yang diperkirakan berada di angka 2,7% pada periode yang sama.

Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Januari 2025, Indonesia tetap menjadi salah satu dari sedikit negara berkembang yang berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan ekonominya. Selain beberapa hal di atas, ada faktor lain yang perlu diperhatikan seperti faktor eksternal ketegangan geopolitik antara Amerika dan China, serta dampak perubahan iklim tetap menjadi ancaman yang perlu diantisipasi serta faktor inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dan pelonggaran kebijakan moneter yang lebih lambat dan bencana alam menimbulkan risiko penurunan lebih lanjut.

Sedangkan jika merujuk pada Bank Indonesia, maka Ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 4,8 – 5,6% dengan inflasi yang terkendali di rentang 2,5±1% dengan upaya penuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Faktor pendukung termasuk peningkatan permintaan domestik, kebijakan fiskal yang konsisten, dan pertumbuhan perdagangan yang tetap stabil. Pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah reformasi yang mencakup liberalisasi perdagangan, stabilisasi makroekonomi, dan reformasi perusahaan publik membantu mengintegrasikan Indonesia ke dalam ekonomi global

Ekonomi Gorontalo,

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo pada 2024 didorong oleh lapangan usaha pertanian dan perdagangan, seiring dengan target produksi komoditas utama yang mengalami peningkatan meski dalam jumlah yang terbatas. Sementara itu lapangan usaha utama lainnya seperti konsumsi domestik tumbuh positif dan menjadi menjadi penopang perekonomian daerah

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari tahapan Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2025 – 2029 yang mengusung tagline Gorontalo Maju dan Sejahtera dengan 5 Program Unggulan, yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia, UMKM, Agro Maritim, Pariwisata dan Infrastruktur. Meskipun dengan berbagai keterbatasan seperti pemberlakukan kebijakan efisiensi Belanja Pemerintah yang

berpengaruh pada komponen dana TKD seperti DAU dan DAK, agenda Pembangunan di Provinsi Gorontalo tetap berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang sudah ditentukan.

Dari hasil analisis *existing* dan *forecasting* pada tahun 2025, pada skenario low Pertumbuhan Ekonomi berada pada angka 4,20%, moderate 5,54% dan high pada capaian 7,04%. Sedangkan untuk tahun 2026 pada skenario low pada angka 4,14%, moderate pada 5,65% dan 7,39%. Hal ini berdasarkan asumsi komponen pendapatan daerah dan investasi yang merupakan sektor penggerak yang memiliki multiplier effect pada pertumbuhan PDRB Provinsi Gorontalo. Selain itu program Agro Maritim diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan perbaikan tata kelola dan manajemen keuangan sektor nelayan dan perikanan yang selama ini potensinya belum dimanfaatkan secara maksimal.

Perbaikan pada infrastruktur, akses dan amenitas pariwisata diharapkan dapat memberikan tambahan *spending time* wisatawan yang ada di Lokasi prioritas wisata yang ada di Provinsi Gorontalo, sehingga sektor riil di sekitar kawasan wisata akan lebih masif bergerak. Ditetapkannya Provinsi Gorontalo sebagai sentra kawasan pengolahan tanaman pangan dan Perkebunan oleh Pemerintah pusat diharapkan dapat menghadirkan investasi baru yang mendukung hilirisasi sektor primer sehingga bisa memberikan *added value* pada komoditi strategis yang dihasilkan oleh daerah ini. Dari sektor pertambangan, Proyek Emas Pani *(Pani Gold Project)* di Kabupaten Pohuwato ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2025 dan diproyeksikan akan menjadi tambang emas primer terbesar di Indonesia dan Asia Pasifik, maka otomatis akan memberikan signifikansi pada share dan pertumbuhan komponen PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian yang pada Triwulan III tahun 2024 menempati peringkat kedua Lapangan Usaha (LU) dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 8,50% *YoY* setelah LU sektor Perdagangan.

Dengan memperhatikan berbagai hal di atas maka untuk proyeksi IKU 205 dan target 2026 dicantumkan pada tabel berikut :

Tabel. 3.11
Proyeksi dan Target Indikator Makro Provinsi Gorontalo 2025-2026

Indikator	Proyeksi 2025	Target 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,54	5,36
Kemiskinan (%)	13,54	13,08
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,75	2,95
Indeks Gini	0,417	0,406
Indeks Modal Manusia	-	0,50
Inflasi (%)	2 – 3 %	2 - 3 %

Sumber : Tim KEMD Bapppeda Provinsi Gorontalo, 2025

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan serta lain-lain PAD yang sah Arah pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya. Proyeksi/target pendapatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.13
Realisasi Pendapatan 2019 s/d 2024

URAIAN	2019 (Rp)	2020 (Rp)	%	2021 (Rp)	%	2022 (Rp)	%	2023 (Rp)	%	APBD Induk 2024 (Rp)	%	Rata-rata pertumbuhan (%)
PENDAPATAN	1.941.076.769.545,85	1.862.646.444.965,92	- 4,04	1.968.370.374.668,08	5,68	1.848.593.656.987,83	- 6,09	1.872.487.105.528,68	1,29	*1.892.294.926.120,00*	1,06	- 0,63
Pendapatan Asli Daerah	*433.427.781.398,85*	*414.861.588.271,92*	- 4,28	*509.512.324.459,08*	22,82	510.337.164.773,83	0,16	*511.931.921.680,68*	0,31	*503.192.709.120,00*	- 1,71	3,80
Pajak Daerah	387.400.916.778,00	352.171.235.900,00	- 9,09	400.833.243.843,00	13,82	440.543.999.280,00	9,91	432.906.096.022,00	- 1,73	437.626.291.107,00	1,09	2,58
Retribusi Daerah	22.284.470.358,00	6.496.155.533,00	- 70,85	5.575.147.290,00	- 14,18	5.003.122.986,00	- 10,26	4.232.976.524,00	- 15,39	35.895.605.572,00	748,00	- 22,14
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.679.904.143,00	3.230.454.894,00	- 43,12	5.092.544.065,00	57,64	5.590.830.014,00	9,78	11.012.325.878,00	96,97	10.219.035.031,00	- 7,20	24,25
Lain-lain PAD yang sah	18.062.490.119,85	52.963.741.944,92	193,23	98.011.389.261,08	85,05	59.199.212.493,83	- 39,60	63.780.523.256,68	7,74	19.451.777.410,00	- 69,50	49,28
Pendapatan Transfer	*1.505.443.391.824,00*	*1.441.616.534.886,00*	- 4,24	*1.456.453.867.885,00*	1,03	*1.334.494.317.475,00*	- 8,37	*1.350.262.842.740,00*	1,18	*1.388.003.873.000,00*	2,80	- 2,08
Dana Bagi Hasil	15.785.726.900,00	19.918.910.232,00	26,18	24.656.712.135,00	23,79	23.900.291.978,00	- 3,07	23.449.484.007,00	- 1,89	18.660.996.000,00	- 20,42	9,00
Dana Alokasi Umum	1.043.126.752.000,00	944.270.446.000,00	- 9,48	940.639.321.000,00	- 0,38	940.903.029.000,00	0,03	979.869.891.000,00	4,14	1.006.766.241.000,00	2,74	- 1,14
Dana Alokasi Khusus	436.242.138.924,00	445.006.020.654,00	2,01	451.415.054.750,00	1,44	299.040.640.497,00	- 33,75	316.498.122.733,00	5,84	354.893.754.000,00	12,13	- 4,89
Dana penyesuaian dan otonomi khusus (DID)	10.288.774.000,00	32.421.158.000,00	215,11	39.742.780.000,00	22,58	70.650.356.000,00	77,77	30.445.345.000,00	- 56,91	7.682.882.000,00	- 74,77	51,71
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	*2.205.596.323,00*	*6.168.321.808,00*	179,67	*2.404.182.324,00*	- 61,02	*3.762.174.739,00*	56,48	*10.292.341.108,00*	173,57	*1.098.344.000,00*	- 89,33	69,74
Hibah	2.058.820.031,00	5.308.321.808,00	157,83	1.959.237.740,00	- 63,09	3.264.864.061,00	66,64	9.707.761.108,00	197,34	598.344.000,00	- 93,84	71,74
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	146.776.292,00	860.000.000,00	485,93	444.944.584,00	- 48,26	497.310.678,00	11,77	584.580.000,00	17,55	500.000.000,00	- 14,47	93,40

Pada tahun tahun 2024 secara Pertumbuhan Realisasi Pendapatan naik sebesar 1,06% jika dibandingkan tahun 2023 dengan total Rp. 1.892.294.926.120. Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 - 2024 jika dirata – rata adalah sebesar – 3,80% dengan penurunan sebesar 8 Milyar pada tahun 2024 untuk kategori Pajak Daerah. Sedangkan peningkatan terbesar ada pada komponen Retribusi Daerah yang naik sebesar 748% yang pada tahun 2023 hanya sebesar 4,2 M, untuk tahun 2024 menjadi sebesar 35 M yang merupakan kontribusi dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hasri Ainun Habibie. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 diprediksi turun 23,90 % (disesuaikan dengan realisasi Tahun 2023 serta kebijakan dana transfer pemerintah pusat). Proyeksi pendapatan asli daerah tahun 2025 diprediksi turun 17,32% (disesuaikan dengan realisasi Tahun 2023 serta kebijakan dana transfer pemerintah pusat). Dana transfer tahun 2025 masih diproyeksikan sama kecuali DAK yang belum di anggarkan disebabkan oleh trend realisasi, kondisi keuangan negara dan kebijakan pemerintah pusat terhadap dana transfer ke daerah. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain kenaikan belanja pegawai (acrees) sebesar 2,5%, Belanja Bunga Pinjaman Daerah, belanja dan Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota di sesuaikan dengan target pajak daerah yang mengalami penurunan. Penerimaan Pembiayaan daerah disesuaikan dengan perkembangan SiLPA dan posisi kas daerah dan Pengeluaran pembiayaan di tujukan untuk penyertaan modal dan untuk Pembayaran Pokok Cicilan Utang dari Pinjaman PEN

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2020, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah serta pembayaran Pinjaman dan Bunga PEN yang sebagian besar proyeknya sudah dalam tahap finalisasi. Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu pada tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas yang terkandung didalam RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026. Kebijakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efesien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan belanja daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan pendekatan *money follow program* (anggaran berorientasi pada program), untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dan kinerja dirumuskan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD guna peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah secara umum diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi berimbang karena adanya anggaran pembiayaan daerah.

Kebijakan belanja pada tahun berjalan 2025 dalam pemanfaatan SiLPA berfokus pada penanggulangan Kewajiban Jangka Pendek yang harus diselesaikan, seperti Utang Pinjaman, Utang Bunga, dan Utang Jangka Pendek dan Jangka Panjang lainnya.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk ”menutup defisit” atau ”memanfaatkan surplus” anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Dengan kata lain pembiayaan menunjukkan penerimaan maupun pengeluaran kas yang akan dibayar kembali atau diterima kembali.

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun berjalan 2025

Provinsi Gorontalo mengalami penurunan signifikan dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar 41,73% dari Rp170,91 miliar pada TA 2023 menjadi Rp99,59 miliar pada TA 2024. Kondisi ini mengindikasikan perubahan dinamika fiskal yang perlu mendapat perhatian serius. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor kunci, antara lain realisasi pendapatan yang lebih rendah dari proyeksi, peningkatan belanja daerah yang tidak diimbangi pertumbuhan penerimaan, atau percepatan penyerapan anggaran pada program-program prioritas. Fenomena ini memerlukan langkah antisipatif melalui optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, dan penguatan instrumen pembiayaan daerah untuk menjaga stabilitas keuangan.

Struktur pembentuk SiLPA TA 2024 menunjukkan komposisi yang menarik dengan dominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp44,20 miliar (44,38%), diikuti oleh DAU Sektor Guru sebesar Rp15,13 miliar (15,20%), serta kontribusi signifikan dari BLUD RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie sebesar Rp13,36 miliar (13,42%). Pola ini mengungkap dua hal penting: pertama, PAD masih menjadi tulang punggung utama keuangan daerah, dan kedua, adanya ketergantungan yang cukup besar pada transfer pusat melalui DAU dan DAK. Kontribusi BLUD RSUD yang cukup besar sekaligus menunjukkan potensi pengembangan badan layanan umum lainnya sebagai sumber pendapatan alternatif. Namun fluktuasi transfer pusat yang rentan terhadap perubahan kebijakan nasional mengharuskan pemerintah daerah mengembangkan strategi mitigasi melalui penguatan basis pendapatan mandiri.

Berdasarkan analisis tersebut, RKPD Perubahan 2025 perlu memformulasikan beberapa langkah strategis. Prioritas utama adalah penguatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD dengan memperluas basis pajak dan retribusi, serta peningkatan efektivitas pemungutan. Kedua, replikasi model keberhasilan BLUD RSUD ke unit layanan publik lainnya seperti pendidikan dan infrastruktur. Ketiga, percepatan dan efisiensi penyerapan DAK Fisik/Non-Fisik untuk memastikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah. Selain itu, penerapan perencanaan anggaran berbasis kinerja menjadi penting untuk menjaga keseimbangan fiskal sekaligus mendukung program-program prioritas. Dengan pendekatan komprehensif ini, Provinsi Gorontalo dapat memitigasi risiko penurunan SiLPA sekaligus memacu pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara keseluruhan, ringkasan perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dapat dicermati pada matriks berikut:

PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**403.422.053.800,00**	**403.422.053.800,00**	**0,00**
4.1.01	Pajak Daerah	357.247.042.700,00	357.247.042.700,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	35.423.011.100,00	35.423.011.100,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.752.000.000,00	5.752.000.000,00	0,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.353.799.062.000,00**	**1.271.015.077.000,00**	**-82.783.985.000,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.353.799.062.000,00	1.271.015.077.000,00	-82.783.985.000,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**0,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**1.757.621.115.800,00**	**1.674.837.130.800,00**	**-82.783.985.000,00**
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.472.022.894.443,00**	**1.435.002.273.993,00**	**-37.020.620.450,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	826.755.857.780,00	826.514.412.915,00	-241.444.865,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.367.263.087,00	582.093.087.502,00	-36.274.175.585,00
5.1.03	Belanja Bunga	5.854.466.805,00	5.854.466.805,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	15.812.306.771,00	13.812.306.771,00	-2.000.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.233.000.000,00	6.728.000.000,00	1.495.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**138.932.603.498,00**	**112.074.167.848,00**	**-26.858.435.650,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.241.062.820,00	35.092.992.108,00	-1.148.070.712,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.713.503.670,00	50.651.898.790,00	8.938.395.120,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.802.237.008,00	24.191.476.950,00	-34.610.760.058,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	175.800.000,00	137.800.000,00	-38.000.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**34.209.475.410,00**	**12.104.546.510,00**	**-22.104.928.900,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	34.209.475.410,00	12.104.546.510,00	-22.104.928.900,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**160.563.726.205,00**	**163.763.726.205,00**	**3.200.000.000,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	159.822.223.203,00	159.822.223.203,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	741.503.002,00	3.941.503.002,00	3.200.000.000,00
	Jumlah Belanja	**1.805.728.699.556,00**	**1.722.944.714.556,00**	**-82.783.985.000,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-48.107.583.756,00**	**-48.107.583.756,00**	**0,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**70.042.967.000,00**	**70.042.967.000,00**	**0,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.042.967.000,00	70.042.967.000,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**21.935.383.244,00**	**21.935.383.244,00**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.935.383.244,00	16.935.383.244,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**21.935.383.244,00**	**21.935.383.244,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**48.107.583.756,00**	**48.107.583.756,00**	**0,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 disusun sebagai bentuk respons terhadap perkembangan terkini pembangunan daerah dan implementasi Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penyempurnaan dokumen perencanaan. Sebagai dokumen strategis, RKPD Perubahan ini mengakomodir sepenuhnya kebijakan ASTA CITA yang merupakan penjabaran visi-misi kepemimpinan daerah terpilih, sekaligus menjaga keselarasan dengan RPJMD 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045 dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Proses penyempurnaan dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja pembangunan, analisis efektivitas program, serta penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan fiskal dan kebutuhan masyarakat. Hasilnya adalah dokumen yang lebih responsif dengan fokus pada optimalisasi program prioritas, realokasi anggaran berbasis kinerja, serta penyelarasan kegiatan seluruh SKPD dengan arahan pembangunan daerah yang baru. RKPD Perubahan ini sekaligus berfungsi sebagai instrumen transisi yang menjembatani periode RPJPD 2007-2025 dengan RPJPD 2025-2045, dengan tetap mempertahankan konsistensi program strategis daerah.

Melalui pendekatan yang lebih dinamis dan terukur, dokumen ini diharapkan mampu menjadi pedoman efektif bagi seluruh OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025. Penekanan pada sinergi antardaerah dan pembangunan berkelanjutan menjadi ciri khas RKPD Perubahan ini, yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah secara lebih tepat sasaran.

4.1. Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 difokuskan pada *Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.*

Tujuan pertama yakni Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan akan dicapai melalui 2 strategi yakni menciptakan sumber pertumbuhan baru pada sisi produksi (*supply side*) yang merata dan meningkatkan sisi permintaan (*demand side*) didukung oleh sektor rill, eksternal, fiskal, dan keuangan. Untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru pada sisi produksi (*supply side*) yang merata akan didorong melalui : peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, mendorong pembangunan industry pengolahan untuk mendukung hilirisasi, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta peningkatan aktivitas wisatawan bernilai tambah tinggi dan pengembangan ekonomi kreatif. Selanjutnya untuk meningkatkan sisi permintaan (*demand side*) didukung oleh sektor rill, eksternal, fiskal, dan keuangan akan didorong melalui upaya : menjaga konsumsi masyarakat melalui peningkatan peran kelas menengah dan produktivitas tenaga kerja, mendorong investasi

berkualitas berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan ekspor dan perdagangan antar pulau serta mendorong partisipasi swasta.

Tujuan ini diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB perkapita, dan Indeks Daya Saing Daerah.

Tujuan kedua yaitu penurunan kemiskinan dan kesenjangan akan dilakukan melalui strategi utama yakni pemberdayaan ekonomi berkelanjutan & lnovatif, perlindungan sosial yang lntegratif, adaptif dan inklusif, peningkatan akses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, transportasi, pangan dan penyediaan rumah bagi masyarakat miskin) serta program kewilayahan, konektivitas, pasar kerja, dan lainnya. Tujuan ini diukur dengan indikator Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini.

Tujuan pembangunan ketiga yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia akan dilaksanakan melalui strategi utama yakni peningkatan layanan dasar, peningkatan modal manusia, peningkatan modal sosial budaya. Untuk peningkatan layanan dasar difokuskan pada : percepatan wajib belajar 13 tahun, penuntasan stunting dan tuberculosis, pengembangan RS provinsi dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses, restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan, serta dukungan terhadap penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis. Untuk peningkatan modal manusia difokuskan pada : peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan *Science, Technology, Engineering, Art and Mathemathics* (STEAM) berkualitas, pemberdayaan pemuda dan olahraga, serta dukungan terhadap penyelenggaraan makan bergizi gratis untuk siswa dan ibu hamil. Untuk peningkatan modal sosial budaya difokuskan pada pendidikan karakter, agama dan budaya, serta pendidikan keluarga. Tujuan ini diukur dengan Indeks Modal Manusia.

Tujuan pembangunan keempat yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup merupakan salah satu tujuan pembangunan yang berfokus pada upaya memperbaiki dan menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan ini dicapai dengan melakukan berbagai upaya seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan sampah yang efektif, serta peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi aman dan air minum layak. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator kunci, antara lain Indeks Risiko Bencana yang mencerminkan tingkat kesiapsiagaan suatu wilayah terhadap bencana, Persentase Penurunan Emisi GRK sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, serta efektivitas Pengelolaan Sampah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak menjadi tolok ukur penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesehatan lingkungan.

Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Intensitas Emisi GRK.

Tujuan pembangunan kelima adalah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berfokus untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Sasaran utamanya adalah terwujudnya regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif, serta hukum yang berkeadilan dan berkepastian. Untuk mencapainya, dilakukan berbagai upaya seperti reformasi hukum, pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan berbasis elektronik, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator, antara lain Indeks Reformasi Hukum yang menilai kemajuan dalam menciptakan sistem hukum yang adil, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengukur pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dan transparansi, Indeks Pelayanan Publik yang menilai kualitas layanan kepada masyarakat, dan Indeks Integritas Nasional yang mengukur tingkat integritas dan upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

4.2. Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Dalam perumusannya, berdasarkan penelaahan Visi dan Misi Kepala Daerah, Rancangan Akhir RPJMN dan RPJPD Provinsi Gorontalo, ditetapkan 13 sasaran dalam RPJMD 2025-2029 sebagai berikut :

1) Terwujudnya pengembangan wilayah dan konektivitas perkotaan dan perdesaan
2) Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah
3) Terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air
4) Terwujudnya kesinambungan fiscal dan meningkatkan kemandirian daerah
5) Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah
6) Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan social bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif
7) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan
8) Terwujudnya pendidikan yang berkualitas
9) Terwujudnya penguatan peran agama dan budaya dalam pembangunan daerah
10) Meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
11) Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim
12) Terwujudnya regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian

Keterkaitan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dapat dicermati pada bagan berikut:

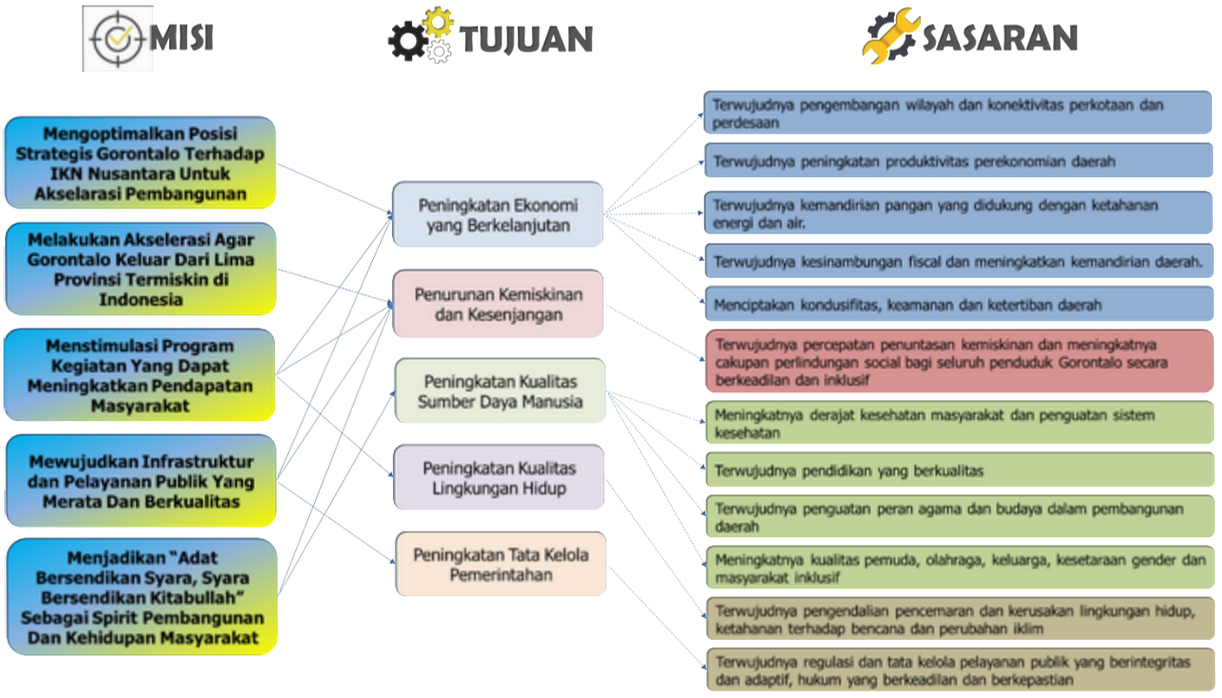

4.3. Isu Strategis Pembangunan Daerah

1. Aspek Ekonomi

a. Daya Saing dan Produktivitas Ekonomi Daerah Rendah

- Produktifitas ekonomi relatif rendah, kontribusi PDRB terhadap PDB hanya 0,2 persen.
- Kurangnya diversifikasi ekonomi, struktur ekonomi Provinsi Gorontalo dari sisi lapangan usaha masih didominasi sektor primer Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi rata-rata sebesar 38 persen, sedangkan sektor manufaktur hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4% terhadap struktur PDRB;
- Proses produksi bersifat parsial, upaya hilirisasi sektor-sektor perekonomian khususnya disektor pertanian terkendala akses teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam hal pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk;
- Kapasitas dan kualitas SDM terbatas, penguasaan iptek, inovasi dan adaptasi teknologi belum memadai sehingga produk/ jasa yang dihasilkan belum memiliki nilai tambah dan berdaya saing;
- Manajemen kemitraan dan distribusi pemasaran produk baik ekspor maupun perdagangan antar pulau yang cenderung masih belum optimal.

b. Koperasi dan UMKM belum memberikan Kontribusi Signifikan bagi penciptaan nilai tambah

- Pelaku usaha sebagian besar masih berskala mikro (94,5%)
- Rendahnya kontribusi koperasi sector produksi
- Kurangnya penerapan standar sertifikat teknologi dan inovasi pada koperasi, wirausaha dan UMKM
- Rendahnya kemitraan UMKM dalam rantai nilai industri
- Belum optimalnya ekosistem usaha, kualitas SDM terhadap diversifikasi produk melalui adaptasi teknologi dan inovasi masih terbatas, manajemen koperasi, pemasaran dan perluasan bidang usaha koperasi serta belum masifnya penerapan koperasi berbasis syariah.

c. Produktifitas dan Daya Saing tenaga kerja rendah.

- Sebagian pekerja yang baru memasuki pasar kerja berada di sektor yang memiliki kontribusi rendah terhadap PDRB, dengan upah rendah dan sedikit kesempatan untuk mengembangkan karir, sehingga kurang motivasi untuk meningkatkan produktivitas;
- Kesempatan kerja terbatas, serapan tenaga kerja terbesar disumbang oleh kelompok angkatan kerja dengan tingkat pendidikan lulusan SD/SMP sebesar 34, 60 persen, dan pekerja yang lebih besar tidak pernah mengeyam pendidikan sebesar 28, 12 persen (tahun 2022);

- Tenaga kerja masih didominasi pada sektor informal 64,97% dan serapan tenaga kerja masih didominasi disektor pertanian 33,3 persen, dengan tingkat upah yang relatif kecil
- Usia muda (15-24) tahun yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan Provinsi Gorontalo atau NEET (*Not Employment, Education and Training*) masih cukup tinggi tahun 2022 sebesar 25,79 persen;
- Adanya kecenderungan ketidaksesuaian antara keterampilan kerja yang dimiliki dengan kebutuhan pasar;
- Kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja Laki-laki dan perempuan masih cukup tinggi.

d. Tingkat produktivitas dan daya saing sektor pertanian dan perkebunan belum optimal.

- Produktivitas komoditi di sektor pertanian belum optimal. Dari sisi kualitas dan harga produk pertanian disebabkan oleh berkurangnya kemampuan/ kualitas lahan dan minimnya sarana dan prasarana produksi yang berbasis teknologi tepat guna.
- Kompetensi dan kapabilitas SDM Pertanian (petani dan penyuluh) masih terbatas juga berpengaruh terhadap sistem budidaya yang dikembangkan oleh petani seperti budidaya monokultur dan masih cenderung berfokus pada tanaman padi dan jagung.
- Belum maksimalnya infrastruktur jaringan irigasi dan kualitas air untuk pengairan akibat cemaran limbah pertambangan di hulu dan sedimentasi karena bencana banjir.
- Dampak perubahan iklim dan sistem pengendalian hama yang belum optimal mempengaruhi mutu produk pertanian dan menjadi penyebab terjadinya gagal panen. Diversifikasi komoditi belum dikembangkan dengan maksimal khususnya komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan diminati oleh pasar internasional.
- Nilai Tukar petani masih fluktuatif, produktivitas yang rendah berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan petani yang ditandai oleh NTP masih fluktuatif sedikit diatas angka 100 (106,17 thn 2023). Dipengaruhi oleh tingkat kehilangan hasil selama proses produksi mulai dari waktu tanam sampai waktu panen (*food loss*).
- Pemanfaatan metode dan teknologi pra dan pasca panen belum sepenuhnya dilakukan petani yang terbiasa dengan metode konvensional. Petani juga mengalami kendala dalam akses permodalan, masih bergantung pada bantuan pemerintah serta belum adanya standar proses dan lemahnya kelembagaan ekonomi petani.

e. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan meningkat

- Ketersediaan pangan terbesar terdapat di Kabupaten Pohuwato, sedangkan Ketersediaan pangan terkecil terdapat di Kota Gorontalo, dan kebutuhan pangan terbesar yaitu di Kabupaten Gorontalo yaitu sebesar 294,134,501,750 Kkal. Beberapa wilayah memiliki kebutuhan pangan terbesar, namun ketersediaan pangan yang cukup rendah.
- Pola distribusi pangan rendah sehingga masyarakat yang tinggal di daerah rawan pangan sulit mengakses pangan. Hasil analisis Bappanas bahwa permasalahan kemiskinan dan pendidikan rendah yang menyebabkan kerawanan pangan di Provinsi Gorontalo. Masalah pangan lainnya adalah pengelolaan *food waste*. Kurangnya kesadaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan pangan yang bergizi dan seimbang seperti masih adanya kebiasaan menyisakan dan membuang makanan masih selalu saja terjadi.

f. Kontribusi pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian daerah

Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan kawasan wisata strategis di Provinsi Gorontalo, minimnya ketersediaan infrastruktur sarana prasarana di lokasi destinasi, amenitas yang terbatas dan belum sesuai dengan standard untuk tujuan wisata mancanegara, belum tersedia paket wisata dengan atraksi menarik yang mempengaruhi lama tinggal wisatawan, aksesibilitas ke lokasi destinasi yang belum optimal, SDM pariwisata masih belum memadai. Pengelolaan Produk wisata belum dikembangkan sesuai dengan karakteristik potensi daerah serta promosi sektor pariwisata masih digarap secara konvensional dan parsial. Akselerasi investasi sektor pariwisata serta penguatan branding lokal belum optimal.

Ekonomi Kreatif belum optimal berkontribusi terhadap PDRB Provinsi Gorontalo disebabkan para pelaku ekonomi kreatif masih memasarkan produknya secara konvensional yang berpengaruh terhadap akses permodalan dan perluasan pasar, peningkatan strategi pemasaran produk ekraf yang lebih optimal serta perlu adanya diversifikasi dan pengembangan branding untuk produk ekraf provinsi Gorontalo.

g. Kondisi infrastruktur seperti jalan, irigasi masih belum optimal

- Kondisi infrastruktur seperti jalan, irigasi masih belum optimal, kondisi mantap jalan provinsi yang masih berada pada angka 70,23 persen. Panjang jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 137,31 Km, dan rusak ringan sebesar 12,09 Km. Jika dilihat dari rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan di Provinsi Gorontalo, setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah ruas jalan belum sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan yang setiap tahunnya tumbuh rata-rata 0,12 persen.

- Kondisi Daerah Irigasi/DI kewenangan Provinsi untuk jaringan irigasi saluran primer dan sekunder dengan panjang 137.713,58 M dalam kondisi Baik (B) 30,19 %, Rusak Sedang (RS) 35,09 sementara Rusak Berat (RB) 34,72 %
- Konektivitas antar wilayah masih rendah, belum terbukanya beberapa ruas jalan di antaranya Marisa – Tolinggula, Tapa-Atinggola dan beberapa jalur strategis lainnya dalam mendorong pengembangan ekonomi.

h. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut.

Implementasi ekonomi biru masih dihadapkan pada rendahnya pemanfaatan sumber daya laut, serta belum adanya observasi dalam pengelolaan tentang potensi *blue carbon* dipesisir. Tantangan lainnya masih belum optimalnya pengelolan dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap, sarana prasarana perikanan masih belum memadai dan belum dikelola dengan baik. Belum optimalnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di perairan Gorontalo. Masih tingginya illegal dan over fishing karena masih rendahnya sistem pengawasan kelautan. Tingkat kesejahteraan nelayan yang diukur dengan Nilai Tukar Nelayan masih rendah.

i. Masih rendahnya energi terbarukan dan efisiensi energi

Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer tahun 2021 baru mencapai 11,08 persen, terjadi peningkatan dari tahun 2015 sebesar 3,45 persen, namun masih jauh dari target 42 persen.

j. Perkembangan teknologi digitasi, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas.

Belum meratanya infrastruktur teknologi informasi, jaringan telekomunikasi diseluruh wilayah. Selain itu kapasitas dan kapabilitas infrastruktur TIK berupa jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, keterbatasan kapasitas data center, dan rendahnya penerapan kebijakan TIK. Pembangunan TIK juga diperhadapkan pada tantangan dalam mengadopsi teknologi, serta penerapan teknologi berbasis *Artificial Intellegence*. Kondisi ekosistem pendukung digitalisasi seperti talenta digital, investasi untuk digitalisasi riset dan inovasi serta keamanan siber belum memadai.

k. Penataan perkotaan, penanganan kawasan perumahan dan permukiman masih belum optimal.

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hunian, prasarana sarana umum (PSU) serta peran serta masyarakat untuk penanganan kawasan kumuh dan kondisi permukiman belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Akibatnya di satu sisi telah berkembang pusat-pusat kegiatan ekonomi namun di sisi lain pertumbuhan kawasan kumuh semakin meningkat. Selain itu layanan SPM bidang Perumahan yg menjadi kewajiban pemerintah daerah yakni pembangunan rumah bantuan bagi korban bencana dan

fasilitasi bantuan rumah bagi warga yang rumahnya harus direlokasi akibat program Pemerintah belum memenuhi mencapai level yg diharapkan. Hal ini patut menjadi perhatian sehingga penerapan dan layanan SPM Bidang Perumahan dapat diwujudkan dgn baik.

2. Aspek Sosial

a. Akses dan Kualitas layanan pendidikan belum merta

- Layanan pendidikan belum merata, Kualitas Pendidikan masih rendah (nilai rata-rata PISA)
- Kualitas, kuantitas dan distribusi guru masih terbatas
- Ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal belum optimal;
- Advokasi kepada masyarakat terkait urgensi pemenuhan hak pendidikan anak serta intervensi terhadap masyarakat khususnya rumah tangga miskin yang memiliki anak usia sekolah masih rendah.;
- Kualitas penyelenggaraan pendidikan yang diwakili oleh jumlah satuan pendidikan terakreditasi masih belum optimal, terutama pada jenjang pendidikan khusus dan SMK;
- Kemampuan literasi dan numerasi peserta didik disemua jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus masih rendah;
- Pendidikan karakter, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan belum optimal

b. Pelayanan kesehatan belum optimal

- Umur Harapan Hidup Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah 70,73 lebih rendah dari capaian nasional yaitu 73,93;
- Tingginya angka penyakit menular dan tidak menular yaitu kasus Tuberkulosis, HIV Aids, Demam Berdarah;
- Tingginya Angka keluhan pemyakit di angka 35,35 pada tahun 2023. keluhan penyakit lebih tinggi dialami oleh Perempuan sebesar 37,27% sedangkan laki-laki sebesar 33,45%.
- Angka Kematian Ibu dan bayi masih tinggi dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
- Prevalensi stunting masih tinggi berada di atas rata-rata nasional (26,9%, 2023) urutan 12 secara Nasional.
- Belum optimalnya sistem layanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal
- Belum optimalnya sistem ketahanan Kesehatan dari sisi Ketersediaan dan distribusi obat dan alat kesehatan;

- Ketersediaan dan distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang belum merata pada fasilitas layanan kesehatan dan menjangkau seluruh wilayah khususnya daerah terpencil.
- Keterbatasan akses terhadap makanan bergizi dan seimbang, belum optimalnya advokasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat sanitasi bersih dan cara pencegahan penyakit.
- Belum maksimalnya layanan rujukan serta pemerataan layanan kesehatan. Pemerintah Provinsi Memiliki RSUD sejak tahun 2013 namun hingga saat ini masih pada akreditas Tipe C.

c. Tingkat kemiskinan dan gini rasio masih tinggi

- Provinsi Gorontalo berada diurutan ke - 9 sebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi secara Nasional. Tahun 2023 tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo masih berada pada angka 15,15, tahun 2024 mengalami penurunan 0,58% dan berada diangka 14,57%;
- Pendidikan, karakteristik penduduk miskin Provinsi Gorontalo memiliki tingkat partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah cenderung rendah. Mayoritas bekerja di sektor pertanian dengan rata-rata kepala keluarga penduduk miskin berada pada usia produktif;
- Ketepatan sasaran program Pengelolaan dan integrasi data belum optimal
- Tahun 2023 Gini Ratio masih berada diangka 0,417, diatas rata-rata Nasional dan tertinggi diwilayah Sulawesi. Kondisi ketimpangan terbesar berada di daerah perkotaan. Rata-rata pengeluaran perkapita perbulan wilayah perkotaan sebesar 11,63 persen, sementara peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan diwilayah pedesaan tidak sebesar wilayah perkotaan yaitu hanya sebesar 4,40 persen. Kesenjangan pendapatan ini disebabkan antara lain ketidakmerataan pembangunan, aktivitas ekonomi, aksesibilitas, kualitas SDM.
- Ketimpangan pendapatan dimana rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk untuk kelompok terbawah termasuk kedua terendah di Indonesia dan rata-rata pendapatan pekerja bebas Gorontalo termasuk tiga terendah di Indonesia (Sakernas 2023) Artinya pendapatan orang miskin di Provinsi Gorontalo lebih rendah dibandingkan provinsi lain;

d. Kualitas pembangunan gender masih belum optimal

Indeks Ketimpangan gender tahun 2023 diangka 0,391 berada dibawah IKP nasional yang artinya lebih kecil ketimpangannya namun beberapa diminsi dalam IKG masih rendah yaitu pada dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan yaitu partisipasi perempuan di politik dan pengambilan keputusan serta dimensi pasar tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan rendah, kontribusi perempuan terhadap pendapatan rendah. Penyebabnya antara

lain keterbatasan perempuan dalam pengambilan keputusan, beban ganda yang menyebabkan perempuan terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah rendah dan mengurangi kemampuan mereka untuk mandiri secara ekonomi.

e. Kualitas keluarga, Perlindungan dan Pemenuhan hak kepada Perempuan, anak dan pemuda serta kelompok rentan belum optimal.

- Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat, yang didominasi oleh KDRT dan kekerasan seksual.
- Perkawinan Anak tinggi (13,65. Tahun 2022) naik 2,01% dari tahun 2021. Provinsi Gorontalo ke-3 tertinggi perkawinan anak;
- Tingginya angka perceraian (2.062 kasus tahun 2022, BPS)
- Indeks Perlindungan Anak masih rendah (57,9. Tahun 2022)
- Indeks Pembangunan Pemuda belum optimal, Rasio NETT mencapai 28,03& (tahun 2022, BPS)
- Belum optimalnya layanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Penyandang Disabilitas dan Lansia yang tidak didukung dengan ketersediaan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Provinsi, serta cakupan layanan perlindungan dan pemberdayaan sosial masih rendah.

f. Penerapan Nilai Agama dan Budaya belum optimal

Pengaruh budaya global, akses teknologi dan informasi, perilaku masyarakat yang semakin individualis, pergeseran karakter, pola pikir, moral yang pranatanya mempengaruhi nilai agama dan budaya dalam masyarakat.

3. Aspek Lingkungan Hidup

a. Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Daya dukung lahan menurun seiring dengan alih fungsi lahan yang terus terjadi, aktifitas pertambangan dalam jangka panjang berimplikasi pada hilangnya habitat keanekaragaman hayati. Hasil analisis perkembangan antar waktu Peta jasa ekosistem penyediaan air Provinsi Gorontalo menunjukkan penurunan kinerja jasa ekosistem penyedia air sebesar 20% dari total luas Provinsi Gorontalo sementara wilayah yang jasa ekosistem pengaturan tata air berkategori sedang dan rendah terjadi peningkatan di semua wilayah kabupaten/kota.

b. Kualitas Lingkungan Hidup Belum Optimal

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup /IKLH Provinsi Gorontalo tahun 2011 – 2022 dari kategori "cukup" menjadi "baik". Namun jika dilihat dari keempat indeks komposit IKLH yaitu kualitas air, indeks kualitas udara, kualitas tutupan lahan dan kualitas air laut, menunjukan bahwa kualitas air di Provinsi Gorontalo berada pada kondisi cemar ringan dan cemar sedang. Penurunan kualitas air disebabkan oleh limbah yang mengalir ke badan sungai yang berasal dari aktifitas pertambangan, industri, pertanian, perkebunan dan limbah domestik

rumah tangga. Selain itu kualitas udara mengalami penurunan yang disebakan oleh meningkatnya kepemilikan kenderaan.

- Kerentanan daya dukung ekosistem laut akibat meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim. Pengelolaan pesisir dan laut yang tidak berkelanjutan menyebabkan berkurangnya ekosistem terumbu karang dan berkurangnya luasan kawasan magrove.
- Emisi GRK di Gorontalo cenderung mengalami kenaikan. Dalam kurun waktu enam tahun, kenaikan emisi GRK di Gorontalo mencapai 1.019,75 Gg CO2e. Urutan sektor penyumbang emisi GRK pada tahun 2022 adalah sektor pertanian, sektor energi, sektor limbah. Sedangkan sektor kehutanan menghasilkan penyerapan emisi GRK.

c. Pengurangan luasan dan pendangkalan Danau Limboto

Danau Limboto telah ditetapkan menjadi salah satu dari 15 danau kritis di Indonesia. Berdasarkan data selang Tahun 2000-2015 luas Danau Limboto berkurang sebesar 1.076 ha atau dengan rata-rata penyusutan sebesar 71,73 ha atau 1,79% pertahunnya. Selain itu terjadinya penurunan kualitas air di Danau Limboto yang disebabkan pada tingginya sedimentasi dan proses eutrofikasi yang terjadi akibat meningkatnya kadar mineral dan nutrisi termasuk nitrogren dan fospor didalam perairan. Hal lainnya Pertumbuhan enceng gondok yang semakin tidak terkendali yang menyebabkan pendangkalan danau. Aktifitas masyarakat dihulu sungai dan wilayah sekitar yang memanfaatkan danau sebagai sumber mata pencaharian menyebabkan kondisi danau terus mengalami penurunan.

d. Terdapat hutan dan lahan kritis

Lahan kritis tersebar di luar kawasan dan di dalam kawasan tahun 2022 sebesar 217.177 Ha, yang tersebar di luar kawasan sebesar 144.983 Ha, dan di dalam kawasan sebesar 72.194 Ha. Luasan lahan kritis lebih besar berada pada wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo. Aktifitas pemanfaatan lahan pertanian yang tidak cerdas iklim juga berada dilahan miring yang semakin tidak terkendali, berdampak pada kondisi dan struktur lahan yang jika tidak diantisipasi menyebabkan kerusakan lahan, erosi dan sedimentasi yang semakin meningkat.

e. Cakupan sanitasi dan air minum layak dan aman masih rendah

Presentasi Rumah tangga yang memiliki akses terhadap Sanitasi diangka 81,72 persen, terdapat 19,28 persen masyarakat belum memiliki sarana sanitasi layak sedangkan cakupan akses sanitasi aman masih sebesar 4,14 persen. Untuk persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap akses air minum layak selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan dari sebelumnya 94, 19 persen menjadi 96.00 persen pada tahun 2023. Namun cakupan akses air minum aman

masih rendah, tahun 2023 hanya mencapai 8,3 persen dibawah target nasional 15 persen tahun 2024.

f. Pengelolaan Sampah dan limbah belum optimal.

Optimalisasi TPA Talumelito masih rendah, TPST belum beroperasi maksimal, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memilah sampah, kelembagaan pengelolaan sampah dan sarana prasarana yang belum memadai. Pengelolaan limbah B3 di Provinsi Gorontalo juga belum dikelola secara mandiri.

g. Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim masih tinggi.

- Indeks Resiko Bencana diangka 116,71 (Irbi, 2023) atau kategori sedang
- Prioritas Penanganan Resiko Bencana dari tingkat kerentanan berdasarkan kelas resiko adalah bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, tanah longsor, tsunami, gempa bumi dan kekeringan.
- Tata kelola kebencanaan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencan, belum optimal
- Sarana prasarana mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini bencana dan infrastruktur resiliens terhadap bencana masih rendah dan masih kurangnya literasi masyarakat yang inklusif terkait kesiapsiagaan bencana.

4. Aspek Tata Kelola Pemerintahan

a. Kapasitas fiscal rendah

Kapasitas Fiskal Daerah ada di kategori rendah dengan angka 1,421. Sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sejak tahun 2021 pendapatan transfer cenderung menurun, adanya perubahan kebijakan Dana Transfer Daerah untuk *spesific grant* dan *block grant.* Belanja pegawai lima tahun terakhir rata-rata meningkat di tahun 2023 mencapai 684.344.820.456. Perlu kebijakan untuk optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

b. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan belum optimal

- Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 dengan Predikat BB. Namun capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang masih berada pada predikat B.
- Akses pelayanan public belum memadai
- Penerapan sistem merit belum optimal, khususnya standar kompetensi jabatan
- Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif
- Indeks Profesionalitas ASN juga masih belum menunjukan capaian optimal masih berada pada kategori Sedang.
- Pembangunan zona integritas yang belum maksimal**.** Hal ini ditandai dengan belum adanya OPD yang mendapat predikat WBK/WBBM.

c. Inovasi pembangunan daerah masih rendah

Indeks Inovasi Daerah kategori kurang inovatif (2018-2020), ditahun 2021-2022 mengalami peningkatan dan masuk dalam kategori inovatif. Namun daya saing inovasi pembangunan daerah belum berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah. Masih rendah akselerasi inovasi dan teknologi dalam mempercepat proses produksi dan pengembangan usaha. Persoalannya belum menjadi perhatian dari sisi pendanaan dan kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kerja sama multipihak dalam pengkajian dan implementasi hasil Riset masih rendah.

d. Kapasitas Lembaga Demokrasi yang belum optimal

Capaian Indeks Demokrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Jika dilihat dari ketiga aspek penyusunnya, Nilai aspek kebebasan dan kesetaraan IDI di Provinsi Gorontalo sudah berada pada kategori tinggi masing-masing sebesar 81,68 dan 83,32. Namun, pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, capaian Provinsi Gorontalo masih berada pada kategori sedang dengan nilai sebesar 73,43.

4.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.4.1. Tema dan Unsur Tema RKPD Tahun 2025

Berdasarkan kebijakan utama pembangunan Gorontalo dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dan berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun berjalan dan isu strategis pembangunan daerah, maka ditetapkan tema dan unsur tema pembangunan untuk tahun 2025 adalah:

"Peningkatan Ekonomi yang Inklusif melalui Optimalisasi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Layanan Dasar yang didukung Sumber Daya Manusia Berkualitas"

Adapun unsur tema RKPD tahun 2025 adalah, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Unsur-unsur tema RKPD Tahun 2025

Peningkatan Ekonomi yang Inklusif	1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 2. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian
Optimalisasi Sumber Daya Alam	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim
Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar	1. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan ekonomi Inklusif dan Pelayanan Dasar

Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1. Meningkatnya derajat kesehatan 2. Peningkatan kualitas anak, perempuan, pemuda dan Kelompok Rentan 3. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama 4. Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat 5. Meningkatnya budaya literasi Masyarakat 6. Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa 7. Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah 8. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

4.3. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Perumusan Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan menengah daerah yang dirumuskan dan menjadi pedoman untuk dilaksanakan agar pembangunan lebih terarah, efektif dan efisien dalam perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan. Berdasarkan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, sebagaimana tema yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 maka sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Tema, Unsur Tema dan Sasaran RKPD 2025

No	Tema	Unsur Tema	Sasaran
	Peningkatan Ekonomi yang Inklusif melalui Optimalisasi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Layanan Dasar yang didukung Sumber Daya	Peningkatan Ekonomi yang Inklusif	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
			Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian
		Optimalisasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
			Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim
		Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Inklusif dan Pelayanan Dasar
		Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan
			Peningkatan kualitas anak, perempuan, pemuda dan Kelompok Rentan

	Manusia Berkualitas		Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama
			Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat
			Meningkatnya budaya literasi Masyarakat
			Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa
			Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Adapun uraian sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1. Sasaran : Terwujudnya pengembangan wilayah dan konektivitas perkotaan dan perdesaan

Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi yang dilakukan adalah Peningkatan konektivitas daerah.

Arah Kebijakan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Pengembangan infrastruktur jalan, jembatan dalam menunjang aksesibilitas perdesaan dan perkotaan
2. Fasilitasi penyediaan akses perumahan permukiman layak, terjangkau, dan berkelanjutan untuk masyarakat serta sarana prasarana dan utilitas
3. Mendorong pertumbuhan serta pengembangan pelabuhan dan bandara sebagai pintu masuk-keluar dan jalur distribusi barang & jasa
4. Pengembangan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan
5. Peningkatan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi wisata dan pengembangan produk unggulan berbasis daya dukung wilayah strategis
6. Dukungan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
7. Peningkatan rantai nilai melalui penguatan kerjasama antardaerah dan pengembangan ekspor komoditas unggulan

Adapun indikator yang menjadi ukuran pada sasaran pembangunan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Indikator, Capaian dan Target Sasaran I

No	Indikator Sasaran	Capaian 2024	Target Perubahan 2025
1	Proporsi kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional	0,25%	0,25%
2	Kondisi Mantap Jalan	66,12	70,6
3	Persentase Desa Mandiri (%)	28,31%	48,81%

4	Penanaman Modal Asing/PMA (Juta Dollar)	23,33	75,91
5	b. Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN (Milyar)	3863,73	4371,99

2. Sasaran: Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah

Strategi yang diterapkan dalam mencapai sasaran ini dibagi atas 3 strategi yaitu :

1) Strategi Pertama adalah Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi yang akan dilakukan melalui kebijakan:
   1. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.
   2. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.
   3. Pengembangan Koperasi berbasis produksi dan kewirausahaan.
   4. Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif.
   5. Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.
2) Strategi Kedua yaitu Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perikanan yang akan dilaksanakan melalui kebijakan :
   1. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang modern dan berkelanjutan
   2. Peningkatan populasi sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya
   3. Peningkatan luasan lahan pertanian (cetak sawah baru)
   4. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian atau fasilitator pendamping
   5. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
   6. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan yang modern dan berkelanjutan
   7. Ekstensifikasi dan Intensifikasi usaha dan industri Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
   8. Pengembangan Tempat Pendaratan dan Pelelangan Ikan
   9. Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting.
3) Startegi Ketiga yaitu Peningkatan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan dilakukan melalui kebijakan:
   1. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) pariwisata seperti Botumoito, Minanga, Hiu Paus Botubarani, dan Geosite dalam Geopark Gorontalo

2. Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
3. Pembangunan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis riset dan inovasi untuk pengembangan lapangan kerja
4. Peningkatan kualitas promosi pariwisata

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.4
Indikator, Capaian dan Target Sasaran II

No	Indikator	Capaian 2024	Target Perubahan 2025
1	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
	- Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	8,12	8,29
	- Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	0,62	0,68
	- Rasio Kewirausahaan Provinsi	3,38	3,83
	- Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,8	0,98
2	Persentase Lapangan Kerja yang Baik		
	- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,08	3.01-3.26
	- Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35	40
	- Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	69,95	71,94
3	Nilai Tukar Petani	109,05	109,83
4	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTNP)	95,69	99,72
5	Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan (NTPT)	104,59	106,21
6	Pengembangan Pariwisata :		
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,29	2,33
	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	4,055	4,7
7	Rata-Rata Lama Menginap Hotel Bintang	1,48	1,61
8	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Kualifikasi Bintang	56,59	53,48
9	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Kualifikasi Non-Bintang	17,14	20,54
10	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	4,39	4,5

3. Sasaran : Terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air

Strategi yang dilakukan adalah penguatan kemandirian pangan dan ketahanan energi dan air.

Kebijakan pembangunan dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air
2. Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai.
3. Pengembangan Flood Forecasting Warning System.
4. Perlindungan pulau-pulau kecil dan pesisir dari risiko abrasi.
5. Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu Food, Energy-Water (FEW) Nexus
6. Diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Adapun indikator yang menjadi ukuran pada sasaran pembangunan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator, Capaian dan Target Sasaran III

No	Indikator	Capaian 2024	Target Perubahan 2025
1	Ketahanan Energi, Air dan Pangan		
	- Konsumsi Listrik per kapita (KWH)	1.100	1.300
	- Intensitas energi primer (SBM/Rp Milyar)	72	70
	- Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	13,57	13,05
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	38,33	42

4. Sasaran : Terwujudnya kesinambungan fiscal dan meningkatkan kemandirian daerah.

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan strategi peningkatan upaya extensifikasi dan intensifikasi Pendapatan daerah serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Arah Kebijakan yang akan dilakukan adalah:

1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui extensifikasi dan Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).
2. Pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Corporate Social Responsibility* (CSR), pendanaan *Filantrophy*, jasa ekosistem pasar karbon, serta pembiayaan alternative lainnya.
3. Peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan serta optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD).

4. Penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
5. Penguatan pengendalian ekonomi dan pembangunan

Adapun indikator yang menjadi ukuran pada sasaran pembangunan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Indikator, Capaian dan Target Sasaran IV

No	Indikator	Capaian 2024	Target Perubahan 2025
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,80%	0,81%
2	Tingkat Inflasi (%)	2,87	2,4 – 2,8
3	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	12,25%	13,10%

5. Sasaran : Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui, strategi Penguatan koordinasi dan komitmen kerjasama serta gotong royong melalui kearifan lokal seperti ”Mohuyula” dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah.

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan Koordinasi dalam meningkatkan kewaspadaan, deteksi, cegah dini pada masyarakat untuk menjamin stabilitas politik, keamanan dan ketertiban dan perlindungan masyarakat.
2. Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada, penguatan komunikasi publik, kesetaraan dan kebebasan.
3. Pelaksanaan komitmen kebangsaan dengan memperkuat nilai-nilai lokal, meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan inklusivitas serta penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila;
4. Penguatan ruang dialog, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik sosial.
5. Mendorong peningkatan pengawasan keamanan di wilayah laut dengan pemanfaatan teknologi.
6. Optimalisasi pemenuhan perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM.

   Adapun indikator yang menjadi ukuran pada sasaran pembangunan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Indikator, Capaian dan Target Sasaran V

No	Indikator	Capaian 2024	Target Perubahan 2025
1	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	59,39	63,53
2	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Sedang

6. Sasaran : Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan social bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif

Strategi yang dilakukan adalah :

1) Strategi pertama adalah Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan inklusif, dengan kebijakan:
   1. Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif
   2. Pendekatan pemanfaatan satu data terpadu sebagai *baseline* data sasaran penerima manfaat
   3. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, lansia, dan disabilitas.
   4. Peningkatan kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak, penyandang disabilitas, dan/atau lansia
   5. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan
2) Strategi kedua yaitu kolaborasi penanggulangan kemiskinan daerah melalui perencanaan, pendanaan, dan intervensi yang sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dengan kebijakan :
   1. Penguatan fungsi dan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi dan Kabupaten Kota dalam penanggulangan kemiskinan daerah
   2. Optimalisasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi melalui penguatan komitmen bersama antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pendanaan dan penentuan sasaran intervensi program
   3. Pengendalian dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah
   4. Memperkuat evaluasi rencana APBD Kabupaten/Kota dalam mendukung sinergi pembangunan
3) Strategi ketiga yaitu Pemenuhan akses hunian layak dan penanganan pemukiman kumuh, dengan arah kebijakan:
   1. Penyediaan akses perumahan layak, terjangkau, dan berkualitas untuk masyarakat miskin

2. Penanganan kawasan kumuh

Adapun indikator yang menjadi ukuran pada sasaran pembangunan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Indikator, Capaian dan Target Sasaran VI

No	Indikator	Capaian 2024	Target Perubahan 2025
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	56,55	68
2	Persentase Penyandang Disabillitas Bekerja di Sektor Formal	15	18
3	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	72,04	76,06

7. Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif serta pembudayaan perilaku hidup sehat.

Kebijakan pembangunan yang dilakukan adalah:

1. Penguatan dan pengembangan upaya promosi kesehatan
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
3. Percepatan penurunan stunting dan percepatan eliminasi penyakit tidak menular dan menular seperti HIV AIDS, tuberkolosis, malaria (ATM) melalui pendekatan integrasi multisektor.
4. Gerakan Konsumsi Pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA)
5. Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*), khususnya untuk daerah kepulauan dan daerah terpencil dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam.
6. Peningkatan sarana dan prasana rumah sakit
7. Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan Kesehatan termasuk pengembangan kompetensi
8. Pengembangan dan pengolahan system air limbah.

Adapun indikator yang menjadi ukuran pada sasaran pembangunan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Indikator, Capaian dan Target Sasaran VII

No	Indikator	Capaian 2024	Target Perubahan 2025
1	Usia Harapan Hidup	71,14	71,96
2	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup	189,00	111,20
3	Prevalensi Stunting pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	24,46	19,74

4	Penanganan Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):		
	- Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	95,00	95,00
	- Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	93,18	95,58
5	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	99,50	99,50

8. Sasaran : Terwujudnya pendidikan yang berkualitas

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi Peningkatan dan pemerataan akses, mutu dan kualitas pendidikan, dengan penerapan kebijakan sebagai berikut :

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
2. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
3. Pemerataan tenaga pendidik dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antar daerah
4. Penguatan kualitas pendidikan vokasi dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi yang sesuai dengan potensi unggulan daerah
5. Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif
6. Penyediaan dan peningkatan akses pendidikan
7. Penyediaan dan peningkatan layanan Sekolah Luar Biasa (SLB)
8. Peningkatan kualitas literasi masyarakat
9. Dukungan terhadap Program Hasil Terbaik Cepat Memberi Makan Bergizi Gratis

Adapun indikator yang menjadi ukuran pada sasaran pembangunan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Indikator, Capaian dan Target Sasaran VIII

No	Indikator	Capaian 2024	Target Perubahan 2025
1	Hasil Pembelajaran		
	a. Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional:	0,00 – 16,67	26,67 - 36,67
	- Literasi Membaca	0,00 – 16,67	26,67 - 36,67
	- Numerasi		
	b. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional untuk :		

	- Literasi Membaca	21,73 – 23,73	26,73 – 30,73
	- Numerasi	14,93 – 16,93	18,93 – 22,93
2	Rata-rata Lama Sekolah penduduk Usia diatas 15 Tahun	8,3	8,5
3	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,17	13,22
4	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	12,23%	12,37%

9. Sasaran : Terwujudnya penguatan peran agama dan budaya dalam pembangunan daerah

Kebijakan ini akan dicapai melalui strategi pembangunan agama dan budaya melalui pelestarian budaya, pemeliharaan sejarah dan cagar budaya, dan pelayanan keagamaan, adat dan budaya dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan potensi warisan budaya melalui perlindungan, pemanfaatan, dan pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat
2. Penguatan kerukunan antar etnis dan agama.
3. Dukungan terhadap pendidikan keagamaan serta sarana dan prasarana keagamaan diantaranya pembangunan Islamic Center Provinsi Gorontalo
4. Pengembangan pendidikan karakter sejak dini.

Adapun indikator yang menjadi ukuran pada sasaran pembangunan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Indikator, Capaian dan Target Sasaran IX

No	Indikator	Capaian 2024	Target Perubahan 2025
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	52,48	54,12
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,71	73,29

10. Sasaran : Meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif

Sasaran ini akan dicapai melalui 2 (dua) strategi yaitu :

1) Peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah. Strategi ini akan dicapai dengan kebijakan antara lain :
   1. Peningkatan peran keluarga untuk mendukung penguatan moral masyarakat
   2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan

perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

3. Pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
4. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan wilayah

2) Strategi kedua yaitu Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga dengan kebijakan pembangunan antara lain :

1. Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah
2. Pengembangan sistem pembinaan olahraga
3. Pengembangan lembaga dan organisasi olahraga

Tabel 4.12
Indikator, Capaian dan Target Sasaran X

No	Indikator	Capaian 2024	Target Perubahan 2025
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,36	0,32
2	Indeks Pembangunan Pemuda	57,83	63,28
3	Jumlah perolehan medali pada event nasional*	13	

*Ditargetkan pada tahun 2028 sesuai dengan pelaksanaan PON selanjutnya

11. Sasaran: Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim

Sasaran ini akan dicapai melalui 2 (dua) strategi yaitu :

1) Strategi Pertama yang akan dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah Mendorong pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang berkelanjutan, dengan kebijakan:

1. Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.
2. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang)
3. Pembinaan dan advokasi pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota
4. pengendalian bahan dan limbah berbahaya dan beracun
5. Pemenuhan dan penyediaan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
6. Penguatan lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.

2) Strategi kedua, yaitu dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pemanfaatan SDA, termasuk energi berbasis lingkungan serta Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan pasca bencana. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan:

1. Penyediaan infrastruktur pemerintahan daerah yang berketahanan bencana dan iklim serta inklusif
2. Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim.
3. Penerapan teknologi climate smart agriculture melalui penyediaan bibit berkualitas.
4. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim.
5. Pengendalian rencana tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, dan wilayah jelajah satwa spesies dilindungi
6. Penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
7. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan
8. Pemanfaatan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana, serta peningkatan kapasitas kesiapsiagaan Masyarakat.
9. Pengelolaan hutan di luar kawasan hutan negara dan daerah aliran sungai (DAS) yang berkelanjutan

Adapun indikator yang menjadi ukuran pada sasaran pembangunan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13
Indikator, Capaian dan Target Sasaran XI

No	Indikator	Capaian 2024	Target Perubahan 2025
1	Indeks Resiko Bencana	113,91	107,94
2	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
	- Kumulatif	21,05	24
	- Tahunan	35,1	39,6
3	Pengelolaan Sampah		
	- Timbulan sampah terolah di Fasilitasi Pengelolaan Sampah	14	20
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	23	28
4	Persentase Layanan Publik Ramah Disabilitas (usulan)		
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	4,28	5,09

6	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	96,13	97,30

12. Sasaran : Terwujudnya regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian

Strategi yang akan dilaksanakan yaitu dengan penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang transparan, kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan serta peningkatan kualitas dan penegakan produk hukum daerah.

Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Optimasi, harmonisasi dan peningkatan layanan hukum dan kualitas produk hukum daerah.
2. Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan dan kebijakan Pemerintahan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan daerah
3. Penguatan manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah serta penguatan implementasi Satu Data Indonesia (SDI)
4. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan kompentensi SDM
5. Peningkatan kualitas manajemen ASN berbasis sistem merit
6. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan peningkatan kualitas pelayanan publik
7. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
8. Peningkatan kepatuhan penyelenggaraan manajemen kearsipan

Adapun indikator yang menjadi ukuran pada sasaran pembangunan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Indikator, Capaian dan Target Sasaran XII

No	Indikator	Capaian 2024	Target Perubahan 2025
1	Indeks Reformasi Hukum	70,00	74,00
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,13	4,18
3	Indeks Pelayanan Publik	4,31	4,41

4.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program yang berhubungan dengan kepentingan public dan memiliki daya ungkit dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian indicator tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, Provinsi Gorontalo menetapkan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.15

Program Prioritas Provinsi Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
	Tujuan : Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan	
	Sasaran : Terwujudnya pengembangan wilayah dan konektivitas perkotaan dan perdesaan	
1	Program Pengembangan Permukiman	Dinas PUPRKP
2	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPRKP
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas PUPRKP
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPRKP
5	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUPRKP
6	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPRKP
7	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dinas PUPRKP
8	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Dinas PUPRKP
9	Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Dinas PUPRKP
10	Program Pengembangan Perumahan	Dinas PUPRKP
11	Program Kawasan Permukiman	Dinas PUPRKP
12	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Kominfo dan Statistik
13	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
14	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
Sasaran : Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah		
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Diskumperindag
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Diskumperindag
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Diskumperindag
4	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Diskumperindag
5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Diskumperindag
6	Program Pengembangan Ekspor	Diskumperindag
7	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Diskumperindag
8	Program Pengawasasan dan Pemeriksaan Koperasi	Diskumperindag
9	Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	Diskumperindag

10	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Diskumperindag
11	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskumperindag
12	Program Pengembangan UMKM	Diskumperindag
13	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
14	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
15	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
16	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
17	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
18	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
19	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
20	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
21	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
22	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
23	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda)	Dinas Kelautan dan Perikanan
24	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma)	Dinas Kelautan dan Perikanan
25	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta)	Dinas Kelautan dan Perikanan
26	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut & Payau)	Dinas Kelautan dan Perikanan
27	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (UPTD BP2MDPP)	Dinas Kelautan dan Perikanan
28	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
29	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
30	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
31	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
32	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
33	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
34	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
35	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
Sasaran : Terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air		
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPRKP
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
9	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
10	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
11	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
12	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
13	Program Pengelolaan Energi baru Terbarukan	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
14	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
15	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
Sasaran : Terwujudnya kesinambungan fiscal dan meningkatkan kemandirian daerah		
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah
4	Program perekonomian dan pembangunan	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
Sasaran : Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah		
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
2	Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesbangpol
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesbangpol
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesbangpol
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konfilk Sosial	Badan Kesbangpol
6	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
7	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
8	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
Tujuan : Penurunan Kemiskinan dan Kesenjangan		

Sasaran : Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan social bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif		
1	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
3	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
5	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
7	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Kesehatan
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan
Tujuan : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan		
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
2	Program Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD dr. Ainun Habibie
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD dr. Ainun Habibie
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPRKP
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPRKP
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPRKP
Sasaran : Terwujudnya pendidikan yang berkualitas		
1	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program pengendalian perizinan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

7	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
8	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
9	Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
Sasaran : Terwujudnya penguatan peran agama dan budaya dalam pembangunan daerah		
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran : Meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif		
1	Program Perlindungan Perempuan	Dinas P3A
2	Program Peningkatan Kualitas keluarga	Dinas P3A
3	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas P3A
4	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas P3A
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas P3A
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas P3A
7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
8	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
Tujuan : Peningkatan kualitas lingkungan hidup		
Sasaran : Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim		
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	UPT TPA Talumelito
2	Program Perencanaan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Program Pengelolaan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Program Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Program Pengelolaan DAS	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

7	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Peracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
Tujuan : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		
Sasaran : Terwujudnya regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian		
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapppeda
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapppeda
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bapppeda
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo dan Statistik
6	Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	Diskominfo dan Statistik
7	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo dan Statistik
8	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
10	Program pengembangan Sumberdaya Manusia	Badan Pengembangan SDM
11	Program Penataan Desa	Dinas Admindukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
12	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Admindukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
13	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Admindukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
14	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Admindukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
15	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Admindukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

16	Program Pencatatan Sipil	Dinas Admindukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
17	Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Admindukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
18	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
19	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
20	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
21	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Kesra
22	Program kebijakan administrasi Pembangunan	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
23	Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	Biro Pengadaan
24	Program Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung

Berdasarkan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, dilaksanakan penyelarasan program prioritas Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan Prioritas RKP Tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.17
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Rancangan Awal RKP dan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 beserta dukungan Program Prioritas

No	Prioritas RKP	Sasaran RKPD	Program Prioritas Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2025
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1. Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konfilk Sosial 6. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum 7. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 8. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		2. Terwujudnya regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Program Penyelenggaraan Pengawasan 5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 6. Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik 7. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 8. Program Pengelolaan Arsip 9. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 10. Program pengembangan Sumberdaya Manusia 11. Program Penataan Desa 12. Program Peningkatan Kerjasama Desa 13. Program Administrasi Pemerintahan Desa

			14. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 15. Program Pendaftaran Penduduk 16. Program Pencatatan Sipil 17. Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan 18. Program Kepegawaian Daerah 19. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 20. Program Penataan Organisasi 21. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 22. Program kebijakan administrasi Pembangunan 23. Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa 24. Program Pelayanan Penghubung
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 4. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 6. Program Pengembangan Ekspor 7. 8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 9. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 10. Program Penempatan Tenaga Kerja 11. Program Hubungan Industrial 12. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 13. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil 14. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 15. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 16. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 17. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 18. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda) 19. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma) 20. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta) 21. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut & Payau) 22. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (UPTD BP2MDPP) 23. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 24. Program Promosi Penanaman Modal 25. Program Pelayanan Penanaman Modal 26. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 27. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 28. Program Pemasaran Pariwisata
		Terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

		ketahanan energi dan air	4. Program Penanganan Kerawanan Pangan 5. Program Pengawasan Keamanan Pangan 6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 10. Program Penyuluhan Pertanian 11. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 12. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara 13. Program Pengelolaan Energi baru Terbarukan 14. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 15. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
3.	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya pengembangan wilayah dan konektivitas perkotaan dan perdesaan	1. Program Pengembangan Permukiman 2. Program Penataan Bangunan Gedung 3. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 4. Program Penyelenggaraan Jalan 5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 7. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 8. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 9. Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan 10. Program Pengembangan Perumahan 11. Program Kawasan Permukiman 12. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 14. Program Pengelolaan Pelayaran 15. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 16. Program Pengawasasan dan Pemeriksaan Koperasi 17. Program Pendidikan dan Latihan Koperasi 18. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 19. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 20. Program Pengembangan UMKM 21. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 22. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan dan Makanan Minuman 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan 5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	1. Program pengelolaan pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program pendidik dan tenaga kependidikan 4. Program pengendalian perizinan pendidikan 5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra 6. Program Pembinaan Perpustakaan 7. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 8. Program Kesejahteraan Rakyat 9. Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	1. Program Perlindungan Perempuan 2. Program Peningkatan Kualitas keluarga 3. Program Perlindungan Khusus Anak 4. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 8. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan industri hulu hilir, peningkatan nilai tambah tenaga kerja, Peningkatan KUKM, ekspor, pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 4. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 6. Program Pengembangan Ekspor 7. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 8. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 9. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal 10. Program Promosi Penanaman Modal 11. Program Pelayanan Penanaman Modal 12. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 13. Progran Penempatan Tenaga Kerja 14. Program Hubungan Industrial 15. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 16. Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 17. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari	Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 3. Program Rehabilitasi Sosial

	bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	meningkatnya cakupan perlindungan social bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif	4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Program Penanganan Bencana 6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 7. Program Pengendalian Penduduk 8. Program Pembinaan Keluarga Berencana 9. Program Administrasi Pemerintahan Desa 10. Program Peningkatan Kerjasama Desa 11. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
7	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta pemantapan demokrasi	1. Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 3. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum 4. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konfilk Sosial 6. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 8. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 9. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 10. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 11. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 12. Program Penyelenggaraan Pengawasan 13. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 14. Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa 15. Program perekonomian dan pembangunan 16. Program kebijakan administrasi pembangunan 17. Program Penataan Organisasi 18. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum 19. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 20. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 21. Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi 22. Program Pelayanan Penghubung 23. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 24. Program Pengelolaan Arsip 25. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
		Terwujudnya kesinambungan fiscal dan meningkatkan kemandirian daerah	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 4. Program perekonomian dan pembangunan
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan	Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 2. Program Perencanaan Hutan 3. Program Pengelolaan Hutan 4. Program Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya 5. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 6. Program Pengelolaan DAS

	toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		7. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 8. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 9. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 10. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Peracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 11. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 12. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 13. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 14. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 15. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 16. Program Pengelolaan Persampahan 17. Program Penanggulangan Bencana
		Terwujudnya penguatan peran agama dan budaya dalam pembangunan daerah	18. Program Pengembangan Kebudayaan 19. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 20. Program Pembinaan Sejarah 21. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 22. Program Pengelolaan Permuseuman

4. 5 Pokok – Pokok Pikiran DPRD dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) juga mengakomodir proses politik dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 78 bahwa dalam penyusunan rancangan awal DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Pokok-pokok pikiran DPRD selain disampaikan secara tertulis juga dimasukkan/diinput kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) pada tahapan perencanaan. Setelah diterima oleh Kepala Bapppeda, Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui proses penelaahan/verifikasi untuk diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Proses penelaahan/verifikasi dimaksud dilaksanakan melalui system SIPD-RI yang merupakan hasil inputan dari seluruh anggota DPRD provinsi.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah Provinsi Gorontalo, maka arah kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo di fokuskan pada hal-hal sebagai berikut :

5.1 KOTA GORONTALO

5.1.1 Kebijakan Prioritas Pembangunan Kota Gorontalo

Kebijakan perioritas pembangunan Kota Gorontalo diarahkan pada beberapa hal yaitu :

1. Pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai kawasan perkotaan rawan banjir.
2. Pengamanan dan mitigasi bencana : Sesar/patahan Gorontalo yang merupakan bagian zona pertemuan antara zona eurasia dan zona pasifik.
3. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya.
4. Peningkatan industri hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata (Benteng Otanaha, Iluta) dan ekonomi kreatif.
5. Peningkatan pengelolaan penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi; Peningkatan konektivitas pelayanan transportasi dan Peningkatan keselamatan lalu lintas.
6. Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan E-Government.
7. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif.
8. Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi Sebagai Upaya Implementasi Tahapan SPM Provinsi dan Penguatan Koordinasi serta Advokasi SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup dan upaya percepatan Penurunan Prevalensi stunting termasuk pengembangan teknologi informasi berbasis digital.

9. Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti.

5.1.2 Sasaran Pembangunan

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Gorontalo dan Kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo, maka sasaran kinerja pembangunan Kota Gorontalo diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Proyeksi Makro Ekonomi Kota Gorontalo Tahun 2025

Indikator	Capaian			Proyeksi	Outlook
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	2,8	4,1	4,52	4,97	5,72
Kemiskinan	5,93	5,73	5,64	5,43	5,24
Tingkat Pengangguran	4,55	3,5	4,06	3,18	3,2
IPM	77,41	78,22	78,64	79,2	78,94
Indeks Gini	0,406	0,396	0,396	0,392	0,264

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2024, Hasil Proyeksi KEMD Bapppeda Provinsi dan Berita Acara Pembahasan Musrenbang RKPD 2025

5.2 KABUPATEN GORONTALO

5.1.1 Kebijakan Pembangunan Prioritas Kabupaten Gorontalo

Prioritas Pembangunan Provinsi di Kabupaten Gorontalo diarahkan pada :

1. Peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya.
2. Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategi dan meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik

dan Non Fisik Kewenangan Provinsi Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan E-Government.

4. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif.
5. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi Sebagai Upaya Implementasi Tahapan SPM Provinsi dan Penguatan Koordinasi serta Advokasi SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup dan upaya percepatan Penurunan Prevalensi stunting termasuk pengembangan teknologi informasi berbasis digital.
6. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial; Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti; Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu; Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial; Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan ibu hamil.
7. Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
8. Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup; Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana; Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

5.1.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Gorontalo

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gorontalo dan Kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo, maka sasaran kinerja pembangunan Kabupaten Gorontalo diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 5.2

Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Gorontalo Tahun 2025

Indikator	Capaian			Proyeksi	Outlook
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	2,42	3,93	4,51	4,89	5,16
Kemiskinan	17,89	17,71	17,48	16,98	16,52
Tingkat Pengangguran	2,12	1,83	2,48	2,32	2,19
IPM	68,53	69,51	70,37	71,1	71,9
Indeks Gini	0,389	0,413	0,413	0,409	0,402

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2024, Hasil Proyeksi KEMD Bapppeda Provinsi dan Berita Acara Pembahasan Musrenbang RKPD 2025

5.3 KABUPATEN BOALEMO

5.3.1 Kebijakan Pembangunan Prioritas Kabupaten Boalemo

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya
2. Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategi dan meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik Kewenangan Provinsi Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan E-Government
4. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif
5. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi Sebagai Upaya Implementasi Tahapan SPM Provinsi dan Penguatan Koordinasi serta Advokasi SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka

mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup dan upaya percepatan Penurunan Prevalensi stunting termasuk pengembangan teknologi informasi berbasis digital

6. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial; Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti; Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu; Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial; Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan ibu hamil
7. Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
8. Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup; Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana; Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

5.3.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Boalemo

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Boalemo dan Kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo, maka sasaran kinerja pembangunan Kabupaten Boalemo diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 5.3

Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Boalemo Tahun 2025

Indikator	Capaian			Proyeksi	Outlook
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	2,04	3,05	4,42	4,79	4,81 – 5,31
Kemiskinan	19	18,74	18,38	17,89	17,56
Tingkat Pengangguran	3,57	2,07	2,86	2,62	2,13
IPM	66,42	67,27	68,78	68,57	68,93
Indeks Gini	0,41	0,39	0,39	0,39	0,380

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2024, Hasil Proyeksi KEMD Bapppeda Provinsi dan Berita Acara Pembahasan Musrenbang RKPD 2025

5.4 KABUPATEN POHUWATO

5.4.1 Kebijakan Pembangunan Prioritas Kabupaten Pohuwato

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya
2. Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategi dan meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik (pembangunan bandara Pohuwato) dan Non Fisik Kewenangan Provinsi Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan E-Government.
4. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif
5. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi Sebagai Upaya Implementasi Tahapan SPM Provinsi dan Penguatan Koordinasi serta Advokasi SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup dan upaya percepatan Penurunan Prevalensi stunting termasuk pengembangan teknologi informasi berbasis digital
6. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial; Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti; Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu; Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial; Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan ibu hamil
7. Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
8. Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup; Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko

bencana; Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

5.4.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Pohuwato

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pohuwato dan Kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo, maka sasaran kinerja pembangunan Kabupaten Pohuwato diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 5.4

Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Pohuwato Tahun 2025

Indikator	Capaian			Proyeksi	Outlook
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	2,2	3,1	4,4	4,73	5,8
Kemiskinan	18,08	17,87	17,64	17,41	15,61
Tingkat Pengangguran	2,45	3,41	3,46	3,02	2,50
IPM	67,93	68,67	69,3	69,9	67,85
Indeks Gini	0,413	0,39	0,4	0,397	0,312

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2024, Hasil Proyeksi KEMD Bapppeda Provinsi dan Berita Acara Pembahasan Musrenbang RKPD 2025

5.5 KABUPATEN BONE BOLANGO

5.5.1 Kebijakan Pembangunan Prioritas Kabupaten Bone Bolango

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya
2. Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategi dan meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik Kewenangan Provinsi Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan E-Government
4. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif

5. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi Sebagai Upaya Implementasi Tahapan SPM Provinsi dan Penguatan Koordinasi serta Advokasi SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup dan upaya percepatan Penurunan Prevalensi stunting termasuk pengembangan teknologi informasi berbasis digital
6. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial; Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti; Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu; Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial; Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan ibu hamil
7. Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
8. Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup; Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana; Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

5.5.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Bone Bolango

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bone Bolango dan Kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo, maka sasaran kinerja pembangunan Kabupaten Bone Bolango diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 5.5

Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025

Indikator	Capaian			Proyeksi	Outlook
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	2,18	4,01	4,47	4,82	5,3
Kemiskinan	16,3	16,05	15,51	15,16	14,60
Tingkat Pengangguran	3,45	3,29	3,39	3,11	3,0
IPM	70,76	71,39	71,97	72,4	72,66

Indeks Gini	0,364	0,4	0,4	0,397	0,382

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2024, Hasil Proyeksi KEMD Bapppeda Provinsi dan Berita Acara Pembahasan Musrenbang RKPD 2025

5.6 KABUPATEN GORONTALO UTARA

5.6.1 Kebijakan Pembangunan Prioritas Kabupaten Gorontalo Utara

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya
2. Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategi dan meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik Kewenangan Provinsi Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan E-Government
4. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif
5. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi Sebagai Upaya Implementasi Tahapan SPM Provinsi dan Penguatan Koordinasi serta Advokasi SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup dan upaya percepatan Penurunan Prevalensi stunting termasuk pengembangan teknologi informasi berbasis digital
6. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial; Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti; Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu; Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial; Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan ibu hamil

7. Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
8. Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup; Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana; Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

5.6.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo, maka sasaran kinerja pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 5.6

Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025

Indikator	Capaian			Proyeksi	Outlook
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	2,21	3,3	4,31	4,79	4,8
Kemiskinan	17,23	17,24	17,03	16,83	16,25
Tingkat Pengangguran	2,3	2,02	2,77	2,69	2,1
IPM	66,64	67,41	68	68,6	67,23
Indeks Gini	0,404	0,434		0,424	0,410

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2024, Hasil Proyeksi KEMD Bapppeda Provinsi dan Berita Acara Pembahasan Musrenbang RKPD 2025

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2025 menjabarkan rencana Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang akan didanai pada tahun 2025, dengan memperhatikan perubahan kebijakan pembangunan dan keuangan daerah. Komposisi pendanaan dari Program dan Kegiatan merupakan elaborasi lebih lanjut dari fokus dan prioritas pembangunan tahun 2025.

Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah disajikan bersama dengan semua parameter yang menyertai, yaitu Indikator, Target Tahun Rencana, Lokasi serta Pagu yang merupakan hasil perumusan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk kemudian menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan daerah di masing-masing Perangkat Daerah.

Selanjutnya, pendanaan perencanaan pembangunan Tahun 2025 untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dicermati pada 2 Tabel, tabel pertama adalah Tabel yg menyajikan menyajikan informasi rancangan pemanfaatan efisiensi anggaran, dan Tabel kedua menyajikan rekapitulasi keseluruhan rencana pendanaan pada setiap OPD, sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rancangan Pemanfaatan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

NO	OPD/ URAIAN	AWAL	PERUBAHAN
1	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**3.792.500.000**	**4.557.500.000**
	KAPAL TAXI NELAYAN	3.087.500.000	3.087.500.000
	DEMPLOT RUMPUT LAUT	455.000.000	455.000.000
	PERLENGKAPAN TEMPAT PELELANGAN IKAN	250.000.000	250.000.000
	PENGADAAN MOTOR BER'COOLBOX"	-	765.000.000
2	**DINAS KUMPERINDAG**	**9.350.000.000**	**12.585.000.000**
	PASAR MURAH	1.710.000.000	1.710.000.000
	BANTUAN UMKM	7.250.000.000	7.250.000.000
	BANTUAN IKM	275.000.000	275.000.000
	DUKUNGAN SERTIFIKASI HALAL UMKM	115.000.000	115.000.000
	TAMBAHAN BANTUAN UMKM		1.235.000.000
	INTERVENSI BERJENJANG IKM		2.000.000.000
3	**DINAS PERTANIAN**	**11.737.500.000**	**11.737.500.000**
	BIBIT JAGUNG	2.287.500.000	2.287.500.000
	BIBIT SAPI	9.450.000.000	9.450.000.000
4	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**1.012.000.000**	**1.024.000.000**
	BEASISWA PUTRI/PUTRI KECAMATAN BERPRESTASI	924.000.000	924.000.000
	BEASISWA SMA UNGGULAN (DIHILANGKAN)	88.000.000	-
	TENAGA AHLI APLKASI SPMB		100.000.000
5	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**1.010.000.000**	**775.000.000**
	PEMBERANGKATAN POPNAS DAN PENUNJANG DISPORA	725.000.000	725.000.000
	FORNAS KORMI (DIHILANGKAN KRN TIDAK DIINPUT)	250.000.000	
	HADIAH KARATE (DIGENAPKAN MENJADI 50JT)	35.000.000	50.000.000
6	**DINAS PUPRKP**	**27.500.000.000**	**22.200.000.000**
	REKONSTRUKSI JALAN ASPARAGA (DIHILANGKAN)	20.500.000.000	-
	PERENCANAAN TEKNIS RUAS JL ASPARAGA	-	500.000.000
	PEKERJAAN LANJUTAN KANAL TANGGIDAA	-	4.900.000.000
	PEKERJAAN JALAN AMIR PIOLA ISA	-	14.100.000.000
	SUPERVISI PEKERJAAN JL AMIR PIOLA ISA	-	500.000.000
	PERENCANAAN JALAN BINA MARGA	-	500.000.000
	PENGADAAN LAHAN BANDARA (PINDAH KE DINAS PERHUBUNGAN)	6.000.000.000	-
	PENATAAN TAMAN PATUNG BJ HABIBIE	450.000.000	450.000.000
	JALAN AKSES PERKANTORAN TAMALATE	50.000.000	50.000.000
	TAMBAHAN HIBAH SARPRAS PENAS PRAMUKA	500.000.000	500.000.000
	SHARING DENGAN EHIME UNTUK TPA TALUMELITO	-	700.000.000
7	**DINAS KOMINFOTIK**	**1.300.000.000**	**1.300.000.000**
	PENGADAAN SERVER	1.300.000.000	1.300.000.000
8	**RSUD AINUN HABIBIE**	**3.500.000.000**	**3.500.000.000**
	TAMBAHAN ANGGARAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT	3.500.000.000	3.500.000.000
9	**DINAS KESEHATAN**	**4.050.000.000**	**4.150.000.000**
	PENGEMBALIAN HIBAH PMI	750.000.000	750.000.000
	TAMBAHAN ANGGARAN PENYELESAIAN GEDUNG LABKESDA	3.300.000.000	3.300.000.000
	JASA PENGIRIMAN MOBIL AMBULANCE EHIME	-	100.000.000

NO	OPD/ URAIAN	AWAL	PERUBAHAN
10	**DINAS SOSIAL**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
	TAMBAHAN ANGGARAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA USAHA EKONOMI PRODUKTIF	1.000.000.000	1.000.000.000
11	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	**810.000.000**	**810.000.000**
	SELEKSI P3K	150.000.000	150.000.000
	UJI KOMPETENSI ESSELON 2 DAN 3	435.000.000	435.000.000
	BEASISWA GURU PENDIDIKAN KHUSUS	225.000.000	225.000.000
12	**BIRO PEMKESRA**	**1.325.000.000**	**1.325.000.000**
	HIBAH OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI POLIGON	200.000.000	200.000.000
	BANTUAN STUDI	1.125.000.000	1.125.000.000
13	**BIRO UMUM**	**5.491.404.279**	**5.155.804.279**
	LED DULOHUPA DAN 2 RUMAH DINAS	1.835.000.000	1.600.000.000
	MOBIL PATWAL	550.000.000	550.000.000
	PEMELIHARAAN RUDIS GUBERNUR	195.000.000	195.000.000
	PENATAAN AULA RUDIS GUBERNUR	158.504.279	158.504.279
	PEMELIHARAAN RUDIS SEKDA	100.000.000	100.000.000
	MOBIL ASISTEN 1	516.850.000	516.850.000
	MOBIL ASISTEN 2	516.850.000	516.850.000
	TAMBAHAN KEKURANGAN HONOR PTT DATABASE	1.234.200.000	1.211.100.000
	PENATAAN RUANG OVAL	100.000.000	100.000.000
	EVENT ORGANIZER PIMSET	100.000.000	100.000.000
	REHAB KAMAR MANDI KANTOR GUBERNUR	75.000.000	75.000.000
	JASA FLYER	10.000.000	10.000.000
	JASA VIDEOGRAFER	-	9.000.000
	BELANJA MODAL ALAT KOMUNIKASI	-	13.500.000
	BELANJA BANTUAN REHAB RUDIS KAPOLDA	100.000.000	-
14	**DINAS PERHUBUNGAN**	**1.176.000.000**	**7.076.000.000**
	PERBAIKAN LAMPU PJU	1.000.000.000	1.000.000.000
	BIAYA BALIK NAMA DAN PENGIRIMAN BUS DARI KEMENHUB	176.000.000	76.000.000
	HIBAH PENGADAAN LAHAN BANDARA	-	6.000.000.000
15	**DINAS TENAGA KERJA ESDM DAN TRANSMIGRASI**	**400.000.000**	**400.000.000**
	PREMI BPJS KETENAGAKERJAAN UNTUK PENGEMUDI BENTOR	400.000.000	400.000.000
16	**BAPPPEDA**	**300.000.000**	**300.000.000**
	BELANJA PEMELIHARAAN KANTOR BAPPPEDA	200.000.000	200.000.000
	KAJIAN PERLUASAN WILAYAH KOTA GORONTALO	100.000.000	100.000.000
17	**DINAS PARWISATA**	**350.000.000**	**350.000.000**
	EVENT EKONOMI KREATIF	250.000.000	250.000.000
	BELANJA SARANA PENDUKUNG GEOPARK	100.000.000	100.000.000

NO	OPD/ URAIAN	AWAL	PERUBAHAN
18	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	**28.728.182.000**	**28.953.182.000**
	BELANJA PEMBAYARAN PEN	28.728.182.000	28.728.182.000
	KEGIATAN OPTIMALISASI PAD	-	225.000.000
19	DINAS PANGAN	-	**3.000.000.000**
	PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN	-	3.000.000.000
20	BADAN KESBANG	-	**748.000.000**
	HIBAH REHAB RUMAH DINAS KAPOLDA	-	300.000.000
	PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	-	300.000.000
	HONOR GAKKUMDU PROVINSI GORONTALO	-	75.000.000
	HONOR TIM PENGKAJI	-	73.000.000
	TOTAL	**102.832.586.279**	**110.946.986.279**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**502.502.101.862,00**	**534.067.260.974,00**	**530.023.080.349,00**	**27.520.978.487,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**497.881.628.209,00**	**529.392.839.321,00**	**525.512.961.696,00**	**27.631.333.487,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**497.881.628.209,00**	**529.392.839.321,00**	**525.512.961.696,00**	**27.631.333.487,00**							**0,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Meningkatnya Kualitas Tata Pemerintahan**				**100 %**	**100 %**	**372.732.461.329,00**	**405.199.201.441,00**	**403.544.578.816,00**	**-372.732.461.329,00**							**0,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.913.752.550,00	1.913.752.550,00	997.513.175,00	-916.239.375,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	1.913.752.550,00	1.913.752.550,00	997.513.175,00	-916.239.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	363.569.421.899,00	396.314.014.355,00	396.314.014.355,00	32.744.592.456,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120/12 Orang/ Bulan	120/12 Orang/ Bulan	0,00	396.231.694.355,00	396.231.694.355,00	396.231.694.355,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**NON URUSAN**							**497.881.628.209,00**	**529.392.839.321,00**	**525.512.961.696,00**	**27.631.333.487,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**497.881.628.209,00**	**529.392.839.321,00**	**525.512.961.696,00**	**27.631.333.487,00**							**0,00**	
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**497.881.628.209,00**	**529.392.839.321,00**	**525.512.961.696,00**	**27.631.333.487,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**497.881.628.209,00**	**529.392.839.321,00**	**525.512.961.696,00**	**27.631.333.487,00**							**0,00**	
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	82.320.000,00	82.320.000,00	82.320.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	636.055.500,00	636.055.500,00	304.242.250,00	-331.813.250,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				22 Orang	22 Orang	636.055.500,00	636.055.500,00	304.242.250,00	-331.813.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	279.820.000,00	279.820.000,00	197.990.000,00	-81.830.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	279.820.000,00	279.820.000,00	197.990.000,00	-81.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah*				100 %	100 %	6.333.411.380,00	6.055.559.036,00	5.730.819.036,00	-602.592.344,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.333.411.380,00	6.055.559.036,00	5.730.819.036,00	-602.592.344,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Rata-Rata Kemampuan Numerasi SM dan Diksus Rata-Rata Kemampuan Literasi SM dan Diksus**				**100 1,8 2 % Nilai Nilai**	**100 1,8 2 % Nilai Nilai**	**124.896.358.680,00**	**123.940.829.680,00**	**121.748.574.680,00**	**-124.896.358.680,00**							**0,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas*				100 %	100 %	68.375.353.834,00	69.369.819.834,00	68.090.819.834,00	-284.534.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				8 Unit	8 Unit	5.281.339.000,00	5.986.539.000,00	3.758.539.000,00	-1.522.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				581 Peserta didik	581 Peserta didik	280.475.000,00	280.475.000,00	1.454.475.000,00	1.174.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				628 Peserta Didik	628 Peserta Didik	1.039.185.600,00	1.039.185.600,00	889.185.600,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				506 Orang	506 Orang	9.868.840.234,00	9.057.140.234,00	9.041.940.234,00	-826.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				60 Orang	60 Orang	148.130.000,00	148.130.000,00	128.330.000,00	-19.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				71 Satuan Pendidikan	71 Satuan Pendidikan	496.090.000,00	496.090.000,00	456.090.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				70 Satuan Pendidikan	70 Satuan Pendidikan	51.061.294.000,00	52.162.260.000,00	52.162.260.000,00	1.100.966.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	45.652.342.854,00	44.696.870.854,00	43.833.615.854,00	-1.818.727.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa																		
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				13 Unit	13 Unit	2.638.575.000,00	2.638.575.000,00	2.638.575.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	1.323.051.550,00	5.066.002.550,00	4.891.222.550,00	3.568.171.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2096 Peserta didik	2096 Peserta didik	2.348.505.750,00	2.348.505.750,00	2.083.505.750,00	-265.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				371 Peserta Didik	371 Peserta Didik	980.731.850,00	980.731.850,00	655.506.850,00	-325.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				436 Orang	436 Orang	9.177.057.954,00	8.432.857.954,00	8.364.607.954,00	-812.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				170 Orang	170 Orang	181.737.750,00	181.737.750,00	151.737.750,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				59 Satuan Pendidikan	59 Satuan Pendidikan	29.002.683.000,00	25.048.460.000,00	25.048.460.000,00	-3.954.223.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Khusus*				100 %	100 %	10.868.661.992,00	9.874.138.992,00	9.824.138.992,00	-1.044.523.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				260 Peserta Didik	260 Peserta Didik	2.290.504.000,00	2.290.504.000,00	2.290.504.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				720 Peserta Didik	720 Peserta Didik	474.751.000,00	474.751.000,00	474.751.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				153 Orang	153 Orang	3.904.693.992,00	3.595.093.992,00	3.545.093.992,00	-359.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	4.198.713.000,00	3.513.790.000,00	3.513.790.000,00	-684.923.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Tersusunya Kurikulum SM dan Diksus Serta Tersedianya Buku Teks Pelajaran**				**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**252.808.200,00**	**252.808.200,00**	**219.808.200,00**	**-252.808.200,00**							**0,00**	
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	*Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Pendidingan Menengah*				100 %	100 %	252.808.200,00	252.808.200,00	219.808.200,00	-33.000.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia				921 Buku	921 Buku	102.809.350,00	102.809.350,00	102.809.350,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya				45 Orang	45 Orang	149.998.850,00	149.998.850,00	116.998.850,00	-33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.620.473.653,00**	**4.674.421.653,00**	**4.510.118.653,00**	**-110.355.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**4.620.473.653,00**	**4.674.421.653,00**	**4.510.118.653,00**	**-110.355.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Pesersentase Objek Pemajuan Kebudayaan, Taman Budaya, Tradisi Budaya dan Lembaga Adat**				**90 %**	**90 %**	**300.023.300,00**	**300.023.300,00**	**285.023.300,00**	**-300.023.300,00**							**0,00**	
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	*Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi*				100 %	100 %	300.023.300,00	300.023.300,00	285.023.300,00	-15.000.000,00			-	Peningkatan Kebudayaan dan Agama Peningkatan Kebudayaan dan Agama	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				10 Objek	10 Objek	150.023.400,00	150.023.400,00	150.023.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kebudayaan dan Agama Peningkatan Kebudayaan dan Agama			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	2 Laporan	149.999.900,00	149.999.900,00	134.999.900,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kebudayaan dan Agama Peningkatan Kebudayaan dan Agama			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Lembaga Kesenian Tradisional Yang Ditingkatkan Kapasitasnya**				**5 Objek**	**5 Objek**	**660.809.950,00**	**660.809.950,00**	**640.809.950,00**	**-660.809.950,00**							**0,00**	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	660.809.950,00	660.809.950,00	640.809.950,00	-20.000.000,00			-	Peningkatan Kebudayaan dan Agama Peningkatan Kebudayaan dan Agama	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	3 Lembaga	660.809.950,00	660.809.950,00	640.809.950,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kebudayaan dan Agama Peningkatan Kebudayaan dan Agama			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Cagar Budaya Yang Ditetapkan Pada Peringkat Provinsi**				**7 Objek**	**7 Objek**	**399.978.540,00**	**399.978.540,00**	**361.675.540,00**	**-399.978.540,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	*Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi*				100 %	100 %	199.979.340,00	199.979.340,00	191.676.340,00	-8.303.000,00			-	Peningkatan Kebudayaan dan Agama Peningkatan Kebudayaan dan Agama	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				4 Objek	4 Objek	99.990.900,00	99.990.900,00	99.990.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kebudayaan dan Agama Peningkatan Kebudayaan dan Agama			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				3 Objek	3 Objek	99.988.440,00	99.988.440,00	91.685.440,00	-8.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kebudayaan dan Agama Peningkatan Kebudayaan dan Agama			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	*Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi*				100 %	100 %	199.999.200,00	199.999.200,00	169.999.200,00	-30.000.000,00			-	Peningkatan Kebudayaan dan Agama Peningkatan Kebudayaan dan Agama	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				2 Objek	2 Objek	100.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kebudayaan dan Agama Peningkatan Kebudayaan dan Agama			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya																		
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Orang	25 Orang	99.999.200,00	99.999.200,00	74.999.200,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kebudayaan dan Agama Peningkatan Kebudayaan dan Agama			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase benda Koleksi Yang Tersimpan di Museum Provinsi**				**10/100 Koleksi/%**	**10/100 Koleksi/%**	**3.259.661.863,00**	**3.313.609.863,00**	**3.222.609.863,00**	**-3.259.661.863,00**							**0,00**	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	*Terlaksananya Pengelolaan Museum Provinsi*				100 %	100 %	3.259.661.863,00	3.313.609.863,00	3.222.609.863,00	-37.052.000,00			-	Peningkatan Kebudayaan dan Agama Peningkatan Kebudayaan dan Agama	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan				3 Unit	3 Unit	1.912.844.863,00	664.338.313,00	624.338.313,00	-1.288.506.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Peningkatan Kebudayaan dan Agama Peningkatan Kebudayaan dan Agama			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				90 Orang	90 Orang	913.029.000,00	884.539.000,00	833.539.000,00	-79.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kebudayaan dan Agama Peningkatan Kebudayaan dan Agama			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum																		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				2 Unit	2 Unit	73.312.000,00	1.054.970.550,00	1.054.970.550,00	981.658.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Peningkatan Kebudayaan dan Agama Peningkatan Kebudayaan dan Agama			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				38 Unit	38 Unit	360.476.000,00	709.762.000,00	709.762.000,00	349.286.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Peningkatan Kebudayaan dan Agama Peningkatan Kebudayaan dan Agama			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**86.495.698.133,00**	**88.770.859.785,00**	**89.837.646.773,00**	**3.341.948.640,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**86.235.103.133,00**	**88.312.684.785,00**	**89.474.025.773,00**	**3.238.922.640,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**86.235.103.133,00**	**88.312.684.785,00**	**89.474.025.773,00**	**3.238.922.640,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja**				**100 %**	**100 %**	**28.532.955.033,00**	**27.881.842.685,00**	**26.974.902.105,00**	**-28.532.955.033,00**							**0,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen data Informasi atau Kehumasan* *Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal* *Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan Kinerja Opd Sesuai Standar* *Persentase Ketersediaan Dokumen Pengukuran Kinerja Opd Sesuai Standar* *Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kinerja Sesuai Standar* *Persentase Ketersediaan Tools Terintegrasi Anggaran Dan Kinerja Secara Internal*				100 %	100 %	1.713.545.000,00	1.700.565.000,00	920.158.420,00	-793.386.580,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	725.041.000,00	719.761.000,00	390.790.172,00	-334.250.828,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	988.504.000,00	980.804.000,00	529.368.248,00	-459.135.752,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen keuangan sesuai standar*				100 %	100 %	21.773.190.549,00	21.169.378.201,00	21.153.406.201,00	-619.784.348,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				140 Orang/ Bulan	140 Orang/ Bulan	21.565.172.549,00	20.968.840.201,00	20.968.840.201,00	-596.332.348,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1000 Dokumen	1000 Dokumen	77.420.000,00	77.420.000,00	77.420.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	130.598.000,00	123.118.000,00	107.146.000,00	-23.452.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase ketersediaan dokumen pelaporan administrasi kepegawaian dan SDM aparatur sesuai NSPK*				100 %	100 %	253.540.000,00	253.540.000,00	193.294.000,00	-60.246.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	78.992.000,00	78.992.000,00	78.992.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	1.257.554.268,00	1.257.554.268,00	1.257.554.268,00	0,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.125.865.368,00	1.125.865.368,00	1.125.865.368,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	558.690.000,00	558.690.000,00	408.374.000,00	-150.316.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	558.690.000,00	558.690.000,00	408.374.000,00	-150.316.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	2.634.021.216,00	2.599.701.216,00	2.699.701.216,00	65.680.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	607.063.200,00	607.063.200,00	607.063.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	854.960.000,00	841.210.000,00	941.210.000,00	86.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	342.414.000,00	342.414.000,00	342.414.000,00	0,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 unit Unit	15 unit Unit	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	165.242.000,00	165.242.000,00	165.242.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	54.946.000,00	54.946.000,00	54.946.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentasi Pemenuhan SPM Layanan Krisis Kesehatan Jumlah Kabupaten /Kota UHC Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan Persentasi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Jumlah RSUD melaksanakan layanan prioritas KJSU minimal Utama Jumlah RSUD melaksanakan layanan prioritas KJSU minimal Madya Persentasi Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Persentasi FKTP terakreditasi paripurna Persentasi Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronik)**				**100 1 1 2.3 2 4 6.5 80 9 % kab/kota unit % RS RS % % %**	**100 1 1 2.3 2 4 6.5 80 9 % kab/kota unit % RS RS % % %**	**56.818.838.100,00**	**59.079.749.200,00**	**61.495.766.018,00**	**-56.818.838.100,00**							**0,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Pembangunan gedung dan fasilitas kesehatan lainnya Persentasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*				100 % 1 unit 91 %	100 % 1 unit 91 %	1.312.270.000,00	2.563.996.050,00	7.208.469.916,00	5.896.199.916,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Unit Kerja Dinas Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	417.682.000,00	607.303.500,00	477.166.500,00	59.484.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	412.900.000,00	1.475.004.550,00	1.475.004.550,00	1.062.104.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Kabupaten Kota memeiliki tenaga cadangan Kesehatan* *Jumlah Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)* *Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan kesehatan kerja* *Jumlah Pasien Rujukan Luar Daerah yang dilakukan Tata Laksana sesuai standar* *Jumlah Penerima Dana Talangan Sesuai kriteria yang ditentukan* *Persentase Akses air minum aman* *Persentase Akses air minum layak* *Persentase ASI Eksklusif* *Persentase Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)* *Persentase D/S* *Persentase Ibu Hamil Konsumsi TTD/MMS* *Persentase Ibu Hamil yang mengkonsumsi PMT* *Persentase KabKota yang melaksanakan skrining Hepatitis B pada ibu hamil* *Persentase Kabupaten/Kota melakukan respon Sinyal Peringatan Dini Penyakit Potensi KLB* *Persentase Kepesertaan JKN* *Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana mendapatkan edukasi* *Persentase ODHA yang ditemukan dan memulai pengobatan ARV* *Persentase Pasien kusta yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu* *Persentase Pemenuhan dan validasi SPA Faskes* *Persentase Pemenuhan layanan kesehatan KLB / Potensi KLB dilakukan sesuai standar* *Persentase Penderita Diabetes Melitus terkendali* *Persentase PKM dan RS yang mengimplementasi serta melaporkan IKP tepat waktu* *Persentase PKM dan RS yang mengimplementasi serta melaporkan INM tepat waktu* *Persentase Sarana Air minum yang diawasi memenuhi syarat sesuai standar* *Persentase Tata laksana kasus DBD sesuai standar* *Persentase Tata Laksana Kasus diare sesuai standar* *Persentase Tata laksana Kasus malaria sesuai standar* *Persentase Tata Laksana Kasus pneumonia sesuai standar* *Persentase Tata laksana kasus Rabies sesuai standar* *Persentase Treatment Coverage TB* *Persentasi Penduduk usia > 15 tahun yang dilakukan skrining kesehatan jiwa* *Tempat Pengelolaan Pangan memenuhi syarat sesuai standar*				100 % 1000% % 15 % 150 pasien 20 pasien 2 kb/kt 50 % 56 % 62 % 65 % 6 kb/kt 75 % 85 % 90 % 90 undefined 93 % 98 %	100 % 1000% % 15 % 150 pasien 20 pasien 2 kb/kt 50 % 56 % 62 % 65 % 6 kb/kt 75 % 85 % 90 % 90 undefined 93 % 98 %	55.415.406.100,00	56.286.509.150,00	54.096.253.102,00	-1.319.152.998,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi dan Kabupaten/Kota		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				45585 Orang	45585 Orang	1.251.814.000,00	1.273.814.000,00	965.844.000,00	-285.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8792 Orang	8792 Orang	958.484.500,00	948.364.500,00	540.423.500,00	-418.061.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				6 Dokumen	6 Dokumen	550.150.000,00	765.640.000,00	581.894.000,00	31.744.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				6 Dokumen	6 Dokumen	151.883.000,00	146.823.000,00	103.240.000,00	-48.643.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	6 Dokumen	298.774.000,00	296.134.000,00	169.225.000,00	-129.549.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				6 Dokumen	6 Dokumen	1.121.292.000,00	1.113.592.000,00	902.292.552,00	-218.999.448,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				6 Dokumen	6 Dokumen	135.640.000,00	216.026.000,00	143.178.000,00	7.538.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis				40 Orang	40 Orang	173.795.000,00	173.795.000,00	155.715.000,00	-18.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	48.672.340.000,00	48.629.480.000,00	47.994.199.000,00	-678.141.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	354.129.050,00	354.129.050,00	354.129.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				6 Dokumen	6 Dokumen	2.101.233.600,00	2.290.856.600,00	2.108.258.000,00	7.024.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	47 Paket	0,00	77.855.000,00	77.855.000,00	77.855.000,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan*				1 dokumen	1 dokumen	91.162.000,00	229.244.000,00	191.043.000,00	99.881.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi dan Kab/Kota		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	91.162.000,00	229.244.000,00	191.043.000,00	99.881.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Pemenuhan layanan Krisis Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**348.403.000,00**	**823.995.900,00**	**716.305.150,00**	**-348.403.000,00**							**0,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Kab/Kota yang memiliki Roadmap Pemenuhan tenaga sesuai standar untuk faskes diwilayahnya* *Persentase Puskesmas dengan 9 Tenaga Kesehatan sesuai standar* *Persentase Puskesmas Tanpa Dokter* *Persentase RSUD dengan 4 Dokter Spesialis Utama dan 3 Dokter Spesialis Pendamping*				0 % 60 % 65 % 6 kabkota	0 % 60 % 65 % 6 kabkota	348.403.000,00	823.995.900,00	716.305.150,00	367.902.150,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi dan Kab/Kota		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				15 Orang	15 Orang	73.879.500,00	557.392.400,00	490.437.650,00	416.558.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	274.523.500,00	266.603.500,00	225.867.500,00	-48.656.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengendalian dan pengawasan sarana kefarmasian, alkes,PKRT, makanan dan minuman**				**6 kabkota**	**6 kabkota**	**159.570.000,00**	**156.930.000,00**	**62.560.000,00**	**-159.570.000,00**							**0,00**	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	*Persentase Puskesmas dan Kab/kota yang memiliki ketersediaan obat dan vaksin sesuai standar*				92 % 93 %	92 % 93 %	159.570.000,00	156.930.000,00	62.560.000,00	-97.010.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi dan Kab/Kota		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				16 Sarana	16 Sarana	159.570.000,00	156.930.000,00	62.560.000,00	-97.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) % Berat Bayi Lahir Rendah Persentase Prevalensi Anemia pada Bumil Prevalensi Bumil KEK**				**100 2.3 6.5 9 % % % %**	**100 2.3 6.5 9 % % % %**	**375.337.000,00**	**370.167.000,00**	**224.492.500,00**	**-375.337.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Kabkota yang mengimplementasikan GERMAS Persentase Posyandu Aktif*				100 % 6 kabkota	100 % 6 kabkota	375.337.000,00	370.167.000,00	224.492.500,00	-150.844.500,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi dan Kab/Kota		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				6 Dokumen	6 Dokumen	375.337.000,00	370.167.000,00	224.492.500,00	-150.844.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**260.595.000,00**	**458.175.000,00**	**363.621.000,00**	**103.026.000,00**							**0,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**260.595.000,00**	**458.175.000,00**	**363.621.000,00**	**103.026.000,00**							**0,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Jumlah Dokumen Grand Desain yang disusun**				**1 dokumen**	**1 dokumen**	**98.700.000,00**	**98.700.000,00**	**55.400.000,00**	**-98.700.000,00**							**0,00**	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Persentase data GDPK tersedia lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan*				100 %	100 %	98.700.000,00	98.700.000,00	55.400.000,00	-43.300.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi		0,00	DINAS KESEHATAN
	2.14.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				6 Dokumen	6 Dokumen	98.700.000,00	98.700.000,00	55.400.000,00	-43.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase KB Aktif**				**63.4 %**	**63.4 %**	**161.895.000,00**	**359.475.000,00**	**308.221.000,00**	**-161.895.000,00**							**0,00**	
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Persentase FKTP melakukan pelayanan kespro catin sesuai standar Persentase FKTP yang melakukan pelayanan KB sesuai standar*				60 % 65 %	60 % 65 %	161.895.000,00	359.475.000,00	308.221.000,00	146.326.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi dan Kab/Kota		0,00	DINAS KESEHATAN
	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				6 Dokumen	6 Dokumen	128.943.000,00	326.523.000,00	293.101.000,00	164.158.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.				6 Dokumen	6 Dokumen	32.952.000,00	32.952.000,00	15.120.000,00	-17.832.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD DR. HASRI AINUN HABIBIE							**79.896.453.340,00**	**99.454.654.676,00**	**112.461.247.921,00**	**32.564.794.581,00**							**119.953.317.362,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**79.896.453.340,00**	**99.454.654.676,00**	**112.461.247.921,00**	**32.564.794.581,00**							**119.953.317.362,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**79.896.453.340,00**	**99.454.654.676,00**	**112.461.247.921,00**	**32.564.794.581,00**							**119.953.317.362,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Meningkatnya kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provins RSUD Ainun Habibie**				**100 %**	**100 %**	**63.735.526.140,00**	**72.874.486.476,00**	**72.248.874.476,00**	**24.198.424.622,00**							**87.933.950.762,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*100% Pengelolaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan dilaksanakan sesuai standar Presentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	293.644.600,00	280.444.600,00	124.078.600,00	-169.566.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		508.315.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	218.147.400,00	210.227.400,00	82.901.400,00	-135.246.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			386.291.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	39.177.000,00	36.537.000,00	36.537.000,00	-2.640.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	36.320.200,00	33.680.200,00	4.640.200,00	-31.680.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			72.024.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*100% Penyelenggaraan adminsitrasi keuangan perangkat daerah dilaksanakan sesuai standar*				100 %	100 %	24.153.004.440,00	23.306.637.776,00	23.241.844.776,00	-911.159.664,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	-		25.321.944.412,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				152 Orang/ Bulan	152 Orang/ Bulan	23.858.582.640,00	23.025.415.976,00	23.025.415.976,00	-833.166.664,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			24.858.582.640,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1800 Dokumen	1800 Dokumen	104.521.000,00	99.241.000,00	74.074.000,00	-30.447.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	142.317.000,00	137.037.000,00	97.411.000,00	-44.906.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	11.687.800,00	11.687.800,00	11.687.800,00	0,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			14.488.172,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				11 Laporan	11 Laporan	35.896.000,00	33.256.000,00	33.256.000,00	-2.640.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			48.873.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*"100% pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah terlaksana sesuai standar "*				100 %	100 %	214.312.000,00	209.032.000,00	120.985.000,00	-93.327.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		400.874.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				152 Orang	152 Orang	214.312.000,00	209.032.000,00	120.985.000,00	-93.327.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			400.874.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*"100% pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan sesuai standar "*				100 %	100 %	762.327.600,00	762.327.600,00	651.904.600,00	-110.423.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		812.001.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	42.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99.451.000,00	99.451.000,00	33.833.000,00	-65.618.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			110.001.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	491.141.000,00	491.141.000,00	463.894.000,00	-27.247.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.139.600,00	30.139.600,00	30.139.600,00	0,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kebudayaan dan Agama Peningkatan Kebudayaan dan Agama			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52.596.000,00	52.596.000,00	43.038.000,00	-9.558.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			46.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*100% kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai standar "* *" Tersedianya jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie*				100 % 4 laporan	100 % 4 laporan	5.168.724.400,00	5.129.564.400,00	4.931.124.400,00	-237.600.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		6.732.304.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.812.304.400,00	1.812.304.400,00	1.812.304.400,00	0,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			2.812.304.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.340.320.000,00	3.301.160.000,00	3.102.720.000,00	-237.600.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			3.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*100% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilakukan pemerliharaan sesuai standar "*				100 %	100 %	95.502.000,00	95.502.000,00	87.959.000,00	-7.543.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		110.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	35.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			45.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	60.002.000,00	60.002.000,00	52.459.000,00	-7.543.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Laporan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi, Pelayanan Medis dan Penunjang RSUD dr. Hasri Ainun Habibie*				1 Laporan	1 Laporan	33.048.011.100,00	43.090.978.100,00	43.090.978.100,00	10.042.967.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		54.048.011.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	33.048.011.100,00	43.090.978.100,00	43.090.978.100,00	10.042.967.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			54.048.011.100,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo**				**100 %**	**100 %**	**1.708.645.200,00**	**13.323.681.200,00**	**29.306.276.445,00**	**14.774.621.400,00**							**16.483.266.600,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*100% aktifitas pada sub kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya,Pengadaan Sarana,Prasarana di Fasilitas Layanan Kesehatan termasuk Pemeliharaan, Sarana,Prasarana, Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan, Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya, Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin,serta Fasilitas Makanan dan Minumanl dan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Prosentase Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie sesuai standar*				100 %	100 %	1.486.366.200,00	13.102.962.200,00	29.100.321.445,00	27.613.955.245,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		16.183.266.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				6 Unit	6 Unit	475.952.200,00	470.672.200,00	470.672.200,00	-5.280.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			525.952.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				6 Unit	6 Unit	363.103.000,00	357.823.000,00	357.823.000,00	-5.280.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			410.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				-	13 Unit	0,00	8.710.296.980,00	8.710.296.980,00	8.710.296.980,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	1 Unit	0,00	2.947.339.020,00	18.973.738.265,00	18.973.738.265,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			4.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	647.311.000,00	616.831.000,00	587.791.000,00	-59.520.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			747.314.400,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*100% aktifitas pada sub kegiatan Pengelolaan data dan informasi kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan* *Tersedianya Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan sistem Informasi Kesehatan*				100 % 1 dok	100 % 1 dok	222.279.000,00	220.719.000,00	205.955.000,00	-16.324.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	222.279.000,00	220.719.000,00	205.955.000,00	-16.324.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**100% Kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan ditingkatkankan kompetensinya terpenuhi sesuai standar yang ditetapkan**				**100 %**	**100 %**	**14.452.282.000,00**	**13.256.487.000,00**	**10.906.097.000,00**	**1.083.818.000,00**							**15.536.100.000,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	*Terpenuhinya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo*				363 orang	363 orang	14.452.282.000,00	13.256.487.000,00	10.906.097.000,00	-3.546.185.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	-		15.536.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				363 Orang	363 Orang	14.452.282.000,00	13.256.487.000,00	10.906.097.000,00	-3.546.185.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			15.536.100.000,00	DINAS KESEHATAN
		LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							**86.495.698.133,00**	**88.770.859.785,00**	**89.837.646.773,00**	**3.341.948.640,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**86.235.103.133,00**	**88.312.684.785,00**	**89.474.025.773,00**	**3.238.922.640,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**86.235.103.133,00**	**88.312.684.785,00**	**89.474.025.773,00**	**3.238.922.640,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase peningkatan pelayanan BLUD**				**100 %**	**100 %**	**28.532.955.033,00**	**27.881.842.685,00**	**26.974.902.105,00**	**-28.532.955.033,00**							**0,00**	
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase ketersediaan dokumen pelaporan administrasi kepegawaian dan SDM aparatur sesuai NSPK*				100 %	100 %	253.540.000,00	253.540.000,00	193.294.000,00	-60.246.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	174.548.000,00	174.548.000,00	114.302.000,00	-60.246.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	1.257.554.268,00	1.257.554.268,00	1.257.554.268,00	0,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	97.978.900,00	97.978.900,00	97.978.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6.210.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	558.690.000,00	558.690.000,00	408.374.000,00	-150.316.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	2.634.021.216,00	2.599.701.216,00	2.699.701.216,00	65.680.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	243.908.016,00	243.908.016,00	243.908.016,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	928.090.000,00	907.520.000,00	907.520.000,00	-20.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	342.414.000,00	342.414.000,00	342.414.000,00	0,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	88.726.000,00	88.726.000,00	88.726.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Pengembangan faskes lainnya**				**1 unit**	**1 unit**	**56.818.838.100,00**	**59.079.749.200,00**	**61.495.766.018,00**	**-56.818.838.100,00**							**0,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase IKM (indeks Kepuasan Masyarakat) Persentase PAD (Pendapatan Asli Daerah) Persentase Pembangungan Gedung dan fasilitas kesehatan Lainnya*				100 % 50 % 90 %	100 % 50 % 90 %	1.312.270.000,00	2.563.996.050,00	7.208.469.916,00	5.896.199.916,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Provinsi		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	4.774.610.866,00	4.774.610.866,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit																		
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	481.688.000,00	481.688.000,00	481.688.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**101.399.045.902,00**	**127.911.756.616,00**	**101.373.360.183,00**	**-25.685.719,00**							**76.706.695.934,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**97.765.104.802,00**	**124.318.955.516,00**	**98.081.701.734,00**	**316.596.932,00**							**76.706.695.934,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**91.450.867.202,00**	**118.053.337.916,00**	**92.887.171.074,00**	**1.436.303.872,00**							**76.706.695.934,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentasi peningkatan kompetensi SDM dan kapasitas pengelolaan Sumberdaya Ogranisasi**				**100 %**	**100 %**	**38.832.021.263,00**	**37.919.766.977,00**	**36.823.776.870,00**	**-4.012.560.422,00**							**34.819.460.841,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan keterpaduan perencanaan dan kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	1.410.555.200,00	1.395.595.200,00	995.710.800,00	-414.844.400,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		1.378.582.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	767.437.200,00	767.437.200,00	499.910.800,00	-267.526.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			761.080.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Dokumen Laporan	7 Dokumen Laporan	643.118.000,00	628.158.000,00	495.800.000,00	-147.318.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			617.501.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan pengelolaan keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	28.465.850.138,00	27.678.885.852,00	27.614.067.852,00	-851.782.286,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		28.465.850.491,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				260 Orang/ Bulan	260 Orang/ Bulan	28.266.309.938,00	27.479.345.652,00	27.479.345.652,00	-786.964.286,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			28.266.309.941,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	199.540.200,00	199.540.200,00	134.722.200,00	-64.818.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			199.540.550,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				100 Orang	100 Orang	732.399.600,00	694.999.600,00	612.534.600,00	-119.865.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		716.560.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	100 Orang	732.399.600,00	694.999.600,00	612.534.600,00	-119.865.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			716.560.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor*				5 Paket	5 Paket	2.626.100.575,00	2.626.100.575,00	2.511.887.268,00	-114.213.307,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.796.100.000,00	1.796.100.000,00	1.833.114.693,00	37.014.693,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pelaporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor*				1 Laporan	1 Laporan	4.869.632.500,00	4.821.012.500,00	4.437.003.100,00	-432.629.400,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		4.158.468.050,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.291.622.500,00	4.259.832.500,00	3.960.587.100,00	-331.035.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			4.158.468.050,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Panjang pengaman Sungai yang dibangun dan dipelihara Panjang pengaman Pantai yang dibangun dan dipelihara**				**0.6 0.8 KM KM**	**0.6 0.8 KM KM**	**13.449.752.461,00**	**18.399.288.461,00**	**12.341.501.707,00**	**28.437.482.632,00**							**41.887.235.093,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang pengaman Pantai yang dibangun dan dipelihara*				0.8 KM	0.8 KM	6.964.708.811,00	6.964.708.811,00	6.393.057.148,00	-571.651.663,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Panjang bangunan Infrastruktur pengendali Banjir		18.982.175.093,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0055	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir																		
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	452.400.000,00	452.400.000,00	452.400.000,00	0,00	Kota Gorontalo, Kota Timur, Ipilo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			728.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				2 Lembaga	2 Lembaga	360.000.000,00	360.000.000,00	113.770.000,00	-246.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0.15 KM	0.15 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.5 KM	0.5 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0.25 KM	0.25 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0097	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				2.5 KM	2.5 KM	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Gorontalo, Kota Timur, Heledulaa Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0098	Pembangunan Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun				2.5 KM	2.5 KM	4.953.775.093,00	4.953.775.093,00	4.900.000.000,00	-53.775.093,00	Kota Gorontalo, Kota Timur, Heledulaa Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			4.953.775.093,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0.3 KM	0.3 KM	943.270.468,00	943.270.468,00	735.395.468,00	-207.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	245.263.250,00	245.263.250,00	181.491.680,00	-63.771.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			1.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Luasan irigasi yang ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara*				2467 Ha	2467 Ha	6.485.043.650,00	11.434.579.650,00	5.948.444.559,00	-536.599.091,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi		22.905.060.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0.45 KM	0.45 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			855.060.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				5 KM	5 KM	1.020.000.000,00	6.216.395.000,00	920.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				0 Bendung	0 Bendung	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				100 KM	100 KM	4.849.377.350,00	4.602.518.350,00	4.536.037.550,00	-313.339.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				7 Bendung	7 Bendung	373.401.000,00	373.401.000,00	336.700.500,00	-36.700.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			2.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	242.265.300,00	242.265.300,00	155.706.509,00	-86.558.791,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Pengelolaan Air Minum**				**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**341.260.200,00**	**341.260.200,00**	**105.067.200,00**	**-341.260.200,00**							**0,00**	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	*Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Pengelolaan Air Minum*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	341.260.200,00	341.260.200,00	105.067.200,00	-236.193.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.1.01.0013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				3 Lembaga	3 Lembaga	166.868.400,00	166.868.400,00	95.107.400,00	-71.761.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				3 Kabupaten/Kota	3 Kabupaten/Kota	174.391.800,00	174.391.800,00	9.959.800,00	-164.432.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase kapasitas Sistem Air Limbah Domestik Regional yang Dapat Terlayani**				**100 %**	**100 %**	**790.094.400,00**	**790.094.400,00**	**15.280.400,00**	**-790.094.400,00**							**0,00**	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	*Persentase kapasitas Sistem Air Limbah Domestik Regional yang Dapat Terlayani*				100 %	100 %	790.094.400,00	790.094.400,00	15.280.400,00	-774.814.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				100 Orang	100 Orang	229.992.400,00	229.992.400,00	2.975.400,00	-227.017.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	560.102.000,00	560.102.000,00	12.305.000,00	-547.797.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Jumlah Drainase yang Dibangun pada Kawasan Strategis Provinsi**				**1 Unit**	**1 Unit**	**601.038.600,00**	**601.038.600,00**	**514.254.600,00**	**-601.038.600,00**							**0,00**	
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	*Jumlah Drainase yang Dibangun pada Kawasan Strategis Provinsi*				1 Unit	1 Unit	601.038.600,00	601.038.600,00	514.254.600,00	-86.784.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	601.038.600,00	601.038.600,00	514.254.600,00	-86.784.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**				**1 Kawasan**	**1 Kawasan**	**2.417.264.600,00**	**2.317.264.600,00**	**1.538.800.570,00**	**-2.417.264.600,00**							**0,00**	
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	*Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi*				1 Kawasan	1 Kawasan	2.417.264.600,00	2.317.264.600,00	1.538.800.570,00	-878.464.030,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.1.01.0009	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar				10 Rumah Tangga	10 Rumah Tangga	1.515.073.600,00	1.415.073.600,00	1.214.513.570,00	-300.560.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.1.01.0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				5 Liter/Detik	5 Liter/Detik	902.191.000,00	902.191.000,00	324.287.000,00	-577.904.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Jumlah Bangunan Milik Pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi untuk Kepentingan Strategis**				**1 Unit**	**1 Unit**	**17.286.513.600,00**	**17.286.513.600,00**	**9.554.808.594,00**	**-17.286.513.600,00**							**0,00**	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	*Jumlah Bangunan Milik Pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi untuk Kepentingan Strategis*				1 Unit	1 Unit	17.286.513.600,00	17.286.513.600,00	9.554.808.594,00	-7.731.705.006,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				24 Orang	24 Orang	105.792.000,00	105.792.000,00	39.948.194,00	-65.843.806,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan				1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	9.952.052.400,00	9.952.052.400,00	2.302.748.200,00	-7.649.304.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.1.01.0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek																		
			Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang				10 Lisensi	10 Lisensi	9.998.400,00	9.998.400,00	3.122.400,00	-6.876.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				4 Dokumen	4 Dokumen	7.218.670.800,00	7.218.670.800,00	7.208.989.800,00	-9.681.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang di kelola pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota**				**5 Kawasan**	**5 Kawasan**	**4.580.303.200,00**	**4.500.554.200,00**	**2.558.653.200,00**	**-4.580.303.200,00**							**0,00**	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang di kelola pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota*				5 Kawasan	5 Kawasan	4.580.303.200,00	4.500.554.200,00	2.558.653.200,00	-2.021.650.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				2 Kawasan	2 Kawasan	2.048.666.400,00	2.048.666.400,00	555.250.400,00	-1.493.416.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	549.991.800,00	549.991.800,00	241.030.800,00	-308.961.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.601.264.000,00	1.521.515.000,00	963.253.000,00	-638.011.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan				6 kabupaten/kota	6 kabupaten/kota	380.381.000,00	380.381.000,00	799.119.000,00	418.738.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Panjang Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi dalam kondisi baik**				**438,29 Km**	**438,29 Km**	**8.066.360.661,00**	**30.869.268.661,00**	**24.336.146.356,00**	**-8.066.360.661,00**							**0,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Panjang Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi dalam kondisi baik*				438,29 Km	438,29 Km	8.066.360.661,00	30.869.268.661,00	24.336.146.356,00	16.269.785.695,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas PUPR-PKP		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi				5 KM	5 KM	74.993.000,00	896.087.000,00	600.000.000,00	525.007.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				20 Jembatan	20 Jembatan	1.088.352.000,00	1.049.762.000,00	1.536.035.600,00	447.683.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				160 KM	160 KM	55.384.000,00	55.384.000,00	0,00	-55.384.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				5 KM	5 KM	0,00	9.942.454.000,00	15.522.081.000,00	15.522.081.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				150 KM	150 KM	2.790.593.249,00	2.790.593.249,00	2.627.195.174,00	-163.398.075,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				1 Jembatan	1 Jembatan	746.306.312,00	12.855.706.312,00	427.878.782,00	-318.427.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				5 KM	5 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.453.095.100,00	2.421.645.100,00	2.561.401.000,00	108.305.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				467,17 KM	467,17 KM	857.637.000,00	857.637.000,00	1.061.554.800,00	203.917.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli**				**100 %**	**100 %**	**658.872.400,00**	**632.692.400,00**	**517.896.400,00**	**-658.872.400,00**							**0,00**	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	*Jumlah SDM bidang konstruksi yang bersertifikat dan terbina*				190 Orang	190 Orang	196.497.400,00	196.497.400,00	181.347.400,00	-15.150.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				90 Orang	90 Orang	111.879.000,00	111.879.000,00	111.879.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Lembaga	20 Lembaga	84.618.400,00	84.618.400,00	69.468.400,00	-15.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi*				2 Dokumen	2 Dokumen	462.375.000,00	436.195.000,00	336.549.000,00	-125.826.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI																		
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Orang	25 Orang	462.375.000,00	436.195.000,00	336.549.000,00	-125.826.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Jumlah Dokumen Rencana Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**883.571.300,00**	**883.571.300,00**	**586.113.660,00**	**-883.571.300,00**							**0,00**	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	*Jumlah Dokumen Rencana Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi*				1 Dokumen	1 Dokumen	136.680.300,00	136.680.300,00	105.107.800,00	-31.572.500,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Jumlah dokumen rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang provinsi yang ditetapkan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				240 Orang	240 Orang	136.680.300,00	136.680.300,00	105.107.800,00	-31.572.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	*Jumlah Dokumen Rencana Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi*				1 Dokumen	1 Dokumen	381.891.000,00	381.891.000,00	276.309.650,00	-105.581.350,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang Provinsi		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	31.450.000,00	31.450.000,00	25.200.000,00	-6.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang																		
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000,00	165.000.000,00	95.437.150,00	-69.562.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota																		
			Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari				1 Dokumen	1 Dokumen	185.441.000,00	185.441.000,00	155.672.500,00	-29.768.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Rencana Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi*				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	93.797.810,00	-56.202.190,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Jumlah dokumen Informasi Penataan Ruang		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
			Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	93.797.810,00	-56.202.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Rencana Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi*				1 Dokumen	1 Dokumen	215.000.000,00	215.000.000,00	110.898.400,00	-104.101.600,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dan RRTR		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				1 Kasus	1 Kasus	215.000.000,00	215.000.000,00	110.898.400,00	-104.101.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**6.314.237.600,00**	**6.265.617.600,00**	**5.194.530.660,00**	**-1.119.706.940,00**							**0,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase terhadap kebutuhan pelayanan dasar pada pemenuhan Kebencanaan**				**100 %**	**100 %**	**1.300.000.000,00**	**1.300.000.000,00**	**924.820.960,00**	**-1.300.000.000,00**							**0,00**	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang dilaksanakan*				6 Dokumen	6 Dokumen	62.012.000,00	62.012.000,00	42.012.000,00	-20.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pemerintah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	62.012.000,00	62.012.000,00	42.012.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Persentase Jumlah Dokumen dan Laporan Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang dilaksanakan*				100 %	100 %	687.996.000,00	687.996.000,00	410.759.360,00	-277.236.640,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pemerintah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana				100 Orang	100 Orang	372.301.000,00	372.301.000,00	227.349.400,00	-144.951.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator																		
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				15 Orang	15 Orang	224.626.000,00	224.626.000,00	122.660.000,00	-101.966.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi				10 orang	10 orang	80.726.000,00	80.726.000,00	60.317.960,00	-20.408.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				100 Orang	100 Orang	10.343.000,00	10.343.000,00	432.000,00	-9.911.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Jumlah Unit Rumah yang Terbangun/Rehabilitasi bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi*				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	549.992.000,00	549.992.000,00	472.049.600,00	-77.942.400,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pemerintah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi																		
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi				5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	549.992.000,00	549.992.000,00	472.049.600,00	-77.942.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase terhadap Penataan Kawasan Permukiman dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Provinsi**				**27 %**	**27 %**	**5.014.237.600,00**	**4.965.617.600,00**	**4.269.709.700,00**	**-5.014.237.600,00**							**0,00**	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Jumlah Laporan Kegiatan Penyadaran Publik, Koordinasi, dan Sinkronisasi yang dilaksanakan*				4 Laporan	4 Laporan	511.344.400,00	511.344.400,00	309.919.100,00	-201.425.300,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pemerintah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				4 Laporan	4 Laporan	317.800.000,00	317.800.000,00	181.365.700,00	-136.434.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				350 Orang	350 Orang	193.544.400,00	193.544.400,00	128.553.400,00	-64.991.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang ditangani*				25 Ha	25 Ha	4.502.893.200,00	4.454.273.200,00	3.959.790.600,00	-543.102.600,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pemerintah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				400 Unit Rumah	400 Unit Rumah	2.862.739.400,00	2.814.119.400,00	2.566.636.800,00	-296.102.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar				19 Ha	19 Ha	1.640.153.800,00	1.640.153.800,00	1.393.153.800,00	-247.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.633.941.100,00**	**3.592.801.100,00**	**3.291.658.449,00**	**-342.282.651,00**							**0,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**3.633.941.100,00**	**3.592.801.100,00**	**3.291.658.449,00**	**-342.282.651,00**							**0,00**	
1.	**2.10.03**	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**Jumlah Penyediaan Bidang Tanah untuk Kepentingan Umum yang tersertifikat**				**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**937.868.000,00**	**896.728.000,00**	**762.080.000,00**	**-937.868.000,00**							**0,00**	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	*Jumlah dokumen pengadaan tanah yang ditetapkan*				5 Dokumen	5 Dokumen	937.868.000,00	896.728.000,00	762.080.000,00	-175.788.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Jumlah Bidang Tanah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.03.1.01.0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum																		
			Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	937.868.000,00	896.728.000,00	762.080.000,00	-175.788.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Jumlah penyelesaian Konflik Sengketa dan Perkara Pertanahan**				**1 Kasus**	**1 Kasus**	**87.628.100,00**	**87.628.100,00**	**87.628.100,00**	**-87.628.100,00**							**0,00**	
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*				1 Dokumen	1 Dokumen	87.628.100,00	87.628.100,00	87.628.100,00	0,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Jumlah konflik pertanahan yang terfasilitasi		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.04.1.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	87.628.100,00	87.628.100,00	87.628.100,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Jumlah lokasi Tanah yang dilaksanakan Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan**				**2 Lokasi**	**2 Lokasi**	**2.608.445.000,00**	**2.608.445.000,00**	**2.441.950.349,00**	**-2.608.445.000,00**							**0,00**	
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi*				10 Dokumen	10 Dokumen	2.608.445.000,00	2.608.445.000,00	2.441.950.349,00	-166.494.651,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang terselesaikan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.05.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.608.445.000,00	2.608.445.000,00	2.441.950.349,00	-166.494.651,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		UPTD BALAI PENGUJIAN MATERIAL JALAN DAN BANGUNAN							**101.399.045.902,00**	**127.911.756.616,00**	**101.373.360.183,00**	**-25.685.719,00**							**76.706.695.934,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**97.765.104.802,00**	**124.318.955.516,00**	**98.081.701.734,00**	**316.596.932,00**							**76.706.695.934,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**91.450.867.202,00**	**118.053.337.916,00**	**92.887.171.074,00**	**1.436.303.872,00**							**76.706.695.934,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentasi peningkatan kompetensi SDM dan kapasitas pengelolaan Sumberdaya Ogranisasi**				**100 %**	**100 %**	**38.832.021.263,00**	**37.919.766.977,00**	**36.823.776.870,00**	**-4.012.560.422,00**							**34.819.460.841,00**	
	1.03.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan pengelolaan retribusi Daerah*				600 Laporan	600 Laporan	727.483.250,00	703.173.250,00	652.573.250,00	-74.910.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				500 Laporan	500 Laporan	727.483.250,00	703.173.250,00	652.573.250,00	-74.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah paket penyediaan peralatan uji material*				2 Paket	2 Paket	2.626.100.575,00	2.626.100.575,00	2.511.887.268,00	-114.213.307,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	830.000.575,00	830.000.575,00	678.772.575,00	-151.228.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan peralatan uji material*				2 Laporan	2 Laporan	4.869.632.500,00	4.821.012.500,00	4.437.003.100,00	-432.629.400,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan		4.158.468.050,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	578.010.000,00	561.180.000,00	476.416.000,00	-101.594.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		UPTD TPA TALUMELITO							**101.399.045.902,00**	**127.911.756.616,00**	**101.373.360.183,00**	**-25.685.719,00**							**76.706.695.934,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**97.765.104.802,00**	**124.318.955.516,00**	**98.081.701.734,00**	**316.596.932,00**							**76.706.695.934,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**91.450.867.202,00**	**118.053.337.916,00**	**92.887.171.074,00**	**1.436.303.872,00**							**76.706.695.934,00**	
1.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Jumlah Sarana dan Prasarana TPA Regional dalam Kondisi Baik**				**5 Unit**	**5 Unit**	**3.543.814.517,00**	**3.512.024.517,00**	**3.994.871.517,00**	**-3.543.814.517,00**							**0,00**	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	*Jumlah Sarana dan Prasarana TPA Regional dalam Kondisi Baik*				5 Unit	5 Unit	3.543.814.517,00	3.512.024.517,00	3.994.871.517,00	451.057.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	UPTD TPA Talumelito		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				150 Orang	150 Orang	338.124.800,00	338.124.800,00	154.441.800,00	-183.683.000,00	Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Talumelito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.486.330.850,00	1.454.540.850,00	1.426.220.850,00	-60.110.000,00	Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Talumelito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.1.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA																		
			Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan				1 Unit	1 Unit	1.719.358.867,00	1.719.358.867,00	2.414.208.867,00	694.850.000,00	Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Talumelito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**12.278.777.615,00**	**11.818.977.615,00**	**10.631.220.615,00**	**-1.647.557.000,00**							**13.190.070.157,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.278.777.615,00**	**11.818.977.615,00**	**10.631.220.615,00**	**-1.647.557.000,00**							**13.190.070.157,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**12.278.777.615,00**	**11.818.977.615,00**	**10.631.220.615,00**	**-1.647.557.000,00**							**13.190.070.157,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100 %**	**100 %**	**7.709.597.532,00**	**7.504.097.532,00**	**6.777.958.532,00**	**-508.773.125,00**							**7.200.824.407,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi*				8 Dokumen	8 Dokumen	72.227.100,00	72.227.100,00	39.208.600,00	-33.018.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Satpol PP Provinsi Gorontalo		117.850.867,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	37.653.450,00	37.653.450,00	20.207.950,00	-17.445.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			71.849.365,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	34.573.650,00	34.573.650,00	19.000.650,00	-15.573.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			46.001.502,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	5.248.840.150,00	5.088.840.150,00	5.049.663.150,00	-199.177.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Satpol PP Provinsi Gorontalo		4.793.183.340,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/ Bulan	39 Orang/ Bulan	5.149.747.200,00	4.989.747.200,00	4.989.747.200,00	-160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			4.598.497.923,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	99.092.950,00	99.092.950,00	59.915.950,00	-39.177.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			194.685.417,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				20 Orang	20 Orang	438.178.850,00	438.178.850,00	310.735.350,00	-127.443.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Satpol PP Provinsi Gorontalo		238.041.364,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	438.178.850,00	438.178.850,00	310.735.350,00	-127.443.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			238.041.364,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				20 Paket	20 Paket	1.066.580.400,00	1.066.580.400,00	540.080.400,00	-526.500.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Satpol PP Provinsi Gorontalo		1.135.819.317,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	1.066.580.400,00	1.066.580.400,00	540.080.400,00	-526.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			1.135.819.317,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	883.771.032,00	838.271.032,00	838.271.032,00	-45.500.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Satpol PP Provinsi Gorontalo		915.929.519,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	883.771.032,00	838.271.032,00	838.271.032,00	-45.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			915.929.519,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat di selesaikan**				**100 %**	**100 %**	**4.114.026.235,00**	**3.888.226.235,00**	**3.459.604.235,00**	**1.170.508.829,00**							**5.284.535.064,00**	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum Lintas Kab/Kota yang Ditangani*				100 Pelanggaran/Pengadua	100 Pelanggaran/Pengadua	3.319.919.322,00	3.100.319.322,00	2.895.758.322,00	-424.161.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat yang Melanggar Perda/Perkada		4.897.573.353,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	2 Dokumen	105.720.661,00	105.720.661,00	82.071.161,00	-23.649.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			492.229.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	10.834.371,00	10.834.371,00	10.834.371,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			14.420.548,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	1 Laporan	24.061.937,00	24.061.937,00	24.061.937,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			32.026.438,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Laporan	1 Laporan	137.070.425,00	132.970.425,00	114.184.925,00	-22.885.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			265.493.279,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				100 laporan	100 laporan	2.334.052.804,00	2.165.552.804,00	2.024.140.804,00	-309.912.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			3.133.513.874,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja				50 Orang	50 Orang	165.293.191,00	159.093.191,00	159.093.191,00	-6.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			237.308.237,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				10 Laporan	10 Laporan	542.885.933,00	502.085.933,00	481.371.933,00	-61.514.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			722.581.177,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	*Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan*				17 Perda/Perkada	17 Perda/Perkada	729.164.364,00	722.964.364,00	517.585.364,00	-211.579.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat yang Melanggar Perda/Perkada dan Badan Usaha		332.733.378,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				17 Laporan	17 Laporan	491.715.439,00	491.715.439,00	309.843.439,00	-181.872.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			80.691.655,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				6 Laporan	6 Laporan	205.016.309,00	198.816.309,00	175.309.309,00	-29.707.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			207.591.157,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda				4 Dokumen	4 Dokumen	32.432.616,00	32.432.616,00	32.432.616,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			44.450.566,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	*Jumlah PPNS yang mendapatkan Pembinaan*				50 Orang	50 Orang	64.942.549,00	64.942.549,00	46.260.549,00	-18.682.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat yang Melanggar Perda/Perkada dan Badan Usaha		54.228.333,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				1 Laporan	1 Laporan	64.942.549,00	64.942.549,00	46.260.549,00	-18.682.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			54.228.333,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran**				**100 %**	**100 %**	**455.153.848,00**	**426.653.848,00**	**393.657.848,00**	**249.556.838,00**							**704.710.686,00**	
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	*Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal*				1 Dokumen	1 Dokumen	383.926.600,00	355.426.600,00	355.426.600,00	-28.500.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat		635.208.730,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	353.184.000,00	324.684.000,00	324.684.000,00	-28.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			475.208.730,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)				50 Orang	50 Orang	30.742.600,00	30.742.600,00	30.742.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			160.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran*				30 Laporan	30 Laporan	71.227.248,00	71.227.248,00	38.231.248,00	-32.996.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat		69.501.956,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				30 Laporan	30 Laporan	71.227.248,00	71.227.248,00	38.231.248,00	-32.996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			69.501.956,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**11.386.754.427,00**	**11.141.014.397,00**	**10.147.696.689,00**	**-1.239.057.738,00**							**12.616.770.426,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.386.754.427,00**	**11.141.014.397,00**	**10.147.696.689,00**	**-1.239.057.738,00**							**12.616.770.426,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**11.386.754.427,00**	**11.141.014.397,00**	**10.147.696.689,00**	**-1.239.057.738,00**							**12.616.770.426,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana SDM Aparatur serta Perencanaan, Monev dan Pelaporan**				**100 %**	**100 %**	**10.036.754.427,00**	**9.791.014.397,00**	**9.205.783.189,00**	**530.015.999,00**							**10.566.770.426,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	589.284.000,00	589.284.000,00	224.882.792,00	-364.401.208,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	589.284.000,00	589.284.000,00	224.882.792,00	-364.401.208,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase jumlah laporan keuangan serta ketersediaan gaji dan tunjangan ASN*				100 %	100 %	6.705.767.427,00	6.513.267.397,00	6.513.267.397,00	-192.500.030,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		6.710.767.426,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/ Bulan	56 Orang/ Bulan	6.655.767.427,00	6.463.267.397,00	6.463.267.397,00	-192.500.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			6.655.767.426,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi*				10 Orang	10 Orang	196.602.000,00	196.602.000,00	126.598.000,00	-70.004.000,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	196.602.000,00	196.602.000,00	126.598.000,00	-70.004.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Pengadaan Kantor yang dilaksanakan*				1 Paket	1 Paket	1.707.374.000,00	1.707.374.000,00	1.618.594.000,00	-88.780.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		2.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.707.374.000,00	1.707.374.000,00	1.618.594.000,00	-88.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			2.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				100 %	100 %	837.727.000,00	784.487.000,00	722.441.000,00	-115.286.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		756.003.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	837.727.000,00	784.487.000,00	722.441.000,00	-115.286.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			756.003.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase masyarakat yang berperan dalam pengurangan resiko bencana**				**100 %**	**100 %**	**1.350.000.000,00**	**1.350.000.000,00**	**941.913.500,00**	**700.000.000,00**							**2.050.000.000,00**	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	*Persentasi Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi*				100 %	100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	133.700.100,00	-66.299.900,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	133.700.100,00	-66.299.900,00	Kab. Boalemo, Tilamuta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentasi Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebencanaan*				100 %	100 %	400.000.000,00	400.000.000,00	226.185.400,00	-173.814.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	86.161.400,00	-63.838.600,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				120 Orang	120 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	140.024.000,00	-109.976.000,00	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				100 %	100 %	500.000.000,00	500.000.000,00	419.082.000,00	-80.918.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	192.336.000,00	-7.664.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	141.178.000,00	-8.822.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	85.568.000,00	-64.432.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Daerah*				100 %	100 %	250.000.000,00	250.000.000,00	162.946.000,00	-87.054.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	168.932.000,00	168.932.000,00	103.592.000,00	-65.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana																		
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	81.068.000,00	81.068.000,00	59.354.000,00	-21.714.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**23.042.816.517,00**	**22.620.455.120,00**	**22.877.897.120,00**	**-164.919.397,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**23.042.816.517,00**	**22.620.455.120,00**	**22.877.897.120,00**	**-164.919.397,00**							**0,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**23.042.816.517,00**	**22.620.455.120,00**	**22.877.897.120,00**	**-164.919.397,00**							**0,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase (%) layanan administrasi, sarana prasarana, SDM apara tur serta perencanaan dan pelaporan**				**100 %**	**100 %**	**12.209.023.638,00**	**11.910.442.241,00**	**11.492.106.241,00**	**-12.209.023.638,00**							**0,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan*				8 dok	8 dok	779.280.249,00	763.440.249,00	532.052.249,00	-247.228.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pejabat di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	581.831.249,00	568.149.249,00	424.508.749,00	-157.322.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.482.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	-2.032.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	44.896.000,00	44.896.000,00	22.876.000,00	-22.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	141.071.000,00	140.945.000,00	75.217.500,00	-65.853.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase (%) kesesuaian laporan keuangan*				100 %	100 %	9.156.371.589,00	8.881.330.192,00	8.869.894.192,00	-286.477.397,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/ Bulan	73 Orang/ Bulan	9.021.821.589,00	8.751.620.192,00	8.751.620.192,00	-270.201.397,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	110.550.000,00	105.710.000,00	105.710.000,00	-4.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	12.564.000,00	-11.436.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase (%) pengembangan pegawai yang sesuai kompetensi*				100 %	100 %	147.006.000,00	138.106.000,00	65.053.000,00	-81.953.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pegawai di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				71 Paket	71 Paket	36.900.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	-26.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				71 Orang	71 Orang	110.106.000,00	110.106.000,00	55.053.000,00	-55.053.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase (%) sarana dan prasarana yang tersedia*				100 %	100 %	141.092.000,00	149.992.000,00	126.992.000,00	-14.100.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.913.000,00	14.913.000,00	14.913.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.430.000,00	25.330.000,00	10.330.000,00	-6.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.490.000,00	30.490.000,00	30.490.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.459.000,00	18.459.000,00	10.459.000,00	-8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah*				2 paket	2 paket	596.309.000,00	596.309.000,00	516.850.000,00	-79.459.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	596.309.000,00	596.309.000,00	516.850.000,00	-79.459.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang*				100 %	100 %	728.400.000,00	720.700.000,00	720.700.000,00	-7.700.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	488.400.000,00	480.700.000,00	480.700.000,00	-7.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	660.564.800,00	660.564.800,00	660.564.800,00	0,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Barang milik daerah		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	84.680.000,00	84.680.000,00	84.680.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	329.690.800,00	329.690.800,00	329.690.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	55 Unit	121.724.000,00	121.724.000,00	121.724.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	124.470.000,00	124.470.000,00	124.470.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase (%) PSKS perorangan yang diberdayakan /Persentase (%) kelembagaan sosial yang diberdayakan /Persentase (%) penyelenggaraan UGB/PUB yang tertib aturan**				**100 %**	**100 %**	**1.303.470.231,00**	**1.293.350.231,00**	**1.119.546.431,00**	**-1.303.470.231,00**							**0,00**	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah rekomendasi PUB dan UGB*				12 rekomendasi	12 rekomendasi	122.302.000,00	119.882.000,00	74.738.000,00	-47.564.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Dunia Usaha dan Masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				2 Dokumen	2 Dokumen	122.302.000,00	119.882.000,00	74.738.000,00	-47.564.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	*Jumlah kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya dalam penyelengga- raan kesejahtera- an sosial Jumlah PSKS perorangan yang meningkat kapasitasnya dalam penyelengga- raan kesejahtera- an sosial*				137 org 53 lembaga	137 org 53 lembaga	1.181.168.231,00	1.173.468.231,00	1.044.808.431,00	-136.359.800,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Organisasi/Lembaga yang bergerak di bidang kesejateraan sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				77 Orang	77 Orang	796.023.800,00	788.323.800,00	727.929.600,00	-68.094.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				25 Lembaga	25 Lembaga	385.144.431,00	385.144.431,00	316.878.831,00	-68.265.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani**				**16 org**	**16 org**	**155.831.850,00**	**150.551.850,00**	**110.551.850,00**	**-155.831.850,00**							**0,00**	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	*Jumlah pekerja migran Korban Tindak Kekerasan yang dilayani*				16 org	16 org	155.831.850,00	150.551.850,00	110.551.850,00	-45.280.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pekerja Migran antar negara dan atau lokal serta orang terlantar/kehilangan harta benda dalam perjalanan		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	155.831.850,00	150.551.850,00	110.551.850,00	-45.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase anak terlant ar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas , gelandang dan penge mis yang meningkat keberfungsi an sosialnya melalui reha bilitasi sosial dasar di dalam panti**				**100 %**	**100 %**	**3.407.788.942,00**	**3.363.528.942,00**	**3.017.042.942,00**	**-3.407.788.942,00**							**0,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	*Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpe nuhi kebutuh an dasarnya didlam panti*				12 org	12 org	604.680.800,00	599.180.800,00	499.180.800,00	-105.500.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Penyandang Disabilitas Terlantar yang membutuhkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				10 Orang	10 Orang	194.340.000,00	194.340.000,00	194.340.000,00	0,00	Kab. Bone Bolango, Suwawa, Boludawa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				10 Orang	10 Orang	38.764.000,00	38.764.000,00	38.764.000,00	0,00	Kab. Bone Bolango, Suwawa, Boludawa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				10 Orang	10 Orang	49.339.500,00	49.339.500,00	49.339.500,00	0,00	Kab. Bone Bolango, Suwawa, Boludawa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				10 Orang	10 Orang	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Bone Bolango, Suwawa, Boludawa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				10 Orang	10 Orang	223.490.000,00	217.990.000,00	172.990.000,00	-50.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				10 Orang	10 Orang	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar				2 Dokumen	2 Dokumen	92.747.300,00	92.747.300,00	37.747.300,00	-55.000.000,00	Kab. Bone Bolango, Suwawa, Boludawa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	*umlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*				30 anak	30 anak	1.109.128.400,00	1.101.428.400,00	1.027.752.400,00	-81.376.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Anak Terlantar yang membutuhkan pelayanan sosial di dalam panti		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				45 Orang	45 Orang	573.350.000,00	573.350.000,00	573.350.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				45 Orang	45 Orang	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				45 Orang	45 Orang	57.742.000,00	57.742.000,00	44.066.000,00	-13.676.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				45 Orang	45 Orang	42.975.000,00	42.975.000,00	42.975.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				45 Orang	45 Orang	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				2 Dokumen	2 Dokumen	349.561.400,00	341.861.400,00	281.861.400,00	-67.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	*Jumlah Lanjut usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didlam panti*				27 org	27 org	1.340.457.742,00	1.317.317.742,00	1.172.113.742,00	-168.344.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Lanjut Usia Terlantar yang membutuhkan pelayanan sosial di dalam panti		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				23 Orang	23 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				23 Orang	23 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				23 Orang	23 Orang	169.911.000,00	169.911.000,00	169.911.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				23 Orang	23 Orang	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				23 Orang	23 Orang	255.048.000,00	255.048.000,00	192.609.000,00	-62.439.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				23 Orang	23 Orang	323.777.500,00	300.637.500,00	300.637.500,00	-23.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				23 Orang	23 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				5 Orang	5 Orang	50.530.000,00	50.530.000,00	25.265.000,00	-25.265.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan																		
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				8 Orang	8 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	111.191.242,00	111.191.242,00	53.691.242,00	-57.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	*umlah dokumen rehabilitasi sosial PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza*				1 dok	1 dok	353.522.000,00	345.602.000,00	317.996.000,00	-35.526.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza yang membutuhkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				1 Dokumen	1 Dokumen	353.522.000,00	345.602.000,00	317.996.000,00	-35.526.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase (%) ketepatan sasaran penerima program Jumlah fakir miskin yang mampu mengembang kan bantuan stimulan**				**100 20 % org**	**100 20 % org**	**4.089.495.356,00**	**4.061.555.356,00**	**5.549.640.656,00**	**-4.089.495.356,00**							**0,00**	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	*Jumlah rekomendasi pengangkatan anak antar WNI*				20 rekomendasi	20 rekomendasi	126.155.900,00	126.155.900,00	91.658.900,00	-34.497.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	calon anak angkat dan calon orang tua angkat		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				10 Orang	10 Orang	126.155.900,00	126.155.900,00	91.658.900,00	-34.497.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	*Jumlah keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam menerima pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkat produktitifita s sosial ekonominya*				10520 KPM	10520 KPM	3.963.339.456,00	3.935.399.456,00	5.457.981.756,00	1.494.642.300,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Keluarga miskin dan rentan		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				15000 Keluarga	15000 Keluarga	3.123.198.721,00	3.107.578.721,00	2.991.654.021,00	-131.544.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				145 Keluarga	145 Keluarga	705.810.735,00	693.490.735,00	2.381.132.735,00	1.675.322.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				6 Orang	6 Orang	134.330.000,00	134.330.000,00	85.195.000,00	-49.135.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Jumlah korban ben- cana alam dan sosial yang terta- ngani dan terlayani**				**1000 org**	**1000 org**	**1.313.440.000,00**	**1.292.320.000,00**	**1.150.302.500,00**	**-1.313.440.000,00**							**0,00**	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	*Jumlah warga negara kor ban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya masa tanggap darurat*				1000 org	1000 org	1.313.440.000,00	1.292.320.000,00	1.150.302.500,00	-163.137.500,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat yang korban bencana alam maupun bencana sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				1300 Orang	1300 Orang	839.570.000,00	818.450.000,00	676.432.500,00	-163.137.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				500 Orang	500 Orang	245.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				1 Unit	1 Unit	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	73.580.000,00	73.580.000,00	73.580.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				200 Orang	200 Orang	15.290.000,00	15.290.000,00	15.290.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang mening kat peran dan fungsi nya dalam penanaman dan pelesta rian nilai-nilai kepahlawan- an, keperin tisan, keju angan dan kesetiakawan an sosial**				**100 %**	**100 %**	**563.766.500,00**	**548.706.500,00**	**438.706.500,00**	**-563.766.500,00**							**0,00**	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	*Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola*				2 TMP/MPN	2 TMP/MPN	563.766.500,00	548.706.500,00	438.706.500,00	-125.060.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				2 Makam	2 Makam	563.766.500,00	548.706.500,00	438.706.500,00	-125.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI							**20.428.745.743,00**	**19.882.759.205,00**	**19.321.076.805,00**	**-1.107.668.938,00**							**28.369.630.024,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.351.426.543,00**	**18.805.440.005,00**	**18.617.671.105,00**	**-733.755.438,00**							**24.709.630.024,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**19.351.426.543,00**	**18.805.440.005,00**	**18.617.671.105,00**	**-733.755.438,00**							**24.709.630.024,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**17.831.250.267,00**	**17.285.263.729,00**	**17.075.024.829,00**	**1.690.512.237,00**							**19.521.762.504,00**	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	433.635.000,00	433.635.000,00	246.522.100,00	-187.112.900,00			-	- -	SKPD Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo		950.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	243.878.000,00	243.878.000,00	153.802.500,00	-90.075.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	189.757.000,00	189.757.000,00	92.719.600,00	-97.037.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya*				106 Orang	106 Orang	14.008.247.067,00	13.552.385.529,00	13.549.385.529,00	-458.861.538,00			-	- -	SKPD Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo		15.441.762.504,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				106 Orang/ Bulan	106 Orang/ Bulan	13.948.199.067,00	13.492.337.529,00	13.492.337.529,00	-455.861.538,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.291.762.504,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60.048.000,00	60.048.000,00	57.048.000,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan*				13 Orang	13 Orang	67.252.000,00	67.252.000,00	47.126.000,00	-20.126.000,00			-	- -	SKPD Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	13 Orang	67.252.000,00	67.252.000,00	47.126.000,00	-20.126.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah sarana prasarana yang disediakan*				20 Paket	20 Paket	1.370.956.300,00	1.370.956.300,00	1.370.956.300,00	0,00			-	- -	SKPD Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo		1.900.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	1.370.956.300,00	1.370.956.300,00	1.370.956.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.900.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	1.951.159.900,00	1.861.034.900,00	1.861.034.900,00	-90.125.000,00			-	- -	SKPD Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo		1.030.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.753.348.100,00	1.663.223.100,00	1.663.223.100,00	-90.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			780.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang dilatih**				**25 %**	**25 %**	**437.000.000,00**	**437.000.000,00**	**268.254.000,00**	**1.793.000.000,00**							**2.230.000.000,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi*				30 Orang	30 Orang	437.000.000,00	437.000.000,00	268.254.000,00	-168.746.000,00			-	- -	Pencari Kerja		1.920.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				30 Orang	30 Orang	259.250.000,00	259.250.000,00	138.044.000,00	-121.206.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.645.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas tenaga kerja*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Pencari Kerja		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar**				**25 %**	**25 %**	**185.600.000,00**	**185.600.000,00**	**118.603.500,00**	**1.034.400.000,00**							**1.220.000.000,00**	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja*				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Perusahaan dan Pencari Kerja		320.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			320.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)*				6000 Orang	6000 Orang	185.600.000,00	185.600.000,00	118.603.500,00	-66.996.500,00			-	- -	Perusahaan dan Pencari Kerja		900.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)				6000 Orang	6000 Orang	185.600.000,00	185.600.000,00	118.603.500,00	-66.996.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Jumlah Perusahaan yang dibina dalam pencegahan perselihan hubungan industrial**				**25 %**	**25 %**	**797.576.276,00**	**797.576.276,00**	**1.101.754.276,00**	**640.291.244,00**							**1.437.867.520,00**	
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Kasus hubungan industrial yang diselesaikan*				50 Kasus	50 Kasus	100.000.000,00	100.000.000,00	59.490.000,00	-40.510.000,00			-	- -	Perusahaan dan Tenaga Kerja		280.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				50 Perkara	50 Perkara	100.000.000,00	100.000.000,00	59.490.000,00	-40.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			280.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	*Jumlah dokumen UMP yang ditetapkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	697.576.276,00	697.576.276,00	1.042.264.276,00	344.688.000,00			-	- -	Perusahaan dan Tenaga Kerja		1.157.867.520,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)																		
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	280.000.000,00	280.000.000,00	224.688.000,00	-55.312.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				2248 Orang	2248 Orang	417.576.276,00	417.576.276,00	817.576.276,00	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			557.867.520,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
5.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**Persentase Jumlah Perusahaan yang dibina dan diperiksa**				**17 %**	**17 %**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**54.034.500,00**	**200.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	*Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan*				396 Perusahaan	396 Perusahaan	100.000.000,00	100.000.000,00	54.034.500,00	-45.965.500,00			-	- -	Perusahaan dan Tenaga Kerja		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				396 Perusahaan	396 Perusahaan	100.000.000,00	100.000.000,00	54.034.500,00	-45.965.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.077.319.200,00**	**1.077.319.200,00**	**703.405.700,00**	**-373.913.500,00**							**3.660.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**807.319.200,00**	**807.319.200,00**	**516.063.700,00**	**-291.255.500,00**							**2.910.000.000,00**	
1.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah**				**57 %**	**57 %**	**220.000.000,00**	**220.000.000,00**	**144.946.000,00**	**440.000.000,00**							**660.000.000,00**	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah data konservasi dan cekungan air tanah*				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat		380.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			380.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah laporan pengendalian dan pemanfaatan air tanah*				1 Laporan	1 Laporan	220.000.000,00	220.000.000,00	144.946.000,00	-75.054.000,00			-	- -	Masyarakat		280.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	220.000.000,00	220.000.000,00	144.946.000,00	-75.054.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			280.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
2.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Persentase pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan**				**100 %**	**100 %**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**61.460.500,00**	**470.000.000,00**							**590.000.000,00**	
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	*Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan wilayah izin usaha pertambangan*				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	61.460.500,00	-58.539.500,00			-	- -	Usaha Pertambangan		310.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	61.460.500,00	-58.539.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			310.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	*Jumlah dokumen rekomendasi teknis pertambangan yang terbitkan dan diawasi*				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Usaha Pertambangan		280.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			280.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
3.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Persentase pemanfaatan potensi energi terbarukan**				**2,94 %**	**2,94 %**	**132.873.000,00**	**132.873.000,00**	**64.308.000,00**	**267.127.000,00**							**400.000.000,00**	
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	*Jumlah dokumen pengelolaan Energi Baru Terbarukan*				1 Dokumen	1 Dokumen	77.599.000,00	77.599.000,00	35.641.000,00	-41.958.000,00			-	- -	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah																		
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				1 Laporan	1 Laporan	77.599.000,00	77.599.000,00	35.641.000,00	-41.958.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT																		
			Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Konservasi Energi*				1 Dokumen	1 Dokumen	55.274.000,00	55.274.000,00	28.667.000,00	-26.607.000,00			-	- -	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi																		
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi				1 Laporan	1 Laporan	55.274.000,00	55.274.000,00	28.667.000,00	-26.607.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
4.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Persentase Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang listrik**				**43,87 %**	**43,87 %**	**334.446.200,00**	**334.446.200,00**	**245.349.200,00**	**925.553.800,00**							**1.260.000.000,00**	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	*Jumlah rekomendasi Izin Operasi yang diterbitkan*				2 Dokumen	2 Dokumen	50.065.800,00	50.065.800,00	26.974.800,00	-23.091.000,00			-	- -	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan				2 Dokumen	2 Dokumen	50.065.800,00	50.065.800,00	26.974.800,00	-23.091.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	*Jumlah Kepala keluarga Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu*				60 KK	60 KK	284.380.400,00	284.380.400,00	218.374.400,00	-66.006.000,00			-	- -	Masyarakat		1.110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu																		
			Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				60 Keluarga	60 Keluarga	284.380.400,00	284.380.400,00	218.374.400,00	-66.006.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**270.000.000,00**	**270.000.000,00**	**187.342.000,00**	**-82.658.000,00**							**750.000.000,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase pembangunan Satuan Permukiman Transmigrasi**				**100 %**	**100 %**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**69.500.000,00**	**400.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi yang di bangun*				4 SP	4 SP	100.000.000,00	100.000.000,00	69.500.000,00	-30.500.000,00			-	- -	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	69.500.000,00	-30.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0017	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)																		
			Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
2.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi pada tahap pemantapan**				**94 %**	**94 %**	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	**117.842.000,00**	**80.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	*Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan*				4 SP	4 SP	170.000.000,00	170.000.000,00	117.842.000,00	-52.158.000,00			-	- -	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				4 Satuan Permukiman	4 Satuan Permukiman	170.000.000,00	170.000.000,00	117.842.000,00	-52.158.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
		UPTD BALAI LATIHAN KERJA, TRANSMIGRASI DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS							**20.428.745.743,00**	**19.882.759.205,00**	**19.321.076.805,00**	**-1.107.668.938,00**							**28.369.630.024,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.351.426.543,00**	**18.805.440.005,00**	**18.617.671.105,00**	**-733.755.438,00**							**24.709.630.024,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**19.351.426.543,00**	**18.805.440.005,00**	**18.617.671.105,00**	**-733.755.438,00**							**24.709.630.024,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**17.831.250.267,00**	**17.285.263.729,00**	**17.075.024.829,00**	**1.690.512.237,00**							**19.521.762.504,00**	
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	1.951.159.900,00	1.861.034.900,00	1.861.034.900,00	-90.125.000,00			-	- -	UPTD Balai Latihan Kerja		1.030.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	197.811.800,00	197.811.800,00	197.811.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang dilatih**				**25 %**	**25 %**	**437.000.000,00**	**437.000.000,00**	**268.254.000,00**	**1.793.000.000,00**							**2.230.000.000,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi*				30 Orang	30 Orang	437.000.000,00	437.000.000,00	268.254.000,00	-168.746.000,00			-	- -	Pencari Kerja		1.920.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				30 Orang	30 Orang	177.750.000,00	177.750.000,00	130.210.000,00	-47.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	*Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas*				0 Perusahaan	0 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Pencari Kerja		210.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah																		
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas				0 Perusahaan	0 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			210.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**9.229.217.841,00**	**9.593.447.841,00**	**8.509.718.541,00**	**-719.499.300,00**							**9.897.179.890,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.229.217.841,00**	**9.593.447.841,00**	**8.509.718.541,00**	**-719.499.300,00**							**9.897.179.890,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**9.229.217.841,00**	**9.593.447.841,00**	**8.509.718.541,00**	**-719.499.300,00**							**9.897.179.890,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**5.982.161.470,00**	**5.856.321.470,00**	**5.407.423.650,00**	**365.018.420,00**							**6.347.179.890,00**	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	373.769.000,00	373.769.000,00	178.021.000,00	-195.748.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Seluruh OPD		435.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 laporan Dokumen	1 laporan Dokumen	343.769.000,00	343.769.000,00	151.779.000,00	-191.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 laporan Laporan	1 laporan Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	26.242.000,00	-3.758.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan* *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				29 Orang 32 Dokumen	29 Orang 32 Dokumen	3.617.180.070,00	3.507.180.070,00	3.507.180.070,00	-110.000.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI		3.667.179.890,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/ Bulan	29 Orang/ Bulan	3.617.180.070,00	3.507.180.070,00	3.507.180.070,00	-110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			3.667.179.890,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase pelaksanaan administrasi kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi*				100 Perssen	100 Perssen	190.563.000,00	190.563.000,00	87.606.780,00	-102.956.220,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Seluruh OPD		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	190.563.000,00	190.563.000,00	87.606.780,00	-102.956.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	279.950.900,00	279.950.900,00	253.255.900,00	-26.695.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Seluruh OPD		375.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	108.257.000,00	108.257.000,00	108.257.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	11.300.000,00	-3.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	156.693.900,00	156.693.900,00	133.698.900,00	-22.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan*				1 Unit	1 Unit	596.309.000,00	596.309.000,00	516.850.000,00	-79.459.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Seluruh OPD		600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	596.309.000,00	596.309.000,00	516.850.000,00	-79.459.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan*				1 LLaporan	1 LLaporan	665.610.000,00	649.770.000,00	620.730.000,00	-44.880.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Seluruh OPD		770.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	519.930.000,00	504.090.000,00	475.050.000,00	-44.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	258.779.500,00	258.779.500,00	243.779.900,00	-14.999.600,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Seluruh OPD		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	168.803.500,00	168.803.500,00	153.803.900,00	-14.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	89.976.000,00	89.976.000,00	89.976.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**1.892.225.791,00**	**1.884.525.791,00**	**1.794.433.978,00**	**7.774.209,00**							**1.900.000.000,00**	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	*Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)*				40 SKPD	40 SKPD	248.320.950,00	240.620.950,00	222.930.950,00	-25.390.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Perangkat Daerah		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				34 Dokumen	34 Dokumen	248.320.950,00	240.620.950,00	222.930.950,00	-25.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	*Jumlah Organisasi Mayrakat yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi*				3 Organisasi Wanita	3 Organisasi Wanita	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Organisasi Wanita		1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				3 Lembaga	3 Lembaga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat Advokasi dan Pendampingan*				30 LPLP	30 LPLP	143.904.841,00	143.904.841,00	71.503.028,00	-72.401.813,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Perempuan		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi				10 Lembaga	10 Lembaga	143.904.841,00	143.904.841,00	71.503.028,00	-72.401.813,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**453.383.000,00**	**959.073.000,00**	**691.715.000,00**	**-3.383.000,00**							**450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi*				40 SKPD	40 SKPD	190.328.000,00	408.728.000,00	404.425.000,00	214.097.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Perangkat Daerah		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				240 orang Perangkat Daerah	240 orang Perangkat Daerah	190.328.000,00	408.728.000,00	404.425.000,00	214.097.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Tindak ;anjut Pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi*				10 Layanan	10 Layanan	263.055.000,00	550.345.000,00	287.290.000,00	24.235.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Korban Kekerasan terhadap Perempuan		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				10 Kasus Layanan	10 Kasus Layanan	263.055.000,00	550.345.000,00	287.290.000,00	24.235.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**				**-**	**-**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**48.618.000,00**	**90.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang mendapat Advokasi dan Pendampingan*				50 Lembaga	50 Lembaga	110.000.000,00	110.000.000,00	48.618.000,00	-61.382.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Lembaga Layanan Keluarga		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				10 Lembaga	10 Lembaga	110.000.000,00	110.000.000,00	48.618.000,00	-61.382.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Perempuan dan Anak		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**				**-**	**-**	**217.560.000,00**	**217.560.000,00**	**166.299.313,00**	**82.440.000,00**							**300.000.000,00**	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	*Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah , media dan Dunia usaha*				6 Kabupaten/Kota	6 Kabupaten/Kota	217.560.000,00	217.560.000,00	166.299.313,00	-51.260.687,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Anak		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi																		
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi				6 KABUPATEN/KOTA perangkat daerah	6 KABUPATEN/KOTA perangkat daerah	217.560.000,00	217.560.000,00	166.299.313,00	-51.260.687,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**523.887.580,00**	**515.967.580,00**	**401.228.600,00**	**76.112.420,00**							**600.000.000,00**	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi*				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	366.016.600,00	358.096.600,00	358.096.600,00	-7.920.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Anak		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Keweangan Provinsi				0 Orang	0 Orang	366.016.600,00	358.096.600,00	358.096.600,00	-7.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi*				6 Kabupaten/Kota	6 Kabupaten/Kota	157.870.980,00	157.870.980,00	43.132.000,00	-114.738.980,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Forum Anak Daerah (FAD)		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi				6 KABUPATEN/KOTA Dokumen	6 KABUPATEN/KOTA Dokumen	157.870.980,00	157.870.980,00	43.132.000,00	-114.738.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**14.383.096.632,00**	**14.093.666.632,00**	**12.175.171.632,00**	**-2.207.925.000,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.383.096.632,00**	**14.093.666.632,00**	**12.175.171.632,00**	**-2.207.925.000,00**							**0,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**10.051.465.232,00**	**9.805.405.232,00**	**9.172.636.232,00**	**-878.829.000,00**							**0,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan**				**100 %**	**100 %**	**9.381.465.232,00**	**9.140.685.232,00**	**8.744.182.232,00**	**-9.381.465.232,00**							**0,00**	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*persentase ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan yang tepat waktu*				100 %	100 %	356.485.750,00	353.955.750,00	202.452.750,00	-154.033.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	ASN		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	356.485.750,00	353.955.750,00	202.452.750,00	-154.033.000,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase ketersediaan dokumen keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	6.737.699.432,00	6.535.199.432,00	6.490.199.432,00	-247.500.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	ASN		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/ Bulan	53 Orang/ Bulan	6.626.198.982,00	6.423.698.982,00	6.423.698.982,00	-202.500.000,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	111.500.450,00	111.500.450,00	66.500.450,00	-45.000.000,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD*				100 %	100 %	75.496.000,00	75.496.000,00	35.496.000,00	-40.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	ASN		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	75.496.000,00	75.496.000,00	35.496.000,00	-40.000.000,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase tersedianya sarana prasarana*				100 %	100 %	1.148.368.600,00	1.148.368.600,00	998.368.600,00	-150.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	ASN		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.148.368.600,00	1.148.368.600,00	998.368.600,00	-150.000.000,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase tersedianya Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.063.415.450,00	1.027.665.450,00	1.017.665.450,00	-45.750.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.063.415.450,00	1.027.665.450,00	1.017.665.450,00	-45.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan**				**100 %**	**100 %**	**160.000.000,00**	**160.000.000,00**	**92.020.000,00**	**-160.000.000,00**							**0,00**	
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	*Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk*				100 %	100 %	160.000.000,00	160.000.000,00	92.020.000,00	-67.980.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	160.000.000,00	92.020.000,00	-67.980.000,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**persentase terwujudnya pelayanan pencatatan sipil**				**100 %**	**100 %**	**170.000.000,00**	**167.360.000,00**	**111.332.000,00**	**-170.000.000,00**							**0,00**	
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*persentase terlaksananya konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil*				100 %	100 %	170.000.000,00	167.360.000,00	111.332.000,00	-58.668.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00	167.360.000,00	111.332.000,00	-58.668.000,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Jumlah Sarana dan Prasarana pengelola administrasi kependudukan**				**2 paket/unit**	**2 paket/unit**	**340.000.000,00**	**337.360.000,00**	**225.102.000,00**	**-340.000.000,00**							**0,00**	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelola Administrasi Kependudukan*				2 Paket/unit	2 Paket/unit	170.000.000,00	167.360.000,00	121.896.000,00	-48.104.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00	167.360.000,00	121.896.000,00	-48.104.000,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	*Persentae terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				100 Persen	100 Persen	170.000.000,00	170.000.000,00	103.206.000,00	-66.794.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				20 Orang	20 Orang	170.000.000,00	170.000.000,00	103.206.000,00	-66.794.000,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**4.331.631.400,00**	**4.288.261.400,00**	**3.002.535.400,00**	**-1.329.096.000,00**							**0,00**	
1.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya**				**0,58 %**	**0,58 %**	**1.654.031.400,00**	**1.641.421.400,00**	**1.220.349.400,00**	**-1.654.031.400,00**							**0,00**	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	*Persentase desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya*				0.58 %	0.58 %	1.654.031.400,00	1.641.421.400,00	1.220.349.400,00	-433.682.000,00			-	Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	480.000.300,00	477.580.300,00	331.670.300,00	-148.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	449.999.550,00	447.509.550,00	338.894.550,00	-111.105.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				30 Orang	30 Orang	95.680.000,00	93.040.000,00	87.420.000,00	-8.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	344.940.000,00	244.013.000,00	-105.987.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0022	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	278.351.550,00	278.351.550,00	218.351.550,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Terwujudnya lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang lebih produktif dan mandiri**				**100 %**	**100 %**	**2.677.600.000,00**	**2.646.840.000,00**	**1.782.186.000,00**	**-2.677.600.000,00**							**0,00**	
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*persentase lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang lebih profuktif dan man*				100 %	100 %	2.677.600.000,00	2.646.840.000,00	1.782.186.000,00	-895.414.000,00			-	Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				1 Lembaga	1 Lembaga	130.000.000,00	130.000.000,00	101.995.000,00	-28.005.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	127.360.000,00	100.021.000,00	-29.979.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	96.500.000,00	93.860.000,00	76.860.000,00	-19.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	2.221.100.000,00	2.195.620.000,00	1.403.310.000,00	-817.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**12.147.311.930,00**	**11.827.883.330,00**	**14.574.938.830,00**	**2.427.626.900,00**							**12.025.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.147.311.930,00**	**11.827.883.330,00**	**14.574.938.830,00**	**2.427.626.900,00**							**12.025.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**12.147.311.930,00**	**11.827.883.330,00**	**14.574.938.830,00**	**2.427.626.900,00**							**12.025.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP**				**70 poin**	**70 poin**	**9.811.448.700,00**	**9.569.760.100,00**	**9.390.438.100,00**	**-256.448.700,00**							**9.555.000.000,00**	
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Prerangkat Daerah*				3/2 Dok/Lap	3/2 Dok/Lap	418.469.320,00	442.559.320,00	290.849.320,00	-127.620.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	masyarakat Rentan Rawan Pangan		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	418.469.320,00	442.559.320,00	290.849.320,00	-127.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan Selama 1 (satu) Tahun*				2 Lap/Org/ Bln	2 Lap/Org/ Bln	8.068.234.330,00	7.812.275.730,00	7.812.275.730,00	-255.958.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	masyarakat Rentan Rawan Pangan		8.095.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/ Bulan	57 Orang/ Bulan	7.962.434.330,00	7.714.175.730,00	7.714.175.730,00	-248.258.600,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			8.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	105.800.000,00	98.100.000,00	98.100.000,00	-7.700.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			95.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Jasa Administrasi Kepegawaian Selama 1 (satu) Tahun*				1/1/70 Pkt/ Dok/Org	1/1/70 Pkt/ Dok/Org	55.224.000,00	55.224.000,00	27.612.000,00	-27.612.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	masyarakat Rentan Rawan Pangan		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	55.224.000,00	55.224.000,00	27.612.000,00	-27.612.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Perkantoran Selama 1 (satu) Tahun*				3/2 Paket/Lap	3/2 Paket/Lap	680.640.700,00	683.140.700,00	683.140.700,00	2.500.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	masyarakat Rentan Rawan Pangan		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	680.640.700,00	683.140.700,00	683.140.700,00	2.500.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Selama 1 (satu) Tahun*				3 Laporan	3 Laporan	588.880.350,00	576.560.350,00	576.560.350,00	-12.320.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	masyarakat Rentan Rawan Pangan		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	588.880.350,00	576.560.350,00	576.560.350,00	-12.320.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Cadangan Pangan Pemerintah daerah yang tersedia**				**50 Persen**	**50 Persen**	**1.194.841.780,00**	**1.137.641.780,00**	**1.109.501.780,00**	**5.158.220,00**							**1.200.000.000,00**	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan serta Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan ebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan*				1 dokumen/ laporan 1 Laporan 2 / 10 Dok/Unit 2 Dokumen undefined undefined	1 dokumen/ laporan 1 Laporan 2 / 10 Dok/Unit 2 Dokumen undefined undefined	151.840.000,00	146.670.000,00	146.670.000,00	-5.170.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	masyarakat		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis				1 Laporan	1 Laporan	151.840.000,00	146.670.000,00	146.670.000,00	-5.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi																		
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi*				50 Ton	50 Ton	454.015.350,00	448.845.350,00	448.845.350,00	-5.170.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	masyarakat Rentan Rawan Pangan		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				2 0	2 0	454.015.350,00	448.845.350,00	448.845.350,00	-5.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	*Skor PPH Konsumsi, Angka Kecukupan Protein (Gram/Kap/Hr), Angka Kecukupan Energi (KKal/Kap/Hr)*				1/1 Dok/Laporan	1/1 Dok/Laporan	588.986.430,00	542.126.430,00	513.986.430,00	-75.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	masyarakat Rentan Rawan Pangan		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	357.377.350,00	313.157.350,00	313.157.350,00	-44.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	231.609.080,00	228.969.080,00	200.829.080,00	-30.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**				**10 Persen**	**10 Persen**	**771.845.750,00**	**759.005.750,00**	**3.759.005.750,00**	**248.154.250,00**							**1.020.000.000,00**	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	*Peta Dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan , Serta Skor PPH Ketersediaan*				1 Dok	1 Dok	65.142.750,00	62.502.750,00	62.502.750,00	-2.640.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	masyarakat Rentan Rawan Pangan		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.142.750,00	62.502.750,00	62.502.750,00	-2.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	*Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan*				2 Dok	2 Dok	706.703.000,00	696.503.000,00	3.696.503.000,00	2.989.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	masyarakat Rentan Rawan Pangan		970.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	436.775.000,00	431.715.000,00	3.431.715.000,00	2.994.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	269.928.000,00	264.788.000,00	264.788.000,00	-5.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN							**12.147.311.930,00**	**11.827.883.330,00**	**14.574.938.830,00**	**2.427.626.900,00**							**12.025.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.147.311.930,00**	**11.827.883.330,00**	**14.574.938.830,00**	**2.427.626.900,00**							**12.025.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**12.147.311.930,00**	**11.827.883.330,00**	**14.574.938.830,00**	**2.427.626.900,00**							**12.025.000.000,00**	
1.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan**				**85 %**	**85 %**	**369.175.700,00**	**361.475.700,00**	**315.993.200,00**	**-119.175.700,00**							**250.000.000,00**	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Kabupaten / Kota*				50/9 Sertifikat/Dok	50/9 Sertifikat/Dok	369.175.700,00	361.475.700,00	315.993.200,00	-53.182.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	masyarakat Rentan Rawan Pangan		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan																		
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				20 Sertifikat	20 Sertifikat	253.347.450,00	248.287.450,00	202.804.950,00	-50.542.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	115.828.250,00	113.188.250,00	113.188.250,00	-2.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN							**33.201.707.945,00**	**39.743.702.271,00**	**37.867.892.737,00**	**4.666.184.792,00**							**60.193.266.498,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**28.753.793.027,00**	**29.279.194.355,00**	**28.086.887.606,00**	**-666.905.421,00**							**34.092.843.178,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**28.753.793.027,00**	**29.279.194.355,00**	**28.086.887.606,00**	**-666.905.421,00**							**34.092.843.178,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**29.380.162.739,00**	**28.584.994.067,00**	**27.591.873.728,00**	**5.587.053.759,00**							**34.967.216.498,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				5 dokumen atau laporan	5 dokumen atau laporan	1.108.443.741,00	1.098.433.741,00	576.573.226,00	-531.870.515,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		2.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	640.294.832,00	640.294.832,00	295.644.670,00	-344.650.162,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	458.138.909,00	280.928.556,00	280.928.556,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			1.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	**NON URUSAN**							**28.753.793.027,00**	**29.279.194.355,00**	**28.086.887.606,00**	**-666.905.421,00**							**34.092.843.178,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**28.753.793.027,00**	**29.279.194.355,00**	**28.086.887.606,00**	**-666.905.421,00**							**34.092.843.178,00**	
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**28.753.793.027,00**	**29.279.194.355,00**	**28.086.887.606,00**	**-666.905.421,00**							**34.092.843.178,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**28.753.793.027,00**	**29.279.194.355,00**	**28.086.887.606,00**	**-666.905.421,00**							**34.092.843.178,00**	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi*				100 %	100 %	24.850.271.763,00	24.123.193.091,00	24.091.505.411,00	-758.766.352,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		26.262.705.628,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				255 Orang/ Bulan	255 Orang/ Bulan	24.637.871.763,00	23.916.073.091,00	23.916.073.091,00	-721.798.672,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			26.050.305.628,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	212.400.000,00	207.120.000,00	175.432.320,00	-36.967.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			212.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia*				2 dokumen atau laporan	2 dokumen atau laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	21.000.000,00	-129.000.000,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	21.000.000,00	-129.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan*				12 paket	12 paket	853.530.170,00	853.530.170,00	544.378.026,00	-309.152.144,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		3.395.537.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	115.576.320,00	115.576.320,00	36.548.320,00	-79.028.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			421.637.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.383.353,00	11.383.353,00	11.383.353,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			72.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	135.159.000,00	135.159.000,00	114.626.776,00	-20.532.224,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia*				1 laporan	1 laporan	1.562.672.944,00	1.504.592.944,00	1.504.592.944,00	-58.080.000,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		1.822.023.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	178.040.000,00	178.040.000,00	178.040.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	599.400.000,00	579.600.000,00	579.600.000,00	-19.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				17 unit	17 unit	855.244.121,00	855.244.121,00	853.824.121,00	-1.420.000,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		786.949.820,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	492.362.000,00	492.362.000,00	492.362.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			360.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	9.510.000,00	9.510.000,00	9.510.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemarannya**				**2 lokasi**	**4 lokasi**	**389.200.000,00**	**481.720.000,00**	**371.209.100,00**	**-139.200.000,00**							**250.000.000,00**	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	*Status Mutu Air Danau* *Status Mutu Air Sungai* *Status Mutu Udara* *Status Trofik Danau Limboto*				Cemar Ringan Status Baik Status Mesotrofik	Cemar Ringan Status Baik Status Mesotrofik	389.200.000,00	481.720.000,00	371.209.100,00	-17.990.900,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	221.200.000,00	216.360.000,00	164.094.500,00	-57.105.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																		
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	1 Dokumen	168.000.000,00	265.360.000,00	207.114.600,00	39.114.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Limbah B3 yang terkelola sebesar 33.868 ton dalam 4 tahun**				**0 Ton**	**0 Ton**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**937.500.000,00**							**937.500.000,00**	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah unit usaha/fasyankes yang terkelola pengelolaan Limbah B3 nya melalui kegiatan pengumpulan sebesar 1.848 ton dalam 4 tahun*				0 fasyankes atau unit usaha	0 fasyankes atau unit usaha	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		937.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			937.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan**				**77 %**	**77 %**	**430.217.450,00**	**422.517.450,00**	**227.109.250,00**	**869.782.550,00**							**1.300.000.000,00**	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Jumlah Pemegang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilakukan pembinaan dan pengawasan*				27 unit usaha	27 unit usaha	430.217.450,00	422.517.450,00	227.109.250,00	-203.108.200,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Pelaku Usaha		1.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				1 Dokumen	1 Dokumen	153.996.000,00	151.576.000,00	93.403.000,00	-60.593.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				27 Badan Usaha	27 Badan Usaha	276.221.450,00	270.941.450,00	133.706.250,00	-142.515.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**50.000.000,00**	**1.250.000.000,00**	**1.228.563.770,00**	**300.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah masyarakat yang dilakukan pembinaan*				200 orang	200 orang	50.000.000,00	1.250.000.000,00	1.228.563.770,00	1.178.563.770,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1.250.000.000,00	1.228.563.770,00	1.178.563.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
5.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang diberikan**				**100 %**	**100 %**	**162.229.400,00**	**159.699.400,00**	**76.856.400,00**	**187.770.600,00**							**350.000.000,00**	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang diberikan*				25 penghargaan	25 penghargaan	162.229.400,00	159.699.400,00	76.856.400,00	-85.373.000,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				1 Entitas	1 Entitas	162.229.400,00	159.699.400,00	76.856.400,00	-85.373.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.447.914.918,00**	**10.464.507.916,00**	**9.781.005.131,00**	**5.333.090.213,00**							**26.100.423.320,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**4.447.914.918,00**	**10.464.507.916,00**	**9.781.005.131,00**	**5.333.090.213,00**							**26.100.423.320,00**	
1.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Presentase Luas kawasan hutan yang dikelola**				**0 %**	**0 %**	**2.645.798.090,00**	**8.650.070.298,00**	**8.245.615.420,00**	**17.242.751.910,00**							**19.888.550.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan*				1 dokumen	1 dokumen	313.321.061,00	1.521.331.500,00	1.495.563.792,00	1.182.242.731,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		1.349.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	81.680.000,00	79.040.000,00	53.272.292,00	-28.407.708,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			849.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luas hutan yang direhabilitasi di luar kawasan hutan negara*				0 Ha	0 Ha	1.623.720.000,00	6.221.273.008,00	6.087.652.708,00	4.463.932.708,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		16.221.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	1 Dokumen	123.720.000,00	115.910.000,00	109.116.000,00	-14.604.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2																		
			Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara				20 Ha	20 Ha	300.000.000,00	300.000.000,00	290.439.200,00	-9.560.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kegiatan perlindungan hutan yang dilaksanakan*				2 kegiatan	2 kegiatan	467.354.480,00	454.924.480,00	291.978.110,00	-175.376.370,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		980.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	80.461.000,00	75.291.000,00	72.458.000,00	-8.003.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	108.080.000,00	100.820.000,00	90.502.050,00	-17.577.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	*Jumlah unit pengolahan HHBK*				10 unit pengolahan	10 unit pengolahan	191.402.549,00	402.541.310,00	345.385.510,00	153.982.961,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		738.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani				10 Unit Ma nagemen	10 Unit Ma nagemen	108.064.800,00	321.208.500,00	290.036.700,00	181.971.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			338.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Jumlah KTH/KUPS yang meningkat kelasnya**				**1 KTH/KUPS**	**1 KTH/KUPS**	**144.100.266,00**	**194.701.056,00**	**126.665.069,00**	**1.805.899.734,00**							**1.950.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH)/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang diberikan penyuluhan dan pemberdayaan*				1 KTH	1 KTH	144.100.266,00	194.701.056,00	126.665.069,00	-17.435.197,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		1.950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				-	17 Kelompok	0,00	53.020.790,00	53.020.790,00	53.020.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				5 Hektar	5 Hektar	79.040.000,00	76.620.000,00	47.868.046,00	-31.171.954,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Persentase DAS yang dikelola**				**5,56 %**	**5,56 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase DAS yang dikelola*				5,56 %	5,56 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Semua Kel/Desa Kab. Gorontalo, Batudaa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		UPTD KPH WILAYAH I DAN II GORONTALO BARAT							**33.201.707.945,00**	**39.743.702.271,00**	**37.867.892.737,00**	**4.666.184.792,00**							**60.193.266.498,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.447.914.918,00**	**10.464.507.916,00**	**9.781.005.131,00**	**5.333.090.213,00**							**26.100.423.320,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**4.447.914.918,00**	**10.464.507.916,00**	**9.781.005.131,00**	**5.333.090.213,00**							**26.100.423.320,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**29.380.162.739,00**	**28.584.994.067,00**	**27.591.873.728,00**	**5.587.053.759,00**							**34.967.216.498,00**	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan*				3 paket	3 paket	853.530.170,00	853.530.170,00	544.378.026,00	-309.152.144,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		3.395.537.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.906.450,00	8.906.450,00	8.906.450,00	0,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.289.400,00	1.289.400,00	1.289.400,00	0,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			3.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	32.328.000,00	32.328.000,00	16.648.000,00	-15.680.000,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia*				2 laporan	2 laporan	1.562.672.944,00	1.504.592.944,00	1.504.592.944,00	-58.080.000,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		1.822.023.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	21.020.000,00	21.020.000,00	21.020.000,00	0,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	118.800.000,00	108.900.000,00	108.900.000,00	-9.900.000,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				1 unit	1 unit	855.244.121,00	855.244.121,00	853.824.121,00	-1.420.000,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		786.949.820,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	59.332.000,00	59.332.000,00	59.332.000,00	0,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Presentase Luas kawasan hutan yang dikelola**				**0 %**	**0 %**	**2.645.798.090,00**	**8.650.070.298,00**	**8.245.615.420,00**	**17.242.751.910,00**							**19.888.550.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan*				0 dokumen	0 dokumen	313.321.061,00	1.521.331.500,00	1.495.563.792,00	1.182.242.731,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		1.349.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	3 Unit	101.641.061,00	1.219.962.000,00	1.219.962.000,00	1.118.320.939,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disahkan*				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	25.035.300,00	-24.964.700,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	KPH dan Masyarakat		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	12.500.000,00	12.500.000,00	5.795.000,00	-6.705.000,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luas hutan yang direhabilitasi di luar kawasan hutan negara*				20 Ha	114 Ha	1.623.720.000,00	6.221.273.008,00	6.087.652.708,00	4.463.932.708,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		16.221.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				20 Ha	114 Ha	200.000.000,00	1.237.300.000,00	1.223.800.000,00	1.023.800.000,00	Kab. Pohuwato, Popayato, Tunas Harapan Kab. Pohuwato, Wanggarasi, Yipilo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			8.639.950.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kegiatan perlindungan hutan yang dilaksanakan*				1 kegiatan	1 kegiatan	467.354.480,00	454.924.480,00	291.978.110,00	-175.376.370,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		980.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	76.636.000,00	76.636.000,00	46.036.000,00	-30.600.000,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Jumlah KTH/KUPS yang meningkat kelasnya**				**0 KTH/KUPS**	**0 KTH/KUPS**	**144.100.266,00**	**194.701.056,00**	**126.665.069,00**	**1.805.899.734,00**							**1.950.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH)/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang diberikan penyuluhan dan pemberdayaan*				0 KTH/KUPS	0 KTH/KUPS	144.100.266,00	194.701.056,00	126.665.069,00	-17.435.197,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	-		1.950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				0 Kelompok	0 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0 Hektar	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		UPTD KPH WILAYAH III POHUWATO							**33.201.707.945,00**	**39.743.702.271,00**	**37.867.892.737,00**	**4.666.184.792,00**							**60.193.266.498,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.447.914.918,00**	**10.464.507.916,00**	**9.781.005.131,00**	**5.333.090.213,00**							**26.100.423.320,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**4.447.914.918,00**	**10.464.507.916,00**	**9.781.005.131,00**	**5.333.090.213,00**							**26.100.423.320,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**29.380.162.739,00**	**28.584.994.067,00**	**27.591.873.728,00**	**5.587.053.759,00**							**34.967.216.498,00**	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan*				9 paket	9 paket	853.530.170,00	853.530.170,00	544.378.026,00	-309.152.144,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		3.395.537.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	31.057.500,00	31.057.500,00	7.341.500,00	-23.716.000,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6.875.000,00	6.875.000,00	3.437.500,00	-3.437.500,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	52.292.200,00	52.292.200,00	25.000.000,00	-27.292.200,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia*				2 laporan	2 laporan	1.562.672.944,00	1.504.592.944,00	1.504.592.944,00	-58.080.000,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		1.822.023.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	23.525.000,00	23.525.000,00	23.525.000,00	0,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			31.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	89.760.000,00	82.280.000,00	82.280.000,00	-7.480.000,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				6 unit	6 unit	855.244.121,00	855.244.121,00	853.824.121,00	-1.420.000,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		786.949.820,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	107.525.446,00	107.525.446,00	107.525.446,00	0,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			77.049.820,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			6.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Presentase Luas kawasan hutan yang dikelola**				**0 %**	**0 %**	**2.645.798.090,00**	**8.650.070.298,00**	**8.245.615.420,00**	**17.242.751.910,00**							**19.888.550.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan*				0 dokumen	0 dokumen	313.321.061,00	1.521.331.500,00	1.495.563.792,00	1.182.242.731,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	-		1.349.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				0 Unit	3 Unit	0,00	19.962.000,00	19.962.000,00	19.962.000,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	25.035.300,00	-24.964.700,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	KPH dan Masyarakat		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	2.302.800,00	-5.197.200,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luas hutan yang direhabilitasi di luar kawasan hutan negara*				20 Ha	114 Ha	1.623.720.000,00	6.221.273.008,00	6.087.652.708,00	4.463.932.708,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		16.221.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				20 Ha	114 Ha	200.000.000,00	1.237.300.000,00	1.219.174.800,00	1.019.174.800,00	Kab. Pohuwato, Taluditi, Semua Kel/Desa Kab. Pohuwato, Taluditi, Kalimas	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			2.199.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan																		
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi				0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kegiatan perlindungan hutan yang dilaksanakan*				1 kegiatan	1 kegiatan	467.354.480,00	454.924.480,00	291.978.110,00	-175.376.370,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		980.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	73.933.480,00	73.933.480,00	22.188.340,00	-51.745.140,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Jumlah KTH/KUPS yang meningkat kelasnya**				**0 KTH/KUPS**	**0 KTH/KUPS**	**144.100.266,00**	**194.701.056,00**	**126.665.069,00**	**1.805.899.734,00**							**1.950.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH)/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang diberikan penyuluhan dan pemberdayaan*				0 KTH/KUPS	0 KTH/KUPS	144.100.266,00	194.701.056,00	126.665.069,00	-17.435.197,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	-		1.950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				0 Kelompok	0 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0 Hektar	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		UPTD KPH WILAYAH IV GORONTALO UTARA							**33.201.707.945,00**	**39.743.702.271,00**	**37.867.892.737,00**	**4.666.184.792,00**							**60.193.266.498,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.447.914.918,00**	**10.464.507.916,00**	**9.781.005.131,00**	**5.333.090.213,00**							**26.100.423.320,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**4.447.914.918,00**	**10.464.507.916,00**	**9.781.005.131,00**	**5.333.090.213,00**							**26.100.423.320,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**29.380.162.739,00**	**28.584.994.067,00**	**27.591.873.728,00**	**5.587.053.759,00**							**34.967.216.498,00**	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan*				8 paket	8 paket	853.530.170,00	853.530.170,00	544.378.026,00	-309.152.144,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		3.395.537.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	25.526.625,00	25.526.625,00	25.526.625,00	0,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	271.875,00	271.875,00	271.875,00	0,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	31.778.000,00	31.778.000,00	15.655.000,00	-16.123.000,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia*				2 laporan	2 laporan	1.562.672.944,00	1.504.592.944,00	1.504.592.944,00	-58.080.000,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		1.822.023.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	39.763.500,00	39.763.500,00	39.763.500,00	0,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			40.763.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	87.120.000,00	79.860.000,00	79.860.000,00	-7.260.000,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				9 unit	9 unit	855.244.121,00	855.244.121,00	853.824.121,00	-1.420.000,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		786.949.820,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	51.226.000,00	51.226.000,00	51.226.000,00	0,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	3.860.000,00	3.860.000,00	2.440.000,00	-1.420.000,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			6.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Presentase Luas kawasan hutan yang dikelola**				**0 %**	**0 %**	**2.645.798.090,00**	**8.650.070.298,00**	**8.245.615.420,00**	**17.242.751.910,00**							**19.888.550.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan*				0 dokumen	0 dokumen	313.321.061,00	1.521.331.500,00	1.495.563.792,00	1.182.242.731,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	KPH dan Masyarakat		1.349.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	2 Unit	70.000.000,00	20.013.500,00	20.013.500,00	-49.986.500,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	25.035.300,00	-24.964.700,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	KPH dan Masyarakat		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	3.877.500,00	-3.622.500,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luas hutan yang direhabilitasi di luar kawasan hutan negara*				20 Ha	170 Ha	1.623.720.000,00	6.221.273.008,00	6.087.652.708,00	4.463.932.708,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		16.221.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				20 Ha	170 Ha	200.000.000,00	832.502.040,00	813.765.240,00	613.765.240,00	Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Tombulilato Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Buata Kab. Gorontalo Utara, Kwandang, Bualemo Kab. Gorontalo Utara, Anggrek, Ibarat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			1.265.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan																		
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi				0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kegiatan perlindungan hutan yang dilaksanakan*				1 kegiatan	1 kegiatan	467.354.480,00	454.924.480,00	291.978.110,00	-175.376.370,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		980.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	28.244.000,00	28.244.000,00	22.672.000,00	-5.572.000,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	*Jumlah unit pengolahan HHBK*				1 unit pengolahan	1 unit pengolahan	191.402.549,00	402.541.310,00	345.385.510,00	153.982.961,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		738.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan				1 Unit Man agemen	1 Unit Man agemen	50.195.610,00	50.195.610,00	24.211.610,00	-25.984.000,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Jumlah KTH/KUPS yang meningkat kelasnya**				**0 KTH/KUPS**	**0 KTH/KUPS**	**144.100.266,00**	**194.701.056,00**	**126.665.069,00**	**1.805.899.734,00**							**1.950.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH)/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang diberikan penyuluhan dan pemberdayaan*				0 KTH/KUPS	0 KTH/KUPS	144.100.266,00	194.701.056,00	126.665.069,00	-17.435.197,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	-		1.950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				0 Kelompok	0 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0 Hektar	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		UPTD KPH WILAYAH V BOALEMO							**33.201.707.945,00**	**39.743.702.271,00**	**37.867.892.737,00**	**4.666.184.792,00**							**60.193.266.498,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.447.914.918,00**	**10.464.507.916,00**	**9.781.005.131,00**	**5.333.090.213,00**							**26.100.423.320,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**4.447.914.918,00**	**10.464.507.916,00**	**9.781.005.131,00**	**5.333.090.213,00**							**26.100.423.320,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**29.380.162.739,00**	**28.584.994.067,00**	**27.591.873.728,00**	**5.587.053.759,00**							**34.967.216.498,00**	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan*				11 paket	11 paket	853.530.170,00	853.530.170,00	544.378.026,00	-309.152.144,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		3.395.537.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	56.250.950,00	56.250.950,00	56.250.950,00	0,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	871.800,00	871.800,00	871.800,00	0,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			4.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	105.510.000,00	105.510.000,00	46.260.000,00	-59.250.000,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia*				2 laporan	2 laporan	1.562.672.944,00	1.504.592.944,00	1.504.592.944,00	-58.080.000,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		1.822.023.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	31.279.984,00	31.279.984,00	31.279.984,00	0,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	132.000.000,00	133.100.000,00	133.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				4 unit	4 unit	855.244.121,00	855.244.121,00	853.824.121,00	-1.420.000,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		786.949.820,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	48.335.875,00	48.335.875,00	48.335.875,00	0,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			6.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Presentase Luas kawasan hutan yang dikelola**				**-**	**0 %**	**2.645.798.090,00**	**8.650.070.298,00**	**8.245.615.420,00**	**17.242.751.910,00**							**19.888.550.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan*				-	0 dokumen	313.321.061,00	1.521.331.500,00	1.495.563.792,00	1.182.242.731,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		1.349.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				-	4 Unit	0,00	19.816.000,00	19.816.000,00	19.816.000,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disahkan*				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	25.035.300,00	-24.964.700,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	KPH dan Masyarakat		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	2.760.000,00	-4.740.000,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luas hutan yang direhabilitasi di luar kawasan hutan negara*				20 Ha	136 Ha	1.623.720.000,00	6.221.273.008,00	6.087.652.708,00	4.463.932.708,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		16.221.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				20 Ha	136 Ha	200.000.000,00	832.499.940,00	815.826.440,00	615.826.440,00	Kab. Boalemo, Wonosari, Sari Tani Kab. Boalemo, Wonosari, Jatimulya Kab. Boalemo, Wonosari, Harapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			1.265.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kegiatan perlindungan hutan yang dilaksanakan*				1 kegiatan	1 kegiatan	467.354.480,00	454.924.480,00	291.978.110,00	-175.376.370,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		980.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Jumlah KTH/KUPS yang meningkat kelasnya**				**0 KTH/KUPS**	**0 KTH/KUPS**	**144.100.266,00**	**194.701.056,00**	**126.665.069,00**	**1.805.899.734,00**							**1.950.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH)/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang diberikan penyuluhan dan pemberdayaan*				0 KTH/KUPS	0 KTH/KUPS	144.100.266,00	194.701.056,00	126.665.069,00	-17.435.197,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	-		1.950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				0 Kelompok	0 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				0 Hektar	0 Hektar	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		UPTD KPH WILAYAH VI GORONTALO							**33.201.707.945,00**	**39.743.702.271,00**	**37.867.892.737,00**	**4.666.184.792,00**							**60.193.266.498,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.447.914.918,00**	**10.464.507.916,00**	**9.781.005.131,00**	**5.333.090.213,00**							**26.100.423.320,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**4.447.914.918,00**	**10.464.507.916,00**	**9.781.005.131,00**	**5.333.090.213,00**							**26.100.423.320,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**29.380.162.739,00**	**28.584.994.067,00**	**27.591.873.728,00**	**5.587.053.759,00**							**34.967.216.498,00**	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan*				8 paket	8 paket	853.530.170,00	853.530.170,00	544.378.026,00	-309.152.144,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		3.395.537.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	29.704.782,00	29.704.782,00	29.704.782,00	0,00	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.804.315,00	2.804.315,00	2.804.315,00	0,00	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6.875.000,00	6.875.000,00	3.437.500,00	-3.437.500,00	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	53.638.000,00	53.638.000,00	26.164.280,00	-27.473.720,00	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia*				2 laporan	2 laporan	1.562.672.944,00	1.504.592.944,00	1.504.592.944,00	-58.080.000,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		1.822.023.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	39.325.460,00	39.325.460,00	39.325.460,00	0,00	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			45.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	89.760.000,00	82.280.000,00	82.280.000,00	-7.480.000,00	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			89.760.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				8 unit	8 unit	855.244.121,00	855.244.121,00	853.824.121,00	-1.420.000,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		786.949.820,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	33.862.400,00	33.862.400,00	33.862.400,00	0,00	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			55.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			6.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Presentase Luas kawasan hutan yang dikelola**				**0 %**	**0 %**	**2.645.798.090,00**	**8.650.070.298,00**	**8.245.615.420,00**	**17.242.751.910,00**							**19.888.550.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan*				0 dokumen	0 dokumen	313.321.061,00	1.521.331.500,00	1.495.563.792,00	1.182.242.731,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	KPH dan Masyarakat		1.349.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	17 Unit	60.000.000,00	144.502.000,00	144.502.000,00	84.502.000,00	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disahkan*				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	25.035.300,00	-24.964.700,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	KPH dan Masyarakat		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	4.400.000,00	-3.100.000,00	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luas hutan yang direhabilitasi di luar kawasan hutan negara*				20 Ha	170 Ha	1.623.720.000,00	6.221.273.008,00	6.087.652.708,00	4.463.932.708,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		16.221.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				20 Ha	170 Ha	200.000.000,00	832.586.008,00	803.406.008,00	603.406.008,00	Kab. Gorontalo, Telaga, Dulamayo Barat Kab. Gorontalo, Telaga, Dulamayo Selatan Kab. Gorontalo, Batudaa, Barakati Kab. Gorontalo, Telaga Biru, Modelidu Kab. Gorontalo, Talaga Jaya, Buhu	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			1.265.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kegiatan perlindungan hutan yang dilaksanakan*				1 kegiatan	1 kegiatan	467.354.480,00	454.924.480,00	291.978.110,00	-175.376.370,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		980.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	18.361.720,00	-31.638.280,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	*Jumlah unit pengolahan HHBK*				0 unit pengolahan	0 unit pengolahan	191.402.549,00	402.541.310,00	345.385.510,00	153.982.961,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		738.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan				0 Unit Man agemen	0 Unit Man agemen	33.142.139,00	31.137.200,00	31.137.200,00	-2.004.939,00	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Jumlah KTH/KUPS yang meningkat kelasnya**				**1 KTH/KUPS**	**1 KTH/KUPS**	**144.100.266,00**	**194.701.056,00**	**126.665.069,00**	**1.805.899.734,00**							**1.950.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH)/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang diberikan penyuluhan dan pemberdayaan*				1 KTH	1 KTH	144.100.266,00	194.701.056,00	126.665.069,00	-17.435.197,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		1.950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				3 Kelompok	3 Kelompok	21.797.200,00	21.797.200,00	11.484.700,00	-10.312.500,00	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		UPTD KPH WILAYAH VII BONE BOLANGO DAN KOTA GORONTALO							**33.201.707.945,00**	**39.743.702.271,00**	**37.867.892.737,00**	**4.666.184.792,00**							**60.193.266.498,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.447.914.918,00**	**10.464.507.916,00**	**9.781.005.131,00**	**5.333.090.213,00**							**26.100.423.320,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**4.447.914.918,00**	**10.464.507.916,00**	**9.781.005.131,00**	**5.333.090.213,00**							**26.100.423.320,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**29.380.162.739,00**	**28.584.994.067,00**	**27.591.873.728,00**	**5.587.053.759,00**							**34.967.216.498,00**	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan*				8 paket	8 paket	853.530.170,00	853.530.170,00	544.378.026,00	-309.152.144,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		3.395.537.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	9.582.600,00	9.582.600,00	9.582.600,00	0,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	990.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	53.759.000,00	53.759.000,00	24.577.000,00	-29.182.000,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia*				2 laporan	2 laporan	1.562.672.944,00	1.504.592.944,00	1.504.592.944,00	-58.080.000,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		1.822.023.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25.759.000,00	25.759.000,00	25.759.000,00	0,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	87.120.000,00	79.860.000,00	79.860.000,00	-7.260.000,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				4 unit	4 unit	855.244.121,00	855.244.121,00	853.824.121,00	-1.420.000,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		786.949.820,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	39.720.400,00	39.720.400,00	39.720.400,00	0,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			47.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			6.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Presentase Luas kawasan hutan yang dikelola**				**-**	**0 %**	**2.645.798.090,00**	**8.650.070.298,00**	**8.245.615.420,00**	**17.242.751.910,00**							**19.888.550.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan*				-	0 dokumen	313.321.061,00	1.521.331.500,00	1.495.563.792,00	1.182.242.731,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Sipil Negara		1.349.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				-	2 Unit	0,00	18.036.000,00	18.036.000,00	18.036.000,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disahkan*				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	25.035.300,00	-24.964.700,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	KPH dan Masyarakat		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	5.900.000,00	-1.600.000,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luas hutan yang direhabilitasi di luar kawasan hutan negara*				20 Ha	146 Ha	1.623.720.000,00	6.221.273.008,00	6.087.652.708,00	4.463.932.708,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		16.221.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				20 Ha	146 Ha	200.000.000,00	833.175.020,00	812.125.020,00	612.125.020,00	Kab. Bone Bolango, Suwawa Timur, Semua Kel/Desa Kab. Bone Bolango, Suwawa Tengah, Lompotoo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			556.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kegiatan perlindungan hutan yang dilaksanakan*				1 kegiatan	1 kegiatan	467.354.480,00	454.924.480,00	291.978.110,00	-175.376.370,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		980.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	14.760.000,00	-25.240.000,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Jumlah KTH/KUPS yang meningkat kelasnya**				**1 KTH/KUPS**	**1 KTH/KUPS**	**144.100.266,00**	**194.701.056,00**	**126.665.069,00**	**1.805.899.734,00**							**1.950.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH)/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang diberikan penyuluhan dan pemberdayaan*				1 KTH	1 KTH	144.100.266,00	194.701.056,00	126.665.069,00	-17.435.197,00			-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat		1.950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	43.263.066,00	43.263.066,00	14.291.533,00	-28.971.533,00	Kab. Bone Bolango, Suwawa Selatan, Bondaraya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		DINAS PERHUBUNGAN							**22.697.284.353,00**	**22.442.704.353,00**	**22.784.432.353,00**	**87.148.000,00**							**32.390.595.674,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**22.697.284.353,00**	**22.442.704.353,00**	**22.784.432.353,00**	**87.148.000,00**							**32.390.595.674,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**22.697.284.353,00**	**22.442.704.353,00**	**22.784.432.353,00**	**87.148.000,00**							**32.390.595.674,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan pelaporan**				**100 %**	**100 %**	**9.410.932.553,00**	**9.193.752.553,00**	**8.604.325.553,00**	**579.663.121,00**							**9.990.595.674,00**	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi*				5 Dokumen	5 Dokumen	711.670.000,00	706.390.000,00	339.999.000,00	-371.671.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Provinsi Gorontalo		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	711.670.000,00	706.390.000,00	339.999.000,00	-371.671.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan OPD* *Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia*				12 Laporan 1 Tahun	12 Laporan 1 Tahun	7.249.028.478,00	7.041.968.478,00	7.041.968.478,00	-207.060.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Provinsi Gorontalo		6.940.595.674,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/ Bulan	61 Orang/ Bulan	7.172.343.478,00	6.970.343.478,00	6.970.343.478,00	-202.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			6.860.595.674,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	76.685.000,00	71.625.000,00	71.625.000,00	-5.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/Bimtek*				3 Orang	3 Orang	192.265.000,00	192.265.000,00	151.741.000,00	-40.524.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	192.265.000,00	192.265.000,00	151.741.000,00	-40.524.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Sapras kantor yang tersedia*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	654.838.575,00	654.838.575,00	565.792.575,00	-89.046.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Provinsi Gorontalo		1.550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	654.838.575,00	654.838.575,00	565.792.575,00	-89.046.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			1.550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	603.130.500,00	598.290.500,00	504.824.500,00	-98.306.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Provinsi Gorontalo		550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	603.130.500,00	598.290.500,00	504.824.500,00	-98.306.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Peningkatan Kapasitas keselamatan transportasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**13.147.293.800,00**	**13.109.893.800,00**	**14.107.868.800,00**	**8.902.706.200,00**							**22.050.000.000,00**	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia*				100 Unit	100 Unit	140.980.000,00	140.980.000,00	1.140.980.000,00	1.000.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Provinsi Gorontalo		1.750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				100 Unit	100 Unit	140.980.000,00	140.980.000,00	1.140.980.000,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			1.750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	*Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun* *Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan* *Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				1 Unit 3 Orang	1 Unit 3 Orang	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Provinsi Gorontalo		15.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang																		
			Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1 Unit	1 Unit	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	0,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PKB	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			15.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	*Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi* *Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi* *Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan*				12 Laporan 1 Laporan 5 Unit	12 Laporan 1 Laporan 5 Unit	904.837.800,00	872.497.800,00	872.497.800,00	-32.340.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Provinsi Gorontalo		3.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	486.670.000,00	461.920.000,00	461.920.000,00	-24.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan				5 Unit	5 Unit	418.167.800,00	410.577.800,00	410.577.800,00	-7.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			2.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang anrat Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi* *Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi*				14 Unit 5 Laporan	14 Unit 5 Laporan	1.581.476.000,00	1.576.416.000,00	1.574.391.000,00	-7.085.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	-		1.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi																		
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	138.659.000,00	133.599.000,00	133.599.000,00	-5.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				14 Unit	14 Unit	1.442.817.000,00	1.442.817.000,00	1.440.792.000,00	-2.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan*				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Provinsi Gorontalo		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase peningkatan kinerja pelayanan transportasi**				**100 %**	**100 %**	**139.058.000,00**	**139.058.000,00**	**72.238.000,00**	**210.942.000,00**							**350.000.000,00**	
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait berupa Bongkat Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan laut, Tally mandiri dan depo peti kemas*				12 Laporan	12 Laporan	139.058.000,00	139.058.000,00	72.238.000,00	-66.820.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Provinsi Gorontalo		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				12 Laporan	12 Laporan	139.058.000,00	139.058.000,00	72.238.000,00	-66.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK							**17.385.070.139,00**	**17.087.923.346,00**	**15.203.275.871,00**	**-2.181.794.268,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.385.070.139,00**	**17.087.923.346,00**	**15.203.275.871,00**	**-2.181.794.268,00**							**0,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**16.497.340.539,00**	**16.210.533.746,00**	**14.708.157.166,00**	**-1.789.183.373,00**							**0,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi**				**100 %**	**100 %**	**8.886.349.539,00**	**8.686.222.746,00**	**7.801.997.566,00**	**-8.886.349.539,00**							**0,00**	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi*				7 Dokumen	7 Dokumen	695.078.875,00	681.878.875,00	428.807.775,00	-266.271.100,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Kantor Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo		0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	447.979.875,00	434.779.875,00	305.800.225,00	-142.179.650,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	247.099.000,00	247.099.000,00	123.007.550,00	-124.091.450,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan*				100 %	100 %	5.192.457.333,00	5.028.520.540,00	4.978.017.040,00	-214.440.293,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Kantor Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo		0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/ Bulan	41 Orang/ Bulan	5.080.109.333,00	4.916.172.540,00	4.916.172.540,00	-163.936.793,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	112.348.000,00	112.348.000,00	61.844.500,00	-50.503.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM*				10 Orang	10 Orang	72.313.660,00	72.313.660,00	42.435.000,00	-29.878.660,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	SDM Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo		0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	72.313.660,00	72.313.660,00	42.435.000,00	-29.878.660,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase kesediaan peralatan dan perlengkapan kantor*				100 %	100 %	1.555.938.800,00	1.555.938.800,00	1.290.976.700,00	-264.962.100,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Kantor Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo		0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.555.938.800,00	1.555.938.800,00	1.290.976.700,00	-264.962.100,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan jasa peralatan perlengkapan kantor*				100 %	100 %	1.370.560.871,00	1.347.570.871,00	1.061.761.051,00	-308.799.820,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Kantor Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo		0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.370.560.871,00	1.347.570.871,00	1.061.761.051,00	-308.799.820,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Meningkatnya Ketersediaan Informasi pelaksanaan Program Kegiatan Pemerintah Daerah**				**100 % Informasi Program Kegiatan Pemda**	**100 % Informasi Program Kegiatan Pemda**	**4.237.762.000,00**	**4.171.432.000,00**	**3.923.679.000,00**	**-4.237.762.000,00**							**0,00**	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentase peningkatan kualitas pengelolaan dan komunikasi publik*				100 %	100 %	4.237.762.000,00	4.171.432.000,00	3.923.679.000,00	-314.083.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Mitra Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo dan Masyarakat Provinsi Gorontalo		0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				27 Laporan	27 Laporan	1.522.221.000,00	1.522.221.000,00	1.522.221.000,00	0,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				2750 Konten	2750 Konten	610.369.000,00	584.299.000,00	447.038.000,00	-163.331.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik																		
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	1 Laporan	1.406.960.000,00	1.406.960.000,00	1.363.960.000,00	-43.000.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				0 Media	0 Media	698.212.000,00	657.952.000,00	590.460.000,00	-107.752.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Aplikasi Informatika**				**50 Layanan Internet OPD Sub Domain Pemda**	**50 Layanan Internet OPD Sub Domain Pemda**	**3.373.229.000,00**	**3.352.879.000,00**	**2.982.480.600,00**	**-3.373.229.000,00**							**0,00**	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	*Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi*				1 Dokumen	1 Dokumen	286.000.000,00	286.000.000,00	276.000.000,00	-10.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo		0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	286.000.000,00	286.000.000,00	276.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentasi Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik*				100 %	100 %	3.087.229.000,00	3.066.879.000,00	2.706.480.600,00	-380.748.400,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo		0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				2 Dokumen	2 Dokumen	165.400.000,00	165.400.000,00	125.152.600,00	-40.247.400,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	2.921.829.000,00	2.901.479.000,00	2.581.328.000,00	-340.501.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**683.104.600,00**	**675.404.600,00**	**397.404.600,00**	**-285.700.000,00**							**0,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah**				**79 %**	**79 %**	**683.104.600,00**	**675.404.600,00**	**397.404.600,00**	**-683.104.600,00**							**0,00**	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	*Persentase peningkatan kualitas dan validitas data statistik sektoral*				79 %	79 %	683.104.600,00	675.404.600,00	397.404.600,00	-285.700.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Mitra Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gorontalo dan Masyarakat Provinsi Gorontalo		0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				34 Orang	34 Orang	203.214.800,00	198.154.800,00	137.984.800,00	-65.230.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	100 Persentase	184.399.000,00	184.399.000,00	105.739.000,00	-78.660.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				1 Dokumen	1 Dokumen	295.490.800,00	292.850.800,00	153.680.800,00	-141.810.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**204.625.000,00**	**201.985.000,00**	**97.714.105,00**	**-106.910.895,00**							**0,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Optimalisasi Pelaksanaan Keamanan Informasi**				**100 %**	**100 %**	**204.625.000,00**	**201.985.000,00**	**97.714.105,00**	**-204.625.000,00**							**0,00**	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*				12 Dokumen	12 Dokumen	204.625.000,00	201.985.000,00	97.714.105,00	-106.910.895,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	KDH/WKDH, Pimpinan Setda dan OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo		0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				12 Laporan	12 Laporan	204.625.000,00	201.985.000,00	97.714.105,00	-106.910.895,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
		DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**22.473.284.366,00**	**22.071.294.305,00**	**31.148.206.805,00**	**8.674.922.439,00**							**37.490.548.217,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.765.165.366,00**	**17.363.175.305,00**	**22.696.519.805,00**	**4.931.354.439,00**							**26.690.926.670,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**17.765.165.366,00**	**17.363.175.305,00**	**22.696.519.805,00**	**4.931.354.439,00**							**26.690.926.670,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan**				**100 %**	**100 %**	**15.682.402.366,00**	**15.280.412.305,00**	**14.690.636.305,00**	**1.867.153.504,00**							**17.549.555.870,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	690.226.400,00	690.226.400,00	610.104.400,00	-80.122.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan		1.089.500.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	381.369.400,00	381.369.400,00	361.369.400,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			1.089.500.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	308.857.000,00	308.857.000,00	248.735.000,00	-60.122.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya*				87 Orang/Bulan	87 Orang/Bulan	10.642.091.766,00	10.326.341.705,00	10.302.421.705,00	-339.670.061,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan		10.921.574.870,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				87 Orang/ Bulan	87 Orang/ Bulan	10.542.189.566,00	10.226.439.505,00	10.226.439.505,00	-315.750.061,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			10.721.574.870,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	99.902.200,00	99.902.200,00	75.982.200,00	-23.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan*				87 Orang	87 Orang	396.892.000,00	396.892.000,00	130.733.000,00	-266.159.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	ASN Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				120 Orang	120 Orang	396.892.000,00	396.892.000,00	130.733.000,00	-266.159.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan*				30 Paket	30 Paket	936.416.800,00	936.416.800,00	731.076.800,00	-205.340.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan		3.250.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	936.416.800,00	936.416.800,00	731.076.800,00	-205.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			3.250.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				1 Laporan	1 Laporan	3.016.775.400,00	2.930.535.400,00	2.916.300.400,00	-100.475.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan		2.288.481.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.437.869.400,00	2.351.629.400,00	2.337.394.400,00	-100.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			2.150.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Jumlah Koperasi Sehat**				**20 Koperasi**	**20 Koperasi**	**257.664.000,00**	**257.664.000,00**	**134.337.500,00**	**179.426.800,00**							**437.090.800,00**	
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi*				20 Dokumen	20 Dokumen	257.664.000,00	257.664.000,00	134.337.500,00	-123.326.500,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Koperasi		437.090.800,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	257.664.000,00	257.664.000,00	134.337.500,00	-123.326.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			437.090.800,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya**				**390 Orang**	**390 Orang**	**241.559.000,00**	**241.559.000,00**	**121.284.000,00**	**1.872.721.000,00**							**2.114.280.000,00**	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian*				390 Orang	390 Orang	241.559.000,00	241.559.000,00	121.284.000,00	-120.275.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Koperasi		2.114.280.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				390 Orang	390 Orang	241.559.000,00	241.559.000,00	121.284.000,00	-120.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			2.114.280.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Jumlah Koperasi Aktif**				**25 Unit Usaha**	**25 Unit Usaha**	**500.777.000,00**	**500.777.000,00**	**53.125.000,00**	**149.223.000,00**							**650.000.000,00**	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha*				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	500.777.000,00	500.777.000,00	53.125.000,00	-447.652.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Koperasi		650.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	500.777.000,00	500.777.000,00	53.125.000,00	-447.652.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			650.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Jumlah UKM yang berdaya saing**				**160 Unit Usaha**	**160 Unit Usaha**	**339.772.000,00**	**339.772.000,00**	**46.146.000,00**	**4.050.228.000,00**							**4.390.000.000,00**	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya*				300 Unit Usaha	300 Unit Usaha	339.772.000,00	339.772.000,00	46.146.000,00	-293.626.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha/UMKM		4.390.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				300 Unit Usaha	300 Unit Usaha	297.548.000,00	297.548.000,00	46.146.000,00	-251.402.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			2.050.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				358 Orang	358 Orang	42.224.000,00	42.224.000,00	0,00	-42.224.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			2.340.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Jumlah UKM yang bertransformasi usaha**				**50 Unit Usaha**	**50 Unit Usaha**	**742.991.000,00**	**742.991.000,00**	**7.650.991.000,00**	**807.009.000,00**							**1.550.000.000,00**	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	*Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah*				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	742.991.000,00	742.991.000,00	7.650.991.000,00	6.908.000.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha/UMKM		1.550.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				50 Unit Usaha	7163 Unit Usaha	742.991.000,00	742.991.000,00	7.650.991.000,00	6.908.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			1.550.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.708.119.000,00**	**4.708.119.000,00**	**8.451.687.000,00**	**3.743.568.000,00**							**10.799.621.547,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**3.708.119.000,00**	**3.708.119.000,00**	**4.001.135.000,00**	**293.016.000,00**							**8.440.500.000,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**23.550.000,00**	**23.550.000,00**	**23.550.000,00**	**266.450.000,00**							**290.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	*Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)*				10 Dokumen	10 Dokumen	23.550.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha/Eksportir		290.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA																		
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				10 Dokumen	10 Dokumen	23.550.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			290.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	**Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**				**28 Laporan**	**28 Laporan**	**1.024.429.000,00**	**1.024.429.000,00**	**2.630.936.500,00**	**1.935.571.000,00**							**2.960.000.000,00**	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan*				16 Laporan	16 Laporan	960.023.000,00	960.023.000,00	2.588.637.500,00	1.628.614.500,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha, Konsumen		2.610.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	44.258.000,00	44.258.000,00	27.258.000,00	-17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			260.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				4 Laporan	4 Laporan	915.765.000,00	915.765.000,00	2.561.379.500,00	1.645.614.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			2.350.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	*Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya*				12 Laporan	12 Laporan	64.406.000,00	64.406.000,00	42.299.000,00	-22.107.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Produsen/Distributor/ Pengecer Pupuk, Petani		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	12 Laporan	64.406.000,00	64.406.000,00	42.299.000,00	-22.107.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			350.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor**				**8 Komoditi**	**8 Komoditi**	**228.052.000,00**	**228.052.000,00**	**91.514.000,00**	**721.948.000,00**							**950.000.000,00**	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	*Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi*				8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	228.052.000,00	228.052.000,00	91.514.000,00	-136.538.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha/Eksportir		950.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	228.052.000,00	228.052.000,00	91.514.000,00	-136.538.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			950.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen**				**9 Dokumen**	**9 Dokumen**	**2.432.088.000,00**	**2.432.088.000,00**	**1.255.134.500,00**	**1.808.412.000,00**							**4.240.500.000,00**	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen*				12 Kasus	12 Kasus	1.920.518.000,00	1.920.518.000,00	998.134.000,00	-922.384.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha dan Konsumen		2.220.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen																		
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				6 BPSK	6 BPSK	1.920.518.000,00	1.920.518.000,00	998.134.000,00	-922.384.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			2.220.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi*				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	90.476.000,00	90.476.000,00	55.805.000,00	-34.671.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha dan Konsumen		375.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				12 Laporan	12 Laporan	90.476.000,00	90.476.000,00	55.805.000,00	-34.671.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			375.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**4.450.552.000,00**	**3.450.552.000,00**							**2.359.121.547,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri**				**36 Dokumen**	**36 Dokumen**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**4.450.552.000,00**	**1.359.121.547,00**							**2.359.121.547,00**	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	*Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi*				36 Dokumen	36 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	4.450.552.000,00	3.450.552.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha/IKM		2.359.121.547,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				12 Dokumen	12 Dokumen	351.396.000,00	351.396.000,00	1.609.230.000,00	1.257.834.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			852.934.407,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	349.884.000,00	349.884.000,00	2.739.168.000,00	2.389.284.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			1.106.187.140,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				12 Dokumen	12 Dokumen	298.720.000,00	298.720.000,00	102.154.000,00	-196.566.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			400.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)							**22.473.284.366,00**	**22.071.294.305,00**	**31.148.206.805,00**	**8.674.922.439,00**							**37.490.548.217,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.765.165.366,00**	**17.363.175.305,00**	**22.696.519.805,00**	**4.931.354.439,00**							**26.690.926.670,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**17.765.165.366,00**	**17.363.175.305,00**	**22.696.519.805,00**	**4.931.354.439,00**							**26.690.926.670,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan**				**100 %**	**100 %**	**15.682.402.366,00**	**15.280.412.305,00**	**14.690.636.305,00**	**1.867.153.504,00**							**17.549.555.870,00**	
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				1 Laporan	1 Laporan	3.016.775.400,00	2.930.535.400,00	2.916.300.400,00	-100.475.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang		2.288.481.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	578.906.000,00	578.906.000,00	578.906.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			138.481.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.708.119.000,00**	**4.708.119.000,00**	**8.451.687.000,00**	**3.743.568.000,00**							**10.799.621.547,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**3.708.119.000,00**	**3.708.119.000,00**	**4.001.135.000,00**	**293.016.000,00**							**8.440.500.000,00**	
1.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen**				**9 Dokumen**	**9 Dokumen**	**2.432.088.000,00**	**2.432.088.000,00**	**1.255.134.500,00**	**1.808.412.000,00**							**4.240.500.000,00**	
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk*				204 Dokumen	204 Dokumen	421.094.000,00	421.094.000,00	201.195.500,00	-219.898.500,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha, UMKM, Eksportir		1.645.500.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian																		
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				200 laporan	200 laporan	259.258.000,00	259.258.000,00	179.934.500,00	-79.323.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			955.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk																		
			Jumlah produk potensial yang dipantau				3 Produk	3 Produk	95.299.000,00	95.299.000,00	18.084.000,00	-77.215.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			190.500.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi																		
			Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan				4 Sertifikat	4 Sertifikat	66.537.000,00	66.537.000,00	3.177.000,00	-63.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			500.000.000,00	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP							**9.993.145.802,00**	**9.737.195.802,00**	**8.571.760.002,00**	**-1.421.385.800,00**							**10.588.613.443,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.993.145.802,00**	**9.737.195.802,00**	**8.571.760.002,00**	**-1.421.385.800,00**							**10.588.613.443,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**9.993.145.802,00**	**9.737.195.802,00**	**8.571.760.002,00**	**-1.421.385.800,00**							**10.588.613.443,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**8.963.867.752,00**	**8.719.317.752,00**	**7.870.678.852,00**	**-235.548.309,00**							**8.728.319.443,00**	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	434.128.550,00	430.528.550,00	242.261.850,00	-191.866.700,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Pengguna Barang / Jasa dan Pegawai di lingkungan DPMPTSP Provinsi Gorontalo		530.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	195.786.000,00	192.186.000,00	132.772.500,00	-63.013.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			230.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	238.342.550,00	238.342.550,00	109.489.350,00	-128.853.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	6.503.583.443,00	6.280.183.443,00	6.268.747.443,00	-234.836.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Pengguna Barang / Jasa dan Pegawai di lingkungan DPMPTSP Provinsi Gorontalo		6.548.319.443,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	6.448.319.443,00	6.224.919.443,00	6.224.919.443,00	-223.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			6.448.319.443,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	55.264.000,00	55.264.000,00	43.828.000,00	-11.436.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan*				21 Orang	21 Orang	95.482.000,00	95.482.000,00	42.854.800,00	-52.627.200,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Pengguna Barang / Jasa dan Pegawai di lingkungan DPMPTSP Provinsi Gorontalo		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				21 Orang	21 Orang	95.482.000,00	95.482.000,00	42.854.800,00	-52.627.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan*				20 Paket	20 Paket	1.109.391.159,00	1.109.391.159,00	513.082.159,00	-596.309.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Pengguna Barang / Jasa dan Pegawai di lingkungan DPMPTSP Provinsi Gorontalo		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	1.109.391.159,00	1.109.391.159,00	513.082.159,00	-596.309.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				1 Laporan	1 Laporan	821.282.600,00	803.732.600,00	803.732.600,00	-17.550.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Pengguna Barang / Jasa dan Pegawai di lingkungan DPMPTSP Provinsi Gorontalo		1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	821.282.600,00	803.732.600,00	803.732.600,00	-17.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase jumlah dokumen pengembangan Iklim Penanaman Modal**				**30 %**	**30 %**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**94.499.400,00**	**50.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	*Peta Potensi Investasi Provinsi Gorontalo*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	94.499.400,00	-55.500.600,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Provinsi Gorontalo		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	94.499.400,00	-55.500.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase jumlah dokumen LOI (Letter Of Intent)**				**25 %**	**25 %**	**130.099.000,00**	**130.099.000,00**	**90.773.600,00**	**69.901.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah Kegiatan promosi yang dilaksanakan*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	130.099.000,00	130.099.000,00	90.773.600,00	-39.325.400,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Provinsi Gorontalo		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	130.099.000,00	130.099.000,00	90.773.600,00	-39.325.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan bagi Pelaku Usaha**				**26 %**	**26 %**	**374.719.200,00**	**371.959.200,00**	**233.739.800,00**	**125.280.800,00**							**500.000.000,00**	
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan sesuai kewenangan Provinsi*				650 Izin	650 Izin	374.719.200,00	371.959.200,00	233.739.800,00	-140.979.400,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha di Provinsi Gorontalo		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				600 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha	224.719.200,00	221.959.200,00	146.914.200,00	-77.805.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha				600 Kegiatan Usaha	600 Kegiatan Usaha	150.000.000,00	150.000.000,00	86.825.600,00	-63.174.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase kegiatan usaha yang mendapat pengawasan penanaman modal**				**26 %**	**26 %**	**178.020.200,00**	**172.260.200,00**	**135.412.200,00**	**532.273.800,00**							**710.294.000,00**	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pembinaan dan pengawasan penanaman modal*				160 Usaha	160 Usaha	178.020.200,00	172.260.200,00	135.412.200,00	-42.608.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha di Provinsi Gorontalo		710.294.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				100 Kegiatan usaha	100 Kegiatan usaha	178.020.200,00	172.260.200,00	135.412.200,00	-42.608.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				8 Kegiatan usaha	8 Kegiatan usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			310.294.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan**				**97.50 %**	**97.50 %**	**196.439.650,00**	**193.559.650,00**	**146.656.150,00**	**53.560.350,00**							**250.000.000,00**	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*				12 Dokumen	12 Dokumen	196.439.650,00	193.559.650,00	146.656.150,00	-49.783.500,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Penerima Layanan Perizinan di Provinsi Gorontalo		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	12 Dokumen	196.439.650,00	193.559.650,00	146.656.150,00	-49.783.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA							**12.393.457.930,00**	**12.191.362.795,00**	**13.610.496.795,00**	**1.217.038.865,00**							**18.094.974.958,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.393.457.930,00**	**12.191.362.795,00**	**13.610.496.795,00**	**1.217.038.865,00**							**18.094.974.958,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**12.393.457.930,00**	**12.191.362.795,00**	**13.610.496.795,00**	**1.217.038.865,00**							**18.094.974.958,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**6.713.257.930,00**	**6.511.162.795,00**	**7.043.307.795,00**	**1.887.582.200,00**							**8.600.840.130,00**	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	125.080.000,00	125.080.000,00	163.480.000,00	38.400.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		438.136.800,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	125.080.000,00	125.080.000,00	163.480.000,00	38.400.000,00	Kota Gorontalo, Kota Selatan, Limba U II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			438.136.800,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	5.365.157.930,00	5.218.832.795,00	5.223.832.795,00	-141.325.135,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		6.536.827.930,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/ Bulan	51 Orang/ Bulan	5.340.077.930,00	5.193.752.795,00	5.193.752.795,00	-146.325.135,00	Kota Gorontalo, Kota Selatan, Limba U I	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			6.340.077.930,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.080.000,00	25.080.000,00	30.080.000,00	5.000.000,00	Kota Gorontalo, Kota Selatan, Limba U II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			196.750.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	125.080.000,00	125.080.000,00	120.000.000,00	-5.080.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		452.695.400,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	125.080.000,00	125.080.000,00	120.000.000,00	-5.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			452.695.400,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.097.940.000,00	1.042.170.000,00	1.535.995.000,00	438.055.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1.173.180.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.097.940.000,00	1.042.170.000,00	1.535.995.000,00	438.055.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			1.173.180.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.741.149.121,00**	**1.741.149.121,00**	**1.378.283.121,00**	**1.100.000.000,00**							**2.841.149.121,00**	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-				-	-	411.902.261,00	411.902.261,00	336.482.461,00	-75.419.800,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		511.902.261,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi																		
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				250 Orang	250 Orang	411.902.261,00	411.902.261,00	336.482.461,00	-75.419.800,00	Kota Gorontalo, Kota Selatan, Limba U II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			511.902.261,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam Pemgembangan Manajemen Kelembagaan Organisasi Kepemudaan Tingkat Provinsi Gorontalo*				2 Organisasi	2 Organisasi	1.329.246.860,00	1.329.246.860,00	1.041.800.660,00	-287.446.200,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pemuda kader Provinsi dari seluruh Kab./Kota yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya		2.329.246.860,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				10 Organisasi	10 Organisasi	1.329.246.860,00	1.329.246.860,00	1.041.800.660,00	-287.446.200,00	Kota Gorontalo, Kota Selatan, Limba U II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			2.329.246.860,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi Nasional dan Internasional**				**100 %**	**100 %**	**3.939.050.879,00**	**3.939.050.879,00**	**5.188.905.879,00**	**2.713.934.828,00**							**6.652.985.707,00**	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-				-	-	310.729.748,00	310.729.748,00	210.729.748,00	-100.000.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarkan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha Yang Dikembangkan		450.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha																		
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				5 Unit	5 Unit	310.729.748,00	310.729.748,00	210.729.748,00	-100.000.000,00	Kota Gorontalo, Kota Selatan, Limba U II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			450.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-				-	-	1.178.321.131,00	1.178.321.131,00	2.528.176.131,00	1.349.855.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		2.051.599.407,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi																		
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				1342 Orang	1342 Orang	1.178.321.131,00	1.178.321.131,00	2.528.176.131,00	1.349.855.000,00	Kota Gorontalo, Kota Selatan, Limba U II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			2.051.599.407,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		4.151.386.300,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				3 Dokumen	3 Dokumen	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	0,00	Kota Gorontalo, Kota Selatan, Limba U II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			4.151.386.300,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							**10.427.842.522,00**	**11.248.088.622,00**	**10.705.674.822,00**	**277.832.300,00**							**10.193.866.522,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.427.842.522,00**	**11.248.088.622,00**	**10.705.674.822,00**	**277.832.300,00**							**10.193.866.522,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**9.637.302.072,00**	**10.497.148.172,00**	**10.262.196.372,00**	**624.894.300,00**							**9.417.724.972,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase meningkatnya urusan pemerintahan daerah provinsi**				**60 %**	**60 %**	**9.474.370.722,00**	**9.240.001.822,00**	**9.087.564.822,00**	**-234.420.375,00**							**9.239.950.347,00**	
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan*				59 Orang	59 Orang	7.661.710.022,00	7.434.161.122,00	7.421.281.122,00	-240.428.900,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		7.661.710.445,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/ Bulan	59 Orang/ Bulan	7.611.710.022,00	7.384.161.122,00	7.384.161.122,00	-227.548.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			7.611.710.445,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	37.120.000,00	-12.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*				5 Paket	5 Paket	412.416.600,00	333.662.600,00	333.662.600,00	-78.754.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Percepatan Reformasi Birokrasi		183.224.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	412.416.600,00	333.662.600,00	333.662.600,00	-78.754.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			183.224.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa*				3 Laporan	3 Laporan	1.120.702.500,00	1.192.636.500,00	1.187.641.500,00	66.939.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Percepatan Reformasi Birokrasi		1.130.317.052,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.120.702.500,00	1.192.636.500,00	1.187.641.500,00	66.939.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			1.130.317.052,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno**				**70 %**	**70 %**	**364.377.950,00**	**1.458.592.950,00**	**1.297.537.150,00**	**-74.535.150,00**							**289.842.800,00**	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah tenaga pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi*				40 Orang	40 Orang	132.258.950,00	132.258.950,00	91.506.950,00	-40.752.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kegemaran Membaca		74.975.050,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				40 Orang	40 Orang	132.258.950,00	132.258.950,00	91.506.950,00	-40.752.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			74.975.050,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah lokasi kunjungan kegiatan pembudayaan gemar membaca*				50 lokus	50 lokus	232.119.000,00	1.326.334.000,00	1.206.030.200,00	973.911.200,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kegemaran Membaca		214.867.750,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	232.119.000,00	1.326.334.000,00	1.206.030.200,00	973.911.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			214.867.750,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno**				**70 %**	**70 %**	**78.095.000,00**	**78.095.000,00**	**22.074.000,00**	**74.535.675,00**							**152.630.675,00**	
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	*Jumlah Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah*				100 Entry	100 Entry	78.095.000,00	78.095.000,00	22.074.000,00	-56.021.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kegemaran Membaca		152.630.675,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah																		
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				100 Entry	100 Entry	78.095.000,00	78.095.000,00	22.074.000,00	-56.021.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			152.630.675,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**790.540.450,00**	**750.940.450,00**	**443.478.450,00**	**-347.062.000,00**							**776.141.550,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase meningkatnya urusan pemerintahan daerah provinsi**				**60 %**	**60 %**	**9.474.370.722,00**	**9.240.001.822,00**	**9.087.564.822,00**	**-234.420.375,00**							**9.239.950.347,00**	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	279.541.600,00	279.541.600,00	144.979.600,00	-134.562.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Percepatan Reformasi Birokrasi		264.698.850,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	279.541.600,00	279.541.600,00	144.979.600,00	-134.562.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			264.698.850,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase meningkatnya pengelolaan arsip provinsi**				**60 %**	**60 %**	**412.566.950,00**	**372.966.950,00**	**225.955.950,00**	**444.150,00**							**413.011.100,00**	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	*Jumlah pengelolaan arsip dinamis provinsi dan pengawasan arsip KabKota*				200 berkas	200 berkas	293.013.600,00	253.413.600,00	152.285.600,00	-140.728.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Percepatan Reformasi Birokrasi		319.456.425,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan				6 Lembaga	6 Lembaga	293.013.600,00	253.413.600,00	152.285.600,00	-140.728.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			319.456.425,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	*Jumlah arsip statis daerah provinsi yang dikelola*				100 Arsip	100 Arsip	119.553.350,00	119.553.350,00	73.670.350,00	-45.883.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Percepatan Reformasi Birokrasi		93.554.675,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi				100 Arsip	100 Arsip	119.553.350,00	119.553.350,00	73.670.350,00	-45.883.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			93.554.675,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip**				**60 %**	**60 %**	**98.431.900,00**	**98.431.900,00**	**72.542.900,00**	**-300,00**							**98.431.600,00**	
	2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	*Jumlah dokumen arsip yang dilindungi dan diselamatkan Akibat Bencana yang Berskala Provinsi*				100 Arsip	100 Arsip	60.238.100,00	60.238.100,00	44.176.600,00	-16.061.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Percepatan Reformasi Birokrasi		58.837.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				100 Arsip	100 Arsip	60.238.100,00	60.238.100,00	44.176.600,00	-16.061.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			58.837.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kab//Kota*				100 Daftar	100 Daftar	38.193.800,00	38.193.800,00	28.366.300,00	-9.827.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Percepatan Reformasi Birokrasi		39.594.100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi				100 Daftar	100 Daftar	38.193.800,00	38.193.800,00	28.366.300,00	-9.827.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			39.594.100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**21.549.221.400,00**	**20.986.563.398,00**	**19.048.779.308,00**	**0,00**							**21.549.221.400,00**	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan*				8 Dokumen	8 Dokumen	1.349.719.000,00	1.349.719.000,00	782.779.310,00	-566.939.690,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		1.349.719.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	786.901.500,00	786.901.500,00	467.860.310,00	-319.041.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			786.901.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	562.817.500,00	562.817.500,00	314.919.000,00	-247.898.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			562.817.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan*				12 Bulan	12 Bulan	12.847.750.910,00	12.441.750.908,00	12.233.888.908,00	-613.862.002,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur Kelautan dan Perikanan		12.847.750.910,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/ Bulan	95 Orang/ Bulan	12.494.893.410,00	12.088.893.408,00	12.088.893.408,00	-406.000.002,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			12.494.893.410,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	352.857.500,00	352.857.500,00	144.995.500,00	-207.862.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			352.857.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				20 Orang	20 Orang	309.691.000,00	309.691.000,00	46.452.000,00	-263.239.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		309.691.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	309.691.000,00	309.691.000,00	46.452.000,00	-263.239.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			309.691.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah peralatan pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan (Sekretariat Dinas, UPTD PPI Tenda, UPTD PPI Gentuma, UPTD PPI Tilamuta, UPTD BPBLP, UPTD BP2MDPP)*				70 Paket	70 Paket	2.135.614.890,00	2.218.296.890,00	1.665.842.030,00	-469.772.860,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		2.135.614.890,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.553.571.000,00	1.636.253.000,00	953.868.140,00	-599.702.860,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			1.553.571.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Sekretariat Dinas, UPTD PPI Tenda, UPTD PPI Gentuma, UPTD PPI Tilamuta, UPTD BPBLP, UPTD BP2MDPP)*				12 Bulan	12 Bulan	4.906.445.600,00	4.667.105.600,00	4.319.817.060,00	-586.628.540,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		4.906.445.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.065.053.300,00	1.782.264.800,00	1.782.264.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			2.065.053.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
1.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Presentase kawasan konservasi, pesisir dan jasa kelautan yang terkelola**				**100 %**	**100 %**	**431.085.000,00**	**4.324.047.900,00**	**320.829.000,00**	**300.000.000,00**							**731.085.000,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	*Jumlah Wilayah Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi*				6 Wilayah	6 Wilayah	308.321.000,00	2.462.563.900,00	218.221.000,00	-90.100.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		508.321.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				136753.12 Ha	136753.12 Ha	251.295.000,00	2.405.537.900,00	180.538.000,00	-70.757.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			251.295.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				0.01 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				30 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru																		
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru				10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0013	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi																		
			Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	57.026.000,00	57.026.000,00	37.683.000,00	-19.343.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			57.026.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	*Jumlah wilayah Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*				6 Wilayah	6 Wilayah	122.764.000,00	1.861.484.000,00	102.608.000,00	-20.156.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		222.764.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				6 Kelompok	6 Kelompok	122.764.000,00	1.861.484.000,00	102.608.000,00	-20.156.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			122.764.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				30 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Nilai produktivitas produksi perikanan tangkap per tahun Presentase sarana penunjang dan pelayanan kepelabuhanan (UPTD PP Tenda)**				**1,5 80 % %**	**1,5 80 % %**	**3.741.818.100,00**	**25.552.527.100,00**	**5.518.296.600,00**	**2.820.746.500,00**							**6.562.564.600,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	*Jumlah Wilayah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil*				2 WPP	2 WPP	662.313.500,00	577.193.500,00	3.508.280.000,00	2.845.966.500,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		3.483.060.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				2 Dokumen	2 Dokumen	180.757.500,00	175.697.500,00	115.977.500,00	-64.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			180.757.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				2 Unit	5 Unit	481.556.000,00	401.496.000,00	3.392.302.500,00	2.910.746.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			3.302.302.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	*Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT*				100 Dokumen	100 Dokumen	319.029.600,00	319.029.600,00	245.263.600,00	-73.766.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		319.029.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil																		
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				25 Persentase	25 Persentase	120.377.600,00	120.377.600,00	77.948.600,00	-42.429.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			120.377.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil																		
			Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	198.652.000,00	198.652.000,00	167.315.000,00	-31.337.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			198.652.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-				-	-	2.760.475.000,00	24.656.304.000,00	1.764.753.000,00	-995.722.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	-		2.760.475.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				-	2 Unit	0,00	21.486.624.000,00	0,00	0,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Nilai produktivitas produksi perikanan budidaya laut dan payau per tahun**				**30 %**	**30 %**	**994.405.300,00**	**2.633.614.400,00**	**1.364.774.300,00**	**85.000.000,00**							**1.079.405.300,00**	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan ikan yang usahanya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	*Jumlah Pengelolaan unit Pembudidaya Ikan di Laut (UPTD BPBLP) Jumlah Wilayah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut*				22 Unit 4 Wilayah	22 Unit 4 Wilayah	65.725.300,00	63.085.300,00	508.019.300,00	442.294.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		115.725.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				5 Unit	2 Unit	65.725.300,00	63.085.300,00	508.019.300,00	442.294.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			65.725.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	*Jumlah Wilayah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat*				6 Wilayah	6 Wilayah	928.680.000,00	2.570.529.100,00	856.755.000,00	-71.925.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		928.680.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	108.836.000,00	108.836.000,00	96.416.000,00	-12.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			108.836.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	65.360.000,00	1.256.289.100,00	137.830.000,00	72.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			65.360.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Presentase Optimalisasi pengawasan SDKP di 2 (dua) wilayah Perairan Provinsi Gorontalo (Teluk Tomini dan Laut Sulawesi)**				**100 %**	**100 %**	**624.544.200,00**	**735.064.200,00**	**527.600.200,00**	**0,00**							**624.544.200,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	*Persentase kepatuhan (Compliance) pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan*				100%, 2 WPP	100%, 2 WPP	624.544.200,00	735.064.200,00	527.600.200,00	-96.944.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		624.544.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	198.369.400,00	173.889.400,00	152.361.400,00	-46.008.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			198.369.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi																		
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	269.694.800,00	269.694.800,00	246.041.800,00	-23.653.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			269.694.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				35 Kelompok Masyarakat	35 Kelompok Masyarakat	156.480.000,00	291.480.000,00	129.197.000,00	-27.283.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			156.480.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Nilai persentase (%) produktivitas Hasil perikananan yang berdaya saing Per Tahunnya Nilai persentase (%) produktivitas Hasil perikananan yang berdaya saing Per Tahunnya**				**100 15 % %**	**100 15 % %**	**1.405.616.000,00**	**1.427.100.000,00**	**3.659.528.000,00**	**0,00**							**1.405.616.000,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*				5 Dokumen	5 Dokumen	87.057.000,00	87.057.000,00	57.036.000,00	-30.021.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		87.057.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko				2 Dokumen	2 Dokumen	87.057.000,00	87.057.000,00	57.036.000,00	-30.021.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			87.057.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	*Jumlah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Jumlah pengolah ikan yang meningkat pengetahuan tentang mutu hasil perikanan (UPTD BP2MDPP)*				100 Data Uji 150 Orang 20 Unit	100 Data Uji 150 Orang 20 Unit	1.190.719.000,00	1.212.203.000,00	1.033.713.000,00	-157.006.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		1.190.719.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				3 Kegiatan	3 Kegiatan	960.608.000,00	960.608.000,00	840.608.000,00	-120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			960.608.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko				2 Kegiatan	2 Kegiatan	156.970.000,00	156.970.000,00	98.480.000,00	-58.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			156.970.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*				6 Kab/Kota/ Pelaku Usaha	6 Kab/Kota/ Pelaku Usaha	127.840.000,00	127.840.000,00	2.568.779.000,00	2.440.939.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		127.840.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	127.840.000,00	127.840.000,00	2.568.779.000,00	2.440.939.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			127.840.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT PAYAU (BPBLP)							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**21.549.221.400,00**	**20.986.563.398,00**	**19.048.779.308,00**	**0,00**							**21.549.221.400,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah peralatan pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan (Sekretariat Dinas, UPTD PPI Tenda, UPTD PPI Gentuma, UPTD PPI Tilamuta, UPTD BPBLP, UPTD BP2MDPP)*				70 Paket	70 Paket	2.135.614.890,00	2.218.296.890,00	1.665.842.030,00	-469.772.860,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		2.135.614.890,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	52.182.000,00	52.182.000,00	52.182.000,00	0,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			52.182.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Sekretariat Dinas, UPTD PPI Tenda, UPTD PPI Gentuma, UPTD PPI Tilamuta, UPTD BPBLP, UPTD BP2MDPP)*				12 Bulan	12 Bulan	4.906.445.600,00	4.667.105.600,00	4.319.817.060,00	-586.628.540,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		4.906.445.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	558.790.000,00	524.690.000,00	450.447.000,00	-108.343.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			558.790.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Nilai produktivitas produksi perikanan budidaya laut dan payau per tahun**				**30 %**	**30 %**	**994.405.300,00**	**2.633.614.400,00**	**1.364.774.300,00**	**85.000.000,00**							**1.079.405.300,00**	
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	*Jumlah Wilayah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat*				6 Wilayah	6 Wilayah	928.680.000,00	2.570.529.100,00	856.755.000,00	-71.925.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		928.680.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	493.551.000,00	429.471.000,00	383.271.000,00	-110.280.000,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			493.551.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	260.933.000,00	775.933.000,00	239.238.000,00	-21.695.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			260.933.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD PELABUHAN PERIKANAN TENDA (PPI TENDA)							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**21.549.221.400,00**	**20.986.563.398,00**	**19.048.779.308,00**	**0,00**							**21.549.221.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah peralatan pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan (Sekretariat Dinas, UPTD PPI Tenda, UPTD PPI Gentuma, UPTD PPI Tilamuta, UPTD BPBLP, UPTD BP2MDPP)*				70 Paket	70 Paket	2.135.614.890,00	2.218.296.890,00	1.665.842.030,00	-469.772.860,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		2.135.614.890,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	156.095.450,00	156.095.450,00	156.095.450,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			156.095.450,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Sekretariat Dinas, UPTD PPI Tenda, UPTD PPI Gentuma, UPTD PPI Tilamuta, UPTD BPBLP, UPTD BP2MDPP)*				12 Bulan	12 Bulan	4.906.445.600,00	4.667.105.600,00	4.319.817.060,00	-586.628.540,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		4.906.445.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.108.287.000,00	995.487.000,00	1.105.207.000,00	-3.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			1.108.287.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Nilai produktivitas produksi perikanan tangkap per tahun Presentase sarana penunjang dan pelayanan kepelabuhanan (UPTD PP Gentuma)**				**1,5 80 % %**	**1,5 80 % %**	**3.741.818.100,00**	**25.552.527.100,00**	**5.518.296.600,00**	**2.820.746.500,00**							**6.562.564.600,00**	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	*Jumlah Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (UPTD PP. Gentuma)* *Jumlah Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (UPTD PP. Tenda)* *Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (UPTD PP. Tilamuta)*				1 Unit	1 Unit	2.760.475.000,00	24.656.304.000,00	1.764.753.000,00	-995.722.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		2.760.475.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				5 Unit	5 Unit	2.131.126.000,00	2.131.126.000,00	1.266.314.000,00	-864.812.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			2.131.126.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				12 Layanan	12 Layanan	200.809.000,00	260.809.000,00	209.283.500,00	8.474.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			200.809.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD PELABUHAN PERIKANAN TILAMUTA (PPI TILAMUTA)							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**21.549.221.400,00**	**20.986.563.398,00**	**19.048.779.308,00**	**0,00**							**21.549.221.400,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah peralatan pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan (Sekretariat Dinas, UPTD PPI Tenda, UPTD PPI Gentuma, UPTD PPI Tilamuta, UPTD BPBLP, UPTD BP2MDPP)*				12 Paket	12 Paket	2.135.614.890,00	2.218.296.890,00	1.665.842.030,00	-469.772.860,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		2.135.614.890,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	75.222.740,00	75.222.740,00	75.222.740,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			75.222.740,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Sekretariat Dinas, UPTD PPI Tenda, UPTD PPI Gentuma, UPTD PPI Tilamuta, UPTD BPBLP, UPTD BP2MDPP)*				12 Bulan	12 Bulan	4.906.445.600,00	4.667.105.600,00	4.319.817.060,00	-586.628.540,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		4.906.445.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	628.494.100,00	569.934.100,00	527.174.100,00	-101.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			628.494.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Presentase sarana penunjang dan pelayanan kepelabuhanan (UPTD PP Tilamuta)**				**80 %**	**80 %**	**3.741.818.100,00**	**25.552.527.100,00**	**5.518.296.600,00**	**2.820.746.500,00**							**6.562.564.600,00**	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	*Jumlah Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (UPTD PP. Tenda)* *Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (UPTD PP. Tilamuta)*				1 Unit	1 Unit	2.760.475.000,00	24.656.304.000,00	1.764.753.000,00	-995.722.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		2.760.475.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				5 Unit	5 Unit	127.658.000,00	476.863.000,00	63.928.000,00	-63.730.000,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			127.658.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				12 Layanan	12 Layanan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD PELABUHAN PERIKANAN GENTUMA							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase pelayanan Jasa Administrasi perkantoran & Ketersediaan sarana/ prasarana**				**100 %**	**100 %**	**21.549.221.400,00**	**20.986.563.398,00**	**19.048.779.308,00**	**0,00**							**21.549.221.400,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah peralatan pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan (Sekretariat Dinas, UPTD PPI Tenda, UPTD PPI Gentuma, UPTD PPI Tilamuta, UPTD BPBLP, UPTD BP2MDPP)*				12 Paket	12 Paket	2.135.614.890,00	2.218.296.890,00	1.665.842.030,00	-469.772.860,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		2.135.614.890,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	161.926.700,00	161.926.700,00	161.926.700,00	0,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			161.926.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Sekretariat Dinas, UPTD PPI Tenda, UPTD PPI Gentuma, UPTD PPI Tilamuta, UPTD BPBLP, UPTD BP2MDPP)*				12 Bulan	12 Bulan	4.906.445.600,00	4.667.105.600,00	4.319.817.060,00	-586.628.540,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		4.906.445.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	358.946.200,00	340.466.200,00	283.249.160,00	-75.697.040,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			358.946.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Presentase sarana penunjang dan pelayanan kepelabuhanan (UPTD PP Gentuma)**				**80 %**	**80 %**	**3.741.818.100,00**	**25.552.527.100,00**	**5.518.296.600,00**	**2.820.746.500,00**							**6.562.564.600,00**	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (UPTD PP. Tilamuta)*				1 Unit	1 Unit	2.760.475.000,00	24.656.304.000,00	1.764.753.000,00	-995.722.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		2.760.475.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				5 Unit	5 Unit	139.793.000,00	139.793.000,00	102.998.000,00	-36.795.000,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			139.793.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				4 Layanan	4 Layanan	86.089.000,00	86.089.000,00	47.229.500,00	-38.859.500,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			86.089.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		BALAI PENGUJIAN PENERAPAN MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK PERIKANAN (BP2MDPP)							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**28.746.690.000,00**	**55.658.916.998,00**	**30.439.807.408,00**	**1.693.117.408,00**							**31.952.436.500,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**21.549.221.400,00**	**20.986.563.398,00**	**19.048.779.308,00**	**0,00**							**21.549.221.400,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah peralatan pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan (Sekretariat Dinas, UPTD PPI Tenda, UPTD PPI Gentuma, UPTD PPI Tilamuta, UPTD BPBLP, UPTD BP2MDPP)*				70 Paket	70 Paket	2.135.614.890,00	2.218.296.890,00	1.665.842.030,00	-469.772.860,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		2.135.614.890,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	136.617.000,00	136.617.000,00	266.547.000,00	129.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			136.617.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Sekretariat Dinas, UPTD PPI Tenda, UPTD PPI Gentuma, UPTD PPI Tilamuta, UPTD BPBLP, UPTD BP2MDPP)*				12 Bulan	12 Bulan	4.906.445.600,00	4.667.105.600,00	4.319.817.060,00	-586.628.540,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		4.906.445.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	186.875.000,00	171.475.000,00	171.475.000,00	-15.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			186.875.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Nilai persentase (%) produktivitas Hasil perikananan yang berdaya saing Per Tahunnya**				**15 %**	**15 %**	**1.405.616.000,00**	**1.427.100.000,00**	**3.659.528.000,00**	**0,00**							**1.405.616.000,00**	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	*Jumlah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar*				20 Unit	20 Unit	1.190.719.000,00	1.212.203.000,00	1.033.713.000,00	-157.006.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		1.190.719.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				4 Kegiatan	4 Kegiatan	73.141.000,00	94.625.000,00	94.625.000,00	21.484.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			73.141.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA							**14.752.620.464,00**	**14.502.370.464,00**	**13.230.864.464,00**	**-1.521.756.000,00**							**15.456.649.368,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**14.752.620.464,00**	**14.502.370.464,00**	**13.230.864.464,00**	**-1.521.756.000,00**							**15.456.649.368,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**14.752.620.464,00**	**14.502.370.464,00**	**13.230.864.464,00**	**-1.521.756.000,00**							**15.456.649.368,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran, Kualitas Dokumen Perencanaan dan Keuangan, dan Sumber Daya Aparatur**				**100 %**	**100 %**	**11.262.744.014,00**	**11.012.494.014,00**	**9.941.467.964,00**	**154.100.918,00**							**11.416.844.932,00**	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	458.702.325,00	458.702.325,00	281.523.775,00	-177.178.550,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo		437.517.802,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	458.702.325,00	458.702.325,00	281.523.775,00	-177.178.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			437.517.802,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	7.605.501.963,00	7.407.501.963,00	7.376.489.963,00	-229.012.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo		7.610.721.963,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/ Bulan	58 Orang/ Bulan	7.501.101.963,00	7.303.101.963,00	7.303.101.963,00	-198.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			7.501.101.963,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	104.400.000,00	104.400.000,00	73.388.000,00	-31.012.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			109.620.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				10 Orang	10 Orang	46.553.000,00	46.553.000,00	30.276.500,00	-16.276.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo		50.702.400,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	46.553.000,00	46.553.000,00	30.276.500,00	-16.276.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			50.702.400,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	1.936.830.326,00	1.936.830.326,00	1.090.271.326,00	-846.559.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo		2.041.988.547,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.936.830.326,00	1.936.830.326,00	1.090.271.326,00	-846.559.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			2.041.988.547,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	1.215.156.400,00	1.162.906.400,00	1.162.906.400,00	-52.250.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo		1.275.914.220,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.215.156.400,00	1.162.906.400,00	1.162.906.400,00	-52.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			1.275.914.220,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah Obyek Wisata yang Dikembangkan**				**6 Obyek Wisata**	**6 Obyek Wisata**	**1.487.063.100,00**	**1.487.063.100,00**	**1.450.343.650,00**	**210.689.127,00**							**1.697.752.227,00**	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	*Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)*				8 Lokasi	8 Lokasi	544.798.000,00	544.798.000,00	441.847.000,00	-102.951.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Wisatawan Mancanegara dan Nusantara		751.220.400,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi				8 Lokasi	8 Lokasi	544.798.000,00	544.798.000,00	441.847.000,00	-102.951.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			751.220.400,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi*				8 Unit	8 Unit	373.054.300,00	373.054.300,00	495.656.800,00	122.602.500,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Wisatawan Mancanegara dan Nusantara		391.707.015,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				6 Lokasi	6 Lokasi	373.054.300,00	373.054.300,00	495.656.800,00	122.602.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			391.707.015,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	*Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi*				8 Dokumen /Laporan	8 Dokumen /Laporan	474.687.250,00	474.687.250,00	413.308.800,00	-61.378.450,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Wisatawan Mancanegara dan Nusantara		455.301.262,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				180 Orang	180 Orang	474.687.250,00	474.687.250,00	413.308.800,00	-61.378.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			455.301.262,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Usaha Industri Pariwisata yang Tersertifikasi*				31 Laporan /Unit Usaha	31 Laporan /Unit Usaha	94.523.550,00	94.523.550,00	99.531.050,00	5.007.500,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Industri Pariwisata		99.523.550,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi				20 Laporan	20 Laporan	94.523.550,00	94.523.550,00	99.531.050,00	5.007.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			99.523.550,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Dokumen dan Laporan Pengembangan Promosi Pemasaran Pariwisata**				**18 Dokumen/Laporan**	**18 Dokumen/Laporan**	**1.114.796.800,00**	**1.114.796.800,00**	**1.166.212.300,00**	**347.408.033,00**							**1.462.204.833,00**	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	*Jumlah Dokumen dan Laporan Pengembangan Promosi Pemasaran Pariwisata*				18 Dokumen/Laporan	18 Dokumen/Laporan	1.114.796.800,00	1.114.796.800,00	1.166.212.300,00	51.415.500,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Wisatawan Mancanegara dan Nusantara		1.462.204.833,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	336.164.000,00	336.164.000,00	327.138.000,00	-9.026.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			457.972.200,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				4 Dokumen	4 Dokumen	98.218.000,00	98.218.000,00	137.795.500,00	39.577.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			297.151.365,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	3 Kegiatan	680.414.800,00	680.414.800,00	701.278.800,00	20.864.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			707.081.268,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Jumlah Sub Sektor Industri Kreatif yang Difasilitasi**				**6 Sub Sektor**	**6 Sub Sektor**	**613.016.550,00**	**613.016.550,00**	**487.468.550,00**	**-21.919.174,00**							**591.097.376,00**	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	*Jumlah Laporan Zona Kreatif yang Dikembangkan*				1 Laporan	1 Laporan	438.016.550,00	438.016.550,00	355.849.550,00	-82.167.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Wisatawan dan Pelaku Ekonomi Kreatif		459.917.377,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				4 Laporan	4 Laporan	438.016.550,00	438.016.550,00	355.849.550,00	-82.167.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			459.917.377,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, Serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif*				4 Dokumen /Laporan	4 Dokumen /Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	131.619.000,00	-43.381.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Wisatawan dan Pelaku Ekonomi Kreatif		131.179.999,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual				15 Orang	15 Orang	121.714.105,00	121.714.105,00	98.644.105,00	-23.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			75.229.810,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah																		
			Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah				3 Lembaga	3 Lembaga	53.285.895,00	53.285.895,00	32.974.895,00	-20.311.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			55.950.189,00	DINAS PARIWISATA
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkompeten**				**175 Orang/ Laporan**	**175 Orang/ Laporan**	**275.000.000,00**	**275.000.000,00**	**185.372.000,00**	**13.750.000,00**							**288.750.000,00**	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	*Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*				125 Orang	125 Orang	275.000.000,00	275.000.000,00	185.372.000,00	-89.628.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		288.750.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				92 Orang	92 Orang	275.000.000,00	275.000.000,00	185.372.000,00	-89.628.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			288.750.000,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN							**55.256.337.144,00**	**53.540.190.683,00**	**61.797.357.683,00**	**6.541.020.539,00**							**428.447.838.292,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**55.256.337.144,00**	**53.540.190.683,00**	**61.797.357.683,00**	**6.541.020.539,00**							**428.447.838.292,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**55.256.337.144,00**	**53.540.190.683,00**	**61.797.357.683,00**	**6.541.020.539,00**							**428.447.838.292,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan**				**100 %**	**100 %**	**44.102.280.465,00**	**42.761.384.004,00**	**42.401.323.911,00**	**372.884.595.481,00**							**416.986.875.946,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)*				3 Dokumen 4 Dokumen	3 Dokumen 4 Dokumen	1.531.897.106,00	1.514.517.106,00	1.239.749.218,01	-292.147.887,99			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	ASN Pertanian		1.685.086.816,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	842.723.106,00	832.295.106,00	751.114.239,00	-91.608.867,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			926.995.416,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	689.174.000,00	682.222.000,00	488.634.979,01	-200.539.020,99	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			758.091.400,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	37.378.370.448,00	36.103.517.987,00	36.068.190.987,00	-1.310.179.461,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	ASN Pertanian		409.662.074.928,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				302 Orang/ Bulan	302 Orang/ Bulan	37.228.370.448,00	35.958.731.987,00	35.958.731.987,00	-1.269.638.461,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			409.512.074.928,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	144.786.000,00	109.459.000,00	-40.541.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				30 Orang	30 Orang	150.158.000,00	150.158.000,00	56.458.000,00	-93.700.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	ASN Pertanian		165.173.800,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	150.158.000,00	150.158.000,00	56.458.000,00	-93.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			165.173.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				1 Paket	1 Paket	1.101.995.000,00	1.101.995.000,00	1.191.895.000,00	89.900.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	ASN Pertanian		1.146.194.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.101.995.000,00	1.101.995.000,00	1.191.895.000,00	89.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			1.146.194.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				1 Laporan	1 Laporan	3.939.859.911,00	3.891.195.911,00	3.845.030.705,99	-94.829.205,01			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	ASN Pertanian		4.328.345.902,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.055.599.811,00	2.027.791.811,00	2.000.310.806,00	-55.289.005,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			2.255.659.792,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Rasio pemanfaatan sarana alsintan terhadap ketersediaan alsintan**				**70 %**	**70 %**	**8.586.506.679,00**	**8.315.536.679,00**	**17.138.120.772,00**	**91.785.667,00**							**8.678.292.346,00**	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	*Jumlah Koordinasi dan Pengawasan Ketersediaan/ Peredaran Alsintan dan Sarana Pertanian lainnya*				2 Laporan	2 Laporan	1.366.003.872,00	1.324.291.872,00	1.022.393.792,00	-343.610.080,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Kelompok petani		1.502.604.259,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	2 Laporan	1.268.437.872,00	1.231.939.872,00	957.389.792,00	-311.048.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			1.395.281.659,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	97.566.000,00	92.352.000,00	65.004.000,00	-32.562.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			107.322.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Jumlah sertifikasi benih dan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman*				6 Laporan	6 Laporan	3.616.312.927,00	3.508.872.927,00	5.396.051.100,00	1.779.738.173,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Kelompok petani		3.482.944.219,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				6 laporan	6 laporan	2.654.458.927,00	2.597.104.927,00	4.528.508.850,00	1.874.049.923,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			2.424.904.819,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	*Jumlah Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain*				300 ekor 5 Ton	300 ekor 5 Ton	789.482.880,00	739.080.880,00	8.139.954.880,00	7.350.472.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Peternak		868.431.168,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.07.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain																		
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				5 Ton	5 Ton	138.612.000,00	131.660.000,00	93.079.000,00	-45.533.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			152.473.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				300 Ekor	300 Ekor	650.870.880,00	607.420.880,00	8.046.875.880,00	7.396.005.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			715.957.968,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Rasio kebutuhan sumber-sumber air pertanian terhadap total ketersediaan sumber air (%)**				**5,36 %**	**5,36 %**	**86.968.000,00**	**81.754.000,00**	**72.984.000,00**	**8.696.800,00**							**95.664.800,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani*				4 Dokumen	4 Dokumen	86.968.000,00	81.754.000,00	72.984.000,00	-13.984.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Kelompok petani		95.664.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				4 Dokumen	4 Dokumen	86.968.000,00	81.754.000,00	72.984.000,00	-13.984.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			95.664.800,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis**				**67,18 %**	**67,18 %**	**923.208.000,00**	**876.282.000,00**	**772.441.000,00**	**92.320.800,00**							**1.015.528.800,00**	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis*				1 Laporan	1 Laporan	710.472.000,00	668.760.000,00	590.000.000,00	-120.472.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Peternak		781.519.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	504.292.000,00	469.532.000,00	415.282.000,00	-89.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			554.721.200,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Kenaikan Jumlah SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya (%)**				**2 %**	**2 %**	**969.822.000,00**	**947.228.000,00**	**708.345.500,00**	**347.200,00**							**970.169.200,00**	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi*				90 Orang	90 Orang	198.646.000,00	193.432.000,00	116.060.000,00	-82.586.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Penyuluh Pertanian		218.510.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				90 Orang	90 Orang	198.646.000,00	193.432.000,00	116.060.000,00	-82.586.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			218.510.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Penerapan Penyuluhan Pertanian*				2 Dokumen	2 Dokumen	285.252.000,00	274.824.000,00	232.248.500,00	-53.003.500,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	kelompk Petani dan peternak		217.142.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				2 Dokumen	2 Dokumen	150.998.000,00	147.522.000,00	122.531.500,00	-28.466.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			69.462.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																		
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				65 Kelompok	65 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	*Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi*				1 Unit	1 Unit	485.924.000,00	478.972.000,00	360.037.000,00	-125.887.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	kelompk Petani dan peternak		534.516.400,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani																		
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				1 Unit	1 Unit	485.924.000,00	478.972.000,00	360.037.000,00	-125.887.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			534.516.400,00	DINAS PERTANIAN
		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN							**55.256.337.144,00**	**53.540.190.683,00**	**61.797.357.683,00**	**6.541.020.539,00**							**428.447.838.292,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**55.256.337.144,00**	**53.540.190.683,00**	**61.797.357.683,00**	**6.541.020.539,00**							**428.447.838.292,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**55.256.337.144,00**	**53.540.190.683,00**	**61.797.357.683,00**	**6.541.020.539,00**							**428.447.838.292,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan**				**100 %**	**100 %**	**44.102.280.465,00**	**42.761.384.004,00**	**42.401.323.911,00**	**372.884.595.481,00**							**416.986.875.946,00**	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				1 Laporan	1 Laporan	3.939.859.911,00	3.891.195.911,00	3.845.030.705,99	-94.829.205,01			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	ASN Pertanian		4.328.345.902,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	442.801.100,00	442.801.100,00	438.538.400,00	-4.262.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			487.081.210,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Rasio ketersediaan benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan terhadap total benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan yang dibutuhkan (%)**				**0,67 %**	**0,67 %**	**8.586.506.679,00**	**8.315.536.679,00**	**17.138.120.772,00**	**91.785.667,00**							**8.678.292.346,00**	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Jumlah sertifikasi benih dan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman*				9 Laporan	9 Laporan	3.616.312.927,00	3.508.872.927,00	5.396.051.100,00	1.779.738.173,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Kelompok petani		3.482.944.219,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih																		
			Jumlah Sertifikat Benih				3 Sertifikat	3 Sertifikat	150.966.000,00	140.538.000,00	140.608.000,00	-10.358.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			166.062.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				6 laporan	6 laporan	810.888.000,00	771.230.000,00	726.934.250,00	-83.953.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			891.976.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	*Jumlah Penilaian Terhadap SDG Tumbuhan/ Kultivar*				3 Laporan	3 Laporan	218.972.000,00	206.806.000,00	137.426.000,00	-81.546.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Kelompok petani		189.004.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme																		
			Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai				3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	218.972.000,00	206.806.000,00	137.426.000,00	-81.546.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			189.004.200,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**86.968.000,00**	**81.754.000,00**	**72.984.000,00**	**8.696.800,00**							**95.664.800,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	86.968.000,00	81.754.000,00	72.984.000,00	-13.984.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	-		95.664.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				50 Unit	50 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	DINAS PERTANIAN
		UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN							**55.256.337.144,00**	**53.540.190.683,00**	**61.797.357.683,00**	**6.541.020.539,00**							**428.447.838.292,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**55.256.337.144,00**	**53.540.190.683,00**	**61.797.357.683,00**	**6.541.020.539,00**							**428.447.838.292,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**55.256.337.144,00**	**53.540.190.683,00**	**61.797.357.683,00**	**6.541.020.539,00**							**428.447.838.292,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan**				**100 %**	**100 %**	**44.102.280.465,00**	**42.761.384.004,00**	**42.401.323.911,00**	**372.884.595.481,00**							**416.986.875.946,00**	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				1 Laporan	1 Laporan	3.939.859.911,00	3.891.195.911,00	3.845.030.705,99	-94.829.205,01			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	ASN Pertanian		4.328.345.902,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	428.300.500,00	426.562.500,00	424.581.499,99	-3.719.000,01	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			471.130.550,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Area Pertanian yang dikendalikan akibat serangan OPT dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap luas tanam**				**5 %**	**5 %**	**587.552.000,00**	**558.006.000,00**	**704.142.500,00**	**113.755.200,00**							**701.307.200,00**	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	*Jumlah Luas/Areal pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi*				279,655 Ha	279,655 Ha	587.552.000,00	558.006.000,00	704.142.500,00	116.590.500,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Kelompok petani		701.307.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				278,655 Ha	278,655 Ha	441.984.000,00	417.652.000,00	640.608.500,00	198.624.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			541.182.400,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				1000 Ha	1000 Ha	145.568.000,00	140.354.000,00	63.534.000,00	-82.034.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			160.124.800,00	DINAS PERTANIAN
		UPTD LABORATORIUM VETERINER							**55.256.337.144,00**	**53.540.190.683,00**	**61.797.357.683,00**	**6.541.020.539,00**							**428.447.838.292,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**55.256.337.144,00**	**53.540.190.683,00**	**61.797.357.683,00**	**6.541.020.539,00**							**428.447.838.292,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**55.256.337.144,00**	**53.540.190.683,00**	**61.797.357.683,00**	**6.541.020.539,00**							**428.447.838.292,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan**				**100 %**	**100 %**	**44.102.280.465,00**	**42.761.384.004,00**	**42.401.323.911,00**	**372.884.595.481,00**							**416.986.875.946,00**	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				1 Laporan	1 Laporan	3.939.859.911,00	3.891.195.911,00	3.845.030.705,99	-94.829.205,01			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	ASN Pertanian		4.328.345.902,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	191.674.500,00	191.674.500,00	188.206.300,00	-3.468.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			210.841.950,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penjaminan Pangan Asal Hewan (PAH) Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)**				**100 %**	**100 %**	**923.208.000,00**	**876.282.000,00**	**772.441.000,00**	**92.320.800,00**							**1.015.528.800,00**	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis*				1 Laporan	1 Laporan	710.472.000,00	668.760.000,00	590.000.000,00	-120.472.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Peternak		781.519.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				1 Wilayah	1 Wilayah	206.180.000,00	199.228.000,00	174.718.000,00	-31.462.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			226.798.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	*Jumlah Laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan*				1 Laporan	1 Laporan	212.736.000,00	207.522.000,00	182.441.000,00	-30.295.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Peternak		234.009.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				2 Dokumen	2 Dokumen	212.736.000,00	207.522.000,00	182.441.000,00	-30.295.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			234.009.600,00	DINAS PERTANIAN
		UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN							**55.256.337.144,00**	**53.540.190.683,00**	**61.797.357.683,00**	**6.541.020.539,00**							**428.447.838.292,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**55.256.337.144,00**	**53.540.190.683,00**	**61.797.357.683,00**	**6.541.020.539,00**							**428.447.838.292,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**55.256.337.144,00**	**53.540.190.683,00**	**61.797.357.683,00**	**6.541.020.539,00**							**428.447.838.292,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan**				**100 %**	**100 %**	**44.102.280.465,00**	**42.761.384.004,00**	**42.401.323.911,00**	**372.884.595.481,00**							**416.986.875.946,00**	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				1 Laporan	1 Laporan	3.939.859.911,00	3.891.195.911,00	3.845.030.705,99	-94.829.205,01			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	ASN Pertanian		4.328.345.902,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	276.934.000,00	269.982.000,00	264.485.700,00	-12.448.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			304.627.400,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**969.822.000,00**	**947.228.000,00**	**708.345.500,00**	**347.200,00**							**970.169.200,00**	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Penerapan Penyuluhan Pertanian*				2 Dokumen	2 Dokumen	285.252.000,00	274.824.000,00	232.248.500,00	-53.003.500,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Penyuluh Pertanian		217.142.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				2 Dokumen	2 Dokumen	134.254.000,00	127.302.000,00	109.717.000,00	-24.537.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			147.679.400,00	DINAS PERTANIAN
		UPTD BALAI PERBIBITAN TERNAK							**55.256.337.144,00**	**53.540.190.683,00**	**61.797.357.683,00**	**6.541.020.539,00**							**428.447.838.292,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**55.256.337.144,00**	**53.540.190.683,00**	**61.797.357.683,00**	**6.541.020.539,00**							**428.447.838.292,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**55.256.337.144,00**	**53.540.190.683,00**	**61.797.357.683,00**	**6.541.020.539,00**							**428.447.838.292,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan**				**100 %**	**100 %**	**44.102.280.465,00**	**42.761.384.004,00**	**42.401.323.911,00**	**372.884.595.481,00**							**416.986.875.946,00**	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				1 Laporan	1 Laporan	3.939.859.911,00	3.891.195.911,00	3.845.030.705,99	-94.829.205,01			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	ASN Pertanian		4.328.345.902,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	544.550.000,00	532.384.000,00	528.908.000,00	-15.642.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			599.005.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**umlah kelahiran ternak**				**11860 Ekor**	**11860 Ekor**	**8.586.506.679,00**	**8.315.536.679,00**	**17.138.120.772,00**	**91.785.667,00**							**8.678.292.346,00**	
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Jumlah Pengendalian, Pengawasan dan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Pakan Ternak*				2 Laporan	2 Laporan	2.595.735.000,00	2.536.485.000,00	2.442.295.000,00	-153.440.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Peternak		2.635.308.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				2 laporan	2 laporan	2.595.735.000,00	2.536.485.000,00	2.442.295.000,00	-153.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			2.635.308.500,00	DINAS PERTANIAN
		BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							**107.765.581.439,00**	**106.113.859.109,00**	**103.156.243.167,00**	**-4.609.338.272,00**							**143.483.140.335,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**107.765.581.439,00**	**106.113.859.109,00**	**103.156.243.167,00**	**-4.609.338.272,00**							**143.483.140.335,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**107.765.581.439,00**	**106.113.859.109,00**	**103.156.243.167,00**	**-4.609.338.272,00**							**143.483.140.335,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**LKIP Biro IKM Biro**				**1 undefined Laporan undefined**	**1 undefined Laporan undefined**	**80.168.281.939,00**	**78.518.499.609,00**	**78.048.622.171,00**	**14.631.280.836,00**							**94.799.562.775,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluating Kinerja Perangkat Daerah*				6 Dok	6 Dok	1.424.662.085,00	1.402.944.085,00	842.243.335,00	-582.418.750,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		1.150.564.710,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	221.510.037,00	221.510.037,00	99.620.037,00	-121.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			313.742.043,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				100 %	100 %	32.104.131.804,00	31.118.209.474,00	31.034.565.974,00	-1.069.565.830,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		25.985.709.874,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/ Bulan	33 Orang/ Bulan	4.747.180.777,00	4.607.519.106,00	4.607.519.106,00	-139.661.671,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			7.510.049.515,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				15 Orang	15 Orang	708.964.960,00	708.964.960,00	346.504.300,00	-362.460.660,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		986.192.189,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	167.932.000,00	167.932.000,00	60.791.000,00	-107.141.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			234.288.210,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				100 %	100 %	6.118.108.200,00	6.048.694.200,00	8.238.604.670,00	2.120.496.470,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		4.782.126.098,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	667.430.000,00	667.430.000,00	308.172.000,00	-359.258.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			678.465.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	6.737.485.671,00	6.526.075.671,00	6.312.748.952,00	-424.736.719,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		5.844.517.248,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	463.956.531,00	437.496.531,00	440.040.112,00	-23.916.419,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			652.757.288,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Presentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**1.962.960.232,00**	**1.962.960.232,00**	**1.158.597.926,00**	**3.935.341.861,00**							**5.898.302.093,00**	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Tugas Pemerintahan*				9 Dok	9 Dok	708.645.700,00	708.645.700,00	344.366.700,00	-364.279.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		1.431.544.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	102.800.000,00	102.800.000,00	53.598.000,00	-49.202.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			484.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				6 Dokumen	6 Dokumen	237.409.700,00	237.409.700,00	136.284.700,00	-101.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			524.044.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				2 Dokumen	2 Dokumen	368.436.000,00	368.436.000,00	154.484.000,00	-213.952.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			423.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah*				7 Dok	7 Dok	752.714.532,00	752.714.532,00	460.284.576,00	-292.429.956,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		2.107.258.093,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	415.302.256,00	415.302.256,00	198.128.300,00	-217.173.956,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			897.258.093,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	41.809.000,00	41.809.000,00	29.490.000,00	-12.319.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			242.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	295.603.276,00	295.603.276,00	232.666.276,00	-62.937.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			968.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah*				20 Kerja Sama	20 Kerja Sama	501.600.000,00	501.600.000,00	353.946.650,00	-147.653.350,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		2.359.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah																		
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				5 Dokumen	5 Dokumen	152.845.000,00	152.845.000,00	95.092.300,00	-57.752.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			907.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta																		
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				3 Dokumen	3 Dokumen	103.723.000,00	103.723.000,00	61.052.000,00	-42.671.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			726.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				5 Laporan	5 Laporan	245.032.000,00	245.032.000,00	197.802.350,00	-47.229.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			726.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Presentase Lembaga Bina Mental Spritual yang ditingkatkan kapasitasnya**				**100 %**	**100 %**	**17.391.826.200,00**	**17.391.826.200,00**	**18.153.200.114,00**	**20.861.857.317,00**							**38.253.683.517,00**	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	*Jumlah Lembaga Bina Mental Spritual*				1 Unit 300 Lembaga	1 Unit 300 Lembaga	13.601.421.686,00	13.601.421.686,00	13.024.684.600,00	-576.737.086,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		26.905.870.247,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	878.205.700,00	878.205.700,00	774.123.700,00	-104.082.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			1.058.373.127,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual																		
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				300 Lembaga	300 Lembaga	12.723.215.986,00	12.723.215.986,00	12.250.560.900,00	-472.655.086,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			25.847.497.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Kesra Pelayanan Dasar*				800 Dok	800 Dok	3.690.404.514,00	3.690.404.514,00	5.084.694.514,00	1.394.290.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		11.140.457.189,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				800 Dokumen	800 Dokumen	3.690.404.514,00	3.690.404.514,00	5.084.694.514,00	1.394.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			11.140.457.189,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar*				1 Dok	1 Dok	100.000.000,00	100.000.000,00	43.821.000,00	-56.179.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		207.356.081,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	43.821.000,00	-56.179.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			207.356.081,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO HUKUM							**107.765.581.439,00**	**106.113.859.109,00**	**103.156.243.167,00**	**-4.609.338.272,00**							**143.483.140.335,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**107.765.581.439,00**	**106.113.859.109,00**	**103.156.243.167,00**	**-4.609.338.272,00**							**143.483.140.335,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**107.765.581.439,00**	**106.113.859.109,00**	**103.156.243.167,00**	**-4.609.338.272,00**							**143.483.140.335,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**LAKIP Biro IKM Biro**				**1 80 laporan**	**1 80 laporan**	**80.168.281.939,00**	**78.518.499.609,00**	**78.048.622.171,00**	**14.631.280.836,00**							**94.799.562.775,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Dok	4 Dok	1.424.662.085,00	1.402.944.085,00	842.243.335,00	-582.418.750,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.150.564.710,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	155.796.000,00	155.796.000,00	95.521.000,00	-60.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			158.873.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	128.077.100,00	128.077.100,00	57.044.100,00	-71.033.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			128.078.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	138.157.000,00	138.157.000,00	77.341.000,00	-60.816.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			138.193.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Lap	1 Lap	32.104.131.804,00	31.118.209.474,00	31.034.565.974,00	-1.069.565.830,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		25.985.709.874,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/ Bulan	30 Orang/ Bulan	3.443.182.398,00	3.317.915.214,00	3.317.915.214,00	-125.267.184,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			3.444.912.628,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	97.455.000,00	97.455.000,00	70.383.000,00	-27.072.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			98.234.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan Pengadaan pakaian dinas*				46 orang	46 orang	708.964.960,00	708.964.960,00	346.504.300,00	-362.460.660,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		986.192.189,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	25.750.000,00	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			25.730.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	150.039.980,00	150.039.980,00	65.025.320,00	-85.014.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			152.873.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dan Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi* *undefined*				1 Lap 1 Paket	1 Lap 1 Paket	6.118.108.200,00	6.048.694.200,00	8.238.604.670,00	2.120.496.470,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		4.782.126.098,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.637.000,00	23.637.000,00	14.781.000,00	-8.856.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			23.678.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	538.895.000,00	538.895.000,00	239.645.000,00	-299.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			564.670.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang di adakan*				4 Unit	4 Unit	823.582.000,00	866.714.000,00	159.623.000,00	-663.959.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		731.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	635.823.000,00	635.823.000,00	0,00	-635.823.000,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			659.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	71.268.000,00	71.268.000,00	0,00	-71.268.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi				72.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	6.737.485.671,00	6.526.075.671,00	6.312.748.952,00	-424.736.719,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		5.844.517.248,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	137.080.000,00	128.940.000,00	96.740.000,00	-40.340.000,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi				112.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera*				2 Unit	2 Unit	5.365.722.394,00	5.312.122.394,00	5.973.126.673,00	607.404.279,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		5.304.023.358,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	115.096.000,00	115.096.000,00	115.096.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi				116.288.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	29.280.000,00	29.280.000,00	29.280.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi				29.952.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Persentase Produk Hukum yang difasilitasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.116.720.800,00**	**3.106.160.800,00**	**2.496.615.800,00**	**-35.128.850,00**							**3.081.591.950,00**	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	*Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perundang Undangan*				100 Persen	100 Persen	1.556.654.450,00	1.546.094.450,00	1.133.282.450,00	-423.372.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.543.337.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan																		
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				60 Dokumen	60 Dokumen	413.595.900,00	410.955.900,00	336.186.900,00	-77.409.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi				413.596.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan																		
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				300 Dokumen	300 Dokumen	118.466.050,00	115.826.050,00	88.418.050,00	-30.048.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi				118.466.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya																		
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				360 Dokumen	360 Dokumen	301.578.500,00	298.938.500,00	157.423.500,00	-144.155.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi				301.579.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				60 Dokumen	60 Dokumen	723.014.000,00	720.374.000,00	551.254.000,00	-171.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			709.695.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Fasilitas Bantuan Hukum*				100 Persen	100 Persen	1.560.066.350,00	1.560.066.350,00	1.363.333.350,00	-196.733.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat Miskin		1.538.254.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum																		
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				6 Kasus	6 Kasus	910.020.000,00	910.020.000,00	803.598.000,00	-106.422.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			888.076.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM																		
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				6 Kasus	6 Kasus	650.046.350,00	650.046.350,00	559.735.350,00	-90.311.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			650.178.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN							**107.765.581.439,00**	**106.113.859.109,00**	**103.156.243.167,00**	**-4.609.338.272,00**							**143.483.140.335,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**107.765.581.439,00**	**106.113.859.109,00**	**103.156.243.167,00**	**-4.609.338.272,00**							**143.483.140.335,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**107.765.581.439,00**	**106.113.859.109,00**	**103.156.243.167,00**	**-4.609.338.272,00**							**143.483.140.335,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**LAKIP Biro IKM Biro**				**1 80 Laporan**	**1 80 Laporan**	**80.168.281.939,00**	**78.518.499.609,00**	**78.048.622.171,00**	**14.631.280.836,00**							**94.799.562.775,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	1.424.662.085,00	1.402.944.085,00	842.243.335,00	-582.418.750,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo		1.150.564.710,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	209.241.748,00	187.523.748,00	94.479.748,00	-114.762.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan SKPD*				100 %	100 %	32.104.131.804,00	31.118.209.474,00	31.034.565.974,00	-1.069.565.830,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia	Seluruh ASN Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo		25.985.709.874,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan	3.078.158.897,00	2.980.658.897,00	2.980.658.897,00	-97.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan dan Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				1 Paket	1 Paket	708.964.960,00	708.964.960,00	346.504.300,00	-362.460.660,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Seluruh ASN Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo		986.192.189,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				16 Orang	16 Orang	45.546.000,00	45.546.000,00	22.773.000,00	-22.773.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyelenggaraan Rapat SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*				1 Paket	1 Paket	6.118.108.200,00	6.048.694.200,00	8.238.604.670,00	2.120.496.470,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo		4.782.126.098,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.418.000,00	16.418.000,00	16.418.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	320.933.000,00	297.279.000,00	158.139.560,00	-162.793.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	48.000.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	-45.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional serta Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	823.582.000,00	866.714.000,00	159.623.000,00	-663.959.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan		731.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	39.514.000,00	39.514.000,00	39.514.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	76.977.000,00	120.109.000,00	120.109.000,00	43.132.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jasa yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	6.737.485.671,00	6.526.075.671,00	6.312.748.952,00	-424.736.719,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo		5.844.517.248,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	83.211.000,00	83.211.000,00	83.211.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	312.840.000,00	315.810.000,00	315.810.000,00	2.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				25 Unit	25 Unit	5.365.722.394,00	5.312.122.394,00	5.973.126.673,00	607.404.279,00			-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	Pengguna Barang dan Jasa, Unit Kerja Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo		5.304.023.358,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	105.486.000,00	105.486.000,00	105.486.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	13.590.000,00	13.590.000,00	13.590.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ekonomi Strategis**				**100 %**	**100 %**	**2.179.042.550,00**	**2.179.042.550,00**	**1.402.375.670,00**	**-2.179.042.550,00**							**0,00**	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro*				8 Dokumend	8 Dokumend	1.474.990.000,00	1.474.990.000,00	854.169.060,00	-620.820.940,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Seluruh OPD dan Masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				4 Dokumen	4 Dokumen	724.990.000,00	724.990.000,00	672.698.000,00	-52.292.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				4 Dokumen	4 Dokumen	750.000.000,00	750.000.000,00	181.471.060,00	-568.528.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan*				4 Dok	4 Dok	90.000.000,00	90.000.000,00	57.613.000,00	-32.387.000,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Seluruh OPD dan Masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				4 Dokumen	4 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	57.613.000,00	-32.387.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan, Aneka Usaha dan Pendirian BLUD*				8 Dokumen	8 Dokumen	614.052.550,00	614.052.550,00	490.593.610,00	-123.458.940,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Seluruh OPD dan Masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	134.449.030,00	-65.550.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	414.052.550,00	414.052.550,00	356.144.580,00	-57.907.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Persentase Monitoring dan Evaluasi Kegaiatan Strategis**				**100 %**	**100 %**	**672.910.318,00**	**691.870.318,00**	**520.496.878,00**	**-672.910.318,00**							**0,00**	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD,APBN dan Wilayah*				12 Lap	12 Lap	659.230.318,00	678.190.318,00	506.816.878,00	-152.413.440,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	Seluruh OPD dan Masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				4 Laporan	4 Laporan	373.480.318,00	421.480.318,00	309.334.318,00	-64.146.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				4 Laporan	4 Laporan	197.400.000,00	168.360.000,00	135.834.060,00	-61.565.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				4 Laporan	4 Laporan	88.350.000,00	88.350.000,00	61.648.500,00	-26.701.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah*				1 Dok	1 Dok	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00			-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA							**107.765.581.439,00**	**106.113.859.109,00**	**103.156.243.167,00**	**-4.609.338.272,00**							**143.483.140.335,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**107.765.581.439,00**	**106.113.859.109,00**	**103.156.243.167,00**	**-4.609.338.272,00**							**143.483.140.335,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**107.765.581.439,00**	**106.113.859.109,00**	**103.156.243.167,00**	**-4.609.338.272,00**							**143.483.140.335,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**80.168.281.939,00**	**78.518.499.609,00**	**78.048.622.171,00**	**14.631.280.836,00**							**94.799.562.775,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	1.424.662.085,00	1.402.944.085,00	842.243.335,00	-582.418.750,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		1.150.564.710,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	168.181.500,00	168.181.500,00	133.952.750,00	-34.228.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	32.104.131.804,00	31.118.209.474,00	31.034.565.974,00	-1.069.565.830,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		25.985.709.874,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/ Bulan	37 Orang/ Bulan	6.390.844.564,00	6.194.935.470,00	6.194.935.470,00	-195.909.094,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	708.964.960,00	708.964.960,00	346.504.300,00	-362.460.660,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		986.192.189,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	22.522.000,00	22.522.000,00	0,00	-22.522.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*				1 Paket	1 Paket	6.118.108.200,00	6.048.694.200,00	8.238.604.670,00	2.120.496.470,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		4.782.126.098,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	275.858.000,00	275.858.000,00	75.082.000,00	-200.776.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	6.737.485.671,00	6.526.075.671,00	6.312.748.952,00	-424.736.719,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		5.844.517.248,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	708.006.095,00	685.236.095,00	618.665.795,00	-89.340.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**Tingkat kematangan UKPBJ**				**1/9 Level Strategis**	**1/9 Level Strategis**	**1.248.437.100,00**	**1.238.097.100,00**	**663.559.808,00**	**-1.248.437.100,00**							**0,00**	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Presentase Penyelenggaraan PBJ*				100 %	100 %	761.815.100,00	756.755.100,00	351.833.358,00	-409.981.742,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, UKPBJ, dan Perangkat Daerah Pemprov Gorontalo		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	133.365.000,00	133.365.000,00	85.445.640,00	-47.919.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	408.623.100,00	408.623.100,00	143.236.718,00	-265.386.382,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	219.827.000,00	214.767.000,00	123.151.000,00	-96.676.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Presentase Layanan SPSE dan Pengembangan Sistem Informasi*				100 %	100 %	187.159.000,00	187.159.000,00	93.832.750,00	-93.326.250,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, UKPBJ, dan Perangkat Daerah Pemprov Gorontalo		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	63.102.000,00	63.102.000,00	32.340.550,00	-30.761.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	85.398.000,00	85.398.000,00	37.383.000,00	-48.015.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	38.659.000,00	38.659.000,00	24.109.200,00	-14.549.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Presentase Pendampingan, Pembinaan SDM dan Advokasi PBJ*				100 %	100 %	299.463.000,00	294.183.000,00	217.893.700,00	-81.569.300,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pengguna Barang dan Jasa, UKPBJ, dan Perangkat Daerah Pemprov Gorontalo		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				35 Orang	35 Orang	121.692.000,00	121.692.000,00	90.840.200,00	-30.851.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	118.969.000,00	113.689.000,00	95.689.000,00	-23.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	58.802.000,00	58.802.000,00	31.364.500,00	-27.437.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO ORGANISASI							**107.765.581.439,00**	**106.113.859.109,00**	**103.156.243.167,00**	**-4.609.338.272,00**							**143.483.140.335,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**107.765.581.439,00**	**106.113.859.109,00**	**103.156.243.167,00**	**-4.609.338.272,00**							**143.483.140.335,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**107.765.581.439,00**	**106.113.859.109,00**	**103.156.243.167,00**	**-4.609.338.272,00**							**143.483.140.335,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**LAKIP BIRO IKM BIRO**				**1 80 Laporan %**	**1 80 Laporan %**	**80.168.281.939,00**	**78.518.499.609,00**	**78.048.622.171,00**	**14.631.280.836,00**							**94.799.562.775,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah*				5 dok, 8 lap Dok/lap	5 dok, 8 lap Dok/lap	1.424.662.085,00	1.402.944.085,00	842.243.335,00	-582.418.750,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Setda provinsi gorontalo		1.150.564.710,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	218.757.000,00	218.757.000,00	149.869.000,00	-68.888.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi keuangan*				32 orang, 12 lap orang/lap	32 orang, 12 lap orang/lap	32.104.131.804,00	31.118.209.474,00	31.034.565.974,00	-1.069.565.830,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Setda provinsi gorontalo		25.985.709.874,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/ Bulan	32 Orang/ Bulan	3.625.481.025,00	3.516.613.025,00	3.516.613.025,00	-108.868.000,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	80.986.500,00	80.986.500,00	48.026.000,00	-32.960.500,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				12 orang	12 orang	708.964.960,00	708.964.960,00	346.504.300,00	-362.460.660,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Setda provinsi gorontalo		986.192.189,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket 12 Lap	3 Paket 12 Lap	6.118.108.200,00	6.048.694.200,00	8.238.604.670,00	2.120.496.470,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Setda provinsi gorontalo		4.782.126.098,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	702.372.200,00	702.372.200,00	702.372.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				6 Laporan	6 Laporan	6.737.485.671,00	6.526.075.671,00	6.312.748.952,00	-424.736.719,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Setda provinsi gorontalo		5.844.517.248,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	646.912.085,00	608.852.085,00	554.602.085,00	-92.310.000,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran Persentase PD dengan tingkat Nilai SAKIP dengan Kategori Baik (BB) Persentase PD yang telah mengimplementasikan RB>Baik**				**100 75,01 78,50 % % %**	**100 75,01 78,50 % % %**	**1.025.402.300,00**	**1.025.402.300,00**	**712.774.800,00**	**424.597.700,00**							**1.450.000.000,00**	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah PD Kab/kota yang dievaluasi kelembagananya Jumlah PD yang di tata kelembagaannya Persentase PD yang telah menyusun Anjab yang sesuai dengan struktur Organisasi yang berlaku*				100 % 29 OPD 6 Kab/kota	100 % 29 OPD 6 Kab/kota	388.871.500,00	388.871.500,00	251.253.000,00	-137.618.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi, Kab/Kota		650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				8 Dokumen	8 Dokumen	180.805.000,00	180.805.000,00	113.872.500,00	-66.932.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				8 Dokumen	8 Dokumen	208.066.500,00	208.066.500,00	137.380.500,00	-70.686.000,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	*JJumlah PD dan Kab/Kota dengan Predikat AKIP Baik Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Sesuai Ketentuan Jumlah PD dan Kab/Kota yang menerapkan RB dengan kategori baik Jumlah PD yang menerapkan aspek Pelayanan Publik Jumlah PD yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintah*				29 PD 6 Kab/kota	29 PD 6 Kab/kota	636.530.800,00	636.530.800,00	461.521.800,00	-175.009.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi, Kab/Kota		800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				33 Dokumen	33 Dokumen	172.153.500,00	172.153.500,00	132.044.000,00	-40.109.500,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				34 Dokumen	34 Dokumen	185.729.100,00	185.729.100,00	153.650.600,00	-32.078.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	108.669.200,00	108.669.200,00	70.931.200,00	-37.738.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				7 Dokumen	7 Dokumen	169.979.000,00	169.979.000,00	104.896.000,00	-65.083.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO UMUM							**107.765.581.439,00**	**106.113.859.109,00**	**103.156.243.167,00**	**-4.609.338.272,00**							**143.483.140.335,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**107.765.581.439,00**	**106.113.859.109,00**	**103.156.243.167,00**	**-4.609.338.272,00**							**143.483.140.335,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**107.765.581.439,00**	**106.113.859.109,00**	**103.156.243.167,00**	**-4.609.338.272,00**							**143.483.140.335,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**LAKIP Biro IKM Biro**				**1 80 Laporan**	**1 80 Laporan**	**80.168.281.939,00**	**78.518.499.609,00**	**78.048.622.171,00**	**14.631.280.836,00**							**94.799.562.775,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				3 Lap 8 Dok	3 Lap 8 Dok	1.424.662.085,00	1.402.944.085,00	842.243.335,00	-582.418.750,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		1.150.564.710,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	126.141.700,00	126.141.700,00	75.615.700,00	-50.526.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			139.571.704,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	50.400.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			22.106.063,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	32.104.131.804,00	31.118.209.474,00	31.034.565.974,00	-1.069.565.830,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		25.985.709.874,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/ Bulan	85 Orang/ Bulan	10.516.760.643,00	10.198.044.262,00	10.198.044.262,00	-318.716.381,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			10.701.031.235,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	115.682.000,00	115.682.000,00	92.071.000,00	-23.611.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			141.481.796,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				1 Lap	1 Lap	159.982.400,00	159.982.400,00	122.167.400,00	-37.815.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		207.133.271,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	159.982.400,00	159.982.400,00	122.167.400,00	-37.815.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			207.133.271,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				20 orang	20 orang	708.964.960,00	708.964.960,00	346.504.300,00	-362.460.660,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		986.192.189,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	279.674.980,00	279.674.980,00	154.664.980,00	-125.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			223.300.379,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang Disediakan*				22 Paket	22 Paket	6.118.108.200,00	6.048.694.200,00	8.238.604.670,00	2.120.496.470,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		4.782.126.098,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	3.524.565.000,00	3.524.565.000,00	6.721.754.910,00	3.197.189.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			2.815.311.598,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Lap	1 Lap	6.737.485.671,00	6.526.075.671,00	6.312.748.952,00	-424.736.719,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		5.844.517.248,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.385.479.960,00	4.266.529.960,00	4.203.679.960,00	-181.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			4.429.679.960,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				30 Unit	30 Unit	5.365.722.394,00	5.312.122.394,00	5.973.126.673,00	607.404.279,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		5.304.023.358,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	1.224.258.400,00	1.224.258.400,00	1.224.258.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			1.178.856.749,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	3.867.511.994,00	3.813.911.994,00	4.474.916.273,00	607.404.279,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			3.978.926.009,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang dan Paket Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				1 Paket 6 Orang	1 Paket 6 Orang	2.066.876.510,00	2.066.876.510,00	1.947.231.645,00	-119.644.865,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		2.067.876.510,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	323.676.510,00	323.676.510,00	323.676.510,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			323.676.510,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	393.200.000,00	393.200.000,00	465.000.000,00	71.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			394.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.008.555.135,00	-241.444.865,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekertariat Daerah yang disediakan*				36 Paket	36 Paket	23.423.903.825,00	23.073.053.825,00	22.217.046.132,00	-1.206.857.693,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		46.173.178.688,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.691.747.616,00	7.558.697.616,00	7.215.791.923,00	-475.955.693,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			8.325.980.616,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.405.507.500,00	6.307.857.500,00	6.495.144.000,00	89.636.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			7.499.477.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.326.648.709,00	9.206.498.709,00	8.506.110.209,00	-820.538.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			30.347.720.572,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan*				3 Lap	3 Lap	1.234.862.090,00	1.234.862.090,00	854.760.090,00	-380.102.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo		1.567.140.829,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1 Laporan	1 Laporan	436.031.500,00	436.031.500,00	436.031.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			564.967.499,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	494.668.000,00	494.668.000,00	247.296.000,00	-247.372.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			614.514.572,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	304.162.590,00	304.162.590,00	171.432.590,00	-132.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			387.658.758,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BADAN PENGHUBUNG							**8.379.147.605,00**	**8.105.307.605,00**	**7.975.665.605,00**	**-403.482.000,00**							**8.828.554.984,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.379.147.605,00**	**8.105.307.605,00**	**7.975.665.605,00**	**-403.482.000,00**							**8.828.554.984,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**							**8.379.147.605,00**	**8.105.307.605,00**	**7.975.665.605,00**	**-403.482.000,00**							**8.828.554.984,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**7.051.501.473,00**	**6.795.301.473,00**	**6.775.017.473,00**	**353.249.675,00**							**7.404.751.148,00**	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	5.459.887.451,00	5.203.687.451,00	5.203.687.451,00	-256.200.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		5.418.256.438,00	BADAN PENGHUBUNG
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/ Bulan	25 Orang/ Bulan	3.239.014.227,00	3.147.014.227,00	3.147.014.227,00	-92.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			3.400.964.938,00	BADAN PENGHUBUNG
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	2.195.923.224,00	2.031.723.224,00	2.031.723.224,00	-164.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			1.991.094.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	24.950.000,00	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			26.197.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.042.814.022,00	1.042.814.022,00	1.022.530.022,00	-20.284.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		1.182.404.710,00	BADAN PENGHUBUNG
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	921.678.022,00	921.678.022,00	921.678.022,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			962.941.875,00	BADAN PENGHUBUNG
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	121.136.000,00	121.136.000,00	100.852.000,00	-20.284.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			219.462.835,00	BADAN PENGHUBUNG
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	548.800.000,00	548.800.000,00	548.800.000,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		804.090.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	548.800.000,00	548.800.000,00	548.800.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			804.090.000,00	BADAN PENGHUBUNG
2.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**				**100 %**	**100 %**	**1.327.646.132,00**	**1.310.006.132,00**	**1.200.648.132,00**	**96.157.704,00**							**1.423.803.836,00**	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penghubung*				100 %	100 %	1.327.646.132,00	1.310.006.132,00	1.200.648.132,00	-126.998.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		1.423.803.836,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	449.990.000,00	449.990.000,00	370.030.000,00	-79.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			472.489.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				2 Laporan	2 Laporan	113.226.958,00	113.226.958,00	103.226.958,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			148.663.704,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				10 Laporan	10 Laporan	764.429.174,00	746.789.174,00	727.391.174,00	-37.038.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			802.650.632,00	BADAN PENGHUBUNG
		SEKRETARIAT DPRD							**93.444.246.843,00**	**93.473.006.842,00**	**75.706.681.842,00**	**-17.737.565.001,00**							**98.444.246.843,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**93.444.246.843,00**	**93.473.006.842,00**	**75.706.681.842,00**	**-17.737.565.001,00**							**98.444.246.843,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**93.444.246.843,00**	**93.473.006.842,00**	**75.706.681.842,00**	**-17.737.565.001,00**							**98.444.246.843,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Peningkatan layanan administrasi ,Sarana Prasarana dan SDM Aparatur**				**100 %**	**100 %**	**45.706.428.994,00**	**45.735.188.993,00**	**44.775.057.993,00**	**1.050.000.000,00**							**46.756.428.994,00**	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				6 laporan	6 laporan	374.861.900,00	374.861.900,00	227.247.900,00	-147.614.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		458.941.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	374.861.900,00	374.861.900,00	227.247.900,00	-147.614.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			458.941.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Administrasi dan Keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				3 dok 71 Org/Bln	3 dok 71 Org/Bln	8.693.702.956,00	8.458.702.955,00	8.355.726.955,00	-337.976.001,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		8.693.702.956,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	8.343.702.956,00	8.108.702.955,00	8.108.702.955,00	-235.000.001,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			8.343.702.956,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	247.024.000,00	-102.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				10 org	10 org	783.954.400,00	783.954.400,00	468.670.400,00	-315.284.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		783.954.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	783.954.400,00	783.954.400,00	468.670.400,00	-315.284.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			783.954.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				14 paket	14 paket	3.882.585.767,00	3.882.585.767,00	3.711.604.767,00	-170.981.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		4.432.585.767,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	3.882.585.767,00	3.882.585.767,00	3.711.604.767,00	-170.981.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			4.432.585.767,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 laporan	1 laporan	4.395.692.900,00	4.254.452.900,00	4.212.452.900,00	-183.240.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		4.485.692.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.395.692.900,00	4.254.452.900,00	4.212.452.900,00	-183.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			4.485.692.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*				45 org/bln	45 org/bln	25.680.040.382,00	26.085.040.382,00	26.053.333.382,00	373.293.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		25.680.040.382,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	25.349.106.332,00	25.754.106.332,00	25.754.106.332,00	405.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			25.349.106.332,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	330.934.050,00	330.934.050,00	299.227.050,00	-31.707.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			330.934.050,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*				40 laporan	40 laporan	1.895.590.689,00	1.895.590.689,00	1.746.021.689,00	-149.569.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		2.221.510.689,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				40 Laporan	40 Laporan	1.895.590.689,00	1.895.590.689,00	1.746.021.689,00	-149.569.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			2.221.510.689,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD**				**100 %**	**100 %**	**47.737.817.849,00**	**47.737.817.849,00**	**30.931.623.849,00**	**3.950.000.000,00**							**51.687.817.849,00**	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda*				5 dok	5 dok	4.877.969.350,00	4.877.969.350,00	3.015.818.350,00	-1.862.151.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		5.877.969.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				5 Dokumen	5 Dokumen	4.877.969.350,00	4.877.969.350,00	3.015.818.350,00	-1.862.151.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			5.877.969.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan* *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*				24 dok 8 dok	24 dok 8 dok	19.996.376.199,00	19.996.376.199,00	11.352.730.699,00	-8.643.645.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		21.496.376.199,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				24 Dokumen	24 Dokumen	17.864.261.599,00	17.864.261.599,00	9.469.214.099,00	-8.395.047.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			18.864.261.599,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				8 Dokumen	8 Dokumen	2.132.114.600,00	2.132.114.600,00	1.883.516.600,00	-248.598.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			2.632.114.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses* *Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*				3 dok 96 laporan	3 dok 96 laporan	21.445.050.111,00	21.445.050.111,00	15.332.902.611,00	-6.112.147.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		22.895.050.111,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				96 Laporan	96 Laporan	12.267.713.228,00	12.267.713.228,00	6.152.030.728,00	-6.115.682.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			13.267.713.228,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	9.177.336.883,00	9.177.336.883,00	9.180.871.883,00	3.535.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			9.627.336.883,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*				20 dok	20 dok	1.418.422.189,00	1.418.422.189,00	1.230.172.189,00	-188.250.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		1.418.422.189,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				20 Dokumen	20 Dokumen	1.418.422.189,00	1.418.422.189,00	1.230.172.189,00	-188.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			1.418.422.189,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							**21.021.672.505,00**	**20.650.510.407,00**	**18.473.402.207,00**	**-2.548.270.298,00**							**21.694.974.894,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**21.021.672.505,00**	**20.650.510.407,00**	**18.473.402.207,00**	**-2.548.270.298,00**							**21.694.974.894,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**19.971.674.305,00**	**19.608.212.207,00**	**17.608.354.007,00**	**-2.363.320.298,00**							**20.544.974.894,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Dukungan Manajemen Urusan Pemerintahan**				**100 %**	**100 %**	**15.522.041.998,00**	**15.197.959.900,00**	**14.648.287.300,00**	**587.932.896,00**							**16.109.974.894,00**	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Monitoring dan Evaluasi*				100 %	100 %	1.379.418.000,00	1.379.418.000,00	1.111.937.400,00	-267.480.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Aparat BAPPPEDA		1.400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	886.223.000,00	886.223.000,00	765.553.400,00	-120.669.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	493.195.000,00	493.195.000,00	346.384.000,00	-146.811.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah dokumen laporan administrasi dan keuangan serta Ketersediaan Gaji & Tunjangan ASN*				100 %	100 %	10.660.215.198,00	10.384.313.100,00	10.329.379.100,00	-330.836.098,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Aparat BAPPPEDA		11.709.974.894,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79 Orang/ Bulan	79 Orang/ Bulan	10.560.215.198,00	10.284.313.100,00	10.284.313.100,00	-275.902.098,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			11.609.974.894,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	45.066.000,00	-54.934.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/ kompetensinya melalui diklat/bimtek*				100 %	100 %	220.468.000,00	220.468.000,00	193.250.000,00	-27.218.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Aparat BAPPPEDA		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				79 Orang	79 Orang	220.468.000,00	220.468.000,00	193.250.000,00	-27.218.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran (jumlah/unit)*				100 %	100 %	1.898.826.800,00	1.898.826.800,00	1.698.786.800,00	-200.040.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Aparat BAPPPEDA		1.650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	9 Paket	1.898.826.800,00	1.898.826.800,00	1.698.786.800,00	-200.040.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi				1.650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya layanan dan manajemen administrasi perkantoran*				100 %	100 %	1.363.114.000,00	1.314.934.000,00	1.314.934.000,00	-48.180.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Aparat BAPPPEDA		1.200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.363.114.000,00	1.314.934.000,00	1.314.934.000,00	-48.180.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi				1.200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan**				**100 %**	**100 %**	**1.449.662.100,00**	**1.439.102.100,00**	**1.248.470.100,00**	**-199.662.100,00**							**1.250.000.000,00**	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan*				100 %	100 %	599.107.400,00	593.827.400,00	507.505.400,00	-91.602.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi Gorontalo dan Stakeholder lainnya di		575.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	599.107.400,00	593.827.400,00	507.505.400,00	-91.602.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi				575.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah*				100 %	100 %	262.367.700,00	259.727.700,00	202.555.700,00	-59.812.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi Gorontalo dan Stakeholder lainnya di		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	262.367.700,00	259.727.700,00	202.555.700,00	-59.812.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi				300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi*				100 %	100 %	588.187.000,00	585.547.000,00	538.409.000,00	-49.778.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Provinsi Gorontalo dan Stakeholder lainnya di		375.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	369.945.000,00	369.945.000,00	338.549.000,00	-31.396.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi				150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 Laporan	3 Laporan	218.242.000,00	215.602.000,00	199.860.000,00	-18.382.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi				225.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD**				**100 %**	**100 %**	**2.999.970.207,00**	**2.971.150.207,00**	**1.711.596.607,00**	**185.029.793,00**							**3.185.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*				100 %	100 %	1.000.000.000,00	989.440.000,00	563.014.400,00	-436.985.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Stakeholder lainnya di		1.050.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	169.270.000,00	166.630.000,00	112.318.400,00	-56.951.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				5 Laporan	5 Laporan	130.730.000,00	130.730.000,00	64.498.000,00	-66.232.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	297.360.000,00	157.584.000,00	-142.416.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			325.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				14 Laporan	14 Laporan	400.000.000,00	394.720.000,00	228.614.000,00	-171.386.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			425.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*				100 %	100 %	999.970.207,00	992.270.207,00	566.652.207,00	-433.318.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Stakeholder lainnya di		1.050.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	333.500.000,00	330.860.000,00	187.761.000,00	-145.739.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	333.000.000,00	330.360.000,00	190.042.000,00	-142.958.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	333.470.207,00	331.050.207,00	188.849.207,00	-144.621.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*				100 %	100 %	1.000.000.000,00	989.440.000,00	581.930.000,00	-418.070.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	OPD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Stakeholder lainnya di		1.085.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	241.752.000,00	241.752.000,00	127.970.000,00	-113.782.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				7 Laporan	7 Laporan	107.922.000,00	102.642.000,00	102.642.000,00	-5.280.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				7 Laporan	7 Laporan	100.728.000,00	100.728.000,00	28.032.000,00	-72.696.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	319.334.000,00	314.054.000,00	216.150.000,00	-103.184.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	2 Laporan	230.264.000,00	230.264.000,00	107.136.000,00	-123.128.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**1.049.998.200,00**	**1.042.298.200,00**	**865.048.200,00**	**-184.950.000,00**							**1.150.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**1.049.998.200,00**	**1.042.298.200,00**	**865.048.200,00**	**100.001.800,00**							**1.150.000.000,00**	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*				100 %	100 %	125.955.200,00	123.315.200,00	88.003.200,00	-37.952.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Kabupaten/Kota se		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	125.955.200,00	123.315.200,00	88.003.200,00	-37.952.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*				100 %	100 %	224.043.400,00	224.043.400,00	156.521.400,00	-67.522.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Kabupaten/Kota se		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	92.008.000,00	92.008.000,00	64.862.000,00	-27.146.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	132.035.400,00	132.035.400,00	91.659.400,00	-40.376.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*				100 %	100 %	350.000.000,00	347.360.000,00	361.179.000,00	11.179.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Kabupaten/Kota se		375.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				1 Dokumen	1 Dokumen	169.750.000,00	167.110.000,00	127.502.000,00	-42.248.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	180.250.000,00	180.250.000,00	233.677.000,00	53.427.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Inovasi dan Teknologi*				100 %	100 %	349.999.600,00	347.579.600,00	259.344.600,00	-90.655.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Kabupaten/Kota se		375.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	180.711.500,00	180.711.500,00	132.295.500,00	-48.416.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	169.288.100,00	166.868.100,00	127.049.100,00	-42.239.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Prosentase layanan administrasi pemerintahan**				**100 %**	**100 %**	**88.061.259.629,00**	**90.376.110.940,00**	**89.151.816.670,67**	**1.217.728.598,00**							**89.278.988.227,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja*				8 Dokumen	8 Dokumen	1.285.261.000,00	1.285.261.000,00	500.565.720,00	-784.695.280,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Badan Keuangan, masyarakat, SKPD dan stakeholder		1.369.544.663,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	755.318.000,00	755.318.000,00	263.429.720,00	-491.888.280,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			774.654.775,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	529.943.000,00	529.943.000,00	237.136.000,00	-292.807.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			594.889.888,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	74.148.525.649,00	76.969.917.960,00	76.922.522.360,00	2.773.996.711,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	ASN Badan Keuangan, TAPD, dan stakeholder		74.007.344.814,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/ Bulan	150 Orang/ Bulan	74.048.520.149,00	76.869.912.460,00	76.869.912.460,00	2.821.392.311,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			73.887.345.400,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	100.005.500,00	100.005.500,00	52.609.900,00	-47.395.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			119.999.414,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pegawai yang mengikuti diklat*				40 orang	40 orang	1.073.265.000,00	1.073.265.000,00	857.219.200,00	-216.045.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo		710.919.100,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	1.073.265.000,00	1.073.265.000,00	857.219.200,00	-216.045.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			710.919.100,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah peralatatan dan perlengkapan kantor yang disediakan*				22 Paket	22 Paket	8.089.057.080,00	7.631.866.080,00	7.497.924.806,67	-591.132.273,33			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Jumlah peralatatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		8.165.921.925,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	6.183.470.580,00	5.726.279.580,00	5.592.338.306,67	-591.132.273,33	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			6.337.380.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	3.465.150.900,00	3.415.800.900,00	3.373.584.584,00	-91.566.316,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Bidang-bidang, UPTD dan Samsat Badan Keuangan		5.025.257.725,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.313.206.200,00	1.263.856.200,00	1.221.639.884,00	-91.566.316,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			2.900.323.700,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Prosentase penetapan APBD dan LKPD**				**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**178.601.670.581,00**	**205.405.130.950,00**	**185.062.277.871,01**	**144.170.326.687,00**							**322.771.997.268,00**	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah dokumen rencana anggaran daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	979.608.190,00	979.608.190,00	502.382.939,01	-477.225.250,99			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD, TAPD, dan DPRD Provinsi Gorontalo		1.296.997.268,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	145.831.800,00	145.831.800,00	73.354.800,00	-72.477.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			296.997.268,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	158.864.200,00	158.864.200,00	32.932.600,00	-125.931.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	504.935.670,00	504.935.670,00	263.833.489,01	-241.102.180,99	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			600.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	169.976.520,00	169.976.520,00	132.262.050,00	-37.714.470,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota*				18 Dokumen	18 Dokumen	374.033.000,00	374.033.000,00	234.455.000,00	-139.578.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	APBD kabupaten/kota		400.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				18 Dokumen	18 Dokumen	374.033.000,00	374.033.000,00	234.455.000,00	-139.578.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	7.165.964.776,00	7.581.625.305,00	7.166.230.545,00	265.769,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD dan Masyarakat		7.175.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	650.597.400,00	680.237.400,00	491.135.640,00	-159.461.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				2 Dokumen	2 Dokumen	169.027.000,00	172.627.000,00	138.563.000,00	-30.464.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			375.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.819.826.376,00	6.207.886.905,00	6.040.894.905,00	221.068.529,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			5.800.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	1 Dokumen	526.514.000,00	520.874.000,00	495.637.000,00	-30.877.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			600.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Jumlah dokumen laporan keuangan daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.123.908.500,00	1.113.108.500,00	812.074.100,00	-311.834.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD dan DPRD Provinsi Gorontalo		1.250.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				2 Laporan	2 Laporan	374.456.000,00	370.856.000,00	286.527.333,00	-87.928.667,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	467.572.000,00	463.972.000,00	337.788.667,00	-129.783.333,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	281.880.500,00	278.280.500,00	187.758.100,00	-94.122.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			350.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Jumlah dokumen bantuan keuangan dan bagi hasil*				2 Laporan	2 Laporan	168.354.954.775,00	194.773.201.615,00	175.868.272.715,00	7.513.317.940,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Pemerintah Kabupaten dan Kota		312.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	5.250.000.000,00	34.950.978.412,00	16.046.049.512,00	10.796.049.512,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			12.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	163.104.954.775,00	159.822.223.203,00	159.822.223.203,00	-3.282.731.572,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			300.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	603.201.340,00	583.554.340,00	478.862.572,00	-124.338.768,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD se-Provinsi Gorontalo		650.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	603.201.340,00	583.554.340,00	478.862.572,00	-124.338.768,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			650.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Prosentase penetapan APBD dan LKPD**				**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**1.633.898.600,00**	**1.615.898.600,00**	**965.617.000,00**	**187.694.409,00**							**1.821.593.009,00**	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah dokumen dan laporan BMD*				3 Dokumen	3 Dokumen	1.633.898.600,00	1.615.898.600,00	965.617.000,00	-668.281.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD se-Provinsi Gorontalo dan stakeholder		1.821.593.009,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	402.597.600,00	391.797.600,00	204.060.000,00	-198.537.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	421.399.000,00	414.199.000,00	216.950.500,00	-204.448.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			479.669.608,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	809.902.000,00	809.902.000,00	544.606.500,00	-265.295.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			941.923.401,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase pertumbuhan PAD**				**7 %**	**7 %**	**7.002.934.945,00**	**7.052.054.945,00**	**5.215.724.817,32**	**2.185.905.613,00**							**9.188.840.558,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Prosentase capaian PAD*				100 %	100 %	7.002.934.945,00	7.052.054.945,00	5.215.724.817,32	-1.787.210.127,68			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	SKPD dan Masyarakat		9.188.840.558,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	503.051.200,00	482.051.200,00	436.085.000,02	-66.966.199,98	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			957.658.006,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	356.505.200,00	356.505.200,00	313.979.000,00	-42.526.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			876.860.362,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Sarana dan Prasarana	1 Sarana dan Prasarana	1.214.861.000,00	1.214.861.000,00	1.203.901.000,00	-10.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			1.300.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	293.474.400,00	293.474.400,00	190.830.000,00	-102.644.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			688.920.095,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	173.723.145,00	173.723.145,00	160.231.000,00	-13.492.145,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			688.920.095,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
		UPTD PUSAT PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA GORONTALO							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Prosentase layanan administrasi pemerintahan**				**100 %**	**100 %**	**88.061.259.629,00**	**90.376.110.940,00**	**89.151.816.670,67**	**1.217.728.598,00**							**89.278.988.227,00**	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				23 Paket	23 Paket	8.089.057.080,00	7.631.866.080,00	7.497.924.806,67	-591.132.273,33			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat		8.165.921.925,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	353.878.500,00	353.878.500,00	353.878.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	3.465.150.900,00	3.415.800.900,00	3.373.584.584,00	-91.566.316,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat		5.025.257.725,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	551.302.250,00	551.302.250,00	551.302.250,00	0,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			494.173.050,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase pertumbuhan PAD**				**7 %**	**7 %**	**7.002.934.945,00**	**7.052.054.945,00**	**5.215.724.817,32**	**2.185.905.613,00**							**9.188.840.558,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Prosentase capaian PAD*				100 %	100 %	7.002.934.945,00	7.052.054.945,00	5.215.724.817,32	-1.787.210.127,68			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak		9.188.840.558,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan	444.926.000,00	453.926.000,00	430.218.750,00	-14.707.250,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			597.796.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	300.000.000,00	300.000.000,00	96.864.000,00	-203.136.000,00	Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			600.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
		UPTD PUSAT PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN GORONTALO							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Prosentase layanan administrasi pemerintahan**				**100 %**	**100 %**	**88.061.259.629,00**	**90.376.110.940,00**	**89.151.816.670,67**	**1.217.728.598,00**							**89.278.988.227,00**	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				23 Paket	23 Paket	8.089.057.080,00	7.631.866.080,00	7.497.924.806,67	-591.132.273,33			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat		8.165.921.925,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	378.527.000,00	378.527.000,00	378.527.000,00	0,00	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			378.532.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	3.465.150.900,00	3.415.800.900,00	3.373.584.584,00	-91.566.316,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat		5.025.257.725,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	349.085.400,00	349.085.400,00	349.085.400,00	0,00	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			486.671.900,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase pertumbuhan PAD**				**7 %**	**7 %**	**7.002.934.945,00**	**7.052.054.945,00**	**5.215.724.817,32**	**2.185.905.613,00**							**9.188.840.558,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Prosentase capaian PAD*				100 %	100 %	7.002.934.945,00	7.052.054.945,00	5.215.724.817,32	-1.787.210.127,68			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak		9.188.840.558,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan	543.273.000,00	646.113.000,00	591.790.767,30	48.517.767,30	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			464.240.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	392.080.000,00	392.080.000,00	120.473.500,00	-271.606.500,00	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			439.375.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
		UPTD PUSAT PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BOALEMO							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Prosentase layanan administrasi pemerintahan**				**100 %**	**100 %**	**88.061.259.629,00**	**90.376.110.940,00**	**89.151.816.670,67**	**1.217.728.598,00**							**89.278.988.227,00**	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				23 Paket	23 Paket	8.089.057.080,00	7.631.866.080,00	7.497.924.806,67	-591.132.273,33			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat		8.165.921.925,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	297.154.000,00	297.154.000,00	297.154.000,00	0,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			278.992.600,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	3.465.150.900,00	3.415.800.900,00	3.373.584.584,00	-91.566.316,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat		5.025.257.725,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	294.034.000,00	294.034.000,00	294.034.000,00	0,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			234.052.350,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase pertumbuhan PAD**				**7 %**	**7 %**	**7.002.934.945,00**	**7.052.054.945,00**	**5.215.724.817,32**	**2.185.905.613,00**							**9.188.840.558,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Prosentase capaian PAD*				100 %	100 %	7.002.934.945,00	7.052.054.945,00	5.215.724.817,32	-1.787.210.127,68			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak		9.188.840.558,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan	266.627.000,00	249.827.000,00	237.314.000,00	-29.313.000,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			241.418.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	360.000.000,00	360.000.000,00	119.429.200,00	-240.570.800,00	Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			399.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
		UPTD PUSAT PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Prosentase layanan administrasi pemerintahan**				**100 %**	**100 %**	**88.061.259.629,00**	**90.376.110.940,00**	**89.151.816.670,67**	**1.217.728.598,00**							**89.278.988.227,00**	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				23 Paket	23 Paket	8.089.057.080,00	7.631.866.080,00	7.497.924.806,67	-591.132.273,33			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak		8.165.921.925,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	276.085.000,00	276.085.000,00	276.085.000,00	0,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			278.992.600,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	3.465.150.900,00	3.415.800.900,00	3.373.584.584,00	-91.566.316,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat		5.025.257.725,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	280.757.700,00	280.757.700,00	280.757.700,00	0,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			286.932.100,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase pertumbuhan PAD**				**7 %**	**7 %**	**7.002.934.945,00**	**7.052.054.945,00**	**5.215.724.817,32**	**2.185.905.613,00**							**9.188.840.558,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Prosentase capaian PAD*				100 %	100 %	7.002.934.945,00	7.052.054.945,00	5.215.724.817,32	-1.787.210.127,68			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak		9.188.840.558,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan	348.352.000,00	327.652.000,00	282.563.000,00	-65.789.000,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			241.418.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	255.000.000,00	255.000.000,00	87.000.000,00	-168.000.000,00	Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			255.000.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
		UPTD PUSAT PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Prosentase layanan administrasi pemerintahan**				**100 %**	**100 %**	**88.061.259.629,00**	**90.376.110.940,00**	**89.151.816.670,67**	**1.217.728.598,00**							**89.278.988.227,00**	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan*				22 Paket	22 Paket	8.089.057.080,00	7.631.866.080,00	7.497.924.806,67	-591.132.273,33			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat		8.165.921.925,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	333.046.000,00	333.046.000,00	333.046.000,00	0,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			223.451.225,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	3.465.150.900,00	3.415.800.900,00	3.373.584.584,00	-91.566.316,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat		5.025.257.725,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	321.226.000,00	321.226.000,00	321.226.000,00	0,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			269.799.900,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase pertumbuhan PAD**				**7 %**	**7 %**	**7.002.934.945,00**	**7.052.054.945,00**	**5.215.724.817,32**	**2.185.905.613,00**							**9.188.840.558,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Prosentase capaian PAD*				100 %	100 %	7.002.934.945,00	7.052.054.945,00	5.215.724.817,32	-1.787.210.127,68			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak		9.188.840.558,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan	367.653.000,00	350.833.000,00	258.757.000,00	-108.896.000,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			270.750.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	279.875.000,00	279.875.000,00	117.875.000,00	-162.000.000,00	Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			264.275.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
		UPTD PUSAT PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN POHUWATO							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**275.299.763.755,00**	**304.449.195.435,00**	**280.395.436.359,00**	**5.095.672.604,00**							**423.061.419.062,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Prosentase layanan administrasi pemerintahan**				**100 %**	**100 %**	**88.061.259.629,00**	**90.376.110.940,00**	**89.151.816.670,67**	**1.217.728.598,00**							**89.278.988.227,00**	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah peralatatan dan perlengkapan kantor yang disediakan*				22 Paket	22 Paket	8.089.057.080,00	7.631.866.080,00	7.497.924.806,67	-591.132.273,33			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat		8.165.921.925,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	266.896.000,00	266.896.000,00	266.896.000,00	0,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			268.573.500,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	3.465.150.900,00	3.415.800.900,00	3.373.584.584,00	-91.566.316,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	UPTD P3D dan Samsat		5.025.257.725,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	355.539.350,00	355.539.350,00	355.539.350,00	0,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			353.304.725,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase pertumbuhan PAD**				**7 %**	**7 %**	**7.002.934.945,00**	**7.052.054.945,00**	**5.215.724.817,32**	**2.185.905.613,00**							**9.188.840.558,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Prosentase capaian PAD*				100 %	100 %	7.002.934.945,00	7.052.054.945,00	5.215.724.817,32	-1.787.210.127,68			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Masyarakat wajib pajak		9.188.840.558,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan	363.534.000,00	376.134.000,00	376.134.000,00	12.600.000,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			340.710.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	540.000.000,00	540.000.000,00	192.279.600,00	-347.720.400,00	Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			562.500.000,00	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							**11.890.208.222,00**	**11.579.868.222,00**	**11.924.784.672,00**	**34.576.450,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.890.208.222,00**	**11.579.868.222,00**	**11.924.784.672,00**	**34.576.450,00**							**0,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**11.890.208.222,00**	**11.579.868.222,00**	**11.924.784.672,00**	**34.576.450,00**							**0,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**9.911.040.222,00**	**9.671.000.222,00**	**9.989.335.222,00**	**-9.911.040.222,00**							**0,00**	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	261.003.000,00	253.748.000,00	246.748.000,00	-14.255.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	261.003.000,00	253.748.000,00	246.748.000,00	-14.255.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	8.459.615.472,00	8.186.370.472,00	8.171.591.472,00	-288.024.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				82 Orang/ Bulan	82 Orang/ Bulan	8.346.607.072,00	8.079.607.072,00	8.079.607.072,00	-267.000.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	113.008.400,00	106.763.400,00	91.984.400,00	-21.024.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase pelaksanaan administrasi kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi*				100 %	100 %	74.772.000,00	74.772.000,00	21.125.000,00	-53.647.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				26 Orang	26 Orang	74.772.000,00	74.772.000,00	21.125.000,00	-53.647.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	639.180.000,00	639.180.000,00	920.861.000,00	281.681.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	639.180.000,00	639.180.000,00	920.861.000,00	281.681.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan*				100 %	100 %	476.469.750,00	516.929.750,00	629.009.750,00	152.540.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	476.469.750,00	516.929.750,00	629.009.750,00	152.540.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indeks Sistem Merit**				**95 %**	**95 %**	**1.979.168.000,00**	**1.908.868.000,00**	**1.935.449.450,00**	**-1.979.168.000,00**							**0,00**	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Presentase pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN*				90 %	90 %	713.886.800,00	685.340.800,00	614.614.850,00	-99.271.950,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	251.167.000,00	245.190.000,00	297.148.000,00	45.981.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				2 Lembaga	2 Lembaga	230.307.000,00	220.487.000,00	162.685.250,00	-67.621.750,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	148.548.000,00	143.631.000,00	87.856.000,00	-60.692.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	83.864.800,00	76.032.800,00	66.925.600,00	-16.939.200,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Presentase penyelenggaraan mutasi dan promosi ASN*				90 %	90 %	470.442.100,00	446.846.100,00	344.294.500,00	-126.147.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	238.013.500,00	227.267.500,00	157.679.900,00	-80.333.600,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Laporan	2 Laporan	106.255.000,00	101.165.000,00	75.701.000,00	-30.554.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	126.173.600,00	118.413.600,00	110.913.600,00	-15.260.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Presentase pengembangan kompetensi ASN*				90 %	90 %	462.752.800,00	450.458.800,00	763.304.800,00	300.552.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	295.495.200,00	287.441.200,00	557.735.200,00	262.240.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				25 Dokumen	25 Dokumen	167.257.600,00	163.017.600,00	205.569.600,00	38.312.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Presentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur*				90 %	90 %	332.086.300,00	326.222.300,00	213.235.300,00	-118.851.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	2 Dokumen	105.424.000,00	102.200.000,00	58.593.000,00	-46.831.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				5 Orang	5 Orang	121.238.300,00	121.238.300,00	73.128.300,00	-48.110.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				35 Orang	35 Orang	105.424.000,00	102.784.000,00	81.514.000,00	-23.910.000,00	Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**15.471.171.891,00**	**16.326.874.979,00**	**13.674.753.479,00**	**-1.796.418.412,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**15.471.171.891,00**	**16.326.874.979,00**	**13.674.753.479,00**	**-1.796.418.412,00**							**0,00**	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**15.471.171.891,00**	**16.326.874.979,00**	**13.674.753.479,00**	**-1.796.418.412,00**							**0,00**	
1.	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**13.332.804.841,00**	**13.086.916.379,00**	**12.461.056.729,00**	**-13.332.804.841,00**							**0,00**	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	343.359.850,00	338.079.850,00	345.355.200,00	1.995.350,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	231.679.900,00	229.039.900,00	229.039.900,00	-2.640.000,00	Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Moutong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	111.679.950,00	109.039.950,00	116.315.300,00	4.635.350,00	Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Moutong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	9.319.767.341,00	8.724.847.574,00	8.734.527.574,00	-585.239.767,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/ Bulan	62 Orang/ Bulan	9.181.686.041,00	8.591.606.274,00	8.591.606.274,00	-590.079.767,00	Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Moutong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	138.081.300,00	133.241.300,00	142.921.300,00	4.840.000,00	Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Moutong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	199.999.000,00	580.140.305,00	561.634.305,00	361.635.305,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	199.999.000,00	580.140.305,00	561.634.305,00	361.635.305,00	Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Moutong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				100 %	100 %	2.199.659.400,00	2.199.569.400,00	1.617.935.400,00	-581.724.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.199.659.400,00	2.199.569.400,00	1.617.935.400,00	-581.724.000,00	Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Moutong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang*				100 %	100 %	1.270.019.250,00	1.244.279.250,00	1.201.604.250,00	-68.415.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.270.019.250,00	1.244.279.250,00	1.201.604.250,00	-68.415.000,00	Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Moutong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase SDM aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui diklat, bimtek, workshop, seminar, Coaching, kursus, penataran, sosialisasi, orientasi, dan jalur pengembangan kompetensi klasikal yang sejenis**				**28,60 %**	**28,60 %**	**2.138.367.050,00**	**3.239.958.600,00**	**1.213.696.750,00**	**-2.138.367.050,00**							**0,00**	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis*				24,14 %	24,14 %	475.343.600,00	790.252.150,00	190.548.000,00	-284.795.600,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				210 Orang	210 Orang	475.343.600,00	790.252.150,00	190.548.000,00	-284.795.600,00	Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Moutong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial, fungsional, dan sertifikasi*				31,67 %	31,67 %	1.663.023.450,00	2.449.706.450,00	1.023.148.750,00	-639.874.700,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,				1 Dokumen	1 Dokumen	101.680.000,00	99.040.000,00	82.235.000,00	-19.445.000,00	Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Moutong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				30 Orang	30 Orang	49.999.900,00	49.999.900,00	30.643.900,00	-19.356.000,00	Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Moutong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				5 Laporan	5 Laporan	236.680.000,00	234.040.000,00	163.166.000,00	-73.514.000,00	Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Moutong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	70.909.500,00	-29.090.500,00	Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Moutong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				403 Orang	403 Orang	1.174.663.550,00	1.966.626.550,00	676.194.350,00	-498.469.200,00	Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Moutong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							**22.326.771.324,00**	**25.209.010.324,00**	**22.716.609.724,00**	**389.838.400,00**							**25.610.980.765,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**22.326.771.324,00**	**25.209.010.324,00**	**22.716.609.724,00**	**389.838.400,00**							**25.610.980.765,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**22.326.771.324,00**	**25.209.010.324,00**	**22.716.609.724,00**	**389.838.400,00**							**25.610.980.765,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100 %**	**100 %**	**18.721.085.624,00**	**18.760.722.624,00**	**18.554.258.624,00**	**1.089.895.141,00**							**19.810.980.765,00**	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi*				9 Dokumen	9 Dokumen	241.016.000,00	289.736.000,00	218.597.000,00	-22.419.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo		300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	168.905.000,00	222.905.000,00	151.766.000,00	-17.139.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			175.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	72.111.000,00	66.831.000,00	66.831.000,00	-5.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			125.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah*				95 %	95 %	16.415.980.765,00	15.827.980.765,00	15.797.557.765,00	-618.423.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo		16.430.980.765,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/ Bulan	115 Orang/ Bulan	16.280.980.765,00	15.692.980.765,00	15.692.980.765,00	-588.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			16.280.980.765,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				700 Dokumen	700 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			80.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	39.577.000,00	-30.423.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			70.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				40 Orang	40 Orang	499.997.400,00	810.485.400,00	705.583.400,00	205.586.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo		700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	499.997.400,00	810.485.400,00	705.583.400,00	205.586.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				20 Paket	20 Paket	261.022.000,00	482.022.000,00	482.022.000,00	221.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo		750.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	261.022.000,00	482.022.000,00	482.022.000,00	221.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			750.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	1.015.227.350,00	1.005.107.350,00	1.005.107.350,00	-10.120.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo		1.280.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	253.237.950,00	253.237.950,00	253.237.950,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			280.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	214.919.400,00	214.919.400,00	214.919.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	547.070.000,00	536.950.000,00	536.950.000,00	-10.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara*				57 Unit	57 Unit	287.842.109,00	345.391.109,00	345.391.109,00	57.549.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo		350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	61.740.000,00	61.740.000,00	61.740.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			75.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	25.130.000,00	25.130.000,00	25.130.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			75.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.972.109,00	258.521.109,00	258.521.109,00	57.549.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			200.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Prosentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK undefined**				**82 92 % %**	**82 92 % %**	**2.196.693.600,00**	**4.386.118.600,00**	**2.601.641.200,00**	**1.653.306.400,00**							**3.850.000.000,00**	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Laporan Pengawasan Internal*				205 Laporan	205 Laporan	1.848.843.600,00	3.840.908.600,00	2.274.118.200,00	425.274.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo		3.300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				95 Laporan	95 Laporan	331.997.000,00	1.550.839.000,00	863.622.000,00	531.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			800.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				60 Laporan	60 Laporan	63.333.000,00	286.868.000,00	164.848.000,00	101.515.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				26 Laporan	26 Laporan	712.336.000,00	948.524.000,00	558.493.600,00	-153.842.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				24 Laporan	24 Laporan	98.171.000,00	421.791.000,00	251.651.000,00	153.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	366.847.000,00	366.847.000,00	209.186.000,00	-157.661.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				3 Dokumen	3 Dokumen	276.159.600,00	266.039.600,00	226.317.600,00	-49.842.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*				12 Laporan	12 Laporan	347.850.000,00	545.210.000,00	327.523.000,00	-20.327.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo		550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	12 Laporan	347.850.000,00	545.210.000,00	327.523.000,00	-20.327.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			550.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Jumlah OPD yang Menerpakan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM**				**2 OPD**	**2 OPD**	**1.408.992.100,00**	**2.062.169.100,00**	**1.560.709.900,00**	**541.007.900,00**							**1.950.000.000,00**	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	250.000.000,00	391.080.000,00	263.572.000,00	13.572.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo		400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	250.000.000,00	391.080.000,00	263.572.000,00	13.572.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dialkukan Pendampingan dan Asistens*				33 PD	33 PD	1.158.992.100,00	1.671.089.100,00	1.297.137.900,00	138.145.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo		1.550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	258.992.000,00	258.992.000,00	148.390.800,00	-110.601.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	250.000.000,00	286.118.000,00	167.324.000,00	-82.676.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	5 Kegiatan	250.000.000,00	569.819.000,00	453.516.000,00	203.516.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	400.000.100,00	556.160.100,00	527.907.100,00	127.907.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			400.000.000,00	INSPEKTORAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**10.601.800.803,00**	**10.414.580.803,00**	**11.628.313.103,00**	**1.026.512.300,00**							**12.282.277.304,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**10.601.800.803,00**	**10.414.580.803,00**	**11.628.313.103,00**	**1.026.512.300,00**							**12.282.277.304,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**10.601.800.803,00**	**10.414.580.803,00**	**11.628.313.103,00**	**1.026.512.300,00**							**12.282.277.304,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan**				**100 %**	**100 %**	**5.876.773.962,00**	**5.689.553.962,00**	**5.641.889.962,00**	**-1.066.496.658,00**							**4.810.277.304,00**	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	65.400.000,00	65.400.000,00	45.400.000,00	-20.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	65.400.000,00	65.400.000,00	45.400.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program dan Kegiatan*				2 Laporan	2 Laporan	4.951.879.495,00	4.764.659.495,00	4.755.481.495,00	-196.398.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		3.785.277.304,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/ Bulan	32 Orang/ Bulan	4.313.839.495,00	4.176.339.495,00	4.176.339.495,00	-137.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			3.655.277.304,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	638.040.000,00	588.320.000,00	579.142.000,00	-58.898.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			130.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang Yang Mengikuti Pengembangan SDM Aparatur melalui Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan*				6 Orang	6 Orang	36.972.000,00	36.972.000,00	18.486.000,00	-18.486.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	36.972.000,00	36.972.000,00	18.486.000,00	-18.486.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah sarana dan prasarana kantor yang Memadai*				3 Paket	3 Paket	234.614.400,00	234.614.400,00	234.614.400,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	234.614.400,00	234.614.400,00	234.614.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Dalam Pelaksanaan Pelayanan Jasa Kantor*				8 Laporan	8 Laporan	587.908.067,00	587.908.067,00	587.908.067,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	587.908.067,00	587.908.067,00	587.908.067,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase capaian Penguatan Wasbang dan Cinta Tanah Air serta Nilai-Nilai Pancasila**				**100 %**	**100 %**	**940.500.000,00**	**940.500.000,00**	**892.580.500,00**	**434.500.000,00**							**1.375.000.000,00**	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah orang yang mengikuti Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*				75 Orang	75 Orang	940.500.000,00	940.500.000,00	892.580.500,00	-47.919.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		1.375.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				75 Orang	75 Orang	145.500.000,00	145.500.000,00	126.007.758,00	-19.492.242,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			375.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				25 Orang	25 Orang	795.000.000,00	795.000.000,00	766.572.742,00	-28.427.258,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Peningkatan Partisipasi Pemilih**				**100 %**	**100 %**	**1.730.044.849,00**	**1.730.044.849,00**	**3.027.327.649,00**	**619.955.151,00**							**2.350.000.000,00**	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Politik Tentang Pendidikan Politik, Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik dan Pemantauan Situasi Politik Yang Terlaksana*				7 Kali	7 Kali	1.730.044.849,00	1.730.044.849,00	3.027.327.649,00	1.297.282.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		2.350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	265.000.000,00	265.000.000,00	255.436.000,00	-9.564.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	100 Orang	1.315.044.849,00	1.315.044.849,00	1.575.044.849,00	260.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			1.250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				7 Laporan	7 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	1.196.846.800,00	1.046.846.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			850.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Massa**				**100 %**	**100 %**	**915.281.992,00**	**915.281.992,00**	**1.197.734.492,00**	**684.718.008,00**							**1.600.000.000,00**	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan Ormas dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*				23 Dokumen	23 Dokumen	915.281.992,00	915.281.992,00	1.197.734.492,00	282.452.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		1.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				23 Dokumen	23 Dokumen	915.281.992,00	915.281.992,00	1.197.734.492,00	282.452.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			1.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Partisipan Ketahanan Sosial dan Budaya**				**100 %**	**100 %**	**71.000.000,00**	**71.000.000,00**	**37.581.000,00**	**476.000.000,00**							**547.000.000,00**	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Dalam Rangka Menjaga Stabilitas*				12 Dokumen	12 Dokumen	71.000.000,00	71.000.000,00	37.581.000,00	-33.419.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		547.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	71.000.000,00	71.000.000,00	37.581.000,00	-33.419.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			297.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Penanganan Konflik yang Terdeteksi**				**100 %**	**100 %**	**1.068.200.000,00**	**1.068.200.000,00**	**831.199.500,00**	**531.800.000,00**							**1.600.000.000,00**	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Dalam Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Dalam Menjada Stabilitas Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	1.068.200.000,00	1.068.200.000,00	831.199.500,00	-237.000.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	-		1.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	37.839.500,00	-12.160.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				5 Laporan	5 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	33.000.000,00	-42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				6 Dokumen	6 Dokumen	943.200.000,00	943.200.000,00	760.360.000,00	-182.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi			1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.666.717.824.994,00**	**1.805.728.699.556,00**	**1.722.944.714.556,00**	**56.226.889.562,00**							**1.650.973.047.452,00**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah menjadi alat ukur dalam memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berikut disajikan target indikator kinerja utama daerah tahun 2025 beserta target indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tahun 2026 sebagaimana tabel 7.1 dan tabel 7.2 di bawah ini:

Tabel 7.1
Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Gorontalo

Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024	Target 2025	Target Perubahan 2025	Target 2026
Pertumbuhan Ekonomi	6,42	4,13	5,23-5,46	5,54	5.36
Indeks Gini	0,417	0,413	0,394-0,400	0,417	0.406
Inflasi	5,15	4,40	3,91-2,52	3,91-2,52	2 - 3
Pendapatan Perkapita	42,45	42,35	44,14	44,14	81.96 - 82.08
TPT	3,06	3,06	2,87-3,08	2,75	2,95
Persentase Kemiskinan	14,54	13,87	14,21-14,50	13,54	13,08
Penurunan Intensitas Emisi GRK	-	-	-	-	64,55
Indeks Modal Manusia*	-	-	-	-	0,50
Nilai MCP	87,50	87,50	95,6	94,6	-
Indeks Reformasi Birokrasi	77,75	77,75	78	78	-
Prevalensi Stunting	26,9	26,9	14	14	18,8

Tabel 7.2

Target Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	4,50	6,42	4,13
1.2	Indeks Gini	0,417	0,396	0,413
1.3	Inflasi	5,15	2-3	2,87
1.4	Pendapatan Perkapita	42,35	36,71	
1.5	Persentase Kemiskinan	15,51	14,54	13,87
1.6	Indeks Pembangunan Manusia (point)	69,81	70,02	72,01
Fokus Kesejahteraan Sosial				
2	**Pendidikan**			
2.1	Rata-rata lama sekolah	8,10	8,28	8,29
2.2	Harapan lama sekolah	13,16	13,24	13,17
2.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 16-18	71,7	71,63	77,19
2.4	Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B SMA/SMK (%)	SMA : 52 SMK : 33	SMA = 1:20 SMK = 1:15 SLB = 1:3	-
2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah	100	-	-
3	**Kesehatan**			
3.1	Angka harapan hidup	68,83	68,4	70,73
3.2	Prevalensi stunting	23,8 %	23	5,44 (Data EPPGBM)
Fokus Budaya dan Agama				

4	**Kebudayaan dan Agama**			
4.1	Persentase warisan budaya benda/tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	-	Benda: 30 Tak Benda : 35	Benda: 30 Tak Benda : 35
4.3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	-	69	72,71
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Pelayanan Urusan Wajib				
6	**Pekerjaan Umum**			
6.1	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	70,3	64,51	66,12
6.2	Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi	30,19	65	87,76
7	**Perumahan**			
7.1	Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%)	4,6	7,38	7,69
7.2	Persentase Cakupan Air minum Layak	96,16	95,75	-
7.3	Persentase Cakupan Sanitasi Layak	79,82	80,08	-
8	**Lingkungan Hidup**			
8.1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	79,52	74,82	78,5
9	**Sosial**			
9.1	Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	96,6%	95,7%	-
9.2	Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan sosial (%)	10,9	23 %	-
10	**Ketenagakerjaan**			
10.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,06	2,40 - 3,49	3,20
11	**Pemerintahan**			
11.1	Nilai MCP	82,51	-	95,6
11.2	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	66,3
11.3	Nilai SAKIP	BB	BB Nilai	-
11.4	Indeks Kematangan Organisasi	-	49 Indeks	49
11.5	Indeks Kualitas Perencanaan	N/A	-	
11.6	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP
11.7	Indeks Sistem Merit	327	-	-

11.8	Nilai Maturitas SPBE	3,22	-	-
11.9	Indeks Demokrasi (%)	73,74	-	-
11.10	Nilai Pengawasan Kearsipan	97,64	64 Nilai	64 Nilai
12	**Ketahanan Pangan**			
12.1	Indeks Ketahanan Pangan	80,35 Indeks	86,04 Indeks	88,86 Indeks
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
13.1	Kemiskinan perdesaan	23,73 %	23,58%	22,82%
13.2	Peningkatan Status Desa dari desa maju menjadi desa mandiri (kawasan Strategis Provinsi/Lokasi Prioritas)	49 Desa	6 Desa	7 Desa
14	**Penanggulangan Bencana**			
14.1	Indeks Resiko Bencana	120,61	120,01	122
15	**Penanaman Modal**			
15.1	Realisasi PMA/PMDN (milyar)	5,515 TOE/Milyar Rupiah	14.987 TOE/Milyar Rupiah	13,352 TOE/Milyar Rupiah
16	**Perhubungan**			
16.1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah (%)	0,553	0,55 Rasio	0,703 Rasio
17	**Kepemudaan dan Olahraga**			
17.1	Indeks Pembangunan Gender	88,12	87,13	87,23
17.2	Indeks Perlindungan Anak	57,90	67,7	67,9
17.3	Indeks Pembangunan Pemuda	54,17	52,62	53,67
18	**Perpustakaan**			
18.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70,39	58,5	50,79
Pelayanan Urusan Pilihan				
19	**Pertanian**			
19.1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	37,75%	38,98 %	39,55
19.2	Nilai Tukar Petani (NTP)	111,32 Rasio	105,09 Rasio	105,89
19.3	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	115,84 Rasio	113,18 Rasio	118,85
20	**Kehutanan**			
20.1	Penurunan emisi GRK (%)	-	-	-
21	**Pariwisata**			
21.1	Kontribusi PDRB sektor Pariwisata	2,41	-	3,5

22	**Kelautan dan Perikanan**			
22.1	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTN-Pi)	95,44 Rasio	97,82 Rasio	98,82 Rasio
23	**Energi dan Sumber Daya Mineral**			
23.1	Rasio Elektrifikasi (%)	99,8	99,7	99,9
24	**Industri**			
24.1	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,42 %	7,89 %	5,92 %
25	**Perdagangan**			
25.1	Nilai Ekspor (juta USD)	37,96 USD	19,52 USD	23,7 USD

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2025 Provinsi Gorontalo hadir sebagai respons terhadap dinamika pembangunan terkini, termasuk perubahan kepemimpinan daerah dan tuntutan sinkronisasi dengan prioritas nasional. Dokumen ini tidak hanya menjadi penjabaran operasional dari RPJMD 2025-2029, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penyesuaian kebijakan untuk memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh terhadap risiko. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, RKPD Perubahan Tahun 2025 menjadi panduan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan sumber daya, mempercepat pencapaian target pembangunan, dan mengelola potensi gangguan secara sistematis. RKPD Perubahan Tahun 2025 memegang peran kunci dalam tiga aspek utama. Pertama, sebagai alat penyesuaian kebijakan terhadap visi kepemimpinan baru. Kedua, sebagai media harmonisasi antara program daerah dan agenda nasional. Ketiga, sebagai pedoman operasional bagi penyusunan dokumen turunan, termasuk Renja SKPD, KUA-PPAS, dan APBD. Selain itu, dokumen ini juga mengintegrasikan prinsip manajemen risiko pembangunan yang mencakup identifikasi, mitigasi, dan pengendalian risiko - baik dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, maupun governance - guna memastikan ketahanan program pembangunan. Dengan demikian, RKPD Perubahan Tahun 2025 menjadi landasan bagi terciptanya koherensi perencanaan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota serta kesiapan menghadapi ketidakpastian.

Implementasi RKPD Perubahan Tahun 2025 memerlukan komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan. Seluruh Perangkat Daerah wajib melaksanakan strategi dan arah kebijakan secara sinergis, terintegrasi, dan akuntabel, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam hal ini, penerapan manajemen risiko sesuai Perpres 39/2023 menjadi krusial untuk meminimalkan dampak gangguan, seperti gejolak ekonomi, bencana alam, atau dinamika politik, terhadap capaian pembangunan. Optimalisasi pendanaan harus dicapai melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan partisipasi aktif masyarakat, yang juga berperan sebagai pengawas pembangunan. Evaluasi kinerja secara berkala dan pemantauan risiko menjadi kunci untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target serta mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi.

Dokumen ini juga menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam menyusun RKPD daerah masing-masing, memastikan adanya sinkronisasi program dan kebijakan di seluruh tingkatan pemerintahan serta penyelarasan strategi penanganan risiko. Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, RKPD Perubahan Tahun 2025 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga penggerak pembangunan yang mampu menjawab tantangan dan mengantisipasi risiko sekaligus memanfaatkan peluang untuk kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Melalui pendekatan yang partisipatif, berbasis bukti, dan berorientasi ketangguhan, RKPD ini menjadi jembatan menuju terwujudnya visi Gorontalo yang maju dan sejahtera.